



ANALISIS DATA PENDIDIKAN UNTUK LEMBAGA INTERNASIONAL

**(ANALISIS BELANJA PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2015 DAN 2016)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016**



**ANALISIS DATA PENDIDIKAN
UNTUK LEMBAGA INTERNASIONAL
(ANALISIS BELANJA PENDIDIKAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2015 DAN 2016)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016**

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kemdikbud, Analisis Data Pendidikan untuk
Lembaga Internasional (Analisis Belanja Pendidikan
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan
2016)/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan
Pelayanan – Jakarta: Pusat Data dan Statistik
Pendidikan dan Kebudayaan, 2016
xiii, 142 hal, bbl, ilus, 23 cm

ISBN 979 401 650 0

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. DATA | 5. SKPD KOTA |
| 2. KEUANGAN | 6. BELANJA TIDAK LANGSUNG |
| 3. SKPD PROVINSI | 7. BELANJA LANGSUNG |
| 4. SKPD KABUPATEN | 8. TAHUN 2015-2016 |
| I. Judul | |

Tim Penyusun Buku

Pengarah:
Bastari
Siti Sofiah

Penulis:
Ida Kintamani

Penyunting:
Sudarwati

Desain Cover:
Abdul Hakim

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku "Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (Analisis Belanja Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2016)" pada tahun 2016 difokuskan pada analisis keuangan. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk melaksanakan pendayagunaan data keuangan yang merupakan salah satu bagian data yang setiap tahun diminta oleh lembaga internasional melalui kuesioner elektronik yang disebut *World Education Indicators* (WEI) 2016.

Metode yang digunakan ada dua jenis, yaitu studi dokumentasi dan survai. Studi dokumentasi dilaksanakan karena data telah tersedia di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), yaitu data statistik persekolahan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, statistik PNF khusus pendidikan kesetaraan, di Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN), yaitu data keuangan pendidikan, di Kementerian Keuangan, yaitu data anggaran fungsi, di Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), yaitu data statistik PT dan keuangan PT, dan di Kementerian Agama, yaitu data statistik madrasah dan keuangan madrasah.

Survai dilakukan untuk memperoleh data keuangan di lapangan, khususnya data keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Survai dilaksanakan di semua provinsi dan 23 kabupaten/kota sebagai sampel. Pengumpulan data keuangan menggunakan instrumen yang telah disusun dan telah melalui perbaikan dari hasil uji coba yang dilakukan sebelumnya. Instrumen tersebut terdiri dari dua jenis data, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam bentuk tabel. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil dan bahasan menunjukkan lima hal, yaitu 1) analisis keuangan belanja pendidikan SKPD provinsi tahun 2015 dan 2016, 2) analisis keuangan belanja pendidikan SKPD 23 Kabupaten/Kota sampel tahun 2015 dan 2016, 3) analisis perkembangan keuangan belanja pendidikan SKPD provinsi tahun 2015-2016, 4) analisis perkembangan keuangan belanja pendidikan SKPD 23 Kabupaten/Kota sampel tahun 2015-2016, dan 5) analisis keuangan belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Analisis belanja pendidikan dari SKPD Dinas Pendidikan Provinsi tahun 2015 menunjukkan bahwa belanja tidak langsung sebesar 59,47% lebih besar daripada belanja langsung sebesar 40,53%. Demikian juga pada tahun 2016 belanja tidak langsung sebesar 55,35% lebih besar daripada belanja langsung sebesar 44,65%. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten/kota sampel maupun rata-rata kabupaten dan rata-rata kota. Pada tahun 2015 rata-rata² kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota untuk belanja tidak langsung masing-masing sebesar 85,11%, 88,13%, dan 76,69% sangat lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung masing-masing sebesar 14,89%, 11,87%, dan 23,31%.

Sejalan dengan tahun 2015 maka pada tahun 2016 rata-rata kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota belanja tidak langsung masing-masing sebesar 89,88%, 92,71%, dan 81,79% sangat lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung masing-masing sebesar 10,12%, 7,29%, dan 18,21%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk semua data provinsi dan kabupaten/kota sampel belanja tidak langsung sangat besar jika dibandingkan belanja langsung karena gaji dan tunjangan ternyata masih lebih dominan dan penting jika dibandingkan dengan program pendidikan yang ada.

Bila dilihat belanja tidak langsung pada tahun 2015 maka porsi terbesar pada provinsi adalah tunjangan penghasilan PNS sebesar 60,54%, sedangkan gaji sebesar 39,19%, dan insentif pemungutan retribusi sangat kecil sebesar 0,27%. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten/kota, rata-rata kabupaten dan rata-rata kota, pada tahun 2015 untuk belanja tidak langsung terbesar adalah gaji dan tunjangan masing-masing sebesar 63,66%, 64,32%, dan 61,54% sangat lebih besar jika dibandingkan dengan tambahan penghasilan PNS masing-masing sebesar 36,34%, 35,68%, dan 38,45%, sedangkan insentif pemungutan retribusi sangat kecil mendekati 0%. Sejalan dengan tahun 2015 maka pada tahun 2016 porsi terbesar provinsi adalah tunjangan penghasilan PNS sebesar 59,92%, sedangkan gaji sebesar 39,79% dan insentif pemungutan retribusi sebesar 0,29%. Sebaliknya, pada tahun 2016, rata-rata kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota belanja tidak langsung terbesar adalah gaji dan tunjangan masing-masing sebesar 65,77%, 65,56%, dan 66,37% sangat lebih besar jika dibandingkan dengan tambahan penghasilan PNS masing-masing sebesar 34,23%, 34,44%, dan 33,63%, sedangkan insentif pemungutan retribusi sangat kecil mendekati 0%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk semua provinsi tambahan penghasilan PNS sangat besar jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya, sedangkan kabupaten/kota sampel gaji dan tunjangan sangat besar jika dibandingkan jenis belanja lainnya karena gaji dan tunjangan ternyata lebih dominan dan penting jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya.

Bila dilihat belanja langsung pada tahun 2015 maka porsi terbesar pada provinsi adalah pada barang dan jasa sebesar 79,77%, sedangkan modal sebesar 14,12%, dan pegawai sebesar 6,11%. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten/kota sampel dan rata-rata kabupaten karena pada tahun 2015 untuk belanja langsung terbesar adalah modal masing-masing sebesar 52,57% dan 61,52%, lebih besar jika dibandingkan dengan barang dan jasa masing-masing sebesar 36,07% dan 30,11%, sedangkan rata-rata kota adalah barang dan jasa sebesar 44,56% lebih besar daripada modal sebesar 39,83%. Sejalan dengan tahun 2015 maka pada tahun 2016 porsi terbesar pada provinsi adalah juga pada barang dan jasa sebesar 68,04%, sedangkan modal sebesar 26,79% dan pegawai sebesar 5,17%. Kondisi ini sama dengan kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota pada tahun 2016 untuk belanja langsung terbesar adalah barang dan jasa masing-masing sebesar 44,56%, 43,97%, dan 45,24%, lebih besar jika dibandingkan dengan modal masing-masing sebesar 38,09%, 43,07%, dan

32,40%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk semua provinsi barang dan jasa sangat besar jika dibandingkan dengan tipe belanja lainnya, sedangkan kabupaten/kota sampel modal sangat besar jika dibandingkan tipe belanja lainnya karena pada tahun 2015 modal dimanfaatkan untuk infrastruktur. Namun, untuk tahun 2016, barang dan jasa baik di provinsi maupun kabupaten/kota sampel sangat besar jika dibandingkan dengan tipe belanja lainnya.

Analisis belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen provinsi tahun 2015 sebesar Rp394.007,00 sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten sampel, maupun rata-rata kota sampel masing-masing sebesar Rp5.016.271,00, Rp4.610.713,00, dan Rp6.650.282,00. Hal yang sama, pada tahun 2016, belanja pendidikan terhadap siswa provinsi sebesar Rp421.526,00 sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten sampel, maupun rata-rata kota sampel masing-masing sebesar Rp4.870.894,00, Rp4.504.904,00, dan Rp6.343.849,00.

Analisis belanja pendidikan terhadap APBD provinsi tahun 2015 sebesar 6,13% sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten sampel, maupun rata-rata kota sampel masing-masing sebesar 42,23%, 45,66%, dan 34,91%. Hal yang sama, pada tahun 2016, belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 6,89% sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten sampel, maupun rata-rata kota sampel masing-masing sebesar 36,82%, 39,24%, dan 31,31%.

Bila dilihat angka pertumbuhan belanja pendidikan tahun 2015-2016 maka di semua belanja dan indikator provinsi menunjukkan peningkatan. Belanja pendidikan provinsi meningkat sebesar 17,86% sangat besar, karena belanja tidak langsung meningkat 9,69% dan belanja langsung meningkat 29,86%. Rasio belanja pendidikan per siswa juga meningkat 5,86%, sedangkan persentase belanja pendidikan terhadap APBD juga meningkat tetapi sangat kecil sebesar 0,76%.

Sebaliknya, bila dilihat rata-rata kabupaten/kota sampel tahun 2015-2016 maka di semua belanja kecuali belanja tidak langsung justru menurun. Angka pertumbuhan belanja pendidikan kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota masing-masing menurun sebesar 2,55%, 4,75%, dan 3,13%. Sebaliknya, angka pertumbuhan belanja tidak langsung kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota masing-masing meningkat sebesar 2,52%, 1,57%, dan 2,29%. Angka pertumbuhan belanja langsung kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota masing-masing menurun sebesar 40,16%, 25,58%, dan 34,15%. Rasio belanja pendidikan per siswa baik kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, maupun rata-rata kota juga menurun masing-masing sebesar 2,25%, 4,61%, dan 2,87%. Demikian juga belanja pendidikan terhadap APBD juga menurun baik kabupaten/kota, rata-rata kabupaten, maupun rata-rata kota masing-masing sebesar 6,42%, 3,60%, dan 5,41%.

KATA PENGANTAR

Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (Analisis Belanja Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2016) pada tahun 2016 ini menitikberatkan pada kajian tentang data keuangan pendidikan yang berasal dari belanja pendidikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Sampel tahun anggaran 2015 dan 2016.

Data keuangan dari belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota merupakan hasil kompilasi data pada tahun anggaran 2016. Untuk menghasilkan data tersebut maka disusun instrumen keuangan yang berisi tentang dua jenis, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sesuai dengan data keuangan provinsi dan kabupaten/kota maka data yang dianalisis adalah belanja pendidikan yang diperuntukkan untuk administrasi dan program-program yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Data dan indikator keuangan provinsi maupun kabupaten/kota tersebut disajikan dalam bentuk belanja pendidikan menurut komponen belanja, belanja tidak langsung menurut jenis belanja, belanja langsung menurut program, tipe belanja, dan jenis pendidikan, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen, dan persentase belanja pendidikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disertai dengan perkembangan belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sampel tahun 2015 dan 2016.

Hasil analisis keuangan ini berisi 1) analisis belanja pendidikan SKPD Provinsi Tahun 2015 dan 2016, 2) analisis perkembangan belanja pendidikan SKPD Provinsi Tahun 2015-2016, 3) analisis belanja pendidikan SKPD 23 kabupaten/kota Tahun 2015 dan 2016, 4) analisis perkembangan belanja pendidikan SKPD 23 kabupaten/kota Tahun 2015-2016, dan 5) bahasan hasil provinsi dan kabupaten/kota.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2016

Kepala,

Dr. Bastari
NIP 19660730 1996011001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Manfaat	6
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	 7
A. Pendayagunaan Data	7
B. Data dan Indikator Keuangan	7
C. Klasifikasi Belanja Daerah	9
D. Satuan Kerja Perangkat Daerah	10
 BAB III: METODOLOGI	 13
A. Metode	13
B. Deskripsi Data	14
C. Indikator Keuangan Pendidikan	16
D. Cara Menghitung Indikator Keuangan Pendidikan	17
 BAB IV: HASIL DAN BAHASAN	 22
A. Analisis Belanja Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi, Tahun 2015 dan 2016	22
B. Analisis Perkembangan Belanja Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi ,Tahun 2015-2016	71
C. Analisis Belanja Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Tahun 2015 dan 2016	84
D. Analisis Perkembangan Belanja Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Tahun 2015-2016	123
F. Bahasan Belanja Pendidikan Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota	131

	Halaman
BAB V: PENUTUP	135
A. Simpulan	135
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

		Halaman
BAB IV		
Tabel 4.1A :	Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja Nasional, Tahun 2015	22
Tabel 4.1B :	Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja Nasional, Tahun 2016	23
Tabel 4.2A :	Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi, Tahun 2015	25
Tabel 4.2B :	Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi, Tahun 2016	27
Tabel 4.3A :	Jumlah Belanja Tidak Langsung Menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2015	29
Tabel 4.3B :	Jumlah Belanja Tidak Langsung Menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2016	32
Tabel 4.4A :	Persentase Belanja Tidak langsung Menurut Jenis Belanja dan Porsi Tiap Provinsi, Tahun 2015	35
Tabel 4.4B :	Persentase Belanja Tidak langsung Menurut Jenis Belanja dan Porsi Tiap Provinsi, Tahun 2016	36
Tabel 4.5A :	Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2015	38
Tabel 4.5B :	Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2016	45
Tabel 4.6A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2015	52
Tabel 4.6B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2016	54
Tabel 4.7A :	Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi, Tahun 2015	55
Tabel 4.7B :	Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi, Tahun 2016	57
Tabel 4.8A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi, Tahun 2015	59
Tabel 4.8B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Provinsi, Tahun 2016	60
Tabel 4.9A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tiap Provinsi, Tahun 2016	61
Tabel 4.9B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tiap Provinsi, Tahun 2016	62
Tabel 4.10A :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi, Tahun 2015	64
Tabel 4.10B :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi, Tahun 2016	66

Tabel 4.11A:	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi, Tahun 2015	68
Tabel 4.11B:	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi, Tahun 2016	70
Tabel 4.12 :	Perkembangan Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	72
Tabel 4.13 :	Perkembangan Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2015—2016	74
Tabel 4.14 :	Perkembangan Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	77
Tabel 4.15 :	Perkembangan Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	80
Tabel 4.16 :	Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	81
Tabel 4.17 :	Perkembangan Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	83
Tabel 4.18A:	Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	85
Tabel 4.18B:	Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	87
Tabel 4.19A:	Jumlah Belanja Tidak langsung Menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	89
Tabel 4.19B:	Jumlah Belanja Tidak langsung Menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	91
Tabel 4.20A:	Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	94
Tabel 4.20B:	Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	95
Tabel 4.21A:	Jumlah Belanja Langsung Menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	97
Tabel 4.21B:	Jumlah Belanja Langsung Menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	102
Tabel 4.22A:	Jumlah Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	107
Tabel 4.22B:	Jumlah Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	108
Tabel 4.23A:	Jumlah Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	110
Tabel 4.23B:	Jumlah Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	111

Tabel 4.24A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	113
Tabel 4.24B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	114
Tabel 4.25A :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	115
Tabel 4.25B :	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	116
Tabel 4.26A :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	117
Tabel 4.26B :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	119
Tabel 4.27A :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	121
Tabel 4.27B :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	122
Tabel 4.28 :	Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2015--2016	124
Tabel 4.29 :	Perkembangan Persentase Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2015--2016	125
Tabel 4.30 :	Perkembangan Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015—2016	126
Tabel 4.31 :	Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2015--2016	128
Tabel 4.32 :	Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2015--2016	130
Tabel 4.33 :	Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD, Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015--2016	131
Tabel 4.34 :	Rangkuman Belanja Pendidikan, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015--2016	132
Tabel 4.35 :	Rangkuman Perkembangan Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015-2016	134

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
BAB IV		
Grafik 4.1A :	Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Nasional, Tahun 2015	23
Grafik 4.1B :	Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Nasional, Tahun 2016	24
Grafik 4.2A :	Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi, Tahun 2015	26
Grafik 4.2B :	Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi, Tahun 2016	28
Grafik 4.3A :	Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Provinsi Tahun 2015	30
Grafik 4.3B :	Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Provinsi Tahun 2016	33
Grafik 4.4A :	Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Nasional, Tahun 2015	35
Grafik 4.4B :	Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Nasional, Tahun 2016	37
Grafik 4.5A :	Jumlah Belanja Langsung Tiap Provinsi Tahun 2015	40
Grafik 4.5B :	Jumlah Belanja Langsung Tiap Provinsi Tahun 2016	49
Grafik 4.6A :	Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Nasional, Tahun 2015	53
Grafik 4.6B :	Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Nasional, Tahun 2016	53
Grafik 4.7A :	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Nasional, Tahun 2015	61
Grafik 4.7B :	Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Nasional, Tahun 2016	63
Grafik 4.8A :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi, Tahun 2015	65
Grafik 4.8B :	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi, Tahun 2016	67
Grafik 4.9A :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi, Tahun 2015	69
Grafik 4.9B :	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi, Tahun 2016	71
Grafik 4.10 :	Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan Tiap Provinsi Tahun 2015--2016	73
Grafik 4.11 :	Angka Pertumbuhan Belanja Tidak langsung Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	75

Grafik 4.12 :	Angka Pertumbuhan Belanja Langsung Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	78
Grafik 4.13 :	Angka Pertumbuhan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi, Tahun 2015—2016	82
Grafik 4.14 :	Angka Pertumbuhan Persentase Belanja Pendidikan Terhadap APBD Tiap Provinsi, Tahun 2015--2016	84
Grafik 4.15A:	Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	86
Grafik 4.15B:	Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	88
Grafik 4.16A:	Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2015	90
Grafik 4.16B:	Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2015	92
Grafik 4.17A:	Persentase Belanja Tidak Langsung Menurut Jenis Belanja Tahun 2015	94
Grafik 4.17B:	Persentase Belanja Tidak Langsung Menurut Jenis Belanja Tahun 2016	95
Grafik 4.18A:	Jumlah Belanja Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2015	100
Grafik 4.18B:	Jumlah Belanja Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2016	105
Grafik 4.19A:	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tahun 2015	107
Grafik 4.19B:	Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja Tahun 2016	108
Grafik 4.20A:	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2015	115
Grafik 4.20B:	Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2016	116
Grafik 4.21A:	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	118
Grafik 4.21B:	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016	120
Grafik 4.22A:	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015	121
Grafik 4.22B:	Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Kabupaten/Kota, Tahun 2016	123

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk dengan urutan kelima terbesar di dunia. Sebagai negara besar, Indonesia menjadi perhatian kalangan internasional baik dari segi kependudukan maupun dari segi ekonomi. Selain itu, perhatian kalangan internasional juga ditujukan pada bidang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Bukti dari perhatian kalangan internasional ini dapat dilihat dari besarnya bantuan maupun pinjaman yang diberikan kepada Indonesia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Banyaknya permintaan akan data dan informasi tentang pendidikan di Indonesia dan diikuti dengan makin banyaknya bantuan yang diberikan oleh kalangan internasional menunjukkan perhatian kalangan internasional terhadap pendidikan Indonesia. Permintaan data tersebut makin meningkat baik dari segi frekuensi maupun keanekaragaman data, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang kualitatif, dan baik yang bersifat rutin tahunan maupun perkembangan pada saat tertentu. Kebutuhan akan data tersebut antara lain digunakan untuk mengetahui apakah bantuan yang telah diberikan oleh lembaga internasional dapat meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan oleh kalangan internasional, ternyata cukup banyak jenis data yang tidak pernah atau belum dikumpulkan dengan mekanisme pendataan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Apalagi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11, Tahun 2015 (Permendikbud 11/2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana pendidikan tinggi sudah tidak termasuk dalam Permendikbud 11/2015. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015b). Bagian Ketiga Pasal 797 mengenai Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), pada pasal 813 terdapat bidang Pendayagunaan dan Pelayanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Pasal 814 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- c. pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- d. pemberian layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan

- e. koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan pada 815 maka bidang Pendayagunaan dan Pelayanan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan.
- b. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik kebudayaan.

Dalam kaitan dengan permintaan internasional maka belum semua data yang diperlukan ada dalam pendataan yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud atau Data Pokok Pendidikan (dapodik), data tersebut pada umumnya diisi dengan m (*missing*), artinya data tidak tersedia. Jenis data yang sering tidak dapat diisi tersebut antara lain adalah jumlah siswa, siswa baru, lulusan, guru dan tenaga kependidikan yang dirinci menurut jenis kelamin dan usia tunggal serta data keuangan terutama yang berasal dari luar Kemendikbud seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swasta atau perusahaan, masyarakat, lembaga internasional, dan lain-lainnya. Data keuangan terasa makin sulit diperoleh setelah adanya otonomi pendidikan karena dana pendidikan berasal dari berbagai pihak baik dari pemerintah pusat termasuk lembaga internasional, sampai pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan swasta/orang tua.

Pengelolaan dana pendidikan dari berbagai instansi ini menyebabkan sulit diperoleh data keuangan pendidikan tersebut, terlebih bila ingin mengetahui jumlahnya. Akibatnya, menimbulkan berbagai masalah, di antaranya adalah yang menyangkut adanya salah penilaian terhadap kinerja pendidikan di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh lembaga pendidikan internasional. Namun, yang perlu dikhawatirkan adalah akan terkucilnya pendidikan di Indonesia dari negara-negara lainnya di dunia, bila Indonesia tidak dapat menyajikan data pendidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga internasional.

Dalam era globalisasi ini diperlukan keterbukaan akan arus informasi yang memerlukan dukungan data. Data tersebut dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, dengan sumber utama berasal dari lingkungan Kemendikbud, dari lingkungan luar Kemendikbud seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, terdapat 18 Kementerian lain sebagai penyelenggara pendidikan dan lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah yang menyelenggarakan pendidikan. BPS

setiap tiga tahun sekali melakukan survai tentang biaya pendidikan yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Data ini sangat membantu untuk mengisi data keuangan yang berasal dari rumah tangga.

Keempat kementerian dan BPS tersebut sangat diperlukan dalam menghasilkan data pendidikan terlebih pada keuangan pendidikan yang diperlukan oleh lembaga internasional. Agar diperoleh data yang konsisten, valid, dan reliabel maka diperlukan pengolahan data yang terintegrasi, mengingat dana yang dialokasikan untuk 18 Kementerian lain penyelenggara pendidikan sangat besar, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengelolaan yang terintegrasi. Selanjutnya, sesuai dengan permintaan lembaga internasional maka diperlukan data keuangan yang tidak hanya berasal pemerintah pusat melainkan juga dari daerah seperti dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swasta, lembaga internasional, dan rumah tangga atau orang tua siswa.

Luas wilayah Indonesia yang tersebar pada ribuan pulau, terbagi dalam 34 provinsi, dan lebih dari 500 kabupaten/kota memerlukan strategi yang tepat baik dalam menerapkan metode maupun waktu pengumpulan dan pengolahan data pendidikan, sehingga tidak terjadi kerancuan data. Hal itu sangat diperlukan agar dapat diperoleh kepastian informasi pendidikan untuk pengambilan kebijakan pimpinan kementerian, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa lembaga dan badan internasional memerlukan data dan informasi pendidikan Indonesia untuk digunakan sebagai bahan studi perbandingan di antara negara-negara yang tergabung dalam suatu badan internasional sampai saat ini ada lima organisasi, yaitu

- 1) *International Consultative Forum on Education for All* (EFA) dari *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).
- 2) *World Education Indicators* (WEI) dari UNESCO dan *Organization for Economics Co-operation Development* (OECD).
- 3) *Millenium Development Goals* (MDGs) dari *United Nations Development Programs* (UNDP).
- 4) *Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO) di Bangkok.
- 5) *Korea Education and Research Information Service* (KERIS) di Korea.

Kelima organisasi internasional tersebut merupakan contoh suatu badan internasional yang memerlukan data dan informasi tentang pendidikan di Indonesia. Selain itu, PDSPK diminta melakukan verifikasi dan validasi data Indonesia yang akan diterbitkan oleh OECD dalam rangka penyusunan buku antara lain *Education at a Glance 2015* (Selayang Pandang Pendidikan) yang sifatnya internasional dan dipublikasikan tiap tahun. (UNESCO/OECD, 2016).

Untuk mendukung penyusunan buku internasional tersebut maka setiap tahun PDSPK diminta untuk mengisi instrumen WEI, tahun ini disebut kuesioner elektronik WEI 2016. Selain Statistik Persekolahan dan Statistik Pendidikan Nonformal yang disusun oleh PDSPK, Kemdikbud, Statistik Perguruan Tinggi yang disusun oleh Kemenristek dan Dikti, dan Statistik Madrasah yang disusun oleh Kemenag maka perlu didukung oleh publikasi lainnya yang berkaitan dengan

data yang diminta oleh WEI. Oleh karena itu, perangkat pendukung tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk merancang sistem pengolahan data pendidikan yang dapat menghasilkan informasi pendidikan. Informasi tersebut, selain digunakan untuk lembaga dan badan internasional dapat pula digunakan untuk berbagai keputusan strategik di bidang pendidikan yang dapat menguntungkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Informasi tersebut secara tidak langsung dapat digunakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pengisian data dari kuesioner elektronik WEI khususnya tentang keuangan maka mulai tahun 2011 PDSPK menyusun mekanisme baru dengan meminta data keuangan di lapangan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan di tiap provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Pada tahun 2011 dikumpulkan data SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel sebanyak 33 kabupaten/kota dengan menjaring data tahun 2009 dan tahun 2010. Pada tahun 2012 dikumpulkan data SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel sebanyak 33 kabupaten/kota dengan menjaring data tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2013 dikumpulkan data SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel sebanyak 33 kabupaten/kota dengan menjaring data tahun 2013. Pada tahun 2014 dikumpulkan hanya data SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dengan menjaring data keuangan tahun 2014 karena keterbatasan dana yang tersedia pada tahun tersebut. Walaupun demikian, untuk analisis pada tahun tersebut dilakukan pada data keuangan dari SKPD Dinas Pendidikan Provinsi tahun 2009 sampai 2014 ditambah dengan data dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel tahun 2009 sampai 2013. Pada tahun 2015, hanya dikumpulkan data SKPD Kabupaten/Kota sampel sebanyak 67 kabupaten/kota dengan menjaring data tahun 2014 dan 2015.

Pada tahun 2016, untuk melengkapi analisis data keuangan maka dikumpulkan data SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel sebanyak 23 kabupaten/kota dengan menjaring data tahun 2015 dan 2016.

Dengan melihat bahwa data keuangan telah dikumpulkan sejak tahun 2011 maka perlu dilakukan analisis data keuangan baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota walaupun sampai ini belum dapat mengumpulkan semua kabupaten/kota yang ada.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya lima permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dapat dilakukan analisis?

2. Bagaimana perkembangan data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dapat dilakukan analisis?
3. Bagaimana data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan 23 Kabupaten/Kota sampel dapat dilakukan analisis?
4. Bagaimana perkembangan data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan 23 Kabupaten/Kota sampel dapat dilakukan analisis?
5. Bagaimana kaitan antara data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dengan SKPD Dinas Pendidikan 23 Kabupaten/Kota sampel dapat dilakukan analisis?

C. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka terdapat dua tujuan dilakukannya kegiatan penyusunan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2016, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk melakukan analisis dan mendokumentasikan data keuangan pendidikan yang berasal dari SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai sampel pada tahun 2015 dan 2016.

Selain itu, tujuan khususnya ada lima seperti disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi tahun 2015 dan 2016.
2. Melakukan analisis perkembangan keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi tahun 2015—2016.
3. Melakukan analisis keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan 23 Kabupaten/Kota sampel tahun 2015 dan 2016.
4. Melakukan analisis perkembangan keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan 23 Kabupaten/Kota tahun 2015—2016.
5. Melakukan kaitan analisis keuangan dari belanja pendidikan antara SKPD Dinas Pendidikan dengan SKPD rata-rata 23 Kabupaten/Kota.

D. Ruang Lingkup

Untuk dapat melaksanakan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, dan UNESCO) 2016 maka ruang lingkupnya dibatasi hanya pada data keuangan dari belanja pendidikan dan analisis keuangan dari belanja pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan 23 Kabupaten/Kota sampel hasil kompilasi data yang telah dilakukan pada tahun 2016.

Pembatasan pada data keuangan dari belanja pendidikan dan analisis keuangan dari belanja pendidikan ini disebabkan karena adanya data keuangan yang diperoleh dari hasil kompilasi data pada tahun 2016. Di samping itu, terdapat indikator keuangan yang penting dan dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang pendidikan khususnya terkait dengan data keuangan.

Penentuan ruang lingkup ini dianggap sangat menguntungkan karena dengan melakukan analisis keuangan dari belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota maka dapat diketahui apakah data keuangan yang ada telah sesuai dengan kebijakan pendidikan tentang keuangan yang harus mencapai 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

E. Manfaat

Dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat digunakan untuk Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, *stakeholder*, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data keuangan pendidikan khususnya yang berasal dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel.

Bagi Kemendikbud dengan tersedianya data keuangan dari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung program-program pendidikan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang pendidikan khususnya keuangan di tingkat nasional.

Bagi Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tersedianya data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Provinsi dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pemerintah provinsi dalam mendukung program-program pendidikan. Selain itu, dapat digunakan untuk mengetahui satuan biaya yang ada, sehingga dapat ditentukan apakah sudah sesuai atau masih perlu ditingkatkan.

Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan tersedianya data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung program-program pendidikan. Selain itu, dapat digunakan untuk mengetahui satuan biaya yang ada, sehingga dapat ditentukan apakah sudah sesuai atau masih perlu ditingkatkan.

Stakeholder dapat memanfaatkan data keuangan pendidikan dari belanja pendidikan untuk kebutuhan pengembangan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam mendukung program pendidikan seperti besarnya belanja administrasi dengan program pendidikan serta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data keuangan pendidikan dari belanja pendidikan untuk kebutuhan penelitian atau pengembangan pendidikan khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam hal program pendidikan seperti berapa besar belanja untuk administrasi dan program pendidikan serta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Analisis

Sesuai dengan tugas bidang pendayagunaan dan pelayanan data berdasarkan Permendikbud 11/2015, salah satunya adalah melaksanakan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Pendayagunaan data merupakan suatu cara untuk melakukan eksplorasi terhadap hasil produksi data berdasarkan pada perkembangan pembangunan pendidikan, kebutuhan pimpinan, atau permintaan data. Pendayagunaan data adalah kegiatan yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi dituntut adanya kreativitas dan kepekaan yang tinggi dari para personilnya sehingga dapat selalu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan maupun masyarakat berkenaan dengan pengenalan arah dan permasalahan dunia pendidikan.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis juga berarti penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. (<http://kbbi.web.id/analisis>).

Untuk dapat mendayagunakan data yang ada diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis dan sintesis data maupun interpretasi data. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua personil di lingkungan unit kerja yang menangani pendataan. Oleh karena itu, analisis adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antarvariabel data pendidikan sehingga dapat tercipta informasi-informasi baru yang relevan dengan tujuan pembinaan, penyelenggaraan, dan program pembangunan pendidikan. Sintesis data adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antara variabel data pendidikan dengan data nonpendidikan. (Kintamani, 2009).

Analisis merupakan komponen pendataan pendidikan agar dihasilkan data yang berkualitas dan mengetahui apakah terdapat permasalahan dalam pendidikan. Oleh karena itu, analisis keuangan yang disajikan pada lembaga internasional ini sangat diperlukan agar diketahui tentang masalah pendidikan dilihat dari keuangan pendidikan yang dialokasikan masing-masing program dan berapa besarnya dana yang dialokasikan oleh daerah untuk pendidikan.

B. Data, Informasi, dan Indikator

Data adalah keterangan yang benar dan nyata, misalnya pengumpulan data adalah untuk memperoleh keterangan tentang sesuatu hal. Data juga berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau simpulan). Digital data yang berhubungan dengan angka untuk sistem perhitungan tertentu, data kualitatif adalah data tidak berbentuk angka yang

diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis; data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif. (<http://kbbi.web.id/data>).

Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. (wikipedia.org/wiki/data).

Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf atau simbol yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Angka, huruf atau simbol tersebut sering disebut sebagai data mentah atau besaran yang belum menunjukkan suatu ukuran terhadap suatu konsep atau gejala tertentu. Besaran data tersebut belum memiliki arti apa pun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut. Data tidak memiliki acuan konseptual apa pun tanpa dilakukan pengolahan menjadi informasi. (Kintamani, 2009).

Sebaliknya, informasi adalah penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Informasi pendidikan adalah keterangan tentang jenis pendidikan yang tersedia, misalnya tentang syarat memasuki sekolah, lama pendidikan, fasilitas yang tersedia, tata tertib, dan kegiatan ekstrakurikuler. (<http://kbbi.web.id/informasi>).

Secara teknis, informasi adalah data yang telah diproses atau data yang telah memiliki arti. Informasi lebih berkaitan dengan pengolahan atau hasil pengolahan data. Informasi tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya data. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi. Dengan demikian, data dan informasi saling berkaitan karena dengan adanya data maka seseorang bisa menjadi informasi bagi orang lain. Data dan informasi tidak dapat dipisahkan dan bahkan saling bergantung satu sama lain. Data dan informasi merupakan dua konsep yang berlainan baik secara konsep maupun secara teknis, namun keduanya berkaitan sangat erat. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. (Kintamani, 2009). Sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet (semisal dari Microsoft Excel) seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat. (wikipedia.org/wiki/informasi).

Seperti halnya, data dan informasi maka data dan indikator juga merupakan dua konsep yang berlainan baik secara konsep maupun secara teknis, namun keduanya berkaitan sangat erat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, data berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. (<http://kbbi.web.id/data>). Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan menjadi petunjuk atau keterangan. Contoh indikator adalah seseorang yang akan melakukan suatu pekerjaan sebaiknya menggunakan bahan yang sudah

ada; kenaikan harga dapat menjadi adanya inflasi. (<http://kbbi.web.id/indikator>). Jadi, bila data lebih berkaitan dengan pengumpulannya maka indikator lebih berkaitan dengan pengolahan atau hasil pengolahan. Besaran data tersebut belum memiliki arti apa pun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut dalam bentuk indikator.

Secara teknis, indikator merupakan suatu konsep dan sekaligus ukuran. Sebagai suatu konsep, indikator merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil atau dampak dari suatu instrumen kebijakan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Secara sederhana, indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan. (Kintamani, 2009).

Bila dikaitkan dengan pendidikan maka indikator pendidikan dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan di bidang pendidikan. Selanjutnya, bila digunakan indikator keuangan maka dapat diukur sejauh mana keuangan tersebut dapat meningkatkan pendidikan. Dengan demikian, data dan indikator pendidikan tidak dapat dipisahkan dan bahkan saling bergantung satu sama lain. Indikator pendidikan tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya data pendidikan. Sebaliknya, data pendidikan tidak memiliki acuan konseptual apa pun tanpa dilakukan pengolahan data pendidikan menjadi indikator pendidikan. Besaran indikator pendidikan ini merupakan sesuatu yang berguna karena dapat dijadikan ukuran yang standar dari strategi kebijakan pendidikan, yaitu meningkatkan ketersediaan layanan, memperluas keterjangkauan layanan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kesetaraan layanan, dan menjamin kepastian layanan.

Dengan demikian, data, informasi, dan indikator keuangan yang disajikan telah sesuai dengan istilah Kbbi Daring, sesuai istilah teknis, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan data lembaga internasional.

C. Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Permendagri 13/2006), pada Lampiran 4 terdapat dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa serta belanja tak terduga. Selain itu, terdapat tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk tambahan penghasilan PNS seperti berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. (Kementerian Dalam Negeri, 2011).

Belanja langsung merupakan belanja daerah yang terkait langsung dengan program atau kegiatan. Termasuk dalam kelompok belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan Permendagri 13/2006 maka dalam analisis keuangan ini juga digunakan belanja tidak langsung dan langsung yang dirinci dengan lebih rinci dari yang disebutkan dalam Permendagri tersebut. Belanja tidak langsung terkait dengan gaji dan tunjangan sedangkan langsung terkait dengan program-program pendidikan. Dengan demikian, belanja yang dianalisis telah sesuai dengan Permendagri.

D. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri 13/2006 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan SKPD bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. SKPD di se23 Kabupaten/Kota dan kabupaten/kota bisa berbeda baik dalam jumlah maupun materinya. Contoh SKPD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 52 SKPD dan meliputi 1) Inspektorat, 2) Biro Bangda, 3) Biro Bina Sosial, 4) Biro Humas, 5) Biro Keuangan, 6) Biro Hukum, 7) Biro Organisasi dan Kepegawaian, 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 9) Badan Koordinasi Wilayah I, 10) Badan 11) Koordinasi Wilayah II, 12) Badan Koordinasi Wilayah III, 13) Badan Lingkungan Hidup, 14) Badan Penanaman Modal Daerah, 15) Badan Arsip dan Perpustakaan, 16) Badan Ketahanan Pangan, 17) Badan Pendidikan dan Pelatihan, 18) Badan Penelitian dan Pengembangan, 19) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 20) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 21) Badan Kepegawaian Daerah, 22) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 23) Dinas Kesehatan, 24) Dinas Sosial, 25) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan, 26) Dinas Pemuda dan Olah Raga, 27) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 28) Dinas Koperasi dan UMKM, 29) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, 30) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 31) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 32) Dinas Bina Marga, 33) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 34) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 35) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 36) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, 37) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 38) Dinas Kehutanan, 39) Dinas Kelautan dan Perikanan, 40)

Dinas Pendidikan, 41) Dinas Perkebunan, 42) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, 43) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, 44) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, 45) Kantor Perwakilan RSUD Dr. Moewardi, 46) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, 47) RSUD Kelet Jepara, 48) RSJD Dr. Amino Gondohutomo, 49) RSJD Surakarta, 50) RSJD Sujarwadi, 51) RSUD Tugurejo, dan 52) Satuan Polisi Pamong Praja. (<http://jatengprov.go.id/id/pemerintahan/satuan-kerja-perangkat-daerah>).

SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah).

Kewenangan daerah yang besar dalam mengelola keuangan daerah tentu memiliki dampak yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis regresi terlihat bahwa pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tidak begitu kuat (tidak signifikan) terhadap PDRB. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah>.

1. SKPD Dinas Pendidikan Provinsi

Data dan informasi dari SKPD Provinsi diambil dari semua provinsi (34 provinsi) mengenai data keuangan yang berasal dari belanja pendidikan dari APBD provinsi untuk Dinas Pendidikan Provinsi. Data keuangan tersebut berasal dari DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi yang berisi belanja pendidikan yang terdiri dari dua komponen, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dirinci menurut jenis belanja, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi. Belanja langsung dirinci menurut jenis program yang terdiri dari 16 program dan tipe belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2. SKPD Kabupaten/Kota

Data dan informasi dari SKPD Kabupaten/Kota diambil dari 23 kabupaten/kota sampel mengenai data keuangan yang berasal dari APBD kabupaten/kota untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Seperti halnya provinsi maka data keuangan tersebut berasal dari DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berisi belanja pendidikan yang terdiri dari dua komponen, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dirinci

menurut jenis belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi. Belanja langsung dirinci menurut jenis program yang terdiri dari 16 program dan dirinci menjadi tipe belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

BAB III METODOLOGI

A. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2016 ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu 1) studi dokumentasi atau kepustakaan dan 2) survai.

Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu melakukan studi melalui dokumentasi atau bahan-bahan tertulis seperti buku kepustakaan atau bahan yang tersedia di lingkungan Kemdikbud. Dokumentasi tersebut berupa data dan informasi yang tersedia di statistik pendidikan, kurikulum pendidikan, peta program pendidikan, pengkalan data pendidikan, pedoman maupun berbagai karya ilmiah penelitian lainnya mengenai data pendidikan. Selain itu, melakukan studi dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian lainnya seperti Kemenristek Dikti yang menyangkut statistik dan data keuangan, Kemenag yang menyangkut pendidikan seperti statistik madrasah dan data keuangan, Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan fungsi. (Arikunto, 2010).

Survai dilaksanakan ke lapangan adalah studi yang mengambil data dari satu populasi maupun sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari penggunaan survai adalah hasil studi ini dapat dilakukan generalisasi dari sampel terhadap populasi. Populasi yang dimaksud adalah 34 SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan 504 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Untuk provinsi maka digunakan semua populasi, sedangkan untuk kabupaten/kota diambil sampling menggunakan metode purposif (sampel bertujuan) sehingga ditemukan 23 kabupaten/kota karena disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam melakukan kompilasi data ke lapangan. (Moleong, 2001).

Pelaksanaan survai dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner khusus keuangan menggunakan format yang telah disiapkan oleh PDSPK, Kemendikbud. Kuesioner tersebut telah melalui uji coba dan perbaikan yang dilaksanakan sebelumnya. Pelaksanaan survai di lapangan ditujukan kepada tiga orang petugas di setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menjadi responden survai. (Gulo, 2002).

Teknik kompilasi data dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner untuk menjangkau data sekunder yang meliputi data keuangan yang terdiri dari dua hal, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung dan dirinci menurut jenis pendidikan serta jenis belanja. Wawancara dilakukan kepada Ketua Kelompok Pendataan Pendidikan atau Kepala Subbag Program dengan didampingi oleh dua orang sebagai responden yang pada pelaksanaannya adalah mereka yang mengisi kuesioner keuangan.

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang penyusunan Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Pendidikan Internasional (WEI, OECD, UNESCO) 2016 adalah analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan data keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel dan perkembangan data keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sampel.

Penyajian data menggunakan tabel dan grafik sehingga memudahkan dalam memahami kajian yang telah disusun.

B. Deskripsi Data

Untuk memenuhi analisis keuangan dari belanja pendidikan maka pada tahun 2016 dikumpulkan data keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel. Instrumen yang digunakan untuk menjangkau data keuangan tersebut disesuaikan dengan program-program yang ada pada SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016b).

Bahan yang dikumpulkan dari SKPD Dinas Pendidikan Provinsi semua provinsi dan Dinas Pendidikan 23 kabupaten/kota sampel menjangkau data belanja pendidikan tahun 2015 dan 2016. Data keuangan dari belanja pendidikan pada dasarnya terdiri dari dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. (Kementerian Dalam Negeri, 2006).

Belanja tidak langsung dirinci menjadi tiga jenis belanja, yaitu:

1. Gaji dan tunjangan,
2. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS), dan
3. Insentif pemungutan retribusi. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Gaji dan tunjangan dirinci menjadi 10 item, yaitu 1) gaji pokok PNS/uang representasi, 2) tunjangan keluarga, 3) tunjangan jabatan, 4) tunjangan fungsional tertentu, 5) tunjangan fungsional umum, 6) tunjangan beras, 7) tunjangan PPH khusus, 8) pembulatan gaji, 9) iuran asuransi kesehatan dan uang duka wafat/tewas, dan 10) gaji guru. Namun, untuk provinsi hanya menggunakan 9 jenis karena gaji guru tidak ada di provinsi, sedangkan kabupaten/kota sampel menggunakan 10 jenis tersebut.

Tambahan penghasilan PNS, juga ditentukan sebanyak 8 item, yaitu 1) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, 2) tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, 3) tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, 4) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dan bersyarat, 5) sertifikasi profesi guru SD, 6) tambahan penghasilan PNS guru, 7) tambahan penghasilan guru PNSD, dan 8) uang kesejahteraan pegawai. Namun, untuk provinsi hanya menggunakan 7 jenis karena tak ada tambahan penghasilan sertifikasi profesi guru SD di provinsi, sedangkan kabupaten/kota sampel menggunakan 8 jenis tersebut.

Insentif pemungutan retribusi tidak semua provinsi maupun kabupaten/kota sampel memiliki program ini.

Belanja langsung dirinci menurut program berlaku untuk provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari 16 jenis, yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pendidikan anak usia dini (PAUD)
7. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Th)
8. Program pendidikan menengah (dikmen)
9. Program pendidikan nonformal (PNF)
10. Program pendidikan luar biasa/PK dan PLK (PK dan PLK)
11. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (mutu PTK)
12. Program manajemen pelayanan pendidikan
13. Program kepemudaan dan olahraga
14. Program kebudayaan
15. Program perguruan tinggi
16. Lainnya (yang tidak ada dalam 15 program di atas). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Pada tahun 2016 dikumpulkan data untuk semua SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan 23 Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Data keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tahun 2015 dan 2016 semuanya tersedia untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Ketika dilakukan pengolahan data tetap menggunakan tiga jenis belanja tidak langsung dan 16 program belanja langsung, namun terdapat beberapa program yang tidak semua provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan belanja untuk program tersebut. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan kabupaten/kota masih ada yang membina PT, Pemuda dan Olahraga, maupun Kebudayaan, sedangkan di Pusat (Kemendikbud) hanya menangani pendidikan dasar dan menengah serta kebudayaan, sehingga program PT, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan masih disertakan dalam kuesioner tersebut walaupun pada kenyataannya belanja pendidikannya tidak besar.

Data pendukung lainnya seperti siswa hanya digunakan data pendidikan dasar dan menengah, yaitu untuk SD termasuk SDLB dan Paket A, untuk SMP termasuk SMPLB dan Paket B, untuk SM termasuk SMA, SMK, SMALB, dan Paket C. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2015 dan 2016a).

Data pendukung lainnya adalah APBD (berdasarkan fungsi) untuk beberapa provinsi tidak tersedia lengkap tahun 2015 dan 2016. Oleh karena itu, data APBD yang digunakan adalah data tahun 2014 dan 2015. Walaupun demikian, masih terdapat enam provinsi yang tidak diperoleh data APBD secara lengkap, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,

Sulawesi Tenggara, dan Bali (<http://www.djpk.depkeu.id/>). Khusus Provinsi DKI Jakarta APBD tahun 2014 maupun tahun 2015 diambil dari website Pemerintah Daerah DKI Jakarta. (<http://apbd.jakarta.go.id>).

C. Indikator Keuangan Pendidikan

Sesuai dengan data belanja pendidikan yang dikumpulkan di semua SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan 23 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel, beberapa indikator keuangan yang disajikan berikut ini dihasilkan dari pengolahan data yang dilakukan.

Berdasarkan data belanja pendidikan yang dikumpulkan maka diperoleh indikator keuangan provinsi dan rata-rata 23 kabupaten/kota sampel dari 15 provinsi di Indonesia. Analisis belanja pendidikan dirinci menjadi lima, yaitu 1) analisis belanja pendidikan provinsi tahun anggaran 2015 dan 2016, 2) analisis perkembangan belanja pendidikan provinsi tahun anggaran 2015--2016, 3) analisis belanja pendidikan 23 kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2015 dan 2016, 4) analisis perkembangan belanja pendidikan 23 kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2015—2016, dan 5) analisis keterkaitan perkembangan provinsi dan kabupaten/kota sampel.

Analisis keuangan dari belanja pendidikan provinsi tahun 2015 dan 2016 terdiri dari delapan indikator, yaitu

- a. Persentase belanja pendidikan menurut komponen belanja (tidak langsung dan belanja langsung) (%BPkb).
- b. Persentase belanja tidak langsung menurut jenis belanja (gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan iuran pemungutan retribusi) (%BTLjb).
- c. Persentase belanja tidak langsung menurut provinsi (%BTLp).
- d. Persentase belanja langsung menurut jenis program (16 jenis).
- e. Persentase belanja langsung menurut tipe belanja (pegawai, barang dan jasa, dan modal) (%BLtb).
- f. Persentase belanja langsung menurut jenis pendidikan (noninstitusi pendidikan, PAUD dan PNF, wajar dikdas dan dikmen, institusi lain, pemuda dan olahraga, dan kebudayaan) (%BLjp).
- g. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen (R-BP/Sdikdasmen).
- h. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD (%BP/APBD). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Analisis perkembangan belanja pendidikan provinsi tahun 2015--2016 terdiri dari enam indikator, yaitu

- a. Angka pertumbuhan komponen belanja (belanja tidak langsung dan langsung) (APBLkb).
- b. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung menurut jenis belanja. (APBTLjb).
- c. Angka pertumbuhan belanja langsung menurut tipe belanja (APBLtb).
- d. Angka pertumbuhan belanja langsung menurut jenis pendidikan (APBLjp).
- e. Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen (APR-BP/Sdikdasmen).

- i. Angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD (APBP/APBD). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Analisis belanja pendidikan 23 kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2015 dan 2016 berbeda sedikit dengan provinsi karena hanya terdiri dari tujuh indikator, yaitu

- a. Persentase belanja pendidikan menurut komponen belanja (tidak langsung dan belanja langsung) (%BPkb).
- b. Persentase belanja tidak langsung menurut jenis belanja (gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan iuran pemungutan retribusi) (%BTLjb).
- c. Persentase belanja langsung menurut jenis program (16 jenis).
- d. Persentase belanja langsung menurut tipe belanja (pegawai, barang dan jasa, dan modal) (%BLtb).
- e. Persentase belanja langsung menurut jenis pendidikan (noninstitusi pendidikan, PAUD dan PNF, wajar dikdas dan dikmen, institusi lain, pemuda dan olahraga, dan kebudayaan) (%BLjp).
- f. Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen (R-BP/Sdikdasmen).
- j. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD (%BP/APBD). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Seperti halnya provinsi maka analisis perkembangan belanja pendidikan kabupaten/kota sampel tahun anggaran 2015--2016 juga terdiri dari enam indikator, yaitu

- a. Angka pertumbuhan komponen belanja (belanja tidak langsung dan langsung) (APBLkb).
- b. Angka pertumbuhan belanja tidak langsung menurut jenis belanja. (APBTLjb).
- c. Angka pertumbuhan belanja langsung menurut tipe belanja (APBLtb).
- d. Angka pertumbuhan belanja langsung menurut jenis pendidikan (APBLjp).
- e. Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen (APR-BP/Sdikdasmen).
- k. Angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD (APBP/APBD). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

D. Cara Menghitung Indikator Keuangan

Untuk menghitung indikator keuangan maka digunakan delapan jenis indikator, dengan diberikan definisi dan rumus yaitu:

1. Persentase Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja (%BPkb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah belanja pendidikan komponen belanja tertentu (belanja tidak langsung atau belanja langsung) dengan jumlah belanja pendidikan seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BPkb		
%BPkb	=	-----	x	100
		BP seluruh		

kb adalah komponen belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung

Keterangan:

BPkb adalah belanja pendidikan komponen belanja tertentu

BP seluruh adalah jumlah belanja pendidikan seluruhnya

2. Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja (%BTLjb)

Definisi: Perbandingan antara belanja tidak langsung jenis belanja tertentu dengan jumlah belanja tidak langsung seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BTLjb		
%BTLjb	=	-----	x	100
		BTL seluruh		

Jb adalah jenis belanja, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi

Keterangan:

BTLjb adalah belanja tidak langsung jenis belanja tertentu

BTL seluruh adalah jumlah belanja tidak langsung seluruhnya

3. Persentas Belanja Tidak Langsung menurut Provinsi (%BTLp)

Definisi: Perbandingan antara belanja tidak langsung provinsi tertentu dengan jumlah belanja tidak langsung seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BTLp		
PBTLp	=	-----	x	100
		BTL seluruh		

p adalah provinsi yang terdiri dari 34 provinsi

Keterangan:

PBTLp adalah belanja tidak langsung provinsi tertentu

BTL seluruh adalah jumlah belanja tidak langsung seluruhnya

4. Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program (%BLjp)

Definisi: Perbandingan antara belanja langsung jenis program tertentu (16 program) dengan jumlah belanja langsung seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BLjp		
%BLjp	=	-----	x	100
		BL seluruh		

jp adalah jenis program yang terdiri dari 16 program seperti administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, kinerja dan keuangan, dll.

Keterangan:

BLjp adalah belanja langsung jenis program tertentu

BL seluruh adalah jumlah belanja langsung seluruhnya

5. Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja (%BLtb)

Definisi: Perbandingan antara belanja langsung tipe belanja tertentu dengan jumlah belanja langsung seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BLtb		
%BLtb	=	-----	x	100
		BL seluruh		

tb adalah tipe belanja, yaitu pegawai, barang dan jasa, dan modal

Keterangan:

BLtb adalah belanja langsung tipe belanja tertentu

BL seluruh adalah jumlah belanja langsung seluruhnya

6. Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan (%BLjp)

Definisi: Perbandingan antara belanja langsung jenis pendidikan tertentu dengan jumlah belanja langsung seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BLjp		
%BLjp	=	-----	x	100
		BL seluruh		

jp adalah jenis pendidikan, yaitu noninstitusi pendidikan, wajar dikdas dan dikmen, institusi lain, pemuda dan olahraga dan kebudayaan

Keterangan:

BLjp adalah belanja langsung menurut jenis pendidikan

BL seluruh adalah jumlah belanja langsung seluruhnya

7. Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen (R-BP/Sddm)

Definisi: Perbandingan antara jumlah belanja pendidikan (penjumlahan belanja tidak langsung dan belanja langsung) dengan jumlah siswa dikdasmen (SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, Paket B, SMA, SMK, SMALB, dan Paket C).

Rumus:

		BP	
R-BP/Sddm	=	-----	
		Sddm	

Keterangan:

BP adalah belanja pendidikan

Sddm adalah siswa dikdasmen

8. Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD (%BP/APBD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah belanja pendidikan (penjumlahan belanja tidak langsung dan belanja langsung) terhadap APBD dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

	BP		
%BP-APBD =	-----	x	100
	APBD		

Keterangan:

BP adalah belanja pendidikan

APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah

Untuk menghitung perkembangan indikator keuangan maka digunakan enam jenis indikator, dengan diberikan definisi dan rumus sebagai berikut ini.

1. Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan menurut Komponen Biaya (AP-BPkb)

Definisi: Perbandingan antara belanja pendidikan komponen belanja tertentu tahun n ke tahun n+1 dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

	BPkb(n+1)-BPkb(n)		
AP-BPkb =	-----	x	100
	BPkb(n)		

Keterangan:

BPkb adalah belanja pendidikan komponen belanja tertentu

(n+1) adalah tahun n+1 dan (n) adalah tahun n

2. Angka Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja (AP-BTLjb)

Definisi: Perbandingan antara belanja tidak langsung jenis belanja tertentu tahun n ke tahun n+1 dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

	BTLjb(n+1)-BTLjb(n)		
AP-BTLjb =	-----	x	100
	BTLjb(n)		

Keterangan:

BTLjb adalah belanja tidak langsung jenis belanja tertentu

(n+1) adalah tahun n+1 dan (n) adalah tahun n

3. Angka Pertumbuhan Belanja Langsung menurut Tipe Belanja (AP-BLtb)

Definisi: Perbandingan antara tipe belanja tertentu belanja langsung tahun n ke tahun n+1 dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BLtb(n+1)-BLtb(n)		
AP-BLtb	=	-----	x	100
		BLtb(n)		

Keterangan:

BLtb adalah belanja langsung tipe belanja tertentu

(n+1) adalah tahun n+1 dan (n) adalah tahun n

4. Angka Pertumbuhan Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan (AP-BLjp)

Definisi: Perbandingan antara belanja jenis pendidikan tertentu belanja langsung tahun n ke tahun n+1 dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BLjp(n+1)-BLjp(n)		
AP-BLjp	=	-----	x	100
		BLjp(n)		

Keterangan:

BLjp adalah belanja langsung jenis pendidikan tertentu

(n+1) adalah tahun n+1 dan (n) adalah tahun n

5. Angka Pertumbuhan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah (AP-R-BP/Sddm)

Definisi: Perbandingan antara belanja pendidikan terhadap siswa pendidikan dasar dan menengah tahun n ke tahun n+1 dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		R-BP/Sddm(n+1)-R-BP/Sddm(n)		
A-PR-BP/Sddm	=	-----	x	100
		R-BP/Sddm(n)		

Keterangan:

R-BP/Sddm adalah rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen

(n+1) adalah tahun n+1 dan (n) adalah tahun n

6. Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan terhadap APBD (APBP-APBD)

Definisi: Perbandingan antara belanja pendidikan terhadap siswa pendidikan dasar dan menengah tahun n ke tahun n+1 dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		BP-APBD(n+1)-BP-APBD(n)		
AP-BP/APBD	=	-----	x	100
		BP-APBD(n)		

Keterangan:

BP-APBD adalah belanja pendidikan terhadap APBD

(n+1) adalah tahun n+1 dan (n) adalah tahun n

BAB IV HASIL DAN BAHASAN

A. Analisis Belanja Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi

Analisis belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi ini menggunakan dua komponen keuangan, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III belanja pendidikan merupakan penjumlahan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Belanja tidak langsung dirinci menjadi tiga jenis belanja, sedangkan belanja langsung dirinci menjadi 16 jenis program dan tiga tipe belanja. Belanja pendidikan yang dikaitkan dengan siswa dikdasmen, sehingga diperoleh rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk seorang siswa. Selanjutnya, belanja pendidikan dikaitkan dengan APBD maka diperoleh persentase dana pendidikan terhadap APBD.

1. Belanja Pendidikan

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka data belanja pendidikan yang dianalisis disajikan dalam bentuk data dan indikatornya. Tabel 4.1A adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung dari jumlah 34 provinsi pada tahun 2015. Belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi sebesar Rp9.596.458,5 juta lebih besar daripada belanja langsung yang terdiri dari pegawai, barang dan jasa, dan modal sebesar Rp6.539.146,0 juta, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp16.135.604,6 juta. Belanja tidak langsung sebesar 59,47% lebih besar daripada belanja langsung sebesar 40,53%. Hal ini berarti masalah gaji dan tunjangan masih lebih dominan dibandingkan dengan dana untuk program pendidikan.

Tabel 4.1A
Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen, Nasional
Tahun 2015

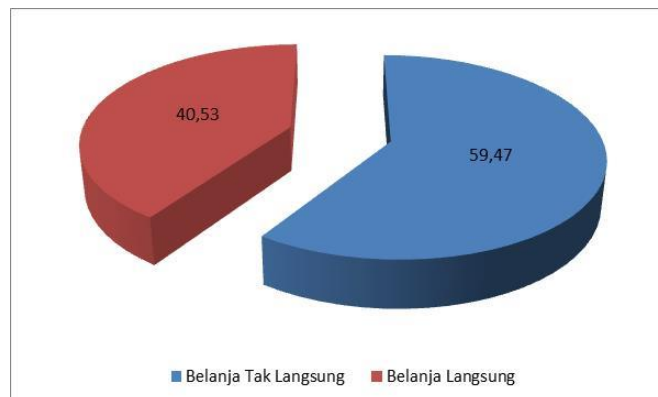
No.	Jenis Belanja	BTL	%	BL	%	Jumlah
1	Gaji dan Tunjangan	3.761.273.930.396	39,19	-	-	3.761.273.930.396
2	Tambahan Penghasilan PNS	5.809.328.696.108	60,54	-	-	5.809.328.696.108
3	Insentif Pemungutan Retribusi	25.855.891.900	0,27	-	-	25.855.891.900
4	Pegawai	-	-	399.639.339.582	6,11	399.639.339.582
5	Barang dan Jasa	-	-	5.216.129.646.225	79,77	5.216.129.646.225
6	Modal	-	-	923.377.047.944	14,12	923.377.047.944
	Jumlah	9.596.458.518.404	100,00	6.539.146.033.751	100,00	16.135.604.552.255
	Persentase	59,47		40,53		100,00

Catatan: BTL adalah belanja tidak langsung dan BL adalah belanja langsung

Pada tahun 2015, belanja tidak langsung terbesar pada tambahan penghasilan PNS sebesar Rp5.809.328,7 juta atau 60,54%, sedangkan untuk belanja langsung maka barang dan jasa yang terbesar sebesar Rp5.216.129,6 juta atau 79,77%.

Hal ini berarti, pada tahun 2015 tambahan penghasilan PNS menjadi prioritas seperti halnya belanja barang dan jasa.

Grafik 4.1A
Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Nasional
Tahun 2015



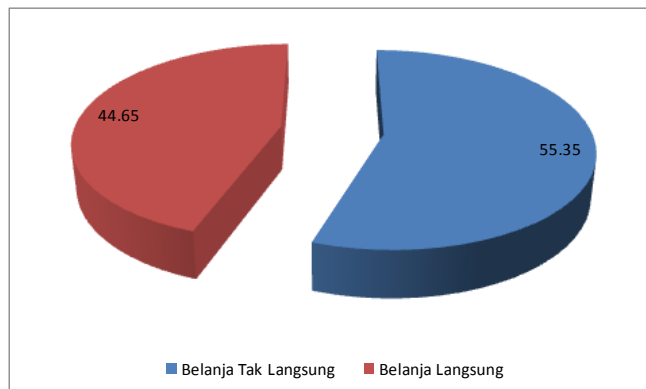
Tabel 4.1B
Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja, Nasional
Tahun 2016

No.	Jenis Belanja	BTL	%	BL	%	Jumlah
1	Gaji dan Tunjangan	4,188,684,241,970	39.79	-	-	4,188,684,241,970
2	Tambahan Penghasilan PNS	6,306,914,648,695	59.92	-	-	6,306,914,648,695
3	Insentif Pemungutan Retribusi	30,757,871,500	0.29	-	-	30,757,871,500
4	Pegawai	-	-	439,078,966,392	5.17	439,078,966,392
5	Barang dan Jasa	-	-	5,777,662,421,115	68.04	5,777,662,421,115
6	Modal	-	-	2,274,967,222,716	26.79	2,274,967,222,716
	Jumlah	10,526,356,762,165	100.00	8,491,708,610,223	100.00	19,018,065,372,487
	Persentase	55.35		44.65		100.00

Tabel 4.1B adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung dari jumlah 34 provinsi pada tahun 2016. Belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi sebesar Rp10.526.356,8 juta lebih besar daripada belanja langsung yang terdiri dari pegawai, barang dan jasa, dan modal sebesar Rp8.491.708,6 juta, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp19.018.065,4 milyar. Belanja tidak langsung sebesar 55,35% lebih besar daripada belanja langsung sebesar 44,65%. Hal ini berarti masalah gaji masih lebih dominan dibandingkan dengan dana untuk program pendidikan.

Besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2016 terbesar pada tambahan penghasilan PNS sebesar Rp6.306.914,6 juta atau 59,92%, sedangkan barang dan jasa juga terbesar sebesar Rp5.777.662,4 juta atau 68,04%. Hal ini berarti, pada tahun 2016 pun tambahan penghasilan PNS menjadi prioritas seperti halnya belanja barang dan jasa.

Grafik 4.1B
Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Nasional
Tahun 2016



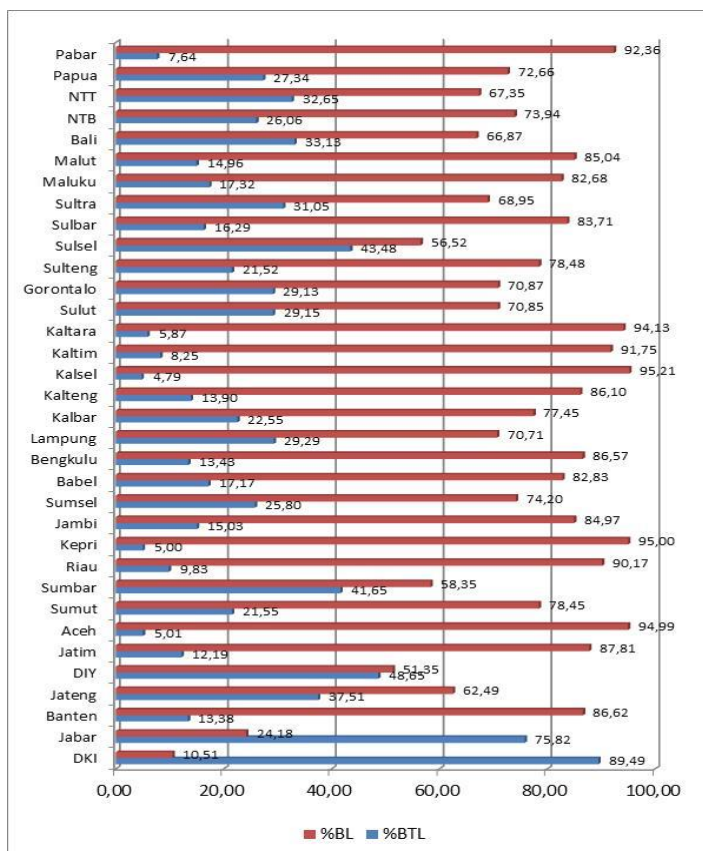
Belanja pendidikan pada tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.2A menunjukkan bahwa belanja tidak langsung secara nasional lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung. Namun, bila dilihat tiap provinsi kondisinya berbeda, belanja tidak langsung terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 89,49% dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,79%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk gaji pegawai sangat besar di Provinsi DKI Jakarta, sehingga belanja untuk program pendidikan sangat kecil karena hanya sepersepuluh dari belanja pendidikan. Sebaliknya, belanja langsung terbesar pada Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 95,21% dan terkecil pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,51%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan lebih memprioritaskan pada program pendidikan, sehingga 95% belanja pendidikan untuk program pendidikan, sedangkan belanja untuk gaji sangat kecil.

Seperti halnya pada tahun 2015 maka belanja pendidikan pada tahun 2016 yang terdapat pada Tabel 4.2B menunjukkan bahwa belanja tidak langsung secara nasional lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung. Namun, bila dilihat tiap provinsi kondisinya berbeda, belanja tidak langsung terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 76,22% dan terkecil pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,08%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk gaji pegawai sangat besar di Provinsi DKI Jakarta sehingga belanja untuk program pendidikan sangat kecil atau hanya seperempat dari belanja pendidikan. Sebaliknya, belanja langsung terbesar pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 95,92% dan terkecil pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 23,78%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau lebih memprioritaskan pada program pendidikan sehingga 95% belanja pendidikan untuk program pendidikan, sedangkan belanja untuk gaji sangat kecil.

Tabel 4.2A
Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Tak Langsung		Langsung		Jumlah
		Subjumlah	%	Subjumlah	%	
1	DKI Jakarta	8.053.402.757.456	89,49	945.725.797.642	10,51	8.999.128.555.098
2	Jawa Barat	293.882.810.220	75,82	93.716.226.850	24,18	387.599.037.070
3	Banten	41.100.000.000	13,38	265.983.002.700	86,62	307.083.002.700
4	Jawa Tengah	117.353.101.000	37,51	195.531.978.000	62,49	312.885.079.000
5	DI Yogyakarta	186.863.764.467	48,65	197.204.488.306	51,35	384.068.252.773
6	Jawa Timur	49.558.852.000	12,19	357.059.122.650	87,81	406.617.974.650
7	Aceh	37.730.414.686	5,01	714.722.203.718	94,99	752.452.618.404
8	Sumatera Utara	48.212.746.000	21,55	175.513.803.302	78,45	223.726.549.302
9	Sumatera Barat	57.494.138.734	41,65	80.533.229.207	58,35	138.027.367.941
10	Riau	68.797.530.512	9,83	631.042.441.085	90,17	699.839.971.597
11	Kepulauan Riau	9.633.733.411	5,00	183.194.367.900	95,00	192.828.101.311
12	Jambi	31.478.947.130	15,03	178.013.069.665	84,97	209.492.016.795
13	Sumatera Selatan	55.638.662.776	25,80	160.050.000.000	74,20	215.688.662.776
14	Bangka Belitung	6.546.987.507	17,17	31.592.211.000	82,83	38.139.198.507
15	Bengkulu	20.505.509.372	13,43	132.235.587.017	86,57	152.741.096.389
16	Lampung	51.146.840.000	29,29	123.460.374.720	70,71	174.607.214.720
17	Kalimantan Barat	27.838.245.100	22,55	95.630.282.906	77,45	123.468.528.006
18	Kalimantan Tengah	23.321.221.926	13,90	144.475.162.011	86,10	167.796.383.937
19	Kalimantan Selatan	19.529.111.000	4,79	388.562.409.022	95,21	408.091.520.022
20	Kalimantan Timur	29.527.024.706	8,25	328.522.834.250	91,75	358.049.858.956
21	Kalimantan Utara	4.704.650.293	5,87	75.507.191.450	94,13	80.211.841.743
22	Sulawesi Utara	25.431.707.054	29,15	61.811.713.000	70,85	87.243.420.054
23	Gorontalo	23.224.457.079	29,13	56.512.106.902	70,87	79.736.563.981
24	Sulawesi Tengah	28.728.387.678	21,52	104.796.423.295	78,48	133.524.810.973
25	Sulawesi Selatan	63.469.070.771	43,48	82.511.464.251	56,52	145.980.535.022
26	Sulawesi Barat	12.488.033.915	16,29	64.171.515.750	83,71	76.659.549.665
27	Sulawesi Tenggara	27.178.795.000	31,05	60.354.784.947	68,95	87.533.579.947
28	Maluku	28.808.519.009	17,32	137.498.977.000	82,68	166.307.496.009
29	Maluku Utara	15.517.370.316	14,96	88.179.577.500	85,04	103.696.947.816
30	Bali	66.341.813.880	33,13	133.893.428.505	66,87	200.235.242.385
31	Nusa Tenggara Barat	17.270.818.797	26,06	49.011.930.200	73,94	66.282.748.997
32	Nusa Tenggara Timur	21.137.757.000	32,65	43.608.310.000	67,35	64.746.067.000
33	Papua	24.974.292.000	27,34	66.384.458.000	72,66	91.358.750.000
34	Papua Barat	7.620.447.609	7,64	92.135.561.000	92,36	99.756.008.609
	Jumlah	9.596.458.518.404	59,47	6.539.146.033.751	40,53	16.135.604.552.155

Grafik 4.2A
Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2015

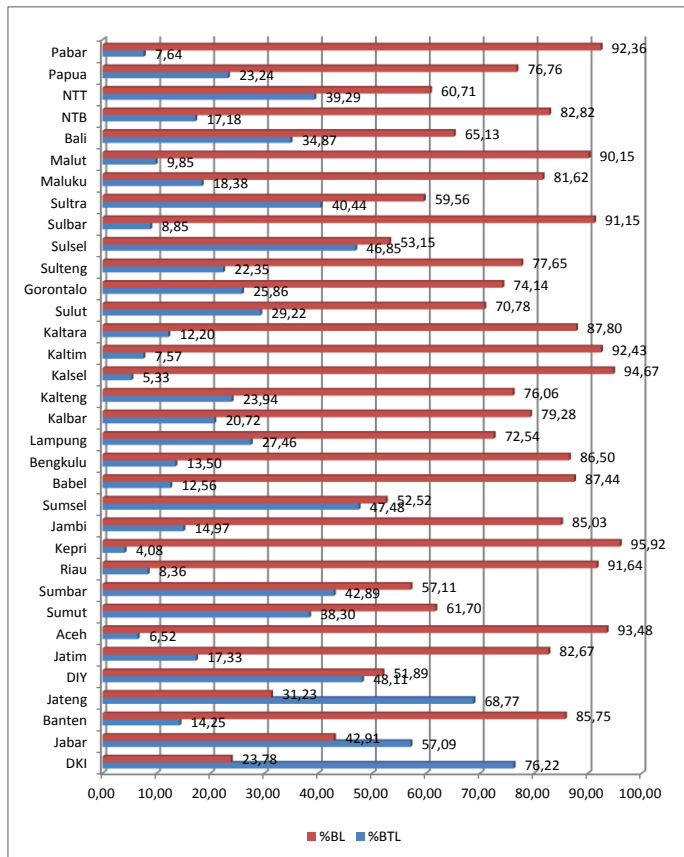


Catatan: %BL: % belanja langsung dan %BTL: % belanja tak langsung

Tabel 4.2B
Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Tak Langsung		Langsung		Jumlah
		Subjumlah	%	Subjumlah	%	
1	DKI Jakarta	8.606.779.028.461	76,22	2.685.635.733.778	23,78	11.292.414.762.239
2	Jawa Barat	337.988.037.692	57,09	254.050.581.589	42,91	592.038.619.281
3	Banten	48.700.000.000	14,25	293.089.200.000	85,75	341.789.200.000
4	Jawa Tengah	333.940.426.000	68,77	151.663.745.000	31,23	485.604.171.000
5	DI Yogyakarta	217.920.125.388	48,11	235.021.701.900	51,89	452.941.827.288
6	Jawa Timur	49.558.852.000	17,33	236.411.452.350	82,67	285.970.304.350
7	Aceh	42.699.833.366	6,52	612.018.217.527	93,48	654.718.050.893
8	Sumatera Utara	59.170.925.000	38,30	95.323.911.957	61,70	154.494.836.957
9	Sumatera Barat	66.361.889.464	42,89	88.380.728.300	57,11	154.742.617.764
10	Riau	70.096.949.941	8,36	767.883.223.998	91,64	837.980.173.939
11	Kepulauan Riau	11.171.617.964	4,08	262.785.614.448	95,92	273.957.232.412
12	Jambi	27.407.050.532	14,97	155.624.367.440	85,03	183.031.417.972
13	Sumatera Selatan	39.755.882.855	47,48	43.971.837.350	52,52	83.727.720.205
14	Bangka Belitung	7.921.982.703	12,56	55.156.013.000	87,44	63.077.995.703
15	Bengkulu	21.740.082.902	13,50	139.278.261.500	86,50	161.018.344.402
16	Lampung	60.693.183.000	27,46	160.326.000.000	72,54	221.019.183.000
17	Kalimantan Barat	29.846.331.800	20,72	114.203.641.920	79,28	144.049.973.720
18	Kalimantan Tengah	27.011.975.509	23,94	85.830.000.000	76,06	112.841.975.509
19	Kalimantan Selatan	21.857.771.000	5,33	388.454.000.000	94,67	410.311.771.000
20	Kalimantan Timur	23.522.754.000	7,57	287.222.400.000	92,43	310.745.154.000
21	Kalimantan Utara	8.219.826.167	12,20	59.165.000.000	87,80	67.384.826.167
22	Sulawesi Utara	26.658.542.761	29,22	64.563.366.300	70,78	91.221.909.061
23	Gorontalo	24.125.262.822	25,86	69.173.714.464	74,14	93.298.977.286
24	Sulawesi Tengah	38.421.199.503	22,35	133.484.023.354	77,65	171.905.222.857
25	Sulawesi Selatan	67.769.104.534	46,85	76.882.049.458	53,15	144.651.153.992
26	Sulawesi Barat	13.182.670.786	8,85	135.792.953.000	91,15	148.975.623.786
27	Sulawesi Tenggara	29.572.343.900	40,44	43.556.917.600	59,56	73.129.261.500
28	Maluku	31.221.123.305	18,38	138.608.660.000	81,62	169.829.783.305
29	Maluku Utara	18.660.563.000	9,85	170.834.455.000	90,15	189.495.018.000
30	Bali	68.989.449.000	34,87	128.847.412.000	65,13	197.836.861.000
31	Nusa Tenggara Barat	18.554.798.200	17,18	89.459.384.190	82,82	108.014.182.390
32	Nusa Tenggara Timur	29.433.289.000	39,29	45.487.782.300	60,71	74.921.071.300
33	Papua	39.783.442.000	23,24	131.386.699.500	76,76	171.170.141.500
34	Papua Barat	7.620.447.609	7,64	92.135.561.000	92,36	99.756.008.609
	Jumlah	10.526.356.762.165	55,35	8.491.708.610.223	44,65	19.018.065.372.387

Grafik 4.2B
Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2016



Catatan: %BL: % belanja langsung dan %BTL: % belanja tak langsung

2. Belanja Tidak Langsung

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, belanja tidak langsung disajikan dalam dua hal, yaitu 1) rincian jenis belanja dari 17 item belanja dan 2) jenis belanja yang terdiri dari tiga.

a. Rincian Jenis Belanja

Belanja tidak langsung pada tahun 2015 semua provinsi memiliki jenis belanja yang sama terdiri dari tiga jenis, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi. Dalam hal gaji dan tunjangan maka 2 provinsi, yaitu Kalimantan Utara dan Papua Barat tidak mengalokasikan tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional umum juga tidak

dialokasikan oleh Provinsi Papua Barat. Sebanyak 13 provinsi tidak mengalokasikan iuran askes atau uang duka.

Tabel 4.3A
Jumlah Belanja Tidak langsung menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Provinsi	1. GP PNS/Uang representasi	Tunjangan					8. Pembulatan Gaji	9. Iuran Askes+ Uang duka	Jumlah Gaji dan Tunjangan	
			2. Keluarga	3. Jabatan	4. Fungsional	5. Fungs Umum	6. Beras				7. PPH Khusus
1	DKI Jakarta	1.898.315.264.000	161.378.364.000	4.549.598.000	115.083.791.000	13.940.869.000	75.850.090.000	432.758.914.000	27.527.000	61.140.000.000	2.763.044.417.000
2	Jawa Barat	117.094.640.000	11.018.909.200	431.457.000	10.152.317.500	1.289.542.800	6.723.907.320	3.107.260.000	4.476.400	0	149.822.510.220
3	Banten	18.715.296.018	1.728.663.480	346.896.550	1.613.959.800	256.120.600	1.089.511.680	306.475.000	586.872	600.000.000	24.657.510.000
4	Jawa Tengah	38.353.909.000	3.555.065.000	341.770.000	2.500.056.000	799.305.000	2.203.467.000	759.589.000	542.000	1.447.393.000	49.961.096.000
5	DI Yogyakarta	94.215.483.460	74.439.154.152	6.789.693.955	327.600.000	6.620.744.000	657.735.000	3.812.244.480	1.109.420	0	186.863.764.467
6	Jawa Timur	30.188.045.000	2.868.192.000	406.696.000	1.047.205.000	1.149.690.000	1.764.960.000	944.523.000	600.000	150.000.000	38.519.911.000
7	Aceh	17.681.000.000	1.725.880.000	438.221.750	669.384.000	658.765.000	1.194.644.500	645.218.800	500.636	0	23.013.614.686
8	Sumatera Utara	27.020.593.000	2.639.189.000	275.330.000	1.360.050.000	798.106.000	1.657.984.000	513.246.000	450.000	862.698.000	35.127.646.000
9	Sumatera Barat	33.632.208.365	3.279.168.288	362.970.000	2.154.189.928	790.553.611	1.965.187.277	634.611.897	789.704	0	42.819.679.070
10	Riau	25.834.344.540	1.989.372.612	402.610.000	1.095.069.950	548.535.000	1.302.436.198	2.099.405.992	3.051.852	2.921.104.368	36.195.930.512
11	Kepulauan Riau	4.437.206.983	505.471.381	266.890.000	95.359.000	166.005.000	311.724.342	60.187.410	139.295	0	5.842.983.411
12	Jambi	14.399.914.510	1.357.059.752	338.507.250	342.352.975	562.323.875	811.972.496	373.374.507	963.528	536.091.937	18.722.560.830
13	Sumatera Selatan	25.675.922.708	2.483.799.174	350.314.250	1.090.917.750	879.783.125	1.615.561.376	555.489.268	375.125	0	32.652.162.776
14	Bangka Belitung	3.063.463.062	328.637.895	229.450.000	15.500.000	128.570.000	278.554.900	69.645.181	86.083	127.395.386	4.241.302.507
15	Bengkulu	13.601.605.360	1.374.750.805	400.270.000	576.223.102	508.623.245	802.206.236	298.179.269	390.000	1.069.200	17.563.317.217
16	Lampung	15.470.141.598	1.436.137.914	374.530.000	322.615.000	649.410.000	932.864.310	364.560.930	1.060.248	0	19.551.320.000
17	Kalimantan Barat	10.739.914.300	1.044.420.800	382.210.000	217.355.000	405.455.000	586.141.800	282.186.000	163.200	0	13.657.473.100
18	Kalimantan Tengah	12.809.671.199	976.477.073	290.290.000	422.227.552	526.500.000	667.219.520	710.193.276	221.248	2.061.990.058	18.464.789.926
19	Kalimantan Selatan	9.971.802.000	902.460.000	368.225.000	399.456.000	319.605.000	629.378.000	183.057.000	158.000	0	12.774.141.000
20	Kalimantan Timur	11.357.944.860	1.032.936.872	375.620.002	448.072.003	408.170.003	692.437.763	316.792.741	176.025	406.124.440	15.038.274.706
21	Kalimantan Utara	1.699.737.000	226.916.808	208.390.000	0	33.280.000	110.499.840	46.637.500	20.653	51.168.492	2.376.650.293
22	Sulawesi Utara	13.377.939.636	1.081.509.829	306.158.154	472.778.400	430.319.000	842.838.922	350.544.316	247.210	0	16.862.335.467
23	Gorontalo	11.236.816.500	1.495.746.460	426.995.000	342.875.000	463.710.000	625.747.200	300.051.407	350.000	382.165.512	15.274.457.079
24	Sulawesi Tengah	17.916.913.948	1.502.340.398	415.750.000	841.552.000	594.770.000	911.934.640	315.919.847	238.057	238.057	22.499.656.947
25	Sulawesi Selatan	35.494.085.984	2.978.744.633	321.880.000	1.787.091.000	910.557.000	1.682.750.720	837.484.635	496.085	780.306.999	44.793.397.056
26	Sulawesi Barat	7.323.591.800	641.068.189	456.430.000	82.515.000	315.265.000	413.352.200	128.614.463	117.763	0	9.360.954.415
27	Sulawesi Tenggara	16.927.169.700	1.669.382.000	454.090.000	298.350.000	805.155.000	1.107.156.960	394.123.700	624.740	0	21.656.052.100
28	Maluku	15.513.797.983	1.381.989.427	218.486.450	440.640.199	675.629.500	913.724.851	250.586.735	554.624	506.894.240	19.902.304.009
29	Maluku Utara	10.306.943.120	974.597.196	298.329.000	457.139.000	363.080.000	656.150.000	249.945.000	187.000	0	13.306.370.316
30	Bali	28.025.500.000	3.069.952.000	365.170.000	1.899.609.000	639.120.000	1.453.034.880	766.150.000	755.000	1.081.677.000	37.300.967.880
31	Nusa Tenggara Barat	9.965.670.196	992.376.283	372.190.000	189.988.975	459.584.250	696.047.321	259.815.473	195.325	79.360.974	13.015.228.797
32	Nusa Tenggara Timur	12.468.938.091	1.096.912.948	454.090.000	311.714.750	493.062.250	779.845.900	217.637.173	460.246	378.378.642	16.201.040.000
33	Papua	11.040.682.000	1.030.256.000	276.250.000	372.301.000	512.813.000	779.793.000	329.834.000	1.001.000	362.134.000	14.705.064.000
34	Papua Barat	3.299.840.245	518.278.060	340.824.185	0	0	316.800.000	250.831.642	127.602	758.345.875	5.485.047.609
	Jumlah	2.617.175.623.166	294.724.179.629	22.636.582.546	147.430.255.884	38.103.021.259	113.027.660.152	453.493.329.642	48.741.940	74.634.536.179	3.761.273.930.396

Dalam hal tambahan penghasilan PNS, hanya Provinsi DI Yogyakarta tidak memberikan tambahan penghasilan atau tidak tersedia datanya. Terdapat 9 provinsi tidak mengalokasikan berdasarkan beban kerja. Hanya 2 provinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Papua mengalokasikan berdasarkan tempat bertugas. Terdapat 14 provinsi mengalokasikan berdasarkan prestasi kerja, 12 provinsi mengalokasikan berdasarkan pertimbangan objektif dan bersyarat, 8 provinsi mengalokasikan berdasarkan PNS guru, 9 provinsi mengalokasikan berdasarkan TPG PNSD, dan 3 provinsi mengalokasikan berdasarkan uang kesejahteraan

pegawai, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bengkulu. Selanjutnya, insentif pemungutan retribusi hanya dialokasikan untuk 13 provinsi.

Berdasarkan data pada Tabel 4.3A, pada tahun 2015 gaji dan tunjangan untuk semua provinsi sebesar Rp3.761.273,9 juta dengan rincian terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.763.044,4 juta dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp2.376,6 juta. Tambahan penghasilan PNS semua provinsi sebesar Rp5.809.328,7 juta, terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.290.358,3 juta dan terkecil pada Papua sebesar Rp2.135,4 juta. Insentif pemungutan retribusi semua provinsi sebesar Rp25.855,9 juta, terbesar pada Provinsi Lampung sebesar Rp25.573,4 juta dan terkecil pada Kalimantan Timur sebesar Rp450,0 ribu. Dengan demikian, belanja tidak langsung semua provinsi sebesar Rp9.596.458,5 juta.

Grafik 4.3A
Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2015



Tabel 4.3A (lanjutan)
Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Provinsi	1. Beban kerja	2. Tempat bertugas	3. Prestasi kerja	4. Pertimb objektif & Bersyarat	5. PNS guru	6. TPG PNSD	7. Uang kesejah pegawai	Tambahan Penghasilan PNS	Insentif pemungutan	Jumlah Belanja Pegawai
1	DKI Jakarta	0	0	2.995.928.369.456	0	0	2.294.429.971.000	0	5.290.358.340.456	0	8.053.402.757.456
2	Jawa Barat	119.625.600.000	0	0	17.327.200.000	800.000.000	0	6.307.500.000	144.060.300.000	0	293.882.810.220
3	Banten	12.941.990.000	0	16.000.000	0	2.880.000.000	604.500.000	0	16.442.490.000	0	41.100.000.000
4	Jawa Tengah	67.371.305.000	0	0	0	0	0	0	67.371.305.000	20.700.000	117.353.101.000
5	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.863.764.467
6	Jawa Timur	3.702.022.000	0	0	4.929.337.000	114.000.000	0	2.292.082.000	11.037.441.000	1.500.000	49.558.852.000
7	Aceh	729.000.000	0	12.696.000.000	1.102.800.000	0	189.000.000	0	14.716.800.000	0	37.730.414.686
8	Sumatera Utara	13.085.100.000	0	0	0	0	0	0	13.085.100.000	0	48.212.746.000
9	Sumatera Barat	12.794.084.664	0	0	1.400.300.000	0	474.000.000	0	14.668.384.664	6.075.000	57.494.138.734
10	Riau	32.403.600.000	0	0	0	198.000.000	0	0	32.601.600.000	0	68.797.530.512
11	Kepulauan Riau	0	0	3.757.750.000	0	33.000.000	0	0	3.790.750.000	0	9.633.733.411
12	Jambi	0	0	12.756.386.300	0	0	0	0	12.756.386.300	0	31.478.947.130
13	Sumatera Selatan	0	0	0	22.080.500.000	0	780.000.000	0	22.860.500.000	126.000.000	55.638.662.776
14	Bangka Belitung	1.813.995.000	0	0	491.690.000	0	0	0	2.305.685.000	0	6.546.987.507
15	Bengkulu	1.466.500.000	0	0	124.750.000	0	0	1.350.942.155	2.942.192.155	0	20.505.509.372
16	Lampung	6.022.100.000	0	0	0	0	0	0	6.022.100.000	25.573.420.000	51.146.840.000
17	Kalimantan Barat	9.068.112.000	4.800.000.000	0	0	306.000.000	0	0	14.174.112.000	6.660.000	27.838.245.100
18	Kalimantan Tengah	4.856.432.000	0	0	0	0	0	0	4.856.432.000	0	23.321.221.926
19	Kalimantan Selatan	6.733.970.000	0	0	0	0	0	0	6.733.970.000	21.000.000	19.529.111.000
20	Kalimantan Timur	14.365.300.000	0	123.000.000	0	0	0	0	14.488.300.000	450.000	29.527.024.706
21	Kalimantan Utara	2.328.000.000	0	0	0	0	0	0	2.328.000.000	0	4.704.650.293
22	Sulawesi Utara	0	0	8.442.851.587	0	126.520.000	0	0	8.569.371.587	0	25.431.707.054
23	Gorontalo	0	0	7.950.000.000	0	0	0	0	7.950.000.000	0	23.224.457.079
24	Sulawesi Tengah	6.203.230.731	0	0	0	0	24.000.000	0	6.227.230.731	1.500.000	28.728.387.678
25	Sulawesi Selatan	0	0	0	18.204.313.715	393.000.000	0	0	18.597.313.715	78.360.000	63.469.070.771
26	Sulawesi Barat	326.051.178	0	2.801.028.322	0	0	0	0	3.127.079.500	0	12.488.033.915
27	Sulawesi Tenggara	5.522.274.000	0	0	0	0	0	0	5.522.274.000	468.900	27.178.795.000
28	Maluku	8.636.215.000	0	0	0	0	270.000.000	0	8.906.215.000	0	28.808.519.009
29	Maluku Utara	435.000.000	0	336.000.000	1.440.000.000	0	0	0	2.211.000.000	0	15.517.370.316
30	Bali	23.735.600.000	0	246.000.000	4.447.198.000	0	600.000.000	0	29.028.798.000	12.048.000	66.341.813.880
31	Nusa Tenggara Barat	0	0	2.985.820.000	1.269.770.000	0	0	0	4.255.590.000	0	17.270.818.797
32	Nusa Tenggara Timur	4.929.007.000	0	0	0	0	0	0	4.929.007.000	7.710.000	21.137.757.000
33	Papua	966.000.000	39.240.000	9.263.988.000	0	0	0	0	10.269.228.000	0	24.974.292.000
34	Papua Barat	1.086.000.000	0	544.800.000	435.600.000	0	69.000.000	0	2.135.400.000	0	7.620.447.609
Jumlah		361.146.488.573	4.839.240.000	3.057.847.993.665	73.253.458.715	4.850.520.000	2.297.440.471.000	9.950.524.155	5.809.328.696.108	25.855.891.900	9.596.458.518.404

Belanja tidak langsung pada tahun 2016 di semua provinsi memiliki jenis belanja yang sama sebanyak tiga jenis, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi. Dalam hal gaji dan tunjangan maka 2 provinsi, yaitu Kalimantan Utara dan Papua Barat tidak mengalokasikan tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional umum juga tidak dialokasikan di Provinsi Papua Barat. Provinsi Sulawesi Utara tidak menyampaikan data beras, PPH khusus, dan pembulatan gaji. Sebanyak 15 provinsi tidak mengalokasikan iuran askes atau uang duka.

Dalam hal tambahan penghasilan PNS, hanya Provinsi DI Yogyakarta tidak memberikan tambahan penghasilan atau tidak tersedia datanya. Terdapat 12 provinsi tidak mengalokasikan berdasarkan beban kerja. Hanya 4 provinsi, yaitu Aceh, Jambi, Kalimantan Barat dan Papua mengalokasikan berdasarkan tempat bertugas. Terdapat 12 provinsi mengalokasikan berdasarkan prestasi kerja, 12 provinsi berdasarkan pertimbangan objektif dan bersyarat, 10 provinsi

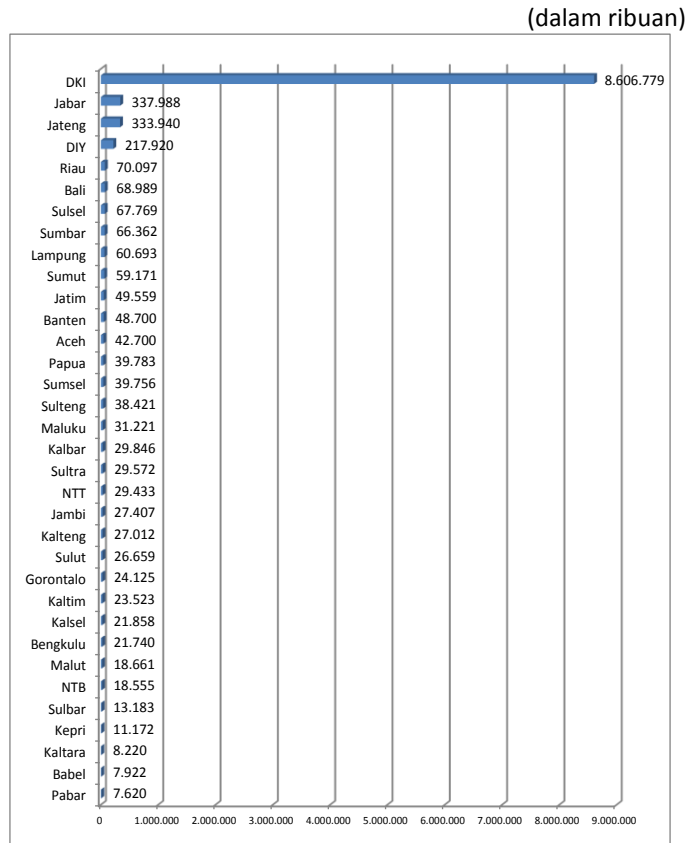
berdasarkan sertifikat profesi PNS guru, 7 provinsi berdasarkan TPG PNSD, dan 5 provinsi berdasarkan uang kesejahteraan pegawai, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, insentif pemungutan retribusi hanya dialokasikan untuk 12 provinsi.

Tabel 4.3B
Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Provinsi	1. GP PNS/Uang representasi	Tunjangan					8. Pembulatan Gaji	9. Iuran Askes+ Uang	Jumlah Gaji dan Tunjangan
			2. Keluarga	3. Jabatan	4. Fungsional	5. Fungs Umum	6. Beras			
1	DKI Jakarta	2.080.183.292.000	176.990.083.000	4.838.404.000	122.954.265.000	14.741.077.000	80.998.637.000	374.048.800.461	30.312.000	2.926.112.870.461
2	Jawa Barat	130.408.320.000	15.162.000.000	518.000.000	10.447.500.000	1.233.078.000	7.234.033.800	2.993.782.400	7.523.492	168.004.237.692
3	Banten	21.871.482.673	2.845.893.546	350.314.250	1.701.858.080	280.325.500	1.915.708.531	399.750.000	20.367.420	30.279.700.000
4	Jawa Tengah	124.461.562.000	39.270.464.000	421.498.000	9.777.257.000	993.993.000	6.242.488.000	2.843.158.000	5.160.000	189.670.326.000
5	DI Yogyakarta	109.311.972.694	88.445.136.842	7.588.894.452	334.750.000	6.395.831.000	3.899.382.480	1.942.928.918	1.229.002	217.920.125.388
6	Jawa Timur	30.188.045.000	2.868.192.000	406.696.000	1.047.205.000	1.149.690.000	1.764.960.000	944.523.000	600.000	38.519.911.000
7	Aceh	21.559.411.300	2.245.782.820	551.943.000	742.622.600	727.653.000	1.260.402.500	475.187.000	538.218	28.379.633.366
8	Sumatera Utara	33.751.585.000	3.393.913.000	346.366.000	1.579.676.000	966.707.000	1.832.784.000	869.588.000	600.000	43.667.800.000
9	Sumatera Barat	37.964.444.891	5.488.910.182	458.780.000	2.202.776.000	952.370.000	2.393.776.474	335.312.549	989.704	49.797.359.800
10	Riau	30.312.448.485	2.171.950.481	433.580.000	1.318.909.950	700.035.000	1.399.406.578	2.255.226.376	3.280.885	42.257.829.941
11	Kepulauan Riau	5.018.948.382	543.123.105	301.791.000	189.189.000	189.189.000	383.246.640	24.023.431	87.406	6.649.597.964
12	Jambi	15.658.498.905	1.455.078.303	362.306.750	357.682.975	585.833.625	918.409.570	375.534.093	247.576	20.214.164.232
13	Sumatera Selatan	24.340.169.285	2.250.275.714	273.700.000	999.900.000	705.149.285	1.417.802.857	562.540.000	345.714	30.549.882.855
14	Bangka Belitung	3.096.605.699	316.864.577	235.186.250	14.657.500	136.647.875	220.984.199	72.731.990	100.654	4.200.506.703
15	Bengkulu	14.513.144.656	1.415.841.632	416.650.000	569.330.346	513.849.310	812.022.286	339.836.713	390.000	18.581.064.943
16	Lampung	18.507.888.000	1.799.980.000	504.140.000	416.220.000	702.130.000	1.183.632.480	412.720.000	581.020	23.527.291.500
17	Kalimantan Barat	11.783.802.000	1.100.348.100	416.547.600	230.622.000	445.250.400	686.680.600	255.125.800	171.300	14.918.547.800
18	Kalimantan Tengah	12.922.743.198	1.023.960.098	312.620.000	409.692.612	567.000.000	703.515.648	475.640.872	221.247	18.722.890.009
19	Kalimantan Selatan	11.331.224.000	964.474.000	355.517.000	486.504.000	377.056.000	585.351.000	284.473.000	176.000	14.384.775.000
20	Kalimantan Timur	9.102.461.000	848.319.000	294.606.000	182.848.000	360.544.000	563.595.000	239.699.000	152.000	11.950.314.000
21	Kalimantan Utara	2.623.962.998	314.875.560	266.890.000	0	59.605.000	181.376.000	53.300.000	340.454	3.571.826.167
22	Sulawesi Utara	14.978.234.667	1.207.843.317	335.933.500	518.738.150	504.187.250	0	0	0	17.544.936.884
23	Gorontalo	12.472.406.800	1.197.990.794	515.255.000	400.075.000	437.515.000	643.017.180	300.000.000	350.000	16.401.012.822
24	Sulawesi Tengah	25.288.517.292	2.058.910.798	503.772.400	1.023.497.440	880.832.400	1.422.818.359	183.758.188	394.895	31.362.501.772
25	Sulawesi Selatan	38.457.392.894	3.283.855.246	308.880.000	1.762.618.000	928.785.000	1.677.588.480	915.605.276	502.245	48.626.374.534
26	Sulawesi Barat	7.821.782.626	697.630.545	503.828.500	71.534.750	343.754.250	511.299.684	54.825.682	130.886	10.004.786.923
27	Sulawesi Tenggara	19.227.534.300	1.996.692.100	454.090.000	221.000.000	831.480.000	1.196.595.660	170.095.100	624.740	24.098.111.900
28	Maluku	16.133.377.629	1.453.003.274	269.264.450	431.471.950	667.871.750	856.503.514	329.570.053	262.593	20.668.360.304
29	Maluku Utara	12.718.443.000	1.225.817.000	354.633.000	538.379.000	433.161.000	898.123.000	265.785.000	222.000	16.434.563.000
30	Bali	30.199.900.000	3.846.640.000	365.170.000	1.911.896.000	646.685.000	1.562.784.000	587.350.000	806.000	40.349.881.000
31	Nusa Tenggara Barat	10.893.730.700	1.076.530.340	400.820.000	210.330.000	525.040.000	738.780.320	217.775.000	2.051.840	14.065.058.200
32	Nusa Tenggara Timur	14.414.645.106	1.343.477.138	489.020.000	343.897.750	627.740.750	1.197.989.100	279.765.950	301.046	19.242.890.200
33	Papua	15.329.746.250	1.446.228.875	407.290.000	320.320.000	694.632.250	1.111.957.925	445.201.575	1.000.175	22.520.062.000
34	Papua Barat	3.299.840.245	518.278.060	340.824.185	0	0	316.800.000	250.831.642	127.602	5.485.047.609
	Jumlah	2.970.147.563.675	372.268.363.447	24.903.211.337	163.717.224.103	40.304.698.645	128.732.452.865	394.204.445.069	80.188.114	4.188.684.241.970

Berdasarkan data pada Tabel 4.3B, pada tahun 2016 gaji dan tunjangan untuk semua provinsi sebesar Rp4.188.684,2 juta dengan rincian terbesar pada DKI Jakarta sebesar Rp2.926.112,9 juta dan terkecil pada Kalimantan Utara sebesar Rp3.571,8 juta. Tambahan penghasilan PNS semua provinsi sebesar Rp6.306.914,6 juta, terbesar juga pada DKI Jakarta sebesar Rp5.680.666,2 juta dan terkecil pada Papua sebesar Rp2.135,4 juta. Insentif pemungutan retribusi semua provinsi sebesar Rp30.757,9 ribu, terbesar pada Lampung sebesar Rp30.391,6 juta dan terkecil pada Bengkulu sebesar Rp1.320,0 ribu. Dengan demikian, belanja tidak langsung semua provinsi sebesar Rp10.526.356,8 juta.

Grafik 4.3B
Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2016



b. Jenis Belanja

Berdasarkan data pada Tabel 4.4A, pada tahun 2015 dari 34 provinsi, tambahan penghasilan PNS ternyata menduduki porsi terbesar sebesar 60,54%, gaji dan tunjangan sebesar 39,19%, dan insentif pemungutan retribusi sebesar 0,27%. Bila dilihat tiap provinsi maka hanya DI Yogyakarta tidak mengalokasikan tambahan penghasilan PNS maupun insentif pemungutan retribusi atau tidak memberikan datanya. Provinsi yang memberikan gaji dan tunjangan terbesar pada Maluku Utara sebesar 85,75% dan terkecil pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 34,31%. Sebaliknya, provinsi yang mengalokasikan tambahan penghasilan PNS terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 65,69% dan terkecil adalah Lampung sebesar 11,77%. Namun, Provinsi Lampung memberikan insentif pemungutan retribusi terbesar sebesar 50% dan terkecil di Sulawesi Tenggara sebesar mendekati 0%.

Tabel 4.3B (lanjutan)
Jumlah Belanja Tidak langsung menurut Rincian Jenis Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2016

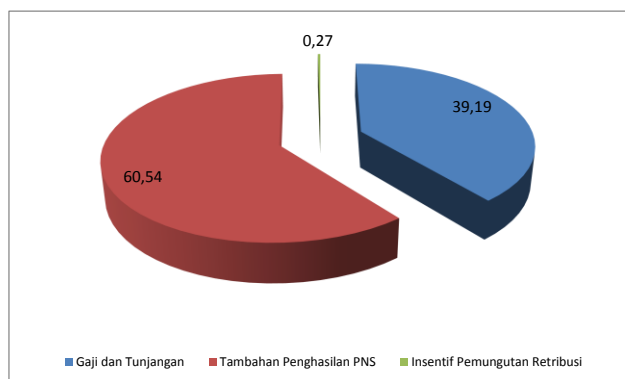
No.	Provinsi	1. Beban kerja	2. Tempat bertugas	3. Prestasi/Kondisi Kerja	4. Pertimbangan objektif & Bersyarat	5. Sertifikasi Profesi & PNS	6. TPG PNSD	7. Uang kesejah pegawai	Tambahan Penghasilan PNS	Insentif pemungutan	Jumlah Belanja Pegawai
1	DKI Jakarta	0	0	3.679.023.878.000	0	0	2.001.642.280.000		5.680.666.158.000	0	8.606.779.028.461
2	Jawa Barat	143.346.600.000	0	0	18.307.200.000	800.000.000		7.530.000.000	169.983.800.000	0	337.988.037.692
3	Banten	14.752.800.000	0	48.000.000	0	3.015.000.000	604.500.000	0	18.420.300.000	0	48.700.000.000
4	Jawa Tengah	144.270.100.000	0	0	0	0	0	0	144.270.100.000	0	333.940.426.000
5	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.920.125.388
6	Jawa Timur	3.702.022.000	0	0	4.929.337.000	114.000.000	0	2.292.082.000	11.037.441.000	1.500.000	49.558.852.000
7	Aceh	0	13.263.000.000	0	0	0	0	994.800.000	14.257.800.000	62.400.000	42.699.833.366
8	Sumatera Utara	15.503.125.000	0	0	0	0	0	0	15.503.125.000	0	59.170.925.000
9	Sumatera Barat	12.794.084.664	0	0	1.092.000.000	0	2.673.000.000	0	16.559.084.664	5.445.000	66.361.889.464
10	Riau	589.400.000	0	27.249.720.000	0	0	0	0	27.839.120.000	0	70.096.949.941
11	Kepulauan Riau	0	0	3.978.450.000	0	33.000.000	0	510.570.000	4.522.020.000	0	11.171.617.964
12	Jambi	0	7.192.886.300	0	0	0	0	0	7.192.886.300	0	27.407.050.532
13	Sumatera Selatan	0	0	0	8.701.000.000	0	363.000.000	0	9.064.000.000	142.000.000	39.755.882.855
14	Bangka Belitung	3.092.100.000	0	0	629.376.000	0		0	3.721.476.000	0	7.921.982.703
15	Bengkulu	3.146.197.959	0	0	0	11.500.000		0	3.157.697.959	1.320.000	21.740.082.902
16	Lampung	6.774.300.000	0	0	0	0	0	0	6.774.300.000	30.391.591.500	60.693.183.000
17	Kalimantan Barat	9.815.064.000	4.800.000.000	0	0	306.000.000	0	0	14.921.064.000	6.720.000	29.846.331.800
18	Kalimantan Tengah	8.289.085.500	0	0	0	0	0	0	8.289.085.500	0	27.011.975.509
19	Kalimantan Selatan	7.451.996.000	0	0	0	0	0	0	7.451.996.000	21.000.000	21.857.771.000
20	Kalimantan Timur	9.732.000.000	0	420.600.000	1.419.840.000	0	0	0	11.572.440.000	0	23.522.754.000
21	Kalimantan Utara	3.918.000.000	0	0	730.000.000	0	0	0	4.648.000.000	0	8.219.826.167
22	Sulawesi Utara	0	0	8.983.922.877	0	129.683.000	0	0	9.113.605.877	0	26.658.542.761
23	Gorontalo	0	0	7.724.250.000	0	0	0	0	7.724.250.000	0	24.125.262.822
24	Sulawesi Tengah	7.033.230.731	0	0	0	24.000.000	0	0	7.057.230.731	1.467.000	38.421.199.503
25	Sulawesi Selatan	0	0	0	18.646.350.000	0	393.000.000	0	19.039.350.000	103.380.000	67.769.104.534
26	Sulawesi Barat	412.500.000	0	2.765.383.863	0	0	0	0	3.177.883.863	0	13.182.670.786
27	Sulawesi Tenggara	5.474.232.000	0	0	0	0	0	0	5.474.232.000	0	29.572.343.900
28	Maluku	10.552.430.001	0	0	0	333.000	0	0	10.552.763.001	0	31.221.123.305
29	Maluku Utara	135.000.000	0	336.000.000	1.755.000.000	0	0	0	2.226.000.000	0	18.660.563.000
30	Bali	0	0	24.757.200.000	3.270.320.000	0	600.000.000	0	28.627.520.000	12.048.000	68.989.449.000
31	Nusa Tenggara Barat	0	0	3.219.970.000	1.269.770.000	0	0	0	4.489.740.000	0	18.554.798.200
32	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	5.214.862.800	0	4.966.536.000	10.181.398.800	9.000.000	29.433.289.000
33	Papua	873.000.000	61.200.000	0	16.329.180.000	0	0	0	17.263.380.000	0	39.783.442.000
34	Papua Barat	1.086.000.000	0	980.400.000	0	0	69.000.000	0	2.135.400.000	0	7.620.447.609
Jumlah		412.743.267.855	25.317.086.300	3.759.487.774.740	77.079.373.000	9.648.378.800	2.006.344.780.000	16.293.988.000	6.306.914.648.695	30.757.871.500	10.526.356.762.165

Bila dilihat porsi belanja tidak langsung tiap provinsi maka pada tahun 2015 porsi terbesar ada di DKI Jakarta sebesar 83,92%, Jawa Barat sebesar 3,06%, Jawa Tengah 1,22%, dan DI Yogyakarta sebesar 1,95%, sedangkan provinsi lainnya kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk penghasilan pegawai di DKI Jakarta memang sangat ekstrim karena 33 provinsi lainnya hanya sebesar 16,08%.

Tabel 4.4A
Jumlah Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Provinsi	Gaji dan Tunjangan		Tambahkan Penghasilan PNS		Insentif Pemungutan Retribusi		Jumlah	Porsi
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	DKI Jakarta	2.763.044.417.000	34,31	5.290.358.340.456	65,69	0	-	8.053.402.757.456	83,92
2	Jawa Barat	149.822.510.220	50,98	144.060.300.000	49,02	0	-	293.882.810.220	3,06
3	Banten	24.657.510.000	59,99	16.442.490.000	40,01	0	-	41.100.000.000	0,43
4	Jawa Tengah	49.961.096.000	42,57	67.371.305.000	57,41	20.700.000	0,02	117.353.101.000	1,22
5	DI Yogyakarta	186.863.764.467	100,00	0	0,00	0	-	186.863.764.467	1,95
6	Jawa Timur	38.519.911.000	77,73	11.037.441.000	22,27	1.500.000	0,00	49.558.852.000	0,52
7	Aceh	23.013.614.686	60,99	14.716.800.000	39,01	0	-	37.730.414.686	0,39
8	Sumatera Utara	35.127.646.000	72,86	13.085.100.000	27,14	0	-	48.212.746.000	0,50
9	Sumatera Barat	42.819.679.070	74,48	14.668.384.664	25,51	6.075.000	0,01	57.494.138.734	0,60
10	Riau	36.195.930.512	52,61	32.601.600.000	47,39	0	-	68.797.530.512	0,72
11	Kepulauan Riau	5.842.983.411	60,65	3.790.750.000	39,35	0	-	9.633.733.411	0,10
12	Jambi	18.722.560.830	59,48	12.756.386.300	40,52	0	-	31.478.947.130	0,33
13	Sumatera Selatan	32.652.162.776	58,69	22.860.500.000	41,09	126.000.000	0,23	55.638.662.776	0,58
14	Bangka Belitung	4.241.302.507	64,78	2.305.685.000	35,22	0	-	6.546.987.507	0,07
15	Bengkulu	17.563.317.217	85,65	2.942.192.155	14,35	0	-	20.505.509.372	0,21
16	Lampung	19.551.320.000	38,23	6.022.100.000	11,77	25.573.420.000	50,00	51.146.840.000	0,53
17	Kalimantan Barat	13.657.473.100	49,06	14.174.112.000	50,92	6.660.000	0,02	27.838.245.100	0,29
18	Kalimantan Tengah	18.464.789.926	79,18	4.856.432.000	20,82	0	-	23.321.221.926	0,24
19	Kalimantan Selatan	12.774.141.000	65,41	6.733.970.000	34,48	21.000.000	0,11	19.529.111.000	0,20
20	Kalimantan Timur	15.038.274.706	50,93	14.488.300.000	49,07	450.000	0,00	29.527.024.706	0,31
21	Kalimantan Utara	2.376.650.293	50,52	2.328.000.000	49,48	0	-	4.704.650.293	0,05
22	Sulawesi Utara	16.862.335.467	66,30	8.569.371.587	33,70	0	-	25.431.707.054	0,27
23	Gorontalo	15.274.457.079	65,77	7.950.000.000	34,23	0	-	23.224.457.079	0,24
24	Sulawesi Tengah	22.499.656.947	78,32	6.227.230.731	21,68	1.500.000	0,01	28.728.387.678	0,30
25	Sulawesi Selatan	44.793.397.056	70,58	18.597.313.715	29,30	78.360.000	0,12	63.469.070.771	0,66
26	Sulawesi Barat	9.360.954.415	74,96	3.127.079.500	25,04	0	-	12.488.033.915	0,13
27	Sulawesi Tenggara	21.656.052.100	79,68	5.522.274.000	20,32	468.900	0,00	27.178.795.000	0,28
28	Maluku	19.902.304.009	69,08	8.906.215.000	30,92	0	-	28.808.519.009	0,30
29	Maluku Utara	13.306.370.316	85,75	2.211.000.000	14,25	0	-	15.517.370.316	0,16
30	Bali	37.300.967.880	56,23	29.028.798.000	43,76	12.048.000	0,02	66.341.813.880	0,69
31	Nusa Tenggara Barat	13.015.228.797	75,36	4.255.590.000	24,64	0	-	17.270.818.797	0,18
32	Nusa Tenggara Timur	16.201.040.000	76,65	4.929.007.000	23,32	7.710.000	0,04	21.137.757.000	0,22
33	Papua	14.705.064.000	58,88	10.269.228.000	41,12	0	-	24.974.292.000	0,26
34	Papua Barat	5.485.047.609	71,98	2.135.400.000	28,02	0	-	7.620.447.609	0,08
	Jumlah	3.761.273.930.396	39,19	5.809.328.696.108	60,54	25.855.891.900	0,27	9.596.458.518.404	100,00

Grafik 4.4A
Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja, Nasional
Tahun 2015



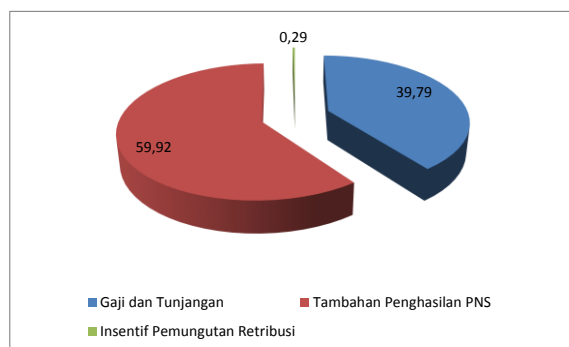
Tabel 4.4B
Jumlah Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja dan Porsi Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Provinsi	Gaji dan Tunjangan		Tambahn Penghasilan PNS		Insentif Pemung Retribusi		Jumlah	Porsi
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	DKI Jakarta	2,926,112,870,461	34.00	5,680,666,158,000	66.00	0	0.00	8,606,779,028,461	81.76
2	Jawa Barat	168,004,237,692	49.71	169,983,800,000	50.29	0	0.00	337,988,037,692	3.21
3	Banten	30,279,700,000	62.18	18,420,300,000	37.82	0	0.00	48,700,000,000	0.46
4	Jawa Tengah	189,670,326,000	56.80	144,270,100,000	43.20	0	0.00	333,940,426,000	3.17
5	DI Yogyakarta	217,920,125,388	100.00	0	0.00	0	0.00	217,920,125,388	2.07
6	Jawa Timur	38,519,911,000	77.73	11,037,441,000	22.27	1,500,000	0.00	49,558,852,000	0.47
7	Aceh	28,379,633,366	66.46	14,257,800,000	33.39	62,400,000	0.15	42,699,833,366	0.41
8	Sumatera Utara	43,667,800,000	73.80	15,503,125,000	26.20	0	0.00	59,170,925,000	0.56
9	Sumatera Barat	49,797,359,800	75.04	16,559,084,664	24.95	5,445,000	0.01	66,361,889,464	0.63
10	Riau	42,257,829,941	60.28	27,839,120,000	39.72	0	0.00	70,096,949,941	0.67
11	Kepulauan Riau	6,649,597,964	59.52	4,522,020,000	40.48	0	0.00	11,171,617,964	0.11
12	Jambi	20,214,164,232	73.76	7,192,886,300	26.24	0	0.00	27,407,050,532	0.26
13	Sumatera Selatan	30,549,882,855	76.84	9,064,000,000	22.80	142,000,000	0.36	39,755,882,855	0.38
14	Bangka Belitung	4,200,506,703	53.02	3,721,476,000	46.98	0	0.00	7,921,982,703	0.08
15	Bengkulu	18,581,064,943	85.47	3,157,697,959	14.52	1,320,000	0.01	21,740,082,902	0.21
16	Lampung	23,527,291,500	38.76	6,774,300,000	11.16	30,391,591,500	50.07	60,693,183,000	0.58
17	Kalimantan Barat	14,918,547,800	49.98	14,921,064,000	49.99	6,720,000	0.02	29,846,331,800	0.28
18	Kalimantan Tengah	18,722,890,009	69.31	8,289,085,500	30.69	0	0.00	27,011,975,509	0.26
19	Kalimantan Selatan	14,384,775,000	65.81	7,451,996,000	34.09	21,000,000	0.10	21,857,771,000	0.21
20	Kalimantan Timur	11,950,314,000	50.80	11,572,440,000	49.20	0	0.00	23,522,754,000	0.22
21	Kalimantan Utara	3,571,826,167	43.45	4,648,000,000	56.55	0	0.00	8,219,826,167	0.08
22	Sulawesi Utara	17,544,936,884	65.81	9,113,605,877	34.19	0	0.00	26,658,542,761	0.25
23	Gorontalo	16,401,012,822	67.98	7,724,250,000	32.02	0	0.00	24,125,262,822	0.23
24	Sulawesi Tengah	31,362,501,772	81.63	7,057,230,731	18.37	1,467,000	0.00	38,421,199,503	0.36
25	Sulawesi Selatan	48,626,374,534	71.75	19,039,350,000	28.09	103,380,000	0.15	67,769,104,534	0.64
26	Sulawesi Barat	10,004,786,923	75.89	3,177,883,863	24.11	0	0.00	13,182,670,786	0.13
27	Sulawesi Tenggara	24,098,111,900	81.49	5,474,232,000	18.51	0	0.00	29,572,343,900	0.28
28	Maluku	20,668,360,304	66.20	10,552,763,001	33.80	0	0.00	31,221,123,305	0.30
29	Maluku Utara	16,434,563,000	88.07	2,226,000,000	11.93	0	0.00	18,660,563,000	0.18
30	Bali	40,349,881,000	58.49	28,627,520,000	41.50	12,048,000	0.02	68,989,449,000	0.66
31	Nusa Tenggara Barat	14,065,058,200	75.80	4,489,740,000	24.20	0	0.00	18,554,798,200	0.18
32	Nusa Tenggara Timur	19,242,890,200	65.38	10,181,398,800	34.59	9,000,000	0.03	29,433,289,000	0.28
33	Papua	22,520,062,000	56.61	17,263,380,000	43.39	0	0.00	39,783,442,000	0.38
34	Papua Barat	5,485,047,609	71.98	2,135,400,000	28.02	0	0.00	7,620,447,609	0.07
	Jumlah	4,188,684,241,970	39.79	6,306,914,648,695	59.92	30,757,871,500	0.29	10,526,356,762,165	100.00

Berdasarkan data pada Tabel 4.4B, pada tahun 2016 dari 34 provinsi, tambahan penghasilan PNS ternyata menduduki porsi terbesar sebesar 59,92%, gaji dan tunjangan sebesar 39,79%, dan insentif pemungutan retribusi sebesar 0,29%. Bila dilihat tiap provinsi maka hanya DI Yogyakarta tidak mengalokasikan tambahan penghasilan PNS maupun insentif pemungutan retribusi atau tidak memberikan datanya. Provinsi yang memberikan gaji dan tunjangan terbesar pada Maluku Utara sebesar 88,07% dan terkecil pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 34,00%. Sebaliknya, provinsi yang mengalokasikan tambahan penghasilan PNS terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 66,00% dan terkecil adalah Lampung sebesar 11,16%. Namun, Provinsi Lampung memberikan insentif pemungutan retribusi terbesar sebesar 50,07% dan terkecil di Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara sebesar mendekati 0%.

Bila dilihat porsi belanja tidak langsung tiap provinsi maka pada tahun 2016 porsi terbesar ada di DKI Jakarta sebesar 81,76%, Jawa Barat sebesar 3,21%, Jawa Tengah 3,17%, dan DI Yogyakarta sebesar 2,07%, sedangkan provinsi lainnya kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk penghasilan pegawai di DKI Jakarta memang sangat besar karena 33 provinsi lainnya hanya sebesar 18,24%.

Grafik 4.4B
Persentase Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja, Nasional
Tahun 2016



3. Belanja Langsung

Belanja langsung yang disajikan ada lima, yaitu 1) belanja langsung menurut jenis program dan tipe belanja, 2) belanja langsung menurut tipe belanja, 3) belanja langsung menurut jenis program, 4) persentase belanja langsung menurut jenis program, dan 5) belanja langsung menurut jenis pendidikan.

a. Jenis Program dan Tipe Belanja

Belanja langsung pada tahun 2015 terdapat 16 jenis program dan 3 tipe belanja, namun tidak semua provinsi memiliki 16 jenis dan 3 tipe belanja. Provinsi DKI Jakarta tidak tersedia data mengenai administrasi perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, namun tersedia data PAUD, Wajar Dikdas, PKLK, Mutu PTK, Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan lainnya. Terdapat 2 provinsi tidak mengalokasikan dana sarana dan prasarana aparatur, yaitu DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan, terdapat 15 provinsi tidak mengalokasikan dana disiplin aparatur, terdapat 10 provinsi tidak mengalokasikan dana kapasitas sumber daya aparatur, terdapat 9 provinsi tidak mengalokasikan dana kinerja dan keuangan, terdapat 3 provinsi tidak mengalokasikan dana PAUD, yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat, hanya Nusa Tenggara Timur tidak mengalokasikan dana wajar dikdas, hanya 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur tidak mengalokasikan dana dikmen, terdapat 3

provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat tidak mengalokasikan dana PNF, terdapat 10 provinsi tidak mengalokasikan dana PK dan PLK, terdapat 9 provinsi tidak mengalokasikan dana mutu PTK, terdapat 4 provinsi tidak mengalokasikan mutu manajemen pelayanan pendidikan, sedangkan kepemudaan dan olahraga hanya di 8 provinsi, kebudayaan di 13 provinsi, dan program PT di 19 provinsi, dan lainnya di 18 provinsi.

Tabel 4.5A
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Tipe Program	1. Adm Perkntan	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SD/	5. SPC Kinerja & Ke	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	DKI Jakarta	Pegawai	0	0	0	0	0	224.510.000	0	0	0
		Barang & Jasa	0	0	0	0	0	3.954.035.163	874.517.204.400	0	0
		Modal	0	0	0	0	0	1.608.750.000	0	0	0
		Jumlah	0	0	0	0	0	5.787.295.163	874.517.204.400	0	0
2	Jawa Barat	Pegawai	1.907.300.000	235.900.000	0	570.900.000	26.676.000	1.290.350.000	22.962.500	2.043.600.000	735.100.000
		Barang & Jasa	17.983.672.643	1.339.452.500	0	3.732.850.313	84.766.500	4.033.337.500	916.542.625	9.929.945.000	2.706.742.500
		Modal	0	5.045.310.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	19.890.972.643	6.620.662.500	0	4.303.750.313	111.442.500	5.323.687.500	939.505.125	11.973.545.000	3.441.842.500
3	Banten	Pegawai	413.840.000	1.752.100.000	291.880.000	0	119.225.000	167.530.000	773.150.000	857.910.000	338.570.000
		Barang & Jasa	6.455.696.400	9.477.618.300	4.046.416.000	0	1.235.854.000	5.007.187.400	57.843.213.650	83.395.757.450	14.133.505.000
		Modal	0	0	0	0	0	1.738.230.600	0	27.173.100.000	0
		Jumlah	6.869.536.400	11.229.718.300	4.338.276.000	0	1.355.079.000	6.912.948.000	58.616.363.650	111.426.767.450	14.472.075.000
4	Jawa Tengah	Pegawai	32.350.000	50.880.000	0	108.080.000	0	566.585.000	3.768.400.000	3.305.535.000	1.367.550.000
		Barang & Jasa	16.341.440.000	8.136.003.000	0	5.125.601.000	0	3.845.615.000	19.438.308.000	33.916.818.000	6.364.250.000
		Modal	0	22.255.707.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	16.373.790.000	30.442.590.000	0	5.233.681.000	0	4.412.200.000	23.206.708.000	37.222.353.000	7.731.800.000
5	DI Yogyakarta	Pegawai	267.152.692	37.100.000	0	52.165.000	54.050.000	286.950.000	1.320.491.000	1.458.600.000	380.890.000
		Barang & Jasa	5.375.520.508	1.468.785.000	0	523.417.000	178.950.000	1.850.730.000	23.563.705.400	31.927.317.100	4.615.762.400
		Modal	0	7.234.689.000	0	0	0	0	795.768.600	2.196.349.900	24.547.600
		Jumlah	5.642.673.200	8.740.574.000	0	575.582.000	233.000.000	2.137.680.000	25.679.965.000	35.882.267.000	5.021.200.000
6	Jawa Timur	Pegawai	9.215.768.000	1.908.000	45.871.000	556.180.000	1.228.600.000	4.991.700.000	3.780.914.000	8.427.999.000	2.941.870.000
		Barang & Jasa	9.715.781.000	4.367.230.000	3.217.938.500	5.110.374.850	1.236.800.000	12.871.620.550	59.107.780.200	106.891.860.300	18.762.910.500
		Modal	0	2.145.203.000	0	0	0	15.000.000	1.313.395.000	9.497.696.900	334.500.000
		Jumlah	18.931.549.000	6.514.341.000	3.263.809.500	5.666.554.850	2.465.400.000	17.878.320.550	64.202.089.200	124.817.556.200	22.095.280.500
7	Aceh	Pegawai	3.314.950.000	-	-	2.287.850.000	0	0	298.800.000	853.260.000	184.080.000
		Barang & Jasa	15.071.497.900	716.250.000	66.700.000	8.657.489.000	0	19.203.212.909	153.068.966.609	56.931.210.998	20.695.425.468
		Modal	30.652.771.501	6.253.092.000	-	0	0	210.000.000	7.993.814.104	94.426.401.374	0
		Jumlah	49.039.219.401	6.969.342.000	66.700.000	10.945.339.000	0	19.413.212.909	161.361.580.713	152.210.872.372	20.879.505.468
8	Sumatera Utara	Pegawai	4.010.340.000	0	0	0	139.800.000	0	4.290.867.500	8.906.480.000	1.495.700.000
		Barang & Jasa	5.431.775.575	13.182.441.000	620.500.000	220.000.000	19.823.200	0	23.724.067.062	47.930.760.565	6.962.805.865
		Modal	0	27.552.104.696	0	0	0	0	0	7.021.462.000	0
		Jumlah	9.442.115.575	40.734.545.696	620.500.000	220.000.000	159.623.200	0	28.014.934.562	63.588.702.605	8.458.505.865
9	Sumatera Barat	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	5.131.173.665	2.011.668.150	290.190.000	263.302.856	1.089.967.100	1.809.588.671	7.959.743.360	23.302.352.217	6.344.688.500
		Modal	280.250.000	1.625.677.100	0	0	0	0	0	12.370.166.655	217.227.000
		Jumlah	5.411.423.665	3.637.345.250	290.190.000	263.302.856	1.089.967.100	1.809.588.671	7.959.743.360	35.672.518.872	6.561.915.500
10	Riau	Pegawai	1.453.160.000	16.600.000	14.350.000	433.200.000	211.300.000	550.100.000	4.603.378.000	6.164.330.000	3.066.470.000
		Barang & Jasa	5.055.151.000	1.146.700.000	705.650.000	1.292.400.000	363.700.000	26.625.906.650	73.852.235.410	108.185.136.600	54.019.319.800
		Modal	37.000.650.000	4.500.000.000	0	324.700.000	0	0	0	60.289.945.400	0
		Jumlah	43.508.961.000	5.663.300.000	720.000.000	2.050.300.000	575.000.000	27.176.006.650	78.455.613.410	174.639.412.000	57.085.789.800
11	Kepulauan Riau	Pegawai	3.381.601.000	37.010.000	0	0	78.705.500	103.286.000	85.759.000	348.091.000	68.842.000
		Barang & Jasa	7.364.763.624	835.803.000	0	0	111.294.500	11.304.491.200	11.402.516.020	42.512.416.433	3.460.081.266
		Modal	1.820.092.617	3.863.515.000	0	0	20.000.000	0	541.016.520	0	0
		Jumlah	12.566.457.241	4.736.328.000	0	0	210.000.000	11.407.777.200	12.029.291.540	42.860.507.433	3.528.923.266

Berdasarkan Tabel 4.5A dana 16 program semua provinsi sebesar Rp6.539.146,0 juta, terbesar terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp945.725,8 juta dan terkecil terjadi di Bangka Belitung sebesar Rp31.592,2 juta. Namun, bila dilihat setiap program maka kondisinya berbeda. Bila dilihat porsi belanja tidak langsung tiap provinsi maka pada tahun 2016 porsi terbesar ada di DKI Jakarta sebesar 81,76%, Jawa Barat sebesar 3,21%, Jawa Tengah 3,17%, dan DI Yogyakarta sebesar 2,07%, sedangkan provinsi lainnya kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk penghasilan pegawai di DKI Jakarta memang sangat besar karena 33 provinsi lainnya hanya sebesar 18,24%.

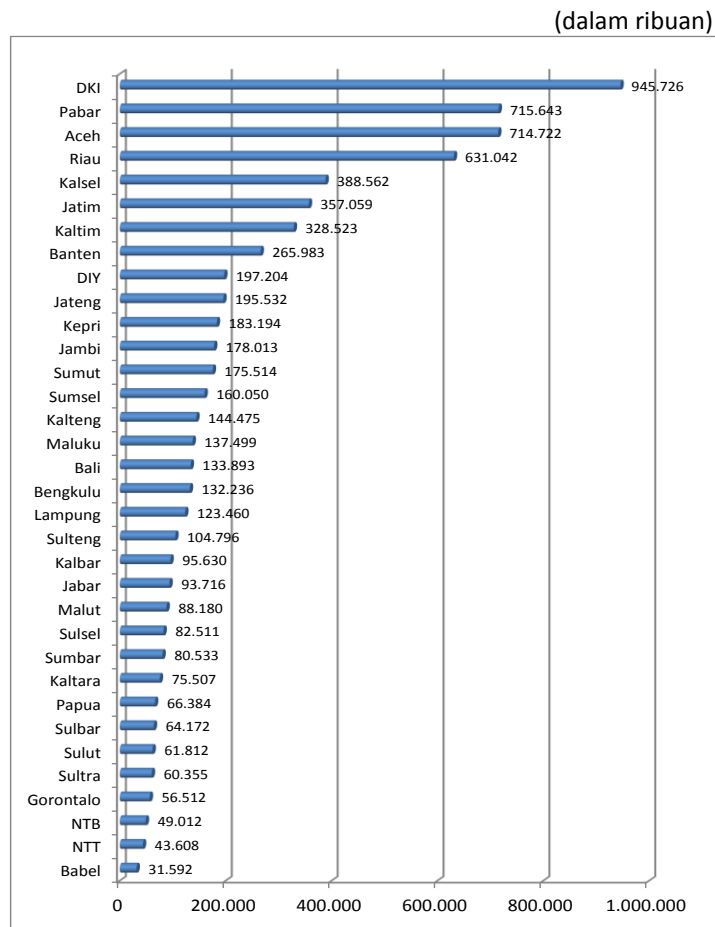
Program 1-5 ditujukan untuk administrasi kantor atau bukan program pendidikan. Program 1, administrasi perkantoran sebesar Rp269.852,5 juta, terbesar terjadi di Aceh sebesar Rp49.039,2 juta dan terkecil terjadi di Bangka Belitung sebesar Rp162,9 juta. Program 2, sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp205.066,5 juta, terbesar terjadi di Sumatera Utara sebesar Rp40.734,5 juta dan terkecil terjadi di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp1.212,8 juta. Program 3, disiplin aparatur sebesar Rp20.165,2 juta, terbesar terjadi di Sulawesi Tengah sebesar Rp6.731,6 juta dan terkecil terjadi di Bengkulu sebesar Rp10,0 juta. Program 4, kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp61.581,7 juta, terbesar terjadi di Kalimantan Selatan sebesar Rp21.472,3 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Utara sebesar Rp20,4 juta. Program 5, kinerja dan keuangan sebesar Rp12.331,1 juta, terbesar terjadi di Jawa Timur sebesar Rp2.465,4 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp5.000,0 ribu.

Tabel 4.4A (lanjutan 1)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Tipe Program	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan Pend	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	DKI Jakarta	Pegawai	74.800.000	3.518.330.000	1.223.040.000	0	0	0	460.800.000	5.501.480.000
		Barang & Jasa	575.173.155	25.554.846.378	10.436.655.983	0	0	0	16.747.751.153	931.785.666.232
		Modal	0	1.998.625.000	0	0	0	0	4.831.276.410	8.438.651.410
		Jumlah	649.973.155	31.071.801.378	11.659.695.983	0	0	0	22.039.827.563	945.725.797.642
2	Jawa Barat	Pegawai	546.800.000	2.089.950.000	2.375.090.000	0	0	0	78.714.000	11.923.342.500
		Barang & Jasa	6.454.213.326	9.114.662.593	18.369.377.850	0	0	0	247.011.000	74.912.574.350
		Modal	1.835.000.000	0	0	0	0	0	0	6.880.310.000
		Jumlah	8.836.013.326	11.204.612.593	20.744.467.850	0	0	0	325.725.000	93.716.226.850
3	Banten	Pegawai	159.630.000	639.730.000	0	0	35.910.000	152.260.000	0	5.701.715.000
		Barang & Jasa	6.350.769.000	32.009.815.000	0	0	1.966.948.000	9.447.176.900	0	231.369.957.100
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	28.911.330.600
		Jumlah	6.510.399.000	32.649.545.000	0	0	2.002.858.000	9.599.436.900	0	265.983.002.700
4	Jawa Tengah	Pegawai	1.868.785.000	4.981.000.000	2.389.545.000	0	0	711.800.000	1.094.300.000	20.244.810.000
		Barang & Jasa	6.871.215.000	27.548.050.000	17.868.859.000	0	0	2.958.800.000	4.616.502.000	153.031.461.000
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	22.255.707.000
		Jumlah	8.740.000.000	32.529.050.000	20.258.404.000	0	0	3.670.600.000	5.710.802.000	195.531.978.000
5	DI Yogyakarta	Pegawai	406.060.000	0	6.382.835.000	2.611.285.000	835.165.000	221.345.000	2.329.493.000	16.643.581.692
		Barang & Jasa	10.261.891.976	0	13.067.592.000	11.779.305.850	2.927.315.000	4.251.455.000	11.373.123.675	123.164.870.909
		Modal	2.267.182.280	0	334.005.000	34.937.330.000	4.508.080.000	NA	5.098.083.325	57.396.035.705
		Jumlah	12.935.134.256	0	19.784.432.000	49.327.920.850	8.270.560.000	4.472.800.000	18.800.700.000	197.204.488.306
6	Jawa Timur	Pegawai	369.645.000	42.057.168.000	0	0	0	76.760.000	0	73.694.383.000
		Barang & Jasa	11.241.001.850	35.462.832.000	0	0	0	2.057.815.000	0	270.043.944.750
		Modal	15.000.000	0	0	0	0	0	0	13.320.794.900
		Jumlah	11.625.646.850	77.520.000.000	0	0	0	2.134.575.000	0	357.059.122.650
7	Aceh	Pegawai	0	55.326.150.000	895.440.000	0	0	1.564.200.000	0	64.724.730.000
		Barang & Jasa	0	102.459.028.660	41.507.013.195	0	0	92.084.600.000	0	510.461.394.739
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	139.536.078.979
		Jumlah	0	157.785.178.660	42.402.453.195	0	0	93.648.800.000	0	714.722.203.718
8	Sumatera Utara	Pegawai	0	2.733.300.000	1.615.460.000	0	0	67.650.000	0	23.259.597.500
		Barang & Jasa	0	13.764.271.475	4.146.029.264	0	0	1.678.165.060	0	117.680.639.066
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	34.573.566.736
		Jumlah	0	16.497.571.475	5.761.489.264	0	0	1.745.815.060	0	175.513.803.302
9	Sumatera Barat	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	3.336.977.410	0	4.697.066.098	0	6.101.067.990	0	2.709.762.160	65.047.548.177
		Modal	86.531.400	0	811.568.875	0	94.260.000	0	0	15.485.681.030
		Jumlah	3.423.508.810	0	5.508.634.973	0	6.195.327.990	0	2.709.762.160	80.533.229.207
10	Riau	Pegawai	1.786.550.000	0	1.263.640.000	0	1.364.770.000	917.900.000	37.900.000	21.883.648.000
		Barang & Jasa	14.719.590.200	0	8.886.710.000	0	10.284.720.250	140.557.857.400	53.962.100.000	499.657.177.310
		Modal	5.568.922.000	0	0	0	1.817.398.375	0	0	109.501.615.775
		Jumlah	22.075.062.200	0	10.150.350.000	0	13.466.888.625	141.475.757.400	54.000.000.000	631.042.441.085
11	Kepulauan Riau	Pegawai	0	14.850.491.000	1.392.138.000	957.784.900	0	330.991.500	146.016.000	21.780.715.900
		Barang & Jasa	0	7.138.215.833	2.581.204.300	58.140.009.687	0	4.778.533.000	1.669.072.500	151.298.401.363
		Modal	0	20.000.000	3.316.950.000	247.357.000	0	188.162.500	98.157.000	10.115.250.637
		Jumlah	0	22.008.706.833	7.290.292.300	59.345.151.587	0	5.297.687.000	1.913.245.500	183.194.367.900

Program 6-16 adalah untuk institusi pendidikan. Program 6, PAUD sebesar Rp249.843,6 juta, terbesar terjadi di Kalimantan Selatan sebesar Rp40.955,1 juta dan terkecil terjadi di Maluku Utara sebesar Rp621,3 juta. Program 7, wajar dikdas sebesar Rp1.716,6 milyar, terbesar terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp874.517,2 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Selatan sebesar Rp387,8 juta. Program 8, dikmen sebesar Rp1.583,2 milyar, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp174.639,4 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Selatan sebesar Rp2.002,3 juta. Program 9, PNF sebesar Rp291.294,2 milyar, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp57.085,8 juta dan terkecil terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp972,4 juta.

Grafik 4.5A
Jumlah Belanja Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2015



Tabel 4.5A (lanjutan 2)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Tipe Program	1. Adm Perkintan	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Ninerja & Kev	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
12	Jambi	Pegawai	327.600.000	11.000.000	0	0	0	151.169.500	371.020.000	4.257.958.000	5.984.000
		Barang & Jasa	3.171.896.050	126.850.000	180.000.000	775.415.315	0	7.764.590.500	3.466.405.000	45.544.664.100	2.835.635.000
		Modal	0	1.497.000.000	0	30.000.000	0	0	7.200.000	56.539.606.100	0
		Jumlah	3.499.496.050	1.634.850.000	180.000.000	805.415.315	0	7.915.760.000	3.844.625.000	106.342.228.200	2.841.619.000
13	Sumatera Selatan	Pegawai	150.000.000	0	0	0	0	1.600.000	77.000.000	49.000.000	13.400.000
		Barang & Jasa	5.516.191.000	153.625.000	0	0	0	3.905.118.000	33.054.040.000	62.956.998.000	18.084.900.000
		Modal	67.800.000	3.821.500.000	0	0	0	15.000.000	2.526.400.000	17.450.836.000	617.000.000
		Jumlah	5.733.991.000	3.975.125.000	0	0	0	3.921.718.000	35.657.440.000	80.456.834.000	18.715.300.000
14	Bangka Belitung	Pegawai	0	7.500.000	7.750.000	0	0	14.300.000	213.000.000	90.900.000	73.300.000
		Barang & Jasa	162.940.000	168.000.000	385.830.000	0	0	1.532.317.000	10.941.340.000	10.314.862.000	3.346.632.000
		Modal	0	1.060.400.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	162.940.000	1.235.900.000	393.580.000	0	0	1.546.617.000	11.154.340.000	10.405.762.000	3.419.932.000
15	Bengkulu	Pegawai	274.150.000	22.780.000	0	4.300.000	21.800.000	4.287.490.000	1.190.960.000	508.820.000	284.580.000
		Barang & Jasa	2.072.884.717	769.714.300	10.000.000	155.700.000	33.200.000	20.079.220.000	25.400.765.000	17.781.180.000	1.378.160.000
		Modal	0	2.483.500.000	0	0	0	0	0	0	291.500.000
		Jumlah	2.347.034.717	3.275.994.300	10.000.000	160.000.000	55.000.000	24.366.650.000	26.591.725.000	18.290.000.000	1.954.240.000
16	Lampung	Pegawai	68.520.000	14.350.000	0	10.658.000	0	51.576.000	196.325.000	1.018.500.000	4.660.580.000
		Barang & Jasa	3.236.353.780	3.616.855.000	0	89.342.000	0	5.255.226.650	28.106.262.200	22.711.349.000	7.293.352.900
		Modal	0	1.121.045.000	0	0	0	0	0	2.231.675.400	0
		Jumlah	3.304.873.780	4.752.250.000	0	100.000.000	0	5.306.802.650	28.302.587.200	25.961.524.400	11.953.932.900
17	Kalimantan Barat	Pegawai	564.870.000	5.300.000	650.000	21.950.000	48.800.000	44.050.000	213.900.000	700.627.600	132.700.000
		Barang & Jasa	2.249.526.700	650.050.000	72.000.000	516.263.000	57.299.850	2.417.640.250	19.340.178.450	26.834.585.516	5.220.038.000
		Modal	20.990.000	1.365.075.750	0	0	0	0	0	222.000.000	0
		Jumlah	2.835.386.700	2.020.425.750	72.650.000	538.213.000	106.099.850	2.461.690.250	19.554.078.450	27.757.213.116	5.352.738.000
18	Kalimantan Tengah	Pegawai	1.259.972.400	8.700.000	0	0	638.090.500	244.600.000	51.800.000	452.100.000	1.311.735.000
		Barang & Jasa	4.876.290.930	134.080.000	425.000.000	341.300.000	1.514.062.656	10.648.585.200	3.583.376.555	17.079.781.000	5.653.250.020
		Modal	1.121.436.100	3.410.920.000	0	0	0	0	30.000.000	0	3.253.996.450
		Jumlah	7.257.699.430	3.553.700.000	425.000.000	341.300.000	2.152.153.156	10.893.185.200	3.665.176.555	17.531.881.000	10.218.981.470
19	Kalimantan Selatan	Pegawai	284.600.000	442.700.000	168.150.000	1.166.250.000	0	613.250.000	2.165.100.000	744.400.000	110.800.000
		Barang & Jasa	1.851.489.500	237.300.000	1.829.524.000	20.306.027.522	0	40.341.812.000	120.370.986.000	63.698.067.000	17.904.034.000
		Modal	0	2.341.500.000	0	0	0	0	0	18.442.200.000	0
		Jumlah	2.136.089.500	3.021.500.000	1.997.674.000	21.472.277.522	0	40.955.062.000	122.536.086.000	82.884.667.000	18.014.834.000
20	Kalimantan Timur	Pegawai	172.800.000	7.750.000	6.500.000	564.000.000	454.520.000	221.600.000	755.500.000	862.450.000	899.550.000
		Barang & Jasa	6.181.045.650	492.500.000	531.470.000	3.200.127.000	0	3.778.400.000	7.855.642.550	53.073.750.000	7.057.600.000
		Modal	0	1.305.500.000	0	0	0	0	1.079.309.700	73.677.082.000	0
		Jumlah	6.353.845.650	1.805.750.000	537.970.000	3.764.127.000	454.520.000	4.000.000.000	9.690.452.250	127.613.282.000	7.957.150.000
21	Kalimantan Utara	Pegawai	1.324.500.000	1.500.000	0	26.750.000	0	465.750.000	2.068.003.200	1.734.000.000	375.100.000
		Barang & Jasa	2.503.679.050	380.000.000	0	1.347.800.000	20.000.000	1.901.735.000	16.150.495.000	12.118.190.000	3.806.650.000
		Modal	862.235.000	1.206.717.600	0	0	0	30.000.000	1.905.000.000	900.000.000	0
		Jumlah	4.690.414.050	1.588.217.600	0	1.374.550.000	20.000.000	2.397.485.000	20.123.498.200	14.752.190.000	4.181.950.000
22	Sulawesi Utara	Pegawai	253.240.000	0	0	0	16.820.000	146.357.700	211.366.000	153.660.000	0
		Barang & Jasa	2.674.290.800	400.799.500	101.750.000	20.408.000	105.014.200	3.463.730.300	3.648.846.000	10.369.269.050	0
		Modal	0	5.807.955.900	0	0	0	0	0	13.052.600.000	0
		Jumlah	2.927.530.800	6.208.754.400	101.750.000	20.408.000	121.834.200	3.610.088.600	3.860.212.000	23.575.529.050	0
23	Gorontalo	Pegawai	367.800.000	435.080.000	0	0	17.160.000	4.081.920.000	295.200.000	40.200.000	4.083.920.000
		Barang & Jasa	1.068.796.000	0	0	624.054.000	216.932.000	1.269.078.100	2.625.595.000	2.850.254.500	3.962.671.802
		Modal	0	4.266.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	1.436.596.000	4.701.080.000	0	624.054.000	234.092.000	5.350.998.100	2.920.795.000	2.890.454.500	8.046.591.802
24	Sulawesi Tengah	Pegawai	3.326.306.000	3.326.306.000	55.250.000	0	4.000.000	605.165.000	1.472.054.000	947.845.000	341.900.000
		Barang dan Jasa	2.935.769.191	2.935.769.191	2.322.366.376	0	698.991.400	4.898.350.035	24.546.021.305	12.052.004.590	13.263.086.753
		Modal	0	0	4.353.993.309	0	0	612.849.523	218.500.000	142.728.765	0
		Jumlah	6.262.075.191	6.262.075.191	6.731.609.685	0	702.991.400	5.503.515.035	26.630.924.828	13.245.349.590	13.747.715.518

Berdasarkan Tabel 4.5A (lanjutan 1, 3, dan 5), program 10, PK dan PLK sebesar Rp143.029,3 juta, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp22.075,1 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Selatan sebesar Rp119,1 juta. Program 11, mutu PTK sebesar Rp586.253,4 juta, terbesar terjadi di Aceh sebesar Rp157.785,2 juta dan terkecil terjadi di Papua Barat sebesar Rp1.341,0 juta. Program 12, manajemen pelayanan pendidikan sebesar Rp411.272,2 juta, terbesar terjadi di Aceh sebesar Rp42.404,5 juta dan terkecil terjadi di Bangka Belitung sebesar Rp582,9 juta. Program 13, kepemudaan dan olahraga sebesar Rp159.267,2 juta, terbesar terjadi di Kepulauan Riau sebesar Rp59.345,2 juta dan terkecil terjadi di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.592,6 juta. Program 14, kebudayaan sebesar Rp77.383,1 milyar, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp13.466,9 juta dan terkecil terjadi di Kalimantan Selatan sebesar Rp913,0 juta. Program 15, PT sebesar Rp418.722,6 juta, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp141.475,8 juta dan terkecil

terjadi di Gorontalo sebesar Rp406,2 juta. Program 16, lainnya sebesar Rp333.294,1 juta, terbesar terjadi di Kalimantan Timur sebesar Rp135.992,2 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp114,5 juta.

Tabel 4.5A (lanjutan 3)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Tipe Program	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan Pend	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
12	Jambi	Pegawai	4.542.885.000	534.400.000	226.924.000	0	0	0	0	10.428.940.500
		Barang & Jasa	7.018.482.000	17.106.908.100	20.548.477.000	0	0	0	0	108.539.323.065
		Modal	741.000.000	0	230.000.000	0	0	0	0	59.044.806.100
		Jumlah	12.302.367.000	17.641.308.100	21.005.401.000	0	0	0	0	178.013.069.665
13	Sumatera Selatan	Pegawai	0	2.500.000	0	0	0	0	0	293.500.000
		Barang & Jasa	622.316.000	4.016.676.000	5.947.400.000	0	0	0	0	134.257.264.000
		Modal	1.000.700.000	0	0	0	0	0	0	25.499.236.000
		Jumlah	1.623.016.000	4.019.176.000	5.947.400.000	0	0	0	0	160.050.000.000
14	Bangka Belitung	Pegawai	0	0	28.150.000	0	0	22.200.000	0	457.100.000
		Barang & Jasa	0	0	554.790.000	0	0	2.668.000.000	0	30.074.711.000
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	1.060.400.000
		Jumlah	0	0	582.940.000	0	0	2.690.200.000	0	31.592.211.000
15	Bengkulu	Pegawai	704.980.000	398.950.000	1.940.505.000	0	382.904.800	0	0	10.022.159.800
		Barang & Jasa	4.470.270.000	4.771.050.000	24.485.045.000	0	1.266.988.200	0	0	102.674.177.217
		Modal	822.250.000	0	15.882.000.000	0	60.000.000	0	0	19.539.250.000
		Jumlah	5.997.500.000	5.170.000.000	42.307.550.000	0	1.709.893.000	0	0	132.235.587.017
16	Lampung	Pegawai	11.400.000	0	542.650.000	0	128.300.000	17.400.000	0	6.720.259.000
		Barang & Jasa	988.600.000	0	27.258.358.190	0	2.673.989.600	6.127.706.000	0	107.357.395.320
		Modal	0	0	5.570.000.000	0	460.000.000	0	0	9.382.720.400
		Jumlah	1.000.000.000	0	33.371.008.190	0	3.262.289.600	6.145.106.000	0	123.460.374.720
17	Kalimantan Barat	Pegawai	0	84.200.000	238.120.000	0	144.850.000	8.900.000	5.450.000	2.214.367.600
		Barang & Jasa	0	3.822.655.750	21.573.687.040	0	7.726.295.500	1.096.047.500	231.582.000	91.807.849.556
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	1.608.065.750
		Jumlah	0	3.906.855.750	21.811.807.040	0	7.871.145.500	1.104.947.500	237.032.000	95.630.282.906
18	Kalimantan Tengah	Pegawai	84.300.000	519.725.000	951.422.200	0	9.400.000	22.800.000	1.854.522.400	7.409.167.500
		Barang & Jasa	4.764.700.000	15.273.643.725	7.195.000.100	0	903.640.820	477.200.000	56.379.730.955	129.249.641.961
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	7.816.352.550
		Jumlah	4.849.000.000	15.793.368.725	8.146.422.300	0	913.040.820	500.000.000	58.234.253.355	144.475.162.011
19	Kalimantan Selatan	Pegawai	0	1.296.200.000	3.875.900.000	0	0	52.500.000	104.350.000	11.024.200.000
		Barang & Jasa	0	42.228.662.000	34.564.892.000	0	0	4.969.963.000	5.673.187.000	353.975.944.022
		Modal	0	0	2.778.565.000	0	0	0	0	23.562.265.000
		Jumlah	0	43.524.862.000	41.219.357.000	0	0	5.022.463.000	5.777.537.000	388.562.409.022
20	Kalimantan Timur	Pegawai	20.000.000	1.665.500.000	0	0	0	0	4.782.188.390	10.412.358.390
		Barang & Jasa	980.000.000	27.688.048.960	0	0	0	0	131.210.000.000	242.048.584.160
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	76.061.891.700
		Jumlah	1.000.000.000	29.353.548.960	0	0	0	0	135.992.188.390	328.522.834.250
21	Kalimantan Utara	Pegawai	48.500.000	0	309.750.000	2.102.100.000	679.050.000	0	0	9.135.003.200
		Barang & Jasa	1.695.630.000	0	3.060.337.600	10.660.569.000	7.672.950.000	0	0	61.318.235.650
		Modal	0	0	150.000.000	0	0	0	0	5.053.952.600
		Jumlah	1.744.130.000	0	3.520.087.600	12.762.669.000	8.352.000.000	0	0	75.507.191.450
22	Sulawesi Utara	Pegawai	0	454.380.000	91.940.000	0	0	0	0	1.327.763.700
		Barang & Jasa	0	11.758.257.200	9.081.027.750	0	0	0	0	41.623.393.400
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	18.860.555.900
		Jumlah	0	12.212.637.200	9.172.967.750	0	0	0	0	61.811.713.000
23	Gorontalo	Pegawai	0	16.835.420.000	1.112.060.000	214.825.000	534.900.000	2.400.000	297.600.000	28.318.485.000
		Barang & Jasa	1.980.550.000	208.778.000	310.860.000	4.839.724.000	2.040.664.000	403.840.000	1.355.324.500	23.757.121.902
		Modal	0	0	0	0	170.500.000	0	0	4.436.500.000
		Jumlah	1.980.550.000	17.044.198.000	1.422.920.000	5.054.549.000	2.746.064.000	406.240.000	1.652.924.500	56.512.106.902
24	Sulawesi Tengah	Pegawai	0	1.094.798.000	0	388.352.800	0	154.380.000	240.000.000	11.982.856.800
		Barang dan Jasa	0	10.409.420.682	0	7.855.755.111	0	2.889.409.800	2.678.550.464	87.485.494.898
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	5.328.071.597
		Jumlah	0	11.503.718.682	0	8.244.107.911	0	3.043.789.800	2.918.550.464	104.796.423.295

Tabel 4.5A (lanjutan 4)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Tipe Program	1. Adm Perkintan	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keu	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
25	Sulawesi Selatan	Pegawai	627.000.000	0	0	288.925.000	425.125.000	11.050.000	23.125.000	65.850.000	86.275.000
		Barang dan Jasa	2.875.499.251	0	0	1.146.665.000	562.460.000	1.658.675.000	364.675.000	1.772.445.000	5.071.000.000
		Modal	275.940.000	0	0	0	0	0	0	164.000.000	7.500.000
		Jumlah	3.778.439.251	0	0	1.435.590.000	987.585.000	1.669.725.000	387.800.000	2.002.295.000	5.164.775.000
26	Sulawesi Barat	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	2.965.049.516	56.350.000	108.310.000	79.000.000	97.335.000	2.608.392.000	3.996.827.200	5.015.440.000	3.638.476.300
		Modal	0	1.779.950.000	0	0	33.500.000	0	0	20.067.996.500	100.000.000
		Jumlah	2.965.049.516	1.836.300.000	108.310.000	79.000.000	130.835.000	2.608.392.000	3.996.827.200	25.083.436.500	3.738.476.300
27	Sulawesi Tenggara	Pegawai	583.260.000	0	0	0	0	10.000.000	90.500.000	319.800.000	235.770.000
		Barang & Jasa	3.187.522.750	930.900.000	31.000.000	320.793.000	5.000.000	1.760.856.000	6.357.382.250	8.067.873.000	2.160.967.900
		Modal	0	9.116.765.750	0	0	0	5.233.095.000	899.987.500	4.814.435.500	0
		Jumlah	3.770.782.750	10.047.665.750	31.000.000	320.793.000	5.000.000	7.003.951.000	7.347.869.750	13.202.108.500	2.396.737.900
28	Maluku	Pegawai	0	0	0	0	5.850.000	6.500.000	0	10.500.000	0
		Barang & Jasa	1.999.100.000	3.510.161.000	0	489.173.000	395.312.000	4.922.020.000	8.877.339.000	75.670.975.000	2.001.515.000
		Modal	0	1.966.732.000	0	0	0	0	0	292.250.000	0
		Jumlah	1.999.100.000	5.476.893.000	0	489.173.000	401.162.000	4.928.520.000	8.877.339.000	75.973.725.000	2.001.515.000
29	Maluku Utara	Pegawai	1.335.500.000	0	0	0	42.000.000	0	107.570.000	3.105.000	46.850.000
		Barang & Jasa	808.300.000	150.000.000	0	0	33.000.000	345.675.000	3.339.254.000	3.273.518.000	572.150.000
		Modal	0	4.346.632.000	0	0	0	275.590.000	3.580.106.000	8.922.092.500	1.039.063.000
		Jumlah	2.143.800.000	4.496.632.000	0	0	75.000.000	621.265.000	7.026.930.000	12.198.715.500	1.658.063.000
30	Bali	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	5.227.323.800	5.027.286.800	0	0	0	4.076.929.500	9.158.456.750	69.043.079.030	2.168.597.500
		Jumlah	5.227.323.800	5.027.286.800	0	0	0	4.076.929.500	9.158.456.750	69.043.079.030	2.168.597.500
31	Nusa Tenggara Barat	Pegawai	179.976.000	0	0	0	91.800.000	135.224.000	118.810.000	281.804.000	0
		Barang & Jasa	1.444.636.700	704.080.600	0	0	144.000.000	6.596.053.000	21.393.235.000	10.572.062.000	0
		Modal	78.500.000	508.750.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
		Jumlah	1.703.112.700	1.212.830.600	0	0	235.800.000	6.731.277.000	21.527.045.000	10.853.866.000	0
32	Nusa Tenggara Timur	Pegawai	1.590.200.000	0	0	0	21.352.000	0	0	0	0
		Barang & Jasa	1.559.183.000	356.615.000	0	0	6.515.000	0	0	0	972.434.000
		Modal	750.000	2.047.622.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	3.150.133.000	2.404.237.000	0	0	27.867.000	0	0	0	972.434.000
33	Papua	Pegawai	1.601.300.000	10.550.000	600.000	0	259.360.000	362.400.000	582.100.000	120.400.000	507.600.000
		Barang & Jasa	3.756.477.000	1.588.700.000	150.000.000	330.000.000	72.248.000	1.352.866.000	3.702.712.000	5.874.160.000	2.565.165.000
		Modal	263.065.000	2.345.600.000	0	0	0	0	3.444.200.000	0	0
		Jumlah	5.620.842.000	3.944.850.000	150.600.000	330.000.000	331.608.000	1.715.266.000	7.729.012.000	5.994.560.000	3.072.765.000
34	Papua Barat	Pegawai	941.050.000	38.700.000	0	28.000.000	50.000.000	0	82.700.000	2.307.025.000	1.368.110.000
		Barang & Jasa	1.928.155.000	533.700.000	125.550.000	440.335.500	40.000.000	0	917.300.000	21.092.975.000	13.126.890.000
		Modal	0	723.066.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	0
		Jumlah	2.869.205.000	1.295.466.000	125.550.000	468.335.500	90.000.000	0	1.000.000.000	26.900.000.000	14.495.000.000
	Jumlah	Pegawai	39.229.106.092	6.463.714.000	590.981.000	6.119.208.000	3.955.034.000	19.634.953.200	29.230.755.200	47.061.749.600	25.117.226.000
		Barang & Jasa	152.951.548.900	60.578.000.541	15.220.194.876	55.107.838.356	8.322.525.406	217.006.065.678	1.653.432.980.246	1.033.647.977.419	257.980.299.974
		Modal	77.671.804.018	138.024.816.596	4.353.993.309	354.700.000	53.500.000	13.202.595.100	33.902.503.697	502.513.475.299	8.196.660.315
		Jumlah	269.852.459.010	205.066.531.137	20.165.169.185	61.581.746.356	12.331.059.406	249.843.613.978	1.716.566.219.143	1.583.223.202.318	291.294.186.289

Tabel 4.5A (lanjutan 5)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
25	Sulawesi Selatan	4.800.000	63.725.000	75.825.000	0	0	6.200.000	186.300.000	1.864.200.000
		114.300.000	8.578.070.000	1.434.890.000	0	0	45.735.400.000	10.366.159.000	79.680.238.251
		0	0	32.000.000	0	0	0	487.586.000	967.026.000
		119.100.000	8.641.795.000	1.542.715.000	0	0	45.741.600.000	11.040.045.000	82.511.464.251
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.355.725.000	3.822.980.000	4.521.989.000	0	5.382.154.234	0	2.405.761.000	37.053.789.250
		2.079.350.000	0	1.918.700.000	0	876.230.000	0	262.000.000	27.117.726.500
		4.435.075.000	3.822.980.000	6.440.689.000	0	6.258.384.234	0	2.667.761.000	64.171.515.750
27	Sulawesi Tenggara	0	0	487.400.000	0	22.000.000	0	0	1.748.730.000
		0	0	5.548.338.977	0	7.707.555.000	0	111.450.000	36.189.638.877
		0	0	2.028.152.320	0	323.980.000	0	0	22.416.416.070
		0	0	8.063.891.297	0	8.053.535.000	0	111.450.000	60.354.784.947
28	Maluku	0	0	2.500.000	0	0	0	0	25.350.000
		1.746.989.000	3.350.919.000	25.645.643.000	5.592.499.000	0	0	0	134.201.645.000
		0	0	341.000.000	672.000.000	0	0	0	3.271.982.000
		1.746.989.000	3.350.919.000	25.989.143.000	6.264.499.000	0	0	0	137.498.977.000
29	Maluku Utara	376.150.000	27.200.000	574.150.000	0	0	0	20.450.000	2.532.975.000
		936.452.000	2.960.518.000	2.933.069.050	0	0	49.328.024.000	2.423.816.950	67.103.777.000
		379.342.000	0	0	0	0	0	0	18.542.825.500
		1.691.944.000	2.987.718.000	3.507.219.050	0	0	49.328.024.000	2.444.266.950	88.179.577.500
30	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		11.603.468.200	1.564.236.600	12.348.378.075	13.675.672.250	0	0	0	133.893.428.505
		11.603.468.200	1.564.236.600	12.348.378.075	13.675.672.250	0	0	0	133.893.428.505
31	Nusa Tenggara Barat	203.206.000	0	417.546.000	546.066.500	0	0	0	1.974.432.500
		627.814.000	0	906.794.000	4.046.572.400	0	0	0	46.435.247.700
		0	0	0	0	0	0	0	602.250.000
		831.020.000	0	1.324.340.000	4.592.638.900	0	0	0	49.011.930.200
32	Nusa Tenggara Timur	495.000.000	1.015.540.000	44.000.000	0	79.050.000	0	0	3.245.142.000
		1.915.930.000	22.093.021.000	3.109.052.000	0	7.730.046.000	0	0	37.742.796.000
		0	0	100.000.000	0	472.000.000	0	0	2.620.372.000
		2.410.930.000	23.108.561.000	3.253.052.000	0	8.281.096.000	0	0	43.608.310.000
33	Papua	2.017.000.000	0	785.150.000	0	0	0	426.500.000	6.672.960.000
		12.881.500.000	0	9.574.285.000	0	0	5.519.000.000	6.291.520.000	53.658.633.000
		0	0	0	0	0	0	0	6.052.865.000
		14.898.500.000	0	10.359.435.000	0	0	5.519.000.000	6.718.020.000	66.384.458.000
34	Papua Barat	0	198.950.000	483.400.000	0	973.450.000	0	0	126.095.956.000
		0	1.142.082.000	5.891.825.000	0	36.202.297.500	0	0	198.533.279.000
		0	0	0	0	0	0	0	391.013.693.000
		0	1.341.032.000	6.375.225.000	0	37.175.747.500	0	0	715.642.928.000
	Jumlah	13.720.491.000	150.387.107.000	29.724.580.200	6.820.414.200	4.216.299.800	5.303.136.500	12.064.583.790	519.263.910.582
		102.910.089.917	432.283.412.356	335.706.268.397	102.914.435.048	64.384.334.594	413.231.290.160	310.452.404.357	5.333.221.815.225
		26.398.745.880	3.582.861.600	45.841.319.270	49.532.359.250	8.782.448.375	188.162.500	10.777.102.735	1.310.167.674.944
		143.029.326.797	586.253.380.956	411.272.167.867	159.267.208.498	77.383.082.769	418.722.589.160	333.294.090.882	7.162.653.400.751

Belanja langsung pada tahun 2016 terdapat 16 jenis program, namun tidak semua provinsi memiliki 16 jenis tersebut. Provinsi DKI Jakarta tidak tersedia datanya mengenai administrasi perkantoran dan disiplin aparatur yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, namun tersedia dana untuk sarana prasarana aparatur, kapasitas SD, kinerja dan keuangan, PAUD, Wajar Dikdas, PNF, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, PT, dan lainnya. Untuk program administrasi perkantoran hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengalokasikan dananya. Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalokasikan dana sarana dan prasarana aparatur, terdapat 18 provinsi tidak mengalokasikan dana disiplin aparatur, terdapat 8 provinsi tidak mengalokasikan dana kapasitas sumber daya aparatur, terdapat 7 provinsi tidak mengalokasikan dana kinerja dan keuangan, terdapat 4 provinsi tidak mengalokasikan dana PAUD, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat, hanya Nusa Tenggara Timur tidak

mengalokasikan dana wajar dikdas, hanya 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur tidak mengalokasikan dana dikmen, terdapat 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat tidak mengalokasikan dana PNF, terdapat 7 provinsi tidak mengalokasikan dana PK dan PLK, terdapat 8 provinsi tidak mengalokasikan dana mutu PTK, terdapat 2 provinsi, yaitu Banten dan Jawa Timur tidak mengalokasikan mutu manajemen pelayanan pendidikan, sedangkan kepemudaan dan olahraga hanya di 9 provinsi, kebudayaan di 16 provinsi, dan program PT di 15 provinsi, dan lainnya di 14 provinsi.

Tabel 4.5B
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Tipe Belanja	1. Administrasi Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keu	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	DKI Jakarta	Pegawai	0	0	0	846.720.000	0	183.200.000	0	0	0
		Barang & Jasa	0	48.367.970.591	0	13.620.000	18.889.000	1.439.898.000	797.734.509.000	0	1.027.450.000
		Modal	0	1.149.321.716.766	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	0	1.197.689.687.357	0	860.340.000	18.889.000	1.623.098.000	797.734.509.000	0	1.027.450.000
2	Jawa Barat	Pegawai	1.455.000.000	96.800.000	0	852.600.000	0	0	1.943.750.000	4.653.650.000	1.002.550.000
		Barang & Jasa	16.097.621.000	4.414.600.000	0	7.044.642.500	7.044.642.500	0	16.661.328.350	40.073.391.000	5.225.077.750
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	58.335.000.000	0
		Jumlah	17.552.621.000	4.511.400.000	0	7.897.242.500	7.044.642.500	0	18.605.078.350	103.062.041.000	6.227.627.750
3	Banten	Pegawai	151.310.000	1.474.480.000	0	0	144.200.000	74.140.000	201.500.000	791.110.000	127.010.000
		Barang & Jasa	2.349.290.000	5.416.520.000	0	0	734.400.000	6.093.897.000	11.870.163.000	81.357.922.500	10.212.990.000
		Modal	0	0	0	1.050.000.000	0	1.759.300.000	0	145.749.167.500	0
		Jumlah	2.500.600.000	6.891.000.000	0	1.050.000.000	878.600.000	7.927.337.000	12.071.663.000	227.898.200.000	10.340.000.000
4	Jawa Tengah	Pegawai	15.948.600.000	9.000.000	0	104.440.000	0	730.600.000	2.626.100.000	3.631.750.000	3.331.600.000
		Barang & Jasa	11.254.892.000	1.426.295.000	0	2.275.560.000	0	3.119.400.000	15.723.900.000	32.846.954.000	8.488.505.000
		Modal	0	5.286.887.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	27.203.492.000	6.722.182.000	0	2.380.000.000	0	3.850.000.000	18.350.000.000	36.478.704.000	11.820.105.000
5	DI Yogyakarta	Pegawai	300.682.400	25.450.000	0	89.400.000	185.150.000	493.500.000	1.160.431.000	1.556.790.000	696.920.000
		Barang & Jasa	7.522.297.600	1.393.310.000	0	558.740.000	446.850.000	4.021.500.000	18.390.155.200	34.506.484.800	4.628.837.000
		Modal	0	6.273.997.000	0	0	0	0	551.331.800	2.344.403.200	0
		Jumlah	7.822.980.000	7.692.757.000	0	648.140.000	632.000.000	4.515.000.000	20.101.918.000	38.407.678.000	5.325.757.000
6	Jawa Timur	Pegawai	8.844.840.000	194.280.000	407.000.000	88.940.000	968.740.000	4.376.670.000	1.240.290.500	2.355.710.000	1.777.540.000
		Barang & Jasa	2.997.728.950	12.651.128.400	2.947.590.000	3.809.787.000	1.294.160.000	4.771.444.500	31.761.341.900	71.493.023.600	8.721.460.000
		Modal	0	1.080.432.000	0	0	20.000.000	0	214.500.000	2.009.882.500	127.000.000
		Jumlah	11.842.568.950	13.925.840.400	3.354.590.000	3.898.727.000	2.282.900.000	9.148.114.500	33.216.132.400	75.858.616.100	10.626.000.000
7	Aceh	Pegawai	5.563.314.100	0	0	2.228.200.000	0	0	310.800.000	716.200.000	127.200.000
		Barang & Jasa	14.844.744.500	1.366.270.000	66.700.000	8.938.523.000	0	35.442.382.114	106.051.333.758	36.573.823.000	16.829.619.136
		Modal	33.625.225.896	16.493.500.000	0	0	0	0	995.500.000	122.467.755.236	0
		Jumlah	54.033.284.496	17.859.770.000	66.700.000	11.166.723.000	0	35.442.382.114	107.357.633.758	159.757.778.236	16.956.819.136
8	Sumatera Utara	Pegawai	4.804.840.000	0	0	0	159.600.000	0	2.921.040.000	1.704.676.000	641.776.000
		Barang & Jasa	6.795.423.184	13.226.956.000	1.300.000.000	350.000.000	13.771.000	0	17.018.056.145	12.923.390.133	2.908.042.008
		Modal	0	11.022.455.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	11.600.263.184	24.249.411.000	1.300.000.000	350.000.000	173.371.000	0	19.939.096.145	14.628.066.133	3.549.818.008
9	Sumatera Barat	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	5.024.263.745	1.647.770.900	262.140.000	279.964.320	1.112.364.557	7.826.504.171	8.996.784.670	15.416.419.510	0
		Modal	166.100.000	515.250.000	0	0	0	0	0	33.063.844.350	0
		Jumlah	5.190.363.745	2.163.020.900	262.140.000	279.964.320	1.112.364.557	7.826.504.171	8.996.784.670	48.480.263.860	0
10	Riau	Pegawai	3.232.970.000	39.330.000	89.640.000	258.000.000	232.800.000	1.551.110.000	12.568.663.550	13.402.890.000	4.680.370.000
		Barang & Jasa	11.941.329.403	3.769.456.883	1.253.400.000	1.284.495.000	267.200.000	20.036.038.492	38.627.731.518	218.143.555.506	72.336.359.245
		Modal	5.373.208.000	23.069.506.709	0	0	0	0	51.000.000	19.806.964.633	0
		Jumlah	20.547.507.403	26.878.293.592	1.343.040.000	1.542.495.000	500.000.000	21.587.148.492	51.247.395.068	251.353.410.139	77.016.729.245
11	Kepulauan Riau	Pegawai	5.054.482.000	34.350.000	0	0	117.327.000	369.921.000	311.539.000	657.695.000	465.738.000
		Barang & Jasa	6.502.708.000	54.000.000	0	0	98.673.000	20.696.134.000	38.733.981.000	102.691.612.989	7.110.952.000
		Modal	552.800.000	4.236.620.200	0	0	34.000.000	0	840.392.000	0	146.549.000
		Jumlah	12.109.990.000	4.324.970.200	0	0	250.000.000	21.066.055.000	39.885.912.000	103.349.307.989	7.723.239.000

Berdasarkan Tabel 4.5B dana keseluruhan program semua provinsi sebesar Rp8.491.708,6 juta, terbesar terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp2.685.635,7 juta dan terkecil terjadi di Sumatera Selatan sebesar Rp43.971,8 juta. Namun, bila dilihat setiap program maka kondisinya berbeda. Program 1, administrasi perkantoran sebesar Rp266.464,8 juta, terbesar terjadi di Aceh sebesar

Rp54.033,3 juta dan terkecil terjadi di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp1.620,8 juta. Program 2, sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp1.405.028,1 juta, terbesar terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp1.197.689,7 juta dan terkecil terjadi di Kalimantan Tengah sebesar Rp255,6 juta. Program 3, disiplin aparatur sebesar Rp9.377,7 juta, terbesar terjadi di Jawa Timur sebesar Rp3.354,6 juta dan terkecil terjadi di Kalimantan Barat sebesar Rp70,7 juta. Program 4, kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp43.550,9 juta, terbesar terjadi di Aceh sebesar Rp11.166,7 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp36,4 juta. Program 5, kinerja dan keuangan sebesar Rp19.837,6 juta, terbesar terjadi di Jawa Barat sebesar Rp7.044,6 juta dan terkecil terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp18,9 juta. Program 6, PAUD sebesar Rp248.223,6 juta, terbesar terjadi di Kalimantan Selatan sebesar Rp69.150,6 juta dan terkecil terjadi di Bali sebesar Rp408,4 juta.

Tabel 4.5B (Lanjutan 1)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Tipe Belanja	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	DKI Jakarta	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	1.029.920.000
		Barang & Jasa	889.258.120	670.458.040.100	4.737.272.301	0	0	0	0	1.524.686.907.112
		Modal	0	10.597.189.900	0	0	0	0	0	1.159.918.906.666
		Jumlah	889.258.120	681.055.230.000	4.737.272.301	0	0	0	0	2.685.635.733.778
2	Jawa Barat	Pegawai	3.577.050.000	0	4.699.343.500	0	0	0	99.600.000	18.380.343.500
		Barang & Jasa	34.590.224.789	0	40.081.763.000	0	2.712.940.000	0	614.007.200	174.560.238.089
		Modal	0	0	2.775.000.000	0	0	0	0	61.110.000.000
		Jumlah	38.167.274.789	0	47.556.106.500	0	2.712.940.000	0	713.607.200	254.050.581.589
3	Banten	Pegawai	60.950.000	298.220.000	0	0	36.250.000	50.360.000	0	3.409.530.000
		Barang & Jasa	2.140.450.000	14.558.580.000	0	0	1.698.750.000	1.289.640.000	0	137.722.602.500
		Modal	3.398.600.000	0	0	0	0	0	0	151.957.067.500
		Jumlah	5.600.000.000	14.856.800.000	0	0	1.735.000.000	1.340.000.000	0	293.089.200.000
4	Jawa Tengah	Pegawai	791.010.000	2.933.040.000	1.529.950.000	0	0	371.000.000	232.400.000	32.239.490.000
		Barang & Jasa	3.123.206.000	17.435.915.000	15.104.965.000	0	0	1.979.000.000	1.358.776.000	114.137.368.000
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	5.286.887.000
		Jumlah	3.914.216.000	20.368.955.000	16.634.915.000	0	0	2.350.000.000	1.591.176.000	151.663.745.000
5	DI Yogyakarta	Pegawai	763.850.000	0	9.498.195.400	5.716.420.000	129.810.000	753.060.000	2.312.767.768	23.682.426.568
		Barang & Jasa	8.952.179.650	0	10.701.814.500	20.942.790.000	3.132.890.000	7.453.280.000	12.938.846.702	135.589.975.452
		Modal	2.660.462.350	0	97.620.000	50.883.340.000	0	7.562.960.000	5.375.185.530	75.749.299.880
		Jumlah	12.376.492.000	0	20.297.629.900	77.542.550.000	3.262.700.000	15.769.300.000	20.626.800.000	235.021.701.900
6	Jawa Timur	Pegawai	104.460.000	42.635.870.000	0	0	0	39.680.000	0	63.034.020.500
		Barang & Jasa	2.996.700.000	24.207.130.000	0	0	0	2.274.123.000	0	169.925.617.350
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	3.451.814.500
		Jumlah	3.101.160.000	66.843.000.000	0	0	0	2.313.803.000	0	236.411.452.350
7	Aceh	Pegawai	0	30.353.890.000	1.074.927.500	0	0	1.324.800.000	0	41.699.331.600
		Barang & Jasa	0	68.376.260.826	23.467.008.461	0	0	84.780.240.000	0	396.736.904.795
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	173.581.981.132
		Jumlah	0	98.730.150.826	24.541.935.961	0	0	86.105.040.000	0	612.018.217.527
8	Sumatera Utara	Pegawai	0	1.916.800.000	594.050.000	0	0	0	0	12.742.782.000
		Barang & Jasa	0	14.125.946.412	2.837.090.075	0	0	0	0	71.498.674.957
		Modal	0	0	60.000.000	0	0	0	0	11.082.455.000
		Jumlah	0	16.042.746.412	3.491.140.075	0	0	0	0	95.323.911.957
9	Sumatera Barat	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	2.908.226.750	0	3.063.346.517	0	6.308.675.710	0	0	52.846.460.850
		Modal	0	0	0	0	169.529.100	0	1.619.544.000	35.534.267.450
		Jumlah	2.908.226.750	0	3.063.346.517	0	6.478.204.810	0	1.619.544.000	88.380.728.300
10	Riau	Pegawai	11.902.468.000	0	7.467.720.000	0	16.228.212.905	1.337.510.000	82.950.000	73.074.634.455
		Barang & Jasa	40.484.177.000	0	19.239.778.991	0	35.357.913.009	101.772.838.486	55.020.146.132	619.534.419.665
		Modal	22.226.920.000	0	198.000.000	0	4.310.390.400	238.180.136	0	75.274.169.878
		Jumlah	74.613.565.000	0	26.905.498.991	0	55.896.516.314	109.348.528.622	55.103.096.132	767.883.223.998
11	Kepulauan Riau	Pegawai	0	15.423.005.659	1.963.868.000	631.129.000	8.602.000	198.834.000	159.001.000	25.395.491.659
		Barang & Jasa	0	8.696.779.500	3.829.448.000	30.868.215.200	376.123.000	8.013.617.000	1.705.999.000	229.378.242.689
		Modal	0	59.800.000	1.768.169.900	166.000.000	20.000.000	187.549.000	0	8.011.880.100
		Jumlah	0	24.179.585.159	7.561.485.900	31.665.344.200	404.725.000	8.400.000.000	1.865.000.000	262.785.614.448

Program 7, wajar dikdas sebesar Rp1.560.346,5 juta, terbesar terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp797.734,5 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Selatan sebesar Rp400,0 juta. Program 8, dikmen sebesar Rp1.941,3 milyar, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp251.353,4 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Selatan sebesar Rp5.569,7 juta. Program 9, PNF sebesar Rp271.314,2 milyar, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp77.016,7 juta dan terkecil terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp1.027,5 juta.

Tabel 4.5B (Lanjutan 2)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Tipe Belanja	1. Administrasi Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keu	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
12	Jambi	Pegawai	696.440.000	19.100.000	0	0	0	84.855.000	221.512.000	9.838.134.000	21.286.000
		Barang & Jasa	5.408.268.700	441.000.000	128.000.000	0	0	2.792.700.000	25.356.005.500	29.141.965.405	3.428.050.000
		Modal	0	1.304.000.000	0	0	0	0	0	39.458.774.000	0
		Jumlah	6.104.708.700	1.764.100.000	128.000.000	0	0	2.877.555.000	25.577.517.500	78.438.873.405	3.449.336.000
13	Sumatera Selatan	Pegawai	91.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	4.215.214.250	256.000.000	0	0	0	389.400.000	6.433.000.000	18.418.518.000	5.885.616.100
		Modal	0	50.000.000	0	0	0	4.000.000	0	1.437.569.000	183.000.000
		Jumlah	4.307.014.250	306.000.000	0	0	0	393.400.000	6.433.000.000	19.856.087.000	6.068.616.100
14	Bangka Belitung	Pegawai	1.357.600.000	216.190.000	7.700.000	0	0	48.110.000	325.300.000	144.060.000	324.040.000
		Barang & Jasa	1.257.680.000	271.960.000	498.042.000	0	0	2.570.268.500	15.044.445.000	16.430.875.000	6.100.386.500
		Modal	0	4.852.220.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	2.615.280.000	5.340.370.000	505.742.000	0	0	2.618.378.500	15.369.745.000	16.574.935.000	6.424.426.500
15	Bengkulu	Pegawai	845.580.000	31.100.000	0	3.000.000	159.600.000	314.100.000	451.100.000	1.024.300.000	308.600.000
		Barang & Jasa	2.335.568.250	1.436.447.000	0	117.500.000	206.150.000	3.978.785.000	7.148.330.000	7.873.839.000	2.369.944.800
		Modal	0	3.321.235.000	0	0	0	0	0	52.914.206.950	749.100.000
		Jumlah	3.181.148.250	4.788.782.000	0	120.500.000	365.750.000	4.292.885.000	7.599.430.000	61.812.345.950	3.427.644.800
16	Lampung	Pegawai	1.057.046.000	32.700.000	0	0	0	29.100.000	305.494.000	1.080.740.000	1.188.180.000
		Barang & Jasa	2.235.646.000	8.265.845.000	0	0	0	7.208.421.300	15.514.079.271	64.484.339.579	3.418.190.000
		Modal	0	1.621.076.000	0	0	0	0	0	688.880.000	83.630.000
		Jumlah	3.292.692.000	9.919.621.000	0	0	0	7.237.521.300	15.819.573.271	66.253.959.579	4.690.000.000
17	Kalimantan Barat	Pegawai	688.110.000	8.600.000	650.000	16.900.000	67.400.000	38.050.000	181.250.000	215.500.000	114.350.000
		Barang & Jasa	3.189.868.620	506.800.000	70.000.000	353.091.500	235.582.000	2.341.362.000	27.783.691.300	34.504.886.450	5.339.803.000
		Modal	0	1.503.656.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	3.877.978.620	2.019.056.000	70.650.000	369.991.500	302.982.000	2.379.412.000	27.964.941.300	34.720.386.450	5.454.153.000
18	Kalimantan Tengah	Pegawai	2.018.240.000	5.600.000	30.000.000	567.800.000	82.950.000	41.400.000	170.300.000	949.985.000	0
		Barang & Jasa	3.754.972.800	58.200.000	364.400.000	30.000.000	1.042.487.200	2.537.050.000	1.858.600.000	14.807.091.000	2.743.075.000
		Modal	150.000.000	191.800.000	0	0	0	0	0	0	343.440.000
		Jumlah	5.923.212.800	255.600.000	364.400.000	60.000.000	1.610.287.200	2.620.000.000	1.900.000.000	14.977.391.000	4.036.500.000
19	Kalimantan Selatan	Pegawai	326.280.000	0	0	35.700.000	351.700.000	979.300.000	3.099.000.000	737.650.000	0
		Barang & Jasa	3.212.383.602	598.680.000	243.000.000	714.300.000	148.300.000	68.171.331.498	172.551.734.000	82.340.226.500	0
		Modal	0	1.385.400.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	3.538.663.602	1.984.080.000	243.000.000	750.000.000	500.000.000	69.150.631.498	175.650.734.000	83.077.876.500	0
20	Kalimantan Timur	Pegawai	62.400.000	0	6.500.000	784.000.000	328.520.000	123.000.000	729.750.000	951.300.000	783.250.000
		Barang & Jasa	9.084.531.610	660.000.000	540.470.000	5.465.032.000	0	4.077.000.000	5.570.250.000	82.240.760.000	9.973.855.000
		Modal	0	3.669.400.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	9.146.931.610	4.329.400.000	546.970.000	6.249.032.000	328.520.000	4.200.000.000	6.300.000.000	83.192.060.000	10.757.105.000
21	Kalimantan Utara	Pegawai	1.581.800.000	0	0	0	0	68.900.000	207.500.000	137.000.000	82.650.000
		Barang & Jasa	2.674.900.000	320.000.000	0	150.000.000	25.000.000	1.356.100.000	16.889.215.000	10.302.500.000	1.792.350.000
		Modal	508.900.000	909.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	4.765.600.000	1.229.000.000	0	150.000.000	25.000.000	1.425.000.000	17.096.715.000	10.439.500.000	1.875.000.000
22	Sulawesi Utara	Pegawai	309.120.000	1.068.671.720	136.500.000	84.000.000	50.765.000	83.500.000	134.000.000	205.550.000	0
		Barang & Jasa	2.901.231.600	0	0	0	71.755.800	4.844.082.300	9.853.782.200	7.899.262.300	0
		Modal	0	2.194.153.680	25.000.000	0	0	0	0	9.147.000.000	0
		Jumlah	3.210.351.600	3.262.825.400	161.500.000	84.000.000	122.520.800	4.927.582.300	9.987.782.200	17.251.812.300	0

Berdasarkan Tabel 4.5B (lanjutan 1, 3, dan 5), program 10, PK dan PLK sebesar Rp334.600,0 juta, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp74.613,6 juta dan terkecil terjadi di Sumatera Selatan sebesar Rp372,0 juta. Program 11, mutu PTK sebesar Rp1.062.435,4 juta, terbesar terjadi di Aceh sebesar Rp98.730,2 juta dan terkecil terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp706,0 juta. Program 12, manajemen

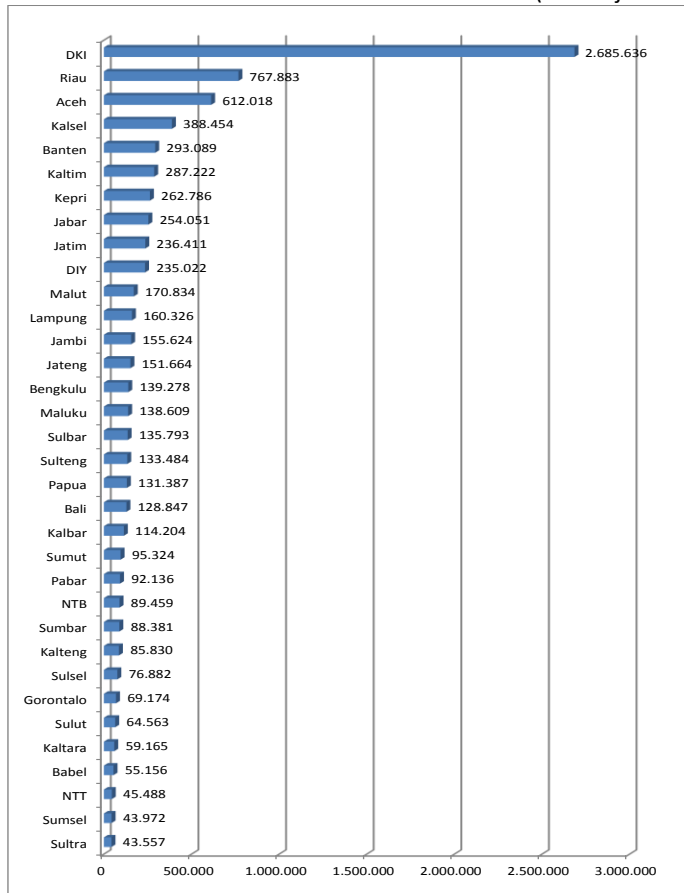
pelayanan pendidikan sebesar Rp388.454,7 juta, terbesar terjadi di Jawa Barat sebesar Rp47.556,1 juta dan terkecil terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp947,2 juta. Program 13, kepemudaan dan olahraga sebesar Rp188.331,0 juta, terbesar terjadi di DI Yogyakarta sebesar Rp77.542,6 juta dan terkecil terjadi di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3.447,8 juta. Program 14, kebudayaan sebesar Rp161.926,7 milyar, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp55.896,5 juta dan terkecil terjadi di Kepulauan Riau sebesar Rp404,7 juta. Program 15, PT sebesar Rp323.544,2 juta, terbesar terjadi di Riau sebesar Rp103.348,5 juta dan terkecil terjadi di Kalimantan Tengah sebesar Rp475,0 juta. Program 16, lainnya sebesar Rp266.990,4 juta, terbesar terjadi di Kalimantan Timur sebesar Rp115.192,2 juta dan terkecil terjadi di Jawa Barat sebesar Rp713,6 juta.

Tabel 4.5B (Lanjutan 3)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Tipe Belanja	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
12	Jambi	Pegawai	453.410.000	497.644.000	452.953.000	0	0	0	0	12.285.334.000
		Barang & Jasa	2.614.350.000	9.411.990.820	23.703.929.015	0	0	0	0	102.426.259.440
		Modal	0	0	150.000.000	0	0	0	0	40.912.774.000
		Jumlah	3.067.760.000	9.909.634.820	24.306.882.015	0	0	0	0	155.624.367.440
13	Sumatera Selatan	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	91.800.000
		Barang & Jasa	271.000.000	2.152.340.000	4.083.380.000	0	0	0	0	42.104.468.350
		Modal	101.000.000	0	0	0	0	0	0	1.775.569.000
		Jumlah	372.000.000	2.152.340.000	4.083.380.000	0	0	0	0	43.971.837.350
14	Bangka Belitung	Pegawai	0	0	69.190.000	0	0	36.060.000	0	2.528.250.000
		Barang & Jasa	0	0	1.340.466.000	0	0	4.261.420.000	0	47.775.543.000
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	4.852.220.000
		Jumlah	0	0	1.409.656.000	0	0	4.297.480.000	0	55.156.013.000
15	Bengkulu	Pegawai	2.015.670.000	238.500.000	336.265.000	1.029.500.000	0	0	0	6.757.315.000
		Barang & Jasa	4.956.915.000	2.088.260.000	2.904.592.000	21.420.553.500	0	0	0	56.836.884.550
		Modal	18.648.520.000	0	51.000.000	0	0	0	0	75.684.061.950
		Jumlah	25.621.105.000	2.326.760.000	3.291.857.000	22.450.053.500	0	0	0	139.278.261.500
16	Lampung	Pegawai	40.000.000	24.600.000	257.228.000	1.036.200.000	132.540.000	15.600.000	124.324.000	5.323.752.000
		Barang & Jasa	2.407.000.000	2.275.400.000	12.648.724.000	1.767.806.000	6.509.120.000	8.424.400.000	5.331.676.000	140.490.647.150
		Modal	0	0	5.553.700.650	5.747.974.200	472.340.000	0	344.000.000	14.511.600.850
		Jumlah	2.447.000.000	2.300.000.000	18.459.652.650	8.551.980.200	7.114.000.000	8.440.000.000	5.800.000.000	160.326.000.000
17	Kalimantan Barat	Pegawai	0	103.100.000	348.670.000	0	144.400.000	12.750.000	0	1.939.730.000
		Barang & Jasa	0	5.472.992.750	21.150.268.800	0	7.535.685.500	2.276.224.000	0	110.760.255.920
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	1.503.656.000
		Jumlah	0	5.576.092.750	21.498.938.800	0	7.680.085.500	2.288.974.000	0	114.203.641.920
18	Kalimantan Tengah	Pegawai	96.500.000	508.600.000	873.824.000	0	0	19.100.000	1.497.300.000	6.861.599.000
		Barang & Jasa	3.534.500.000	10.098.400.000	4.371.916.000	0	0	455.900.000	32.626.569.000	78.283.161.000
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	685.240.000
		Jumlah	3.631.000.000	10.607.000.000	5.245.740.000	0	0	475.000.000	34.123.869.000	85.830.000.000
19	Kalimantan Selatan	Pegawai	887.600.000	0	1.700.750.000	0	0	0	0	8.117.980.000
		Barang & Jasa	14.661.240.000	0	29.618.024.400	0	0	0	0	372.259.220.000
		Modal	6.278.000.000	0	413.400.000	0	0	0	0	8.076.800.000
		Jumlah	21.826.840.000	0	31.732.174.400	0	0	0	0	388.454.000.000
20	Kalimantan Timur	Pegawai	148.000.000	776.000.000	957.200.000	0	0	0	4.125.588.390	9.775.508.390
		Barang & Jasa	14.746.375.000	21.474.580.800	6.296.622.200	0	0	0	111.066.600.000	271.196.076.610
		Modal	2.581.415.000	0	0	0	0	0	0	6.250.815.000
		Jumlah	17.475.790.000	22.250.580.800	7.253.822.200	0	0	0	115.192.188.390	287.222.400.000
21	Kalimantan Utara	Pegawai	75.000.000	7.500.000	279.500.000	641.500.000	151.700.000	0	0	3.233.050.000
		Barang & Jasa	2.508.500.000	792.500.000	5.039.200.000	6.188.535.000	5.725.250.000	0	0	53.764.050.000
		Modal	0	0	0	0	750.000.000	0	0	2.167.900.000
		Jumlah	2.583.500.000	800.000.000	5.318.700.000	6.830.035.000	6.626.950.000	0	0	59.165.000.000
22	Sulawesi Utara	Pegawai	0	206.650.000	188.300.000	0	0	0	0	2.467.056.720
		Barang & Jasa	0	7.496.337.900	17.663.703.800	0	0	0	0	50.730.155.900
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	11.366.153.680
		Jumlah	0	7.702.987.900	17.852.003.800	0	0	0	0	64.563.366.300

Grafik 4.5B
Jumlah Belanja Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2016

(dalam jutaan)



Tabel 4.5B (Lanjutan 4)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Tipe Belanja	1. Administrasi Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Kew	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
23	Gorontalo	Pegawai	434.880.000	0	0	0	36.960.000	4.316.185.000	36.960.000	9.660.370.000	4.118.000.000
		Barang & Jasa	2.491.597.719	763.840.000	0	1.071.900.000	113.040.000	1.505.958.000	1.866.733.500	2.777.424.000	3.463.445.500
		Modal	0	4.636.250.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	2.926.477.719	5.400.090.000	0	1.071.900.000	150.000.000	5.822.143.000	1.903.693.500	12.437.794.000	7.581.445.500
24	Sulawesi Tengah	Pegawai	3.311.901.000	51.600.000	0	25.700.000	254.048.000	760.200.000	1.219.204.000	1.132.634.000	380.700.000
		Barang dan Jasa	2.590.742.280	2.386.557.567	0	783.873.725	402.545.400	7.024.141.037	30.729.530.558	35.890.073.859	12.654.844.466
		Modal	0	5.533.553.886	0	0	0	40.000.000	22.500.000	0	0
		Jumlah	5.902.643.280	7.971.711.453	0	809.573.725	656.593.400	7.824.341.037	31.971.234.558	37.022.707.859	13.035.544.466
25	Sulawesi Selatan	Pegawai	554.759.000	0	0	824.830.000	226.700.000	22.250.000	58.600.000	102.375.000	114.380.000
		Barang & Jasa	3.042.700.457	0	0	897.350.000	682.840.001	1.226.065.000	341.400.000	5.436.245.730	5.978.710.000
		Modal	462.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	31.100.000	0
		Jumlah	4.059.459.457	0	0	1.722.180.000	924.540.001	1.248.315.000	400.000.000	5.569.720.730	6.093.090.000
26	Sulawesi Barat	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	3.527.090.000	201.350.000	314.090.000	145.400.000	584.690.000	1.011.195.000	4.892.560.000	7.467.030.000	7.978.356.800
		Modal	60.000.000	1.584.600.000	0	0	0	0	150.000.000	79.673.652.200	120.350.000
		Jumlah	3.587.090.000	1.785.950.000	314.090.000	145.400.000	584.690.000	1.011.195.000	5.042.560.000	87.140.682.200	8.098.706.800
27	Sulawesi Tenggara	Pegawai	999.700.000	0	0	0	0	0	0	210.600.000	169.200.000
		Barang & Jasa	5.729.324.950	792.618.000	199.750.000	36.400.000	25.000.000	87.330.000	2.163.761.000	6.282.461.000	1.162.422.500
		Modal	0	4.402.994.800	0	0	0	328.083.500	0	1.913.949.300	0
		Jumlah	6.729.024.950	5.195.612.800	199.750.000	36.400.000	25.000.000	415.413.500	2.163.761.000	8.407.010.300	1.331.622.500
28	Maluku	Pegawai	0	1.800.000.000	0	0	0	0	11.782.000	52.450.000	0
		Barang & Jasa	1.923.780.000	239.745.200	0	727.179.000	184.900.000	1.608.149.000	11.142.887.000	70.557.623.000	2.685.737.000
		Modal	0	2.972.454.800	0	0	0	1.963.931.000	0	7.155.894.000	0
		Jumlah	1.923.780.000	3.214.000.000	0	727.179.000	184.900.000	3.572.080.000	11.154.669.000	77.765.967.000	2.685.737.000
29	Maluku Utara	Pegawai	1.610.000.000	0	0	0	88.600.000	427.500.000	265.950.000	191.150.000	74.250.000
		Barang & Jasa	1.154.000.000	0	0	0	157.400.000	2.435.900.000	13.253.780.000	31.292.222.500	2.347.750.000
		Modal	0	12.906.105.000	0	0	0	675.180.000	0	26.542.174.500	0
		Jumlah	2.764.000.000	12.906.105.000	0	0	246.000.000	3.538.580.000	13.519.730.000	58.025.547.000	2.422.000.000
30	Bali	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	4.080.020.980	11.138.053.520	0	0	0	408.431.000	6.779.526.750	26.824.595.050	1.396.414.000
		Jumlah	4.080.020.980	11.138.053.520	0	0	0	408.431.000	6.779.526.750	26.824.595.050	1.396.414.000
31	NTB	Pegawai	244.768.000	0	0	0	130.800.000	161.992.000	280.732.000	620.709.000	0
		Barang & Jasa	1.376.085.490	306.750.000	0	40.200.000	90.000.000	1.756.750.500	33.977.500.000	21.074.195.000	0
		Modal	0	1.046.700.000	0	0	0	0	15.000.000	21.694.904.000	0
		Jumlah	1.620.853.490	1.353.450.000	0	40.200.000	220.800.000	1.918.742.500	34.273.232.000	43.389.808.000	0
32	NTT	Pegawai	2.057.400.000	5.050.000	0	0	30.000.000	0	0	0	20.000.000
		Barang & Jasa	1.791.126.400	255.915.000	0	0	14.215.000	0	0	0	1.758.826.950
		Modal	2.000.000	940.046.000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	3.850.526.400	1.201.011.000	0	0	44.215.000	0	0	0	1.778.826.950
33	Papua	Pegawai	1.035.600.000	0	0	0	450.000.000	414.400.000	2.066.900.000	520.800.000	737.300.000
		Barang & Jasa	3.789.950.000	238.000.000	391.600.000	672.600.000	112.998.000	6.941.991.500	12.865.620.000	8.008.744.000	14.862.211.005
		Modal	959.000.000	5.221.500.000	0	0	0	0	0	3.400.000.000	0
		Jumlah	5.784.550.000	5.459.500.000	391.600.000	672.600.000	562.998.000	7.356.391.500	14.932.520.000	11.929.544.000	15.599.511.005
34	Papua Barat	Pegawai	941.050.000	38.700.000	0	28.000.000	50.000.000	0	82.700.000	2.307.025.000	1.368.110.000
		Barang & Jasa	1.928.155.000	533.700.000	125.550.000	440.335.500	40.000.000	0	917.300.000	21.092.975.000	13.126.890.000
		Modal	0	723.066.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	0
		Jumlah	2.869.205.000	1.295.466.000	125.550.000	468.335.500	90.000.000	0	1.000.000.000	26.900.000.000	14.495.000.000
		Jumlah	65.580.512.500	3.352.801.720	647.990.000	6.300.430.000	4.600.710.000	15.733.533.000	33.003.248.050	58.773.118.000	23.604.985.000
		Barang & Jasa	154.945.116.110	112.267.685.541	8.704.732.000	36.200.493.545	15.167.853.458	227.311.178.912	1.517.723.488.870	1.224.349.834.361	244.559.756.760
		Modal	45.939.254.876	1.289.407.629.361	25.000.000	1.050.000.000	69.000.000	5.178.925.500	9.619.750.550	658.159.716.419	3.149.483.000
		Jumlah	266.464.883.486	1.405.028.116.622	9.377.722.000	43.550.923.545	19.837.563.458	248.223.637.412	1.560.346.487.470	1.941.282.668.780	271.314.224.760

Tabel 4.5B (Lanjutan 5)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Tipe Belanja	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
23	Gorontalo	Pegawai	180.930.000	3.000.000	1.028.400.000	139.090.000	242.740.000	0	351.840.000	20.549.355.000
		Barang & Jasa	368.248.000	3.498.934.000	406.520.000	18.859.958.225	2.379.440.000	0	2.213.945.520	41.780.984.464
		Modal	290.000.000	0	0	1.917.125.000	0	0	0	6.843.375.000
		Jumlah	839.178.000	3.501.934.000	1.434.920.000	20.916.173.225	2.622.180.000	0	2.565.785.520	69.173.714.464
24	Sulawesi Tengah	Pegawai	1.133.010.000	0	457.250.000	0	515.205.000	0	0	9.241.452.000
		Barang dan Jasa	10.442.709.149	0	8.874.574.093	0	5.620.612.860	0	0	117.400.204.994
		Modal	1.246.312.474	0	0	0	0	0	0	6.842.366.360
		Jumlah	12.822.031.623	0	9.331.824.093	0	6.135.817.860	0	0	133.484.023.354
25	Sulawesi Selatan	Pegawai	73.750.000	145.300.000	169.810.000	0	18.225.000	162.680.000	124.230.000	2.597.889.000
		Barang & Jasa	964.360.000	11.991.570.000	6.042.120.000	0	914.740.000	26.010.220.000	8.512.434.600	72.040.755.788
		Modal	100.000.000	0	150.650.000	0	0	0	1.484.654.670	2.743.404.670
		Jumlah	1.138.110.000	12.136.870.000	6.362.580.000	0	932.965.000	26.172.900.000	10.121.319.270	76.882.049.458
26	Sulawesi Barat	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	2.733.840.000	2.707.465.000	5.963.156.000	0	5.579.380.000	0	3.541.888.000	46.647.490.800
		Modal	1.994.000.000	0	1.450.000.000	0	3.860.160.000	0	252.700.000	89.145.462.200
		Jumlah	4.727.840.000	2.707.465.000	7.413.156.000	0	9.439.540.000	0	3.794.588.000	135.792.953.000
27	Sulawesi Tenggara	Pegawai	0	0	308.800.000	0	0	0	301.920.000	1.990.220.000
		Barang & Jasa	310.330.000	706.042.000	4.561.646.000	0	0	1.211.356.000	11.398.228.550	34.666.670.000
		Modal	237.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	6.900.027.600
		Jumlah	547.330.000	706.042.000	4.870.446.000	0	0	1.229.356.000	11.700.148.550	43.556.917.600
28	Maluku	Pegawai	11.198.000	0	127.000.000	0	0	0	0	204.230.000
		Barang & Jasa	2.913.735.000	3.300.000.000	25.331.026.000	0	5.631.389.000	0	0	126.246.150.200
		Modal	0	0	66.000.000	0	0	0	0	12.158.279.800
		Jumlah	2.924.933.000	3.300.000.000	25.324.026.000	0	5.631.389.000	0	0	138.608.660.000
29	Maluku Utara	Pegawai	255.000.000	658.400.000	590.150.000	0	0	20.430.000.000	49.600.000	24.640.600.000
		Barang & Jasa	2.146.712.000	5.401.600.000	6.256.259.000	0	0	32.279.400.000	2.123.702.000	98.848.725.500
		Modal	7.071.670.000	0	150.000.000	0	0	0	0	47.345.129.500
		Jumlah	9.473.382.000	6.060.000.000	6.996.409.000	0	0	52.709.400.000	2.173.302.000	170.834.455.000
30	Bali	Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
		Barang & Jasa	42.591.433.100	18.475.443.800	7.592.421.900	9.561.071.900	0	0	0	128.847.412.000
		Jumlah	42.591.433.100	18.475.443.800	7.592.421.900	9.561.071.900	0	0	0	128.847.412.000
31	NTB	Pegawai	221.310.000	0	356.556.000	332.721.000	0	0	0	2.349.588.000
		Barang & Jasa	516.160.000	0	2.100.474.200	3.115.077.000	0	0	0	64.353.192.190
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	22.756.604.000
		Jumlah	737.470.000	0	2.457.030.200	3.447.798.000	0	0	0	89.459.384.190
32	NTT	Pegawai	609.000.000	3.554.652.000	0	70.900.000	0	0	0	6.347.002.000
		Barang & Jasa	3.186.225.400	22.917.624.250	947.242.000	7.038.679.300	0	0	0	37.909.854.300
		Modal	0	32.480.000	0	256.400.000	0	0	0	1.230.926.000
		Jumlah	3.795.225.400	26.504.756.250	947.242.000	7.365.979.300	0	0	0	45.487.782.300
33	Papua	Pegawai	3.208.700.000	316.100.000	1.230.950.000	0	632.150.000	5.000.000	0	10.617.900.000
		Barang & Jasa	25.893.207.000	1.683.900.000	11.962.662.995	0	7.360.250.000	8.299.415.000	0	103.083.149.500
		Modal	7.306.000.000	0	713.650.000	0	85.500.000	0	0	17.685.650.000
		Jumlah	36.407.907.000	2.000.000.000	13.907.262.995	0	8.077.900.000	8.304.415.000	0	131.386.699.500
34	Papua Barat	Pegawai	0	198.950.000	483.400.000	0	973.450.000	0	0	6.471.385.000
		Barang & Jasa	0	1.142.082.000	5.891.825.000	0	36.202.297.500	0	0	81.441.110.000
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	4.223.066.000
		Jumlah	0	1.341.032.000	6.375.225.000	0	37.175.747.500	0	0	92.135.561.000
	Jumlah	Pegawai	26.608.866.000	100.799.821.659	37.044.250.400	9.597.460.000	19.213.284.905	24.756.434.000	9.461.521.158	439.078.966.392
		Barang & Jasa	191.259.828.858	932.470.671.358	330.220.818.348	110.201.614.225	133.045.456.579	290.781.073.486	248.452.818.704	5.777.662.421.115
		Modal	116.731.332.924	29.164.913.700	21.189.612.450	68.531.911.100	9.667.919.500	8.006.689.136	9.076.084.200	2.274.967.222.716
		Jumlah	334.600.027.782	1.062.435.406.717	388.454.681.198	188.330.985.325	161.926.660.984	323.544.196.622	266.990.424.062	8.491.708.610.223

b. Tipe Belanja

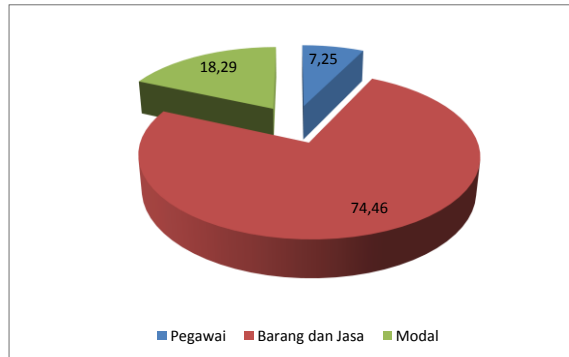
Berdasarkan Tabel 4.6A, pada tahun 2015 belanja pegawai sebesar Rp519.263,9 juta atau 7,25% yang terkecil dibandingkan dengan barang dan jasa sebesar Rp5.333.221,8 juta atau 74,46% yang terbesar, sedangkan sisanya adalah modal sebesar Rp1.310.167,7 juta atau 16,29% dari belanja langsung sebesar Rp7.162.653,4 juta. Bila dibandingkan antarprovinsi maka belanja pegawai yang terbesar Provinsi Gorontalo sebesar Rp28.318,5 juta atau 50,11% dan terkecil Provinsi Maluku sebesar Rp25,4 juta atau 0,02%, sedangkan 3 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Bali tidak tersedia belanja pegawai.

Tabel 4.6A
Jumlah Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Pegawai		Barang dan Jasa		Modal		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	DKI Jakarta	5.501.480.000	0,58	931.785.666.232	98,53	8.438.651.410	0,89	945.725.797.642
2	Jawa Barat	11.923.342.500	12,72	74.912.574.350	79,94	6.880.310.000	7,34	93.716.226.850
3	Banten	5.701.715.000	2,14	231.369.957.100	86,99	28.911.330.600	10,87	265.983.002.700
4	Jawa Tengah	20.244.810.000	10,35	153.031.461.000	78,26	22.255.707.000	11,38	195.531.978.000
5	DI Yogyakarta	16.643.581.692	8,44	123.164.870.909	62,46	57.396.035.705	29,10	197.204.488.306
6	Jawa Timur	73.694.383.000	20,64	270.043.944.750	75,63	13.320.794.900	3,73	357.059.122.650
7	Aceh	64.724.730.000	9,06	510.461.394.739	71,42	139.536.078.979	19,52	714.722.203.718
8	Sumatera Utara	23.259.597.500	13,25	117.680.639.066	67,05	34.573.566.736	19,70	175.513.803.302
9	Sumatera Barat	0	0,00	65.047.548.177	80,77	15.485.681.030	19,23	80.533.229.207
10	Riau	21.883.648.000	3,47	499.657.177.310	79,18	109.501.615.775	17,35	631.042.441.085
11	Kepulauan Riau	21.780.715.900	11,89	151.298.401.363	82,59	10.115.250.637	5,52	183.194.367.900
12	Jambi	10.428.940.500	5,86	108.539.323.065	60,97	59.044.806.100	33,17	178.013.069.665
13	Sumatera Selatan	293.500.000	0,18	134.257.264.000	83,88	25.499.236.000	15,93	160.050.000.000
14	Bangka Belitung	457.100.000	1,45	30.074.711.000	95,20	1.060.400.000	3,36	31.592.211.000
15	Bengkulu	10.022.159.800	7,58	102.674.177.217	77,64	19.539.250.000	14,78	132.235.587.017
16	Lampung	6.720.259.000	5,44	107.357.395.320	86,96	9.382.720.400	7,60	123.460.374.720
17	Kalimantan Barat	2.214.367.600	2,32	91.807.849.556	96,00	1.608.065.750	1,68	95.630.282.906
18	Kalimantan Tengah	7.409.167.500	5,13	129.249.641.961	89,46	7.816.352.550	5,41	144.475.162.011
19	Kalimantan Selatan	11.024.200.000	2,84	353.975.944.022	91,10	23.562.265.000	6,06	388.562.409.022
20	Kalimantan Timur	10.412.358.390	3,17	242.048.584.160	73,68	76.061.891.700	23,15	328.522.834.250
21	Kalimantan Utara	9.135.003.200	12,10	61.318.235.650	81,21	5.053.952.600	6,69	75.507.191.450
22	Sulawesi Utara	1.327.763.700	2,15	41.623.393.400	67,34	18.860.555.900	30,51	61.811.713.000
23	Gorontalo	28.318.485.000	50,11	23.757.121.902	42,04	4.436.500.000	7,85	56.512.106.902
24	Sulawesi Tengah	11.982.856.800	11,43	87.485.494.898	83,48	5.328.071.597	5,08	104.796.423.295
25	Sulawesi Selatan	1.864.200.000	2,26	79.680.238.251	96,57	967.026.000	1,17	82.511.464.251
26	Sulawesi Barat	0	0,00	37.053.789.250	57,74	27.117.726.500	42,26	64.171.515.750
27	Sulawesi Tenggara	1.748.730.000	2,90	36.189.638.877	59,96	22.416.416.070	37,14	60.354.784.947
28	Maluku	25.350.000	0,02	134.201.645.000	97,60	3.271.982.000	2,38	137.498.977.000
29	Maluku Utara	2.532.975.000	2,87	67.103.777.000	76,10	18.542.825.500	21,03	88.179.577.500
30	Bali	0	0,00	0	0,00	133.893.428.505	100,00	133.893.428.505
31	Nusa Tenggara Barat	1.974.432.500	4,03	46.435.247.700	94,74	602.250.000	1,23	49.011.930.200
32	Nusa Tenggara Timur	3.245.142.000	7,44	37.742.796.000	86,55	2.620.372.000	6,01	43.608.310.000
33	Papua	6.672.960.000	10,05	53.658.633.000	80,83	6.052.865.000	9,12	66.384.458.000
34	Papua Barat	126.095.956.000	17,62	198.533.279.000	27,74	391.013.693.000	54,64	715.642.928.000
	Jumlah	519.263.910.582	7,25	5.333.221.815.225	74,46	1.310.167.674.944	18,29	7.162.653.400.751

Belanja barang dan jasa yang terbesar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp931.785,7 juta atau 98,53% dan terkecil Provinsi Gorontalo sebesar Rp23.757,1 juta atau 42,04%, sedangkan Provinsi Bali tidak tersedia belanja barang dan jasa. Belanja modal yang terbesar Provinsi Papua Barat sebesar Rp391.013,7 juta atau 54,64% dan terkecil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.438,7 juta atau 0,89%, sedangkan Provinsi Bali 100% adalah belanja modal.

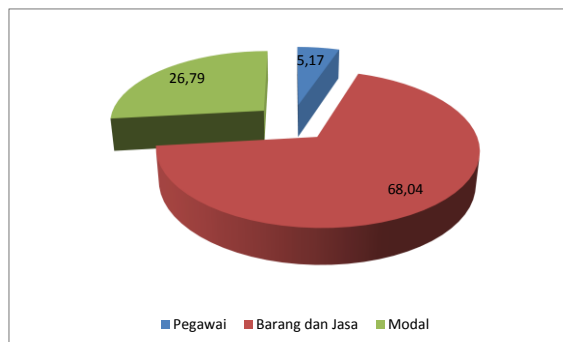
Grafik 4.6A
Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja, Nasional
Tahun 2015



Berdasarkan Tabel 4.6B, pada tahun 2016 belanja pegawai sebesar Rp439.078,9 juta atau 5,17% yang terkecil dibandingkan dengan barang dan jasa sebesar Rp5.777.662,4 juta atau 68,04% yang terbesar, sedangkan sisanya adalah modal sebesar Rp2.274.967,2 juta atau 26,79% dari belanja langsung sebesar Rp8.491,7 milyar. Bila dibandingkan antarprovinsi maka belanja pegawai yang terbesar Provinsi Gorontalo sebesar Rp20.549,4 juta atau 29,71% dan terkecil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.029,9 juta atau 0,04%, sedangkan 3 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Bali tidak tersedia belanja pegawai.

Belanja barang dan jasa yang terbesar Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp110.760,3 juta atau 96,98% dan terkecil Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp46.647,5 juta atau 34,35%, sedangkan Provinsi Bali tidak tersedia belanja barang dan jasa. Belanja modal yang terbesar Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp89.145,5 juta atau 65,65% dan terkecil Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp685,2 juta atau 0,80%, sedangkan Provinsi Bali 100% adalah belanja modal.

Grafik 4.6B
Persentase Belanja Langsung menurut Tipe Belanja, Nasional
Tahun 2016



Tabel 4.6B
Jumlah Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Pegawai		Barang dan Jasa		Modal		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	DKI Jakarta	1.029.920.000	0,04	1.524.686.907.112	56,77	1.159.918.906.666	43,19	2.685.635.733.778
2	Jawa Barat	18.380.343.500	7,23	174.560.238.089	68,71	61.110.000.000	24,05	254.050.581.589
3	Banten	3.409.530.000	1,16	137.722.602.500	46,99	151.957.067.500	51,85	293.089.200.000
4	Jawa Tengah	32.239.490.000	21,26	114.137.368.000	75,26	5.286.887.000	3,49	151.663.745.000
5	DI Yogyakarta	23.682.426.568	10,08	135.589.975.452	57,69	75.749.299.880	32,23	235.021.701.900
6	Jawa Timur	63.034.020.500	26,66	169.925.617.350	71,88	3.451.814.500	1,46	236.411.452.350
7	Aceh	41.699.331.600	6,81	396.736.904.795	64,82	173.581.981.132	28,36	612.018.217.527
8	Sumatera Utara	12.742.782.000	13,37	71.498.674.957	75,01	11.082.455.000	11,63	95.323.911.957
9	Sumatera Barat	0	0,00	52.846.460.850	59,79	35.534.267.450	40,21	88.380.728.300
10	Riau	73.074.634.455	9,52	619.534.419.665	80,68	75.274.169.878	9,80	767.883.223.998
11	Kepulauan Riau	25.395.491.659	9,66	229.378.242.689	87,29	8.011.880.100	3,05	262.785.614.448
12	Jambi	12.285.334.000	7,89	102.426.259.440	65,82	40.912.774.000	26,29	155.624.367.440
13	Sumatera Selatan	91.800.000	0,21	42.104.468.350	95,75	1.775.569.000	4,04	43.971.837.350
14	Bangka Belitung	2.528.250.000	4,58	47.775.543.000	86,62	4.852.220.000	8,80	55.156.013.000
15	Bengkulu	6.757.315.000	4,85	56.836.884.550	40,81	75.684.061.950	54,34	139.278.261.500
16	Lampung	5.323.752.000	3,32	140.490.647.150	87,63	14.511.600.850	9,05	160.326.000.000
17	Kalimantan Barat	1.939.730.000	1,70	110.760.255.920	96,98	1.503.656.000	1,32	114.203.641.920
18	Kalimantan Tengah	6.861.599.000	7,99	78.283.161.000	91,21	685.240.000	0,80	85.830.000.000
19	Kalimantan Selatan	8.117.980.000	2,09	372.259.220.000	95,83	8.076.800.000	2,08	388.454.000.000
20	Kalimantan Timur	9.775.508.390	3,40	271.196.076.610	94,42	6.250.815.000	2,18	287.222.400.000
21	Kalimantan Utara	3.233.050.000	5,46	53.764.050.000	90,87	2.167.900.000	3,66	59.165.000.000
22	Sulawesi Utara	2.467.056.720	3,82	50.730.155.900	78,57	11.366.153.680	17,60	64.563.366.300
23	Gorontalo	20.549.355.000	29,71	41.780.984.464	60,40	6.843.375.000	9,89	69.173.714.464
24	Sulawesi Tengah	9.241.452.000	6,92	117.400.204.994	87,95	6.842.366.360	5,13	133.484.023.354
25	Sulawesi Selatan	2.597.889.000	3,38	72.040.755.788	93,70	2.243.404.670	2,92	76.882.049.458
26	Sulawesi Barat	0	0,00	46.647.490.800	34,35	89.145.462.200	65,65	135.792.953.000
27	Sulawesi Tenggara	1.990.220.000	4,57	34.666.670.000	79,59	6.900.027.600	15,84	43.556.917.600
28	Maluku	204.230.000	0,15	126.246.150.200	91,08	12.158.279.800	8,77	138.608.660.000
29	Maluku Utara	24.640.600.000	14,42	98.848.725.500	57,86	47.345.129.500	27,71	170.834.455.000
30	Bali	0	0,00	0	0,00	128.847.412.000	100,00	128.847.412.000
31	Nusa Tenggara Barat	2.349.588.000	2,63	64.353.192.190	71,94	22.756.604.000	25,44	89.459.384.190
32	Nusa Tenggara Timur	6.347.002.000	13,95	37.909.854.300	83,34	1.230.926.000	2,71	45.487.782.300
33	Papua	10.617.900.000	8,08	103.083.149.500	78,46	17.685.650.000	13,46	131.386.699.500
34	Papua Barat	6.471.385.000	7,02	81.441.110.000	88,39	4.223.066.000	4,58	92.135.561.000
	Jumlah	439.078.966.392	5,17	5.777.662.421.115	68,04	2.274.967.222.716	26,79	8.491.708.610.223

c. Jenis Program

Berdasarkan Tabel 4.7A pada tahun 2015, jumlah belanja langsung untuk administrasi terbesar pada administrasi perkantoran sebesar Rp Rp269.852,5 juta dan terkecil pada kinerja dan keuangan sebesar Rp12.331,1 juta. Untuk program pendidikan terbesar pada wajar dikdas dan dikmen masing-masing sebesar Rp1.716.566,2 juta dan Rp1.583.223,2 juta. Hal ini berarti program wajar dikdas dan dikmen merupakan program prioritas pendidikan, sehingga alokasi dananya sangat besar dibandingkan dengan program lainnya. Tiga program lainnya, yaitu mutu PTK, PT, dan manajemen pelayanan pendidikan cukup besar masing-masing sebesar Rp586.253,4 juta, Rp418.722,6 juta, dan Rp411.272,2 juta.

Tabel 4.7A
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	1. Adm Perkntan	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keu	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	5.787.295.163	874.517.204.400	0	0
2	Jawa Barat	19.890.972.643	6.620.662.500	0	4.303.750.313	111.442.500	5.323.687.500	939.505.125	11.973.545.000	3.441.842.500
3	Banten	6.869.536.400	11.229.718.300	4.338.276.000	0	1.355.079.000	6.912.948.000	58.616.363.650	111.426.767.450	14.472.075.000
4	Jawa Tengah	16.373.790.000	30.442.590.000	0	5.233.681.000	0	4.412.200.000	23.206.708.000	37.222.353.000	7.731.800.000
5	DI Yogyakarta	5.642.673.200	8.740.574.000	0	575.582.000	233.000.000	2.137.680.000	25.679.965.000	35.582.267.000	5.021.200.000
6	Jawa Timur	18.931.549.000	6.514.341.000	3.263.809.500	5.666.554.850	2.465.400.000	17.878.320.550	64.202.089.200	124.817.556.200	22.039.280.500
7	Aceh	49.039.219.401	6.969.342.000	66.700.000	10.945.339.000	0	19.413.212.909	161.361.580.713	152.210.872.372	20.879.505.468
8	Sumatera Utara	9.442.115.575	40.734.545.696	620.500.000	220.000.000	159.623.200	0	28.014.934.562	63.858.702.605	8.458.505.865
9	Sumatera Barat	5.411.423.665	3.637.345.250	290.190.000	263.302.856	1.089.967.100	1.809.588.671	7.959.743.360	35.672.518.872	6.561.915.500
10	Riau	43.508.961.000	5.663.300.000	720.000.000	2.050.300.000	575.000.000	27.176.006.650	78.455.613.410	174.639.412.000	57.085.789.800
11	Kepulauan Riau	12.566.457.241	4.736.328.000	0	0	210.000.000	11.407.777.200	12.029.291.540	42.860.507.433	3.528.923.266
12	Jambi	3.499.496.050	1.634.850.000	180.000.000	805.415.315	0	7.915.760.000	3.844.625.000	106.342.228.200	2.841.619.000
13	Sumatera Selatan	5.733.991.000	3.975.125.000	0	0	0	3.921.718.000	35.657.440.000	80.456.834.000	18.715.300.000
14	Bangka Belitung	162.940.000	1.235.900.000	393.580.000	0	0	1.546.617.000	11.154.340.000	10.405.762.000	3.419.932.000
15	Bengkulu	2.347.034.717	3.275.994.300	10.000.000	160.000.000	55.000.000	24.366.650.000	26.591.725.000	18.290.000.000	1.954.240.000
16	Lampung	3.304.873.780	4.752.250.000	0	100.000.000	0	5.306.802.650	28.302.587.200	25.961.524.400	11.953.932.900
17	Kalimantan Barat	2.835.386.700	2.020.425.750	72.650.000	538.213.000	106.099.850	2.461.690.250	19.554.078.450	27.757.213.116	5.352.738.000
18	Kalimantan Tengah	7.257.699.430	3.553.700.000	425.000.000	341.300.000	2.152.153.156	10.893.185.200	3.665.176.555	17.531.881.000	10.218.981.470
19	Kalimantan Selatan	2.136.089.500	3.021.500.000	1.997.674.000	21.472.277.522	0	40.955.062.000	122.536.086.000	82.884.667.000	18.014.834.000
20	Kalimantan Timur	6.353.845.650	1.805.750.000	537.970.000	3.764.127.000	454.520.000	4.000.000.000	9.690.452.250	127.613.282.000	7.957.150.000
21	Kalimantan Utara	4.690.414.050	1.588.217.600	0	1.374.550.000	20.000.000	2.397.485.000	20.123.498.200	14.752.190.000	4.181.950.000
22	Sulawesi Utara	2.927.530.800	6.208.755.400	101.750.000	20.408.000	121.834.200	3.610.088.600	3.860.212.000	23.575.529.050	0
23	Gorontalo	1.436.596.000	4.701.080.000	0	624.054.000	234.092.000	5.350.998.100	2.920.795.000	2.890.454.500	8.046.591.802
24	Sulawesi Tengah	6.262.075.191	6.262.075.191	6.731.609.685	0	702.991.400	5.503.515.035	26.630.924.828	13.245.349.590	13.747.715.518
25	Sulawesi Selatan	3.778.439.251	0	0	1.435.590.000	987.585.000	1.669.725.000	387.800.000	2.002.295.000	5.164.775.000
26	Sulawesi Barat	2.965.049.516	1.836.300.000	108.310.000	79.000.000	130.835.000	2.608.392.000	3.996.827.200	25.083.436.500	3.738.476.300
27	Sulawesi Tenggara	3.770.782.750	10.047.665.750	31.000.000	320.793.000	5.000.000	7.003.951.000	7.347.869.750	13.202.108.500	2.396.737.900
28	Maluku	1.999.100.000	5.476.893.000	0	489.173.000	401.162.000	4.928.520.000	8.877.339.000	75.973.725.000	2.001.515.000
29	Maluku Utara	2.143.800.000	4.496.632.000	0	0	75.000.000	621.265.000	7.026.930.000	12.198.715.500	1.658.063.000
30	Bali	5.227.323.800	5.027.286.800	0	0	0	4.076.929.500	9.158.456.750	69.043.079.030	2.168.597.500
31	Nusa Tenggara Barat	1.703.112.700	1.212.830.600	0	0	235.800.000	6.731.277.000	21.527.045.000	10.853.866.000	0
32	Nusa Tenggara Timur	3.150.133.000	2.404.237.000	0	0	27.867.000	0	0	0	972.434.000
33	Papua	5.620.842.000	3.944.850.000	150.600.000	330.000.000	331.608.000	1.715.266.000	7.729.012.000	5.994.560.000	3.072.765.000
34	Papua Barat	2.869.205.000	1.295.466.000	125.550.000	468.335.500	90.000.000	0	1.000.000.000	26.900.000.000	14.495.000.000
	Jumlah	269.852.459.010	205.066.531.137	20.165.169.185	61.581.746.356	12.331.059.406	249.843.613.978	1.716.566.219.143	1.583.223.202.318	291.294.186.289

Tabel 4.7A (lanjutan)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan	13. Kepmdan & O	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	DKI Jakarta	649.973.155	31.071.801.378	11.659.695.983	0	0	0	22.039.827.563	945.725.797.642
2	Jawa Barat	8.836.013.326	11.204.612.593	20.744.467.850	0	0	0	325.725.000	93.716.226.850
3	Banten	6.510.399.000	32.649.545.000	0	0	2.002.858.000	9.599.436.900	0	265.983.002.700
4	Jawa Tengah	8.740.000.000	32.529.050.000	20.258.404.000	0	0	3.670.600.000	5.710.802.000	195.531.978.000
5	DI Yogyakarta	12.935.134.256	0	19.784.432.000	49.327.920.850	8.270.560.000	4.472.800.000	18.800.700.000	197.204.488.306
6	Jawa Timur	11.625.646.850	77.520.000.000	0	0	0	2.134.575.000	0	357.059.122.650
7	Aceh	0	157.785.178.660	42.402.453.195	0	0	93.648.800.000	0	714.722.203.718
8	Sumatera Utara	0	16.497.571.475	5.761.489.264	0	0	1.745.815.060	0	175.513.803.302
9	Sumatera Barat	3.423.508.810	0	5.508.634.973	0	6.195.327.990	0	2.709.762.160	80.533.229.207
10	Riau	22.075.062.200	0	10.150.350.000	0	13.466.888.625	141.475.757.400	54.000.000.000	631.042.441.085
11	Kepulauan Riau	0	22.008.706.833	7.290.292.300	59.345.151.587	0	5.297.687.000	1.913.245.500	183.194.367.900
12	Jambi	12.302.367.000	17.641.308.100	21.005.401.000	0	0	0	0	178.013.069.665
13	Sumatera Selatan	1.623.016.000	4.019.176.000	5.947.400.000	0	0	0	0	160.050.000.000
14	Bangka Belitung	0	0	582.940.000	0	0	2.690.200.000	0	31.592.211.000
15	Bengkulu	5.997.500.000	5.170.000.000	42.307.550.000	0	1.709.893.000	0	0	132.235.587.017
16	Lampung	1.000.000.000	0	33.371.008.190	0	3.262.289.600	6.145.106.000	0	123.460.374.720
17	Kalimantan Barat	0	3.906.855.750	21.811.807.040	0	7.871.145.500	1.104.947.500	237.032.000	95.630.282.906
18	Kalimantan Tengah	4.849.000.000	15.793.368.725	8.146.422.300	0	913.040.820	500.000.000	58.234.253.355	144.475.162.011
19	Kalimantan Selatan	0	43.524.862.000	41.219.357.000	0	0	5.022.463.000	5.777.537.000	388.562.409.022
20	Kalimantan Timur	1.000.000.000	29.353.548.960	0	0	0	0	135.992.188.390	328.522.834.250
21	Kalimantan Utara	1.744.130.000	0	3.520.087.600	12.762.669.000	8.352.000.000	0	0	75.507.191.450
22	Sulawesi Utara	0	12.212.637.200	9.172.967.750	0	0	0	0	61.811.713.000
23	Gorontalo	1.980.550.000	17.044.198.000	1.422.920.000	5.054.549.000	2.746.064.000	406.240.000	1.652.924.500	56.512.106.902
24	Sulawesi Tengah	0	11.503.718.682	0	8.244.107.911	0	3.043.789.800	2.918.550.464	104.796.423.295
25	Sulawesi Selatan	119.100.000	8.641.795.000	1.542.715.000	0	0	45.741.600.000	11.040.045.000	82.511.464.251
26	Sulawesi Barat	4.435.075.000	3.822.980.000	6.440.689.000	0	6.258.384.234	0	2.667.761.000	64.171.515.750
27	Sulawesi Tenggara	0	0	8.063.891.297	0	8.053.535.000	0	111.450.000	60.354.784.947
28	Maluku	1.746.989.000	3.350.919.000	25.989.143.000	6.264.499.000	0	0	0	137.498.977.000
29	Maluku Utara	1.691.944.000	2.987.718.000	3.507.219.050	0	0	49.328.024.000	2.444.266.950	88.179.577.500
30	Bali	11.603.468.200	1.564.236.600	12.348.378.075	13.675.672.250	0	0	0	133.893.428.505
31	Nusa Tenggara Barat	831.020.000	0	1.324.340.000	4.592.638.900	0	0	0	49.011.930.200
32	Nusa Tenggara Timur	2.410.930.000	23.108.561.000	3.253.052.000	0	8.281.096.000	0	0	43.608.310.000
33	Papua	14.898.500.000	0	10.359.435.000	0	0	5.519.000.000	6.718.020.000	66.384.458.000
34	Papua Barat	0	1.341.032.000	6.375.225.000	0	0	37.175.747.500	0	92.135.561.000
	Jumlah	143.029.326.797	586.253.380.956	411.272.167.867	159.267.208.498	77.383.082.769	418.722.589.160	333.294.090.882	6.539.146.033.751

Berdasarkan Tabel 4.7B pada tahun 2016, jumlah belanja langsung untuk administrasi terbesar pada sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp Rp1.405.028,1 juta dan terkecil pada disiplin aparatur sebesar Rp9.377.722,0 juta. Untuk program pendidikan terbesar pada dikmen dan wajar dikdas masing-masing sebesar Rp1.941.282,7 juta dan Rp1.560.346,5 juta. Hal ini berarti dikmen dan wajar dikdas merupakan program prioritas pendidikan sehingga alokasi dananya sangat besar jika dibandingkan dengan program lainnya. Program mutu PTK cukup besar sebesar Rp1.062.435,4 juta dan terkecil pada kebudayaan sebesar Rp161.926,7 juta. Kecilnya program kebudayaan karena belum semua Dinas Pendidikan terintegrasi dengan kebudayaan dan bahkan ada yang merupakan Dinas tersendiri.

Tabel 4.7B
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	1. Adm Perkntan	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparat	4. Kapasitas SD	5. SPC Kinerja & Ke	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	DKI Jakarta	0	1.197.689.687.357	0	860.340.000	18.889.000	1.623.098.000	797.734.509.000	0	1.027.450.000
2	Jawa Barat	17.552.621.000	4.511.400.000	0	7.897.242.500	7.044.642.500	0	18.605.078.350	103.062.041.000	6.227.627.750
3	Banten	2.500.600.000	6.891.000.000	0	1.050.000.000	878.600.000	7.927.337.000	12.071.663.000	227.898.200.000	10.340.000.000
4	Jawa Tengah	27.203.492.000	6.722.182.000	0	2.380.000.000	0	3.850.000.000	18.350.000.000	36.478.704.000	11.820.105.000
5	DI Yogyakarta	7.822.980.000	7.692.757.000	0	648.140.000	632.000.000	4.515.000.000	20.101.918.000	38.407.678.000	5.325.757.000
6	Jawa Timur	11.842.568.950	13.925.840.400	3.354.590.000	3.898.727.000	2.282.900.000	9.148.114.500	33.216.132.400	75.858.616.100	10.626.000.000
7	Aceh	54.033.284.496	17.859.770.000	66.700.000	11.166.723.000	0	35.442.382.114	107.357.633.758	159.757.778.236	16.956.819.136
8	Sumatera Utara	11.600.263.184	24.249.411.000	1.300.000.000	350.000.000	173.371.000	0	19.939.096.145	14.628.066.133	3.549.818.008
9	Sumatera Barat	5.190.363.745	2.163.020.900	262.140.000	279.964.320	1.112.364.557	7.826.504.171	8.996.784.670	48.480.263.860	0
10	Riau	20.547.507.403	26.878.293.592	1.343.040.000	1.542.495.000	500.000.000	21.587.148.492	51.247.395.068	251.353.410.139	77.016.729.245
11	Kepulauan Riau	12.109.990.000	4.324.970.200	0	0	250.000.000	21.066.055.000	39.885.912.000	103.349.307.989	7.723.239.000
12	Jambi	6.104.708.700	1.764.100.000	128.000.000	0	0	2.877.555.000	25.577.517.500	78.438.873.405	3.449.336.000
13	Sumatera Selatan	4.307.014.250	306.000.000	0	0	0	393.400.000	6.433.000.000	19.856.087.000	6.068.616.100
14	Bangka Belitung	2.615.280.000	5.340.370.000	505.742.000	0	0	2.618.378.500	15.369.745.000	16.574.935.000	6.424.426.500
15	Bengkulu	3.181.148.250	4.788.782.000	0	120.500.000	365.750.000	4.292.885.000	7.599.430.000	61.812.345.950	3.427.644.800
16	Lampung	3.292.692.000	9.919.621.000	0	0	0	7.237.521.300	15.819.573.271	66.253.959.579	4.690.000.000
17	Kalimantan Barat	3.877.978.620	2.019.056.000	70.650.000	369.991.500	302.982.000	2.379.412.000	27.964.941.300	34.720.386.450	5.454.153.000
18	Kalimantan Tengah	5.923.212.800	255.600.000	364.400.000	60.000.000	1.610.287.200	2.620.000.000	1.900.000.000	14.977.391.000	4.036.500.000
19	Kalimantan Selatan	3.538.663.602	1.984.080.000	243.000.000	750.000.000	500.000.000	69.150.631.498	175.650.734.000	83.077.876.500	0
20	Kalimantan Timur	9.146.931.610	4.329.400.000	546.970.000	6.249.032.000	328.520.000	4.200.000.000	6.300.000.000	83.192.060.000	10.757.105.000
21	Kalimantan Utara	4.765.600.000	1.229.000.000	0	150.000.000	25.000.000	1.425.000.000	17.096.715.000	10.439.500.000	1.875.000.000
22	Sulawesi Utara	3.210.351.600	3.262.825.400	161.500.000	84.000.000	122.520.800	4.927.582.300	9.987.782.200	17.251.812.300	0
23	Gorontalo	2.926.477.719	5.400.090.000	0	1.071.900.000	150.000.000	5.822.143.000	1.903.693.500	12.437.794.000	7.581.445.500
24	Sulawesi Tengah	5.902.643.280	7.971.711.453	0	809.573.725	656.593.400	7.824.341.037	31.971.234.558	37.022.707.859	13.035.544.466
25	Sulawesi Selatan	4.059.459.457	0	0	1.722.180.000	924.540.001	1.248.315.000	400.000.000	5.569.720.730	6.093.090.000
26	Sulawesi Barat	3.587.090.000	1.785.950.000	314.090.000	145.400.000	584.690.000	1.011.195.000	5.042.560.000	87.140.682.200	8.098.706.800
27	Sulawesi Tenggara	6.729.024.950	5.195.612.800	199.750.000	36.400.000	25.000.000	415.413.500	2.163.761.000	8.407.010.300	1.331.622.500
28	Maluku	1.923.780.000	3.214.000.000	0	727.179.000	184.900.000	3.572.080.000	11.154.669.000	77.765.967.000	2.685.737.000
29	Maluku Utara	2.764.000.000	12.906.105.000	0	0	246.000.000	3.538.580.000	13.519.730.000	58.025.547.000	2.422.000.000
30	Bali	4.080.020.980	11.138.053.520	0	0	0	408.431.000	6.779.526.750	26.824.595.050	1.396.414.000
31	Nusa Tenggara Barat	1.620.853.490	1.353.450.000	0	40.200.000	220.800.000	1.918.742.500	34.273.232.000	43.389.808.000	0
32	Nusa Tenggara Timur	3.850.526.400	1.201.011.000	0	0	44.215.000	0	0	0	1.778.826.950
33	Papua	5.784.550.000	5.459.500.000	391.600.000	672.600.000	562.998.000	7.356.391.500	14.932.520.000	11.929.544.000	15.599.511.005
34	Papua Barat	2.869.205.000	1.295.466.000	125.550.000	468.335.500	90.000.000	0	1.000.000.000	26.900.000.000	14.495.000.000
	Jumlah	266.464.883.486	1.405.028.116.622	9.377.722.000	43.550.923.545	19.837.563.458	248.223.637.412	1.560.346.487.470	1.941.282.668.780	271.314.224.760

Tabel 4.7B (Lanjutan)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelay	13. Kepemudaan	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	DKI Jakarta	889.258.120	681.055.230.000	4.737.272.301	0	0	0	0	2.685.635.733.778
2	Jawa Barat	38.167.274.789	0	47.556.106.500	0	2.712.940.000	0	713.607.200	254.050.581.589
3	Banten	5.600.000.000	14.856.800.000	0	0	1.735.000.000	1.340.000.000	0	293.089.200.000
4	Jawa Tengah	3.914.216.000	20.368.955.000	16.634.915.000	0	0	2.350.000.000	1.591.176.000	151.663.745.000
5	DI Yogyakarta	12.376.492.000	0	20.297.629.900	77.542.550.000	3.262.700.000	15.769.300.000	20.626.800.000	235.021.701.900
6	Jawa Timur	3.101.160.000	66.843.000.000	0	0	0	2.313.803.000	0	236.411.452.350
7	Aceh	0	98.730.150.826	24.541.935.961	0	0	86.105.040.000	0	612.018.217.527
8	Sumatera Utara	0	16.042.746.412	3.491.140.075	0	0	0	0	95.323.911.957
9	Sumatera Barat	2.908.226.750	0	3.063.346.517	0	6.478.204.810	0	1.619.544.000	88.380.728.300
10	Riau	74.613.565.000	0	26.905.498.991	0	55.896.516.314	103.348.528.622	55.103.096.132	767.883.223.998
11	Kepulauan Riau	0	24.179.585.159	7.561.485.900	31.665.344.200	404.725.000	8.400.000.000	1.865.000.000	262.785.614.448
12	Jambi	3.067.760.000	9.909.634.820	24.306.882.015	0	0	0	0	155.624.367.440
13	Sumatera Selatan	372.000.000	2.152.340.000	4.083.380.000	0	0	0	0	43.971.837.350
14	Bangka Belitung	0	0	1.409.656.000	0	0	4.297.480.000	0	55.156.013.000
15	Bengkulu	25.621.105.000	2.326.760.000	3.291.857.000	22.450.053.500	0	0	0	139.278.261.500
16	Lampung	2.447.000.000	2.300.000.000	18.459.652.650	8.551.980.200	7.114.000.000	8.440.000.000	5.800.000.000	160.326.000.000
17	Kalimantan Barat	0	5.576.092.750	21.498.938.800	0	7.680.085.500	2.288.974.000	0	114.203.641.920
18	Kalimantan Tengah	3.631.000.000	10.607.000.000	5.245.740.000	0	0	475.000.000	34.123.869.000	85.830.000.000
19	Kalimantan Selatan	21.826.840.000	0	31.732.174.400	0	0	0	0	388.454.000.000
20	Kalimantan Timur	17.475.790.000	22.250.580.800	7.253.822.200	0	0	0	115.192.188.390	287.222.400.000
21	Kalimantan Utara	2.583.500.000	800.000.000	5.318.700.000	6.830.035.000	6.626.950.000	0	0	59.165.000.000
22	Sulawesi Utara	0	7.702.987.900	17.852.003.800	0	0	0	0	64.563.366.300
23	Gorontalo	839.178.000	3.501.934.000	1.434.920.000	20.916.173.225	2.622.180.000	0	2.565.785.520	69.173.714.464
24	Sulawesi Tengah	12.822.031.623	0	9.331.824.093	0	6.135.817.860	0	0	133.484.023.354
25	Sulawesi Selatan	1.138.110.000	12.136.870.000	6.362.580.000	0	932.965.000	26.172.900.000	10.121.319.270	76.882.049.458
26	Sulawesi Barat	4.727.840.000	2.707.465.000	7.413.156.000	0	9.439.540.000	0	3.794.588.000	135.792.953.000
27	Sulawesi Tenggara	547.330.000	706.042.000	4.870.446.000	0	0	1.229.356.000	11.700.148.550	43.556.917.600
28	Maluku	2.924.933.000	3.300.000.000	25.524.026.000	0	5.631.389.000	0	0	138.608.660.000
29	Maluku Utara	9.473.382.000	6.060.000.000	6.996.409.000	0	0	52.709.400.000	2.173.302.000	170.834.455.000
30	Bali	42.591.433.100	18.475.443.800	7.592.421.900	9.561.071.900	0	0	0	128.847.412.000
31	Nusa Tenggara Barat	737.470.000	0	2.457.030.200	3.447.798.000	0	0	0	89.459.384.190
32	Nusa Tenggara Timur	3.795.225.400	26.504.756.250	947.242.000	7.365.979.300	0	0	0	45.487.782.300
33	Papua	36.407.907.000	2.000.000.000	13.907.262.995	0	8.077.900.000	8.304.415.000	0	131.386.699.500
34	Papua Barat	0	1.341.032.000	6.375.225.000	0	37.175.747.500	0	0	92.135.561.000
	Jumlah	334.600.027.782	1.062.435.406.717	388.454.681.198	188.330.985.325	161.926.660.984	323.544.196.622	266.990.424.062	8.491.708.610.223

d. Persentase Jenis Program

Agar lebih jelas mengetahui besarnya alokasi dana tiap program tahun 2015 maka pada Tabel 4.8A disajikan persentase belanja langsung menurut jenis program. Alokasi terbesar pada program wajar dikdas sebesar 26,25%, dikmen sebesar 24,21%, mutu PTK sebesar 8,97%, PT sebesar 6,40%, dan lainnya sebesar 5,10%, sedangkan jenis program lainnya kurang dari 5% dan terkecil pada capaian kinerja dan keuangan sebesar 0,19%.

Tabel 4.8A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	1. Adm P	2. SP Aparat	3. Disiplin	4. Kapas SD	5. SPC Kine	6. PAUD	7. Dikdas	8. Dikmen	9. PNF	10. PK&PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj	13. Pmd &	14. Kebud	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	92,47	0,00	0,00	0,07	3,29	1,23	0,00	0,00	0,00	2,33	100,00
2	Jawa Barat	21,22	7,06	0,00	4,59	0,12	5,68	1,00	12,78	3,67	9,43	11,96	22,14	0,00	0,00	0,00	0,35	100,00
3	Banten	2,58	4,22	1,63	0,00	0,51	2,60	22,04	41,89	5,44	2,45	12,28	0,00	0,00	0,75	3,61	0,00	100,00
4	Jawa Tengah	8,37	15,57	0,00	2,68	0,00	2,26	11,87	19,04	3,95	4,47	16,64	10,36	0,00	0,00	1,88	2,92	100,00
5	DI Yogyakarta	2,86	4,43	0,00	0,29	0,12	1,08	13,02	18,04	2,55	6,56	0,00	10,03	25,01	4,19	2,27	9,53	100,00
6	Jawa Timur	5,30	1,82	0,91	1,59	0,69	5,01	17,98	34,96	6,17	3,26	21,71	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	100,00
7	Aceh	6,86	0,98	0,01	1,53	0,00	2,72	22,58	21,30	2,92	0,00	22,08	5,93	0,00	0,00	13,10	0,00	100,00
8	Sumatera Utara	5,38	23,21	0,35	0,13	0,09	0,00	15,96	36,38	4,82	0,00	9,40	3,28	0,00	0,00	0,99	0,00	100,00
9	Sumatera Barat	6,72	4,52	0,36	0,33	1,35	2,25	9,88	44,30	8,15	4,25	0,00	6,84	0,00	7,69	0,00	3,36	100,00
10	Riau	6,89	0,90	0,11	0,32	0,09	4,31	12,43	27,67	9,05	3,50	0,00	1,61	0,00	2,13	22,42	8,56	100,00
11	Kepulauan Riau	6,86	2,59	0,00	0,00	0,11	6,23	6,57	23,40	1,93	0,00	12,01	3,98	32,39	0,00	2,89	1,04	100,00
12	Jambi	1,97	0,92	0,10	0,45	0,00	4,45	2,16	59,74	1,60	6,91	9,91	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13	Sumatera Selatan	3,58	2,48	0,00	0,00	0,00	2,45	22,28	50,27	11,69	1,01	2,51	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	Bangka Belitung	0,52	3,91	1,25	0,00	0,00	4,90	35,31	32,94	10,83	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	8,52	0,00	100,00
15	Bengkulu	1,77	2,48	0,01	0,12	0,04	18,43	20,11	13,83	1,48	4,54	3,91	31,99	0,00	1,29	0,00	0,00	100,00
16	Lampung	2,68	3,85	0,00	0,08	0,00	4,30	22,92	21,03	9,68	0,81	0,00	27,03	0,00	2,64	4,98	0,00	100,00
17	Kalimantan Barat	2,96	2,11	0,08	0,56	0,11	2,57	20,45	29,03	5,60	0,00	4,09	22,81	0,00	8,23	1,16	0,25	100,00
18	Kalimantan Tengah	5,02	2,46	0,29	0,24	1,49	7,54	2,54	12,13	7,07	3,36	10,93	5,64	0,00	0,63	0,35	40,31	100,00
19	Kalimantan Selatan	0,55	0,78	0,51	5,53	0,00	10,54	31,54	21,33	4,64	0,00	11,20	10,61	0,00	0,00	1,29	1,49	100,00
20	Kalimantan Timur	1,93	0,55	0,16	1,15	0,14	1,22	2,95	38,84	2,42	0,30	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	100,00
21	Kalimantan Utara	6,21	2,10	0,00	1,82	0,03	3,18	26,65	19,54	5,54	2,31	0,00	4,66	16,90	11,06	0,00	0,00	100,00
22	Sulawesi Utara	4,74	10,04	0,16	0,03	0,20	5,84	6,25	38,14	0,00	0,00	19,76	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23	Gorontalo	2,54	8,32	0,00	1,10	0,41	9,47	5,17	5,11	14,24	3,50	30,16	2,52	8,94	4,86	0,72	2,92	100,00
24	Sulawesi Tengah	5,98	5,98	6,42	0,00	0,67	5,25	25,41	12,64	13,12	0,00	10,98	0,00	7,87	0,00	2,90	2,78	100,00
25	Sulawesi Selatan	4,58	0,00	0,00	1,74	1,20	2,02	0,47	2,43	6,26	0,14	10,47	1,87	0,00	0,00	55,44	13,38	100,00
26	Sulawesi Barat	4,62	2,86	0,17	0,12	0,20	4,06	6,23	39,09	5,83	6,91	5,96	10,04	0,00	9,75	0,00	4,16	100,00
27	Sulawesi Tenggara	6,25	16,65	0,05	0,53	0,01	11,60	12,17	21,87	3,97	0,00	0,00	13,36	0,00	13,34	0,00	0,18	100,00
28	Maluku	1,45	3,98	0,00	0,36	0,29	3,58	6,46	55,25	1,46	1,27	2,44	18,90	4,56	0,00	0,00	0,00	100,00
29	Maluku Utara	2,43	5,10	0,00	0,00	0,09	0,70	7,97	13,83	1,88	1,92	3,39	3,98	0,00	0,00	55,94	2,77	100,00
30	Bali	3,90	3,75	0,00	0,00	0,00	3,04	6,84	51,57	1,62	8,67	1,17	9,22	10,21	0,00	0,00	0,00	100,00
31	Nusa Tenggara Barat	3,47	2,47	0,00	0,00	0,48	13,73	43,92	22,15	0,00	1,70	0,00	2,70	9,37	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Nusa Tenggara Timur	7,22	5,51	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,23	5,53	52,99	7,46	0,00	18,99	0,00	0,00	100,00
33	Papua	8,47	5,94	0,23	0,50	0,50	2,58	11,64	9,03	4,63	22,44	0,00	15,61	0,00	0,00	8,31	10,12	100,00
34	Papua Barat	3,11	1,41	0,14	0,51	0,10	0,00	1,09	29,20	15,73	0,00	1,46	6,92	0,00	0,00	40,35	0,00	100,00
	Jumlah	4,13	3,14	0,31	0,94	0,19	3,82	26,25	24,21	4,45	2,19	8,97	6,29	2,44	1,18	6,40	5,10	100,00

Seperti halnya pada tahun 2015 maka dana tiap program pada tahun 2016 yang terdapat pada Tabel 4.8B disajikan persentase belanja langsung menurut jenis program. Alokasi terbesar pada program dikmen sebesar 22,86%, wajar dikdas sebesar 18,37%, sarana dan prasarana aparatur sebesar 16,55%, dan mutu PTK sebesar 12,51%, sedangkan jenis program lainnya kurang dari 5% dan terkecil pada disiplin aparatur sebesar 0,11%.

Tabel 4.8B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	1. Adm P	2. SP Aparat	3. Disiplin A	4. Kapas SD	5. SPC Kiner	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF	10. PKB PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj P	13. Pmd & C	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	DKI Jakarta	0,00	44,60	0,00	0,03	0,00	0,06	29,70	0,00	0,04	0,03	25,36	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Jawa Barat	6,91	1,78	0,00	3,11	2,77	0,00	7,32	40,57	2,45	15,02	0,00	18,72	0,00	1,07	0,00	0,28	100,00
3	Banten	0,85	2,35	0,00	0,36	0,30	2,70	4,12	77,76	3,53	1,91	5,07	0,00	0,00	0,59	0,46	0,00	100,00
4	Jawa Tengah	17,94	4,43	0,00	1,57	0,00	2,54	12,10	24,05	7,79	2,58	13,43	10,97	0,00	0,00	1,55	1,05	100,00
5	DI Yogyakarta	3,33	3,27	0,00	0,28	0,27	1,92	8,55	16,34	2,27	5,27	0,00	8,64	32,99	1,39	6,71	8,78	100,00
6	Jawa Timur	5,01	5,89	1,42	1,65	0,97	3,87	14,05	32,09	4,49	1,31	28,27	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	100,00
7	Aceh	8,83	2,92	0,01	1,82	0,00	5,79	17,54	26,10	2,77	0,00	16,13	4,01	0,00	0,00	14,07	0,00	100,00
8	Sumatera Utara	12,17	25,44	1,36	0,37	0,18	0,00	20,92	15,35	3,72	0,00	16,83	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9	Sumatera Barat	5,87	2,45	0,30	0,32	1,26	8,86	10,18	54,85	0,00	3,29	0,00	3,47	0,00	7,33	0,00	1,83	100,00
10	Riau	2,68	3,50	0,17	0,20	0,07	2,81	6,67	32,73	10,03	9,72	0,00	3,50	0,00	7,28	13,46	7,18	100,00
11	Kepulauan Riau	4,61	1,65	0,00	0,00	0,10	8,02	15,18	39,33	2,94	0,00	9,20	2,88	12,05	0,15	3,20	0,71	100,00
12	Lambi	3,92	1,13	0,08	0,00	0,00	1,85	16,44	50,40	2,22	1,97	6,37	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13	Sumatera Selatan	9,79	0,70	0,00	0,00	0,00	0,89	14,63	45,16	13,80	0,85	4,89	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	Bangka Belitung	4,74	9,68	0,92	0,00	0,00	4,75	27,87	30,05	11,65	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	7,79	0,00	100,00
15	Bengkulu	2,28	3,44	0,00	0,09	0,26	3,08	5,46	44,38	2,46	18,40	1,67	2,36	16,12	0,00	0,00	0,00	100,00
16	Lampung	2,05	6,19	0,00	0,00	0,00	4,51	9,87	41,32	2,93	1,53	1,43	11,51	5,33	4,44	5,26	3,62	100,00
17	Kalimantan Barat	3,40	1,77	0,06	0,32	0,27	2,08	24,49	30,40	4,78	0,00	4,88	18,83	0,00	6,72	2,00	0,00	100,00
18	Kalimantan Tengah	6,90	0,30	0,42	0,07	1,88	3,05	2,21	17,45	4,70	4,23	12,36	6,11	0,00	0,00	0,55	39,76	100,00
19	Kalimantan Selatan	0,91	0,51	0,06	0,19	0,13	17,80	45,22	21,39	0,00	5,62	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20	Kalimantan Timur	3,18	1,51	0,19	2,18	0,11	1,46	2,19	28,96	3,75	6,08	7,75	2,53	0,00	0,00	0,00	40,11	100,00
21	Kalimantan Utara	8,05	2,08	0,00	0,25	0,04	2,41	28,90	17,64	3,17	4,37	1,35	8,99	11,54	11,20	0,00	0,00	100,00
22	Sulawesi Utara	4,97	5,05	0,25	0,13	0,19	7,63	15,47	26,72	0,00	0,00	11,93	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23	Gorontalo	4,23	7,81	0,00	1,55	0,22	8,42	2,75	17,98	10,96	1,21	5,06	2,07	30,24	3,79	0,00	3,71	100,00
24	Sulawesi Tengah	4,42	5,97	0,00	0,61	0,49	5,86	23,95	27,74	9,77	9,61	0,00	6,99	0,00	4,60	0,00	0,00	100,00
25	Sulawesi Selatan	5,28	0,00	0,00	2,24	1,20	1,62	0,52	7,24	7,93	1,48	15,79	8,28	0,00	1,21	34,04	13,16	100,00
26	Sulawesi Barat	2,64	1,32	0,23	0,11	0,43	0,74	3,71	64,17	5,96	3,48	1,99	5,46	0,00	6,95	0,00	2,79	100,00
27	Sulawesi Tenggara	15,45	11,93	0,46	0,08	0,06	0,95	4,97	19,30	3,06	1,26	1,62	11,18	0,00	0,00	2,82	26,86	100,00
28	Maluku	1,39	2,32	0,00	0,52	0,13	2,58	8,05	56,10	1,94	2,11	2,38	18,41	0,00	4,06	0,00	0,00	100,00
29	Maluku Utara	1,62	7,55	0,00	0,00	0,14	2,07	7,91	33,97	1,42	5,55	3,55	4,10	0,00	0,00	30,85	1,27	100,00
30	Bali	3,17	8,64	0,00	0,00	0,00	0,32	5,26	20,82	1,08	33,06	14,34	5,89	7,42	0,00	0,00	0,00	100,00
31	Nusa Tenggara Barat	1,81	1,51	0,00	0,04	0,25	2,14	38,31	48,50	0,00	0,82	0,00	2,75	3,85	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Nusa Tenggara Timur	8,46	2,64	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,91	8,34	58,27	2,08	16,19	0,00	0,00	0,00	100,00
33	Papua	4,40	4,16	0,30	0,51	0,43	5,60	11,37	9,08	11,87	27,71	1,52	10,58	0,00	6,15	6,32	0,00	100,00
34	Papua Barat	3,11	1,41	0,14	0,51	0,10	0,00	1,09	29,20	15,73	0,00	1,46	6,92	0,00	40,35	0,00	0,00	100,00
	Jumlah	3,14	16,55	0,11	0,51	0,23	2,92	18,37	22,86	3,20	3,94	12,51	4,57	2,22	1,91	3,81	3,14	100,00

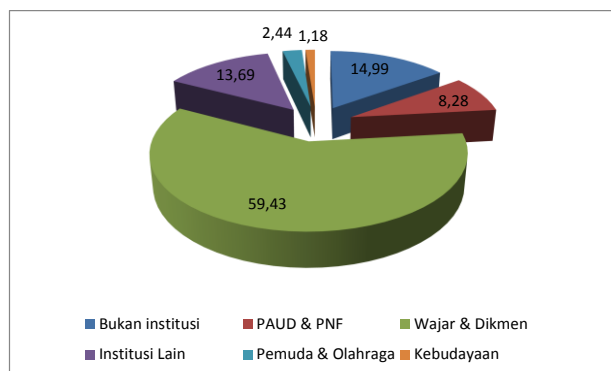
e. Jenis Pendidikan

Belanja langsung dapat dirinci menjadi enam jenis pendidikan, yaitu 1) bukan institusi pendidikan, 2) PAUD dan PNF, 3) wajar dikdas dan dikmen, 4) institusi lain, 5) pemuda dan olahraga, dan 6) kebudayaan. Pada tahun 2015 dan berdasarkan pada Tabel 4.9A, program wajar dikdas dan dikmen menduduki porsi tertinggi sebesar Rp3.886.042,8 juta atau 59,43% berarti lebih dari separuh anggaran adalah untuk wajar dikdas dan dikmen. Bukan institusi pendidikan menduduki porsi kedua sebesar Rp980.269,1 juta atau 14,99%, berarti dana yang dialokasikan untuk manajemen di kantor masih sangat besar karena lebih dari 10%, sedangkan institusi pendidikan lainnya sebesar Rp895.046,0 juta atau 13,69%. Pemuda dan olahraga dan kebudayaan hanya 2,44% dan 1,18% karena memang belum semua Dinas Pendidikan termasuk Kebudayaan dan masih banyak Dinas Pendidikan yang termasuk Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4.9A
Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Bkn Institusi Pend		PAUD+PNF		Wajar Dikdas+Dikmen		Institusi Lain		Pemuda & Olahraga		Kebudayaan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	DKI Jakarta	11.659.695.983	1,23	5.787.295.163	0,61	905.589.005.778	95,76	22.689.800.718	2,40	0	0,00	0	0,00	945.725.797.642
2	Jawa Barat	51.671.295.806	55,14	8.765.530.000	9,35	24.117.662.718	25,73	9.161.738.326	9,78	0	0,00	0	0,00	93.716.226.850
3	Banten	23.792.609.700	8,95	21.385.023.000	8,04	202.692.676.100	76,21	16.109.835.900	6,06	0	0,00	2.002.858.000	0,75	265.983.002.700
4	Jawa Tengah	72.308.465.000	36,98	12.144.000.000	6,21	92.958.111.000	47,54	18.121.402.000	9,27	0	0,00	0	0,00	195.531.978.000
5	DI Yogyakarta	34.976.261.200	17,74	7.158.880.000	3,63	61.262.232.000	31,07	36.208.634.256	18,36	49.327.920.850	25,01	8.270.560.000	4,19	197.204.488.306
6	Jawa Timur	36.841.654.350	10,32	39.917.601.050	11,18	266.539.645.400	74,65	13.760.221.850	3,85	0	0,00	0	0,00	357.059.122.650
7	Aceh	109.423.053.596	15,31	40.292.718.377	5,64	471.357.631.745	65,95	93.648.800.000	13,10	0	0,00	0	0,00	714.722.203.718
8	Sumatera Utara	56.938.273.735	32,44	8.458.505.865	4,82	108.371.208.642	61,75	1.745.815.060	0,99	0	0,00	0	0,00	175.513.803.302
9	Sumatera Barat	16.200.863.844	20,12	8.371.504.171	10,40	43.632.262.232	54,18	6.133.270.970	7,62	0	0,00	6.195.327.990	7,69	80.533.229.207
10	Riau	62.667.911.000	9,93	84.261.796.450	13,35	253.095.025.410	40,11	217.550.819.600	34,47	0	0,00	13.466.888.625	2,13	631.042.441.085
11	Kepulauan Riau	24.803.077.541	13,54	14.936.700.466	8,15	76.898.505.806	41,98	7.210.932.500	3,94	59.345.151.587	32,39	0	0,00	183.194.367.900
12	Jambi	27.125.162.365	15,24	10.757.379.000	6,04	127.828.161.300	71,81	12.302.367.000	6,91	0	0,00	0	0,00	178.013.069.665
13	Sumatera Selatan	15.656.516.000	9,78	22.637.018.000	14,14	120.133.450.000	75,06	1.623.016.000	1,01	0	0,00	0	0,00	160.050.000.000
14	Bangka Belitung	2.375.360.000	7,52	4.966.549.000	15,72	21.560.102.000	68,24	2.690.200.000	8,52	0	0,00	0	0,00	31.592.211.000
15	Bengkulu	48.155.579.017	36,42	26.320.890.000	19,90	50.051.725.000	37,85	5.997.500.000	4,54	0	0,00	1.709.893.000	1,29	132.235.587.017
16	Lampung	41.528.131.970	33,64	17.260.735.550	13,98	54.264.111.600	43,95	7.145.106.000	5,79	0	0,00	3.262.289.600	2,64	123.460.374.720
17	Kalimantan Barat	27.384.582.340	28,64	7.814.428.250	8,17	51.218.147.316	53,56	1.341.979.500	1,40	0	0,00	7.871.145.500	8,23	95.630.282.906
18	Kalimantan Tengah	21.876.274.886	15,14	21.112.166.670	14,61	36.990.426.280	25,60	63.583.253.355	44,01	0	0,00	913.040.820	0,63	144.475.162.011
19	Kalimantan Selatan	69.846.898.022	17,98	58.969.896.000	15,18	248.945.615.000	64,07	10.800.000.000	2,78	0	0,00	0	0,00	388.562.409.022
20	Kalimantan Timur	12.916.212.650	3,93	11.957.150.000	3,64	166.657.283.210	50,73	136.992.188.390	41,70	0	0,00	0	0,00	328.522.834.250
21	Kalimantan Utara	11.193.269.250	14,82	6.579.435.000	8,71	34.875.688.200	46,19	1.744.130.000	2,31	12.762.669.000	16,90	8.352.000.000	11,06	75.507.191.450
22	Sulawesi Utara	18.553.246.150	30,02	3.610.088.600	5,84	39.648.378.250	64,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61.811.713.000
23	Gorontalo	8.418.742.000	14,90	13.397.589.902	23,71	22.855.447.500	40,44	4.039.714.500	7,15	5.054.549.000	8,94	2.746.064.000	4,86	56.512.106.902
24	Sulawesi Tengah	19.958.751.467	19,05	19.251.230.553	18,37	51.379.993.100	49,03	5.962.340.264	5,69	8.244.107.911	7,87	0	0,00	104.796.423.295
25	Sulawesi Selatan	7.744.329.251	9,39	6.834.500.000	8,28	11.031.890.000	13,37	56.900.745.000	68,96	0	0,00	0	0,00	82.511.464.251
26	Sulawesi Barat	11.560.183.516	18,01	6.346.868.300	9,89	32.903.243.700	51,27	7.102.836.000	11,07	0	0,00	6.258.384.234	9,75	64.171.515.750
27	Sulawesi Tenggara	22.239.132.797	36,85	9.400.688.900	15,58	20.549.978.250	34,05	111.450.000	0,18	0	0,00	8.053.535.000	13,34	60.354.784.947
28	Maluku	34.355.471.000	24,99	6.930.035.000	5,04	88.201.983.000	64,15	1.746.989.000	1,27	6.264.499.000	4,56	0	0,00	137.498.977.000
29	Maluku Utara	10.222.651.050	11,59	2.279.328.000	2,58	22.213.363.500	25,19	53.464.234.950	60,63	0	0,00	0	0,00	88.179.577.500
30	Bali	22.602.988.675	16,88	6.245.527.000	4,66	79.765.772.380	59,57	11.603.468.200	8,67	13.675.672.250	10,21	0	0,00	133.893.428.505
31	Nusa Tenggara Barat	4.476.083.300	9,13	6.731.277.000	13,73	32.380.911.000	66,07	831.020.000	1,70	4.592.638.900	9,37	0	0,00	49.011.930.200
32	Nusa Tenggara Timur	8.835.289.000	20,26	972.434.000	2,23	23.108.561.000	52,99	2.410.930.000	5,53	0	0,00	8.281.096.000	18,99	43.608.310.000
33	Papua	20.737.335.000	31,24	4.788.031.000	7,21	13.723.572.000	20,67	27.135.520.000	40,88	0	0,00	0	0,00	66.384.458.000
34	Papua Barat	11.223.781.500	12,18	14.495.000.000	15,73	29.241.032.000	31,74	37.175.747.500	40,35	0	0,00	0	0,00	92.135.561.000
	Jumlah	980.269.132.961	14,99	541.137.800.267	8,28	3.886.042.802.417	59,43	895.046.006.839	13,69	159.267.208.498	2,44	77.383.082.769	1,18	6.539.146.033.751

Grafik 4.7A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan, Nasional
Tahun 2015

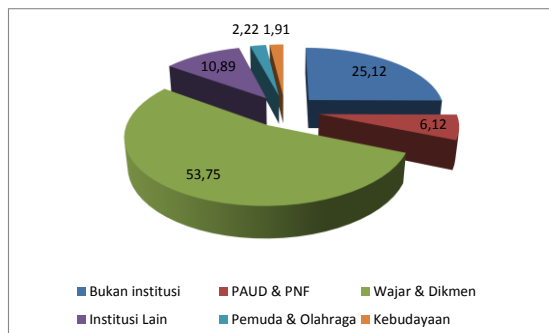


Pada tahun 2016 dan berdasarkan pada Tabel 4.9B maka program wajar dikdas dan dikmen menduduki porsi tertinggi sebesar Rp4.564.064,6 juta atau 53,75% berarti lebih dari separuh anggaran adalah untuk wajar dikdas dan dikmen. Bukan institusi pendidikan menduduki porsi kedua sebesar Rp2.132.713,9 juta atau 25,12%, berarti dana yang dialokasikan untuk manajemen di kantor sangat besar karena lebih dari 25%, sedangkan institusi pendidikan lainnya sebesar Rp925.134,6 juta atau 10,89%. Pemuda dan olahraga dan kebudayaan hanya 2,22% dan 1,91% karena memang belum semua Dinas Pendidikan termasuk Kebudayaan dan masih banyak Dinas Pendidikan yang termasuk Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4.9B
Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Bkn Institusi Pend		PAUD+PNF		Wajar Dikdas+Dikmen		Institusi Lain		Pemuda & Olahraga		Kebudayaan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	DKI Jakarta	1.203.306.188.658	44,81	2.650.548.000	0,10	1.478.789.739.000	55,06	889.258.120	0,03	0	0,00	0	0,00	2.685.635.733.778
2	Jawa Barat	84.562.012.500	33,29	6.227.627.750	2,45	121.667.119.350	47,89	38.880.881.989	15,30	0	0,00	2.712.940.000	1,07	254.050.581.589
3	Banten	11.320.200.000	3,86	18.267.337.000	6,23	254.826.663.000	86,95	6.940.000.000	2,37	0	0,00	1.735.000.000	0,59	293.089.200.000
4	Jawa Tengah	52.940.689.000	34,91	15.670.105.000	10,33	75.197.659.000	49,58	7.855.392.000	5,18	0	0,00	0	0,00	151.663.745.000
5	DI Yogyakarta	37.093.506.900	15,78	9.840.757.000	4,19	58.509.596.000	24,90	48.772.592.000	20,75	77.542.550.000	32,99	3.262.700.000	1,39	235.021.701.900
6	Jawa Timur	35.304.626.350	14,93	19.774.114.500	8,36	175.917.748.500	74,41	5.414.963.000	2,29	0	0,00	0	0,00	236.411.452.350
7	Aceh	107.668.413.457	17,59	52.399.201.250	8,56	365.845.562.820	59,78	86.105.040.000	14,07	0	0,00	0	0,00	612.018.217.527
8	Sumatera Utara	41.164.185.259	43,18	3.549.818.008	3,72	50.609.908.690	53,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95.323.911.957
9	Sumatera Barat	12.071.200.039	13,66	7.826.504.171	8,86	57.477.048.530	65,03	4.527.770.750	5,12	0	0,00	6.478.204.810	7,33	88.380.728.300
10	Riau	77.716.834.986	10,12	98.603.877.737	12,84	302.600.805.207	39,41	233.065.189.754	30,35	0	0,00	55.896.516.314	7,28	767.883.223.998
11	Kepulauan Riau	24.246.446.100	9,23	28.789.294.000	10,96	167.414.805.148	63,71	10.265.000.000	3,91	31.665.344.200	12,05	404.725.000	0,15	262.785.614.448
12	Jambi	32.303.690.715	20,76	6.326.891.000	4,07	113.926.025.725	73,21	3.067.760.000	1,97	0	0,00	0	0,00	155.624.367.440
13	Sumatera Selatan	8.696.394.250	19,78	6.462.016.100	14,70	28.441.427.000	64,68	372.000.000	0,85	0	0,00	0	0,00	43.971.837.350
14	Bangka Belitung	9.871.048.000	17,90	9.042.805.000	16,39	31.944.680.000	57,92	4.297.480.000	7,79	0	0,00	0	0,00	55.156.013.000
15	Bengkulu	11.748.037.250	8,43	7.720.529.800	5,54	71.738.535.950	51,51	25.621.105.000	18,40	22.450.053.500	16,12	0	0,00	139.278.261.500
16	Lampung	31.671.965.650	19,75	11.927.521.300	7,44	84.373.532.850	52,63	16.687.000.000	10,41	8.551.980.200	5,33	7.114.000.000	4,44	160.326.000.000
17	Kalimantan Barat	28.139.596.920	24,64	7.833.565.000	6,86	68.261.420.500	59,77	2.288.974.000	2,00	0	0,00	7.680.085.500	6,72	114.203.641.920
18	Kalimantan Tengah	13.459.240.000	15,68	6.656.500.000	7,76	27.484.391.000	32,02	38.229.869.000	44,54	0	0,00	0	0,00	85.830.000.000
19	Kalimantan Selatan	38.747.918.002	9,97	69.150.631.498	17,80	258.728.610.500	66,60	21.826.840.000	5,62	0	0,00	0	0,00	388.454.000.000
20	Kalimantan Timur	27.854.675.810	9,70	14.957.105.000	5,21	111.742.640.800	38,90	132.667.978.390	46,19	0	0,00	0	0,00	287.222.400.000
21	Kalimantan Utara	11.488.300.000	19,42	3.300.000.000	5,58	28.336.215.000	47,89	2.583.500.000	4,37	6.830.035.000	11,54	6.626.950.000	11,20	59.165.000.000
22	Sulawesi Utara	24.693.201.600	38,25	4.927.582.300	7,63	34.942.582.400	54,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64.563.366.300
23	Gorontalo	10.983.387.719	15,88	13.403.588.500	19,38	17.843.421.500	25,80	3.404.963.520	4,92	20.916.173.225	30,24	2.622.180.000	3,79	69.173.714.464
24	Sulawesi Tengah	24.672.345.951	18,48	20.859.885.503	15,63	68.993.942.417	51,69	12.822.031.623	9,61	0	0,00	6.135.817.860	4,60	133.484.023.354
25	Sulawesi Selatan	13.068.759.458	17,00	7.341.405.000	9,55	18.106.590.730	23,55	37.432.329.270	48,69	0	0,00	932.965.000	1,21	76.882.049.458
26	Sulawesi Barat	13.830.376.000	10,18	9.109.901.800	6,71	94.890.707.200	69,88	8.522.428.000	6,28	0	0,00	9.439.540.000	6,95	135.792.953.000
27	Sulawesi Tenggara	17.056.233.750	39,16	1.747.036.000	4,01	11.276.813.300	25,89	13.476.834.550	30,94	0	0,00	0	0,00	43.556.917.600
28	Maluku	31.573.885.000	22,78	6.257.817.000	4,51	92.220.636.000	66,53	2.924.933.000	2,11	0	0,00	5.631.389.000	4,06	138.608.660.000
29	Maluku Utara	22.912.514.000	13,48	5.960.580.000	3,49	77.605.277.000	45,43	64.356.084.000	37,67	0	0,00	0	0,00	170.834.455.000
30	Bali	22.810.496.400	17,70	1.804.845.000	1,40	52.079.565.600	40,42	42.591.433.100	33,06	9.561.071.900	7,42	0	0,00	128.847.412.000
31	Nusa Tenggara Barat	5.692.333.690	6,36	1.918.742.500	2,14	77.663.040.000	86,81	737.470.000	0,82	3.447.798.000	3,85	0	0,00	89.459.384.190
32	Nusa Tenggara Timur	6.042.994.400	13,28	1.778.826.950	3,91	26.504.756.250	58,27	3.795.225.400	8,34	7.365.979.300	16,19	0	0,00	45.487.782.300
33	Papua	26.778.510.995	20,38	22.955.902.505	17,47	28.862.064.000	21,97	44.712.322.000	34,03	0	0,00	8.077.900.000	6,15	131.386.699.500
34	Papua Barat	11.223.781.500	12,18	14.495.000.000	15,73	29.241.032.000	31,74	0	0,00	0	0,00	37.175.747.500	40,35	92.135.561.000
Jumlah		2.132.713.890.309	25,12	519.537.862.172	6,12	4.564.064.562.967	53,75	925.134.648.466	10,89	188.330.985.325	2,22	161.926.660.984	1,91	8.491.708.610.223

Grafik 4.7B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan, Nasional
Tahun 2016



4. Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa

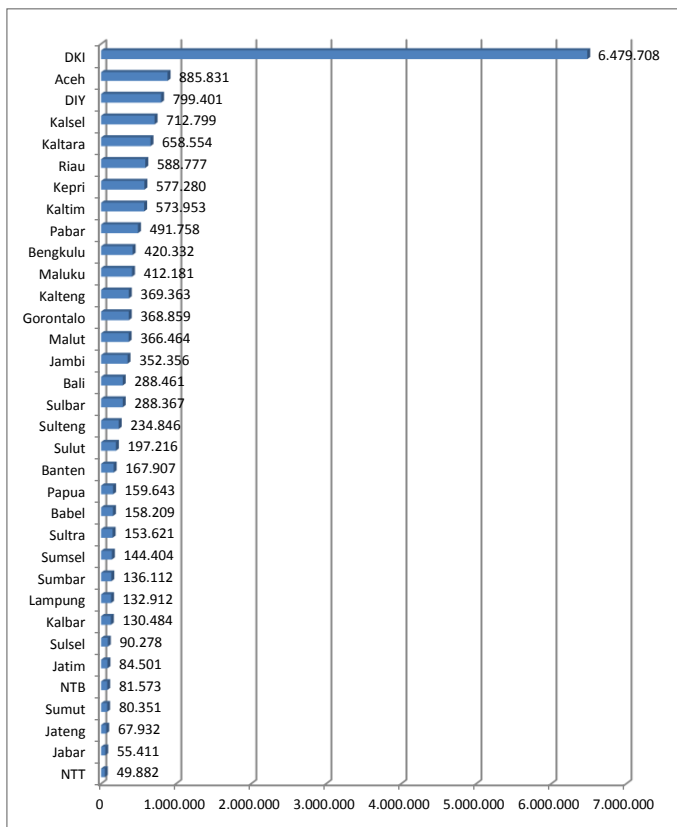
Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dimaksud adalah penjumlahan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung dibandingkan dengan siswa pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena belanja pendidikan ini untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah maka rasio belanja pendidikan terhadap siswa dapat dikatakan sebagai satuan biaya pendidikan dikdasmen. Tabel 4.10A tahun 2015 menunjukkan bahwa belanja pendidikan sebesar Rp16.135.604,6 juta dengan siswa sebesar 40.952.608, sehingga diperoleh satuan pendidikan sebesar Rp394.007,00 per siswa.

Namun, bila dilihat per provinsi maka belanja pendidikan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.999,2 milyar dengan siswa dikdasmen sebesar 1.388,8 ribu, sehingga satuan biaya terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.479.708,00 per siswa. Belanja pendidikan terkecil terjadi di Bangka Belitung sebesar Rp38.139,2 juta dengan siswa dikdasmen sebesar 241,1 ribu sehingga satuan biaya sebesar Rp158.209,00 namun bukan yang terkecil. Satuan biaya terkecil pada Nusa Tenggara Timur sebesar Rp49.882,00 per siswa dengan belanja pendidikan sebesar Rp64.746,1 ribu dengan siswa dikdasmen sebesar 1.298,0 ribu. Perbedaan antara satuan biaya yang terbesar dengan yang terkecil menunjukkan disparitas yang sangat besar antara provinsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belanja pendidikan yang besar tidak menunjukkan satuan biaya per siswa yang besar pula karena tergantung dari siswa dikdasmen yang dilayani.

Tabel 4.10A
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	Tahun 2014/2015				Rasio
			SD	SMP	SM	Jumlah	
1	DKI Jakarta	8.999.128.555.098	842.243	382.350	164.224	1.388.817	6.479.708
2	Jawa Barat	387.599.037.070	4.624.794	1.801.475	568.744	6.995.013	55.411
3	Banten	307.083.002.700	1.214.303	434.570	180.019	1.828.892	167.907
4	Jawa Tengah	312.885.079.000	2.951.687	1.238.897	415.260	4.605.844	67.932
5	DI Yogyakarta	384.068.252.773	292.959	132.054	55.432	480.445	799.401
6	Jawa Timur	406.617.974.650	2.975.134	1.289.133	547.724	4.811.991	84.501
7	Aceh	752.452.618.404	486.545	210.182	152.704	849.431	885.831
8	Sumatera Utara	223.726.549.302	1.793.678	650.966	339.730	2.784.374	80.351
9	Sumatera Barat	138.027.367.941	661.604	212.448	140.017	1.014.069	136.112
10	Riau	699.839.971.597	796.430	245.127	147.076	1.188.633	588.777
11	Kepulauan Riau	192.828.101.311	214.788	79.443	39.798	334.029	577.280
12	Jambi	209.492.016.795	399.444	122.559	72.543	594.546	352.356
13	Sumatera Selatan	215.688.662.776	943.352	351.438	198.859	1.493.649	144.404
14	Bangka Belitung	38.139.198.507	158.807	56.609	25.653	241.069	158.209
15	Bengkulu	152.741.096.389	221.966	91.570	49.846	363.382	420.332
16	Lampung	174.607.214.720	847.192	323.732	142.784	1.313.708	132.912
17	Kalimantan Barat	123.468.528.006	617.792	219.891	108.554	946.237	130.484
18	Kalimantan Tengah	167.796.383.937	296.599	105.266	52.421	454.286	369.363
19	Kalimantan Selatan	408.091.520.022	387.819	123.906	60.795	572.520	712.799
20	Kalimantan Timur	358.049.858.956	410.246	150.594	62.991	623.831	573.953
21	Kalimantan Utara	80.211.841.743	77.915	29.811	14.074	121.800	658.554
22	Sulawesi Utara	87.243.420.054	269.713	118.200	54.463	442.376	197.216
23	Gorontalo	79.736.563.981	139.149	51.522	25.500	216.171	368.859
24	Sulawesi Tengah	133.524.810.973	375.763	128.059	64.742	568.564	234.846
25	Sulawesi Selatan	145.980.535.022	1.000.521	397.915	218.580	1.617.016	90.278
26	Sulawesi Barat	76.659.549.665	174.690	63.544	27.606	265.840	288.367
27	Sulawesi Tenggara	87.533.579.947	344.212	137.170	88.422	569.804	153.621
28	Maluku	166.307.496.009	235.636	97.825	70.021	403.482	412.181
29	Maluku Utara	103.696.947.816	166.626	65.961	50.379	282.966	366.464
30	Bali	200.235.242.385	411.560	196.992	85.597	694.149	288.461
31	Nusa Tenggara Barat	66.282.748.997	520.803	182.465	109.286	812.554	81.573
32	Nusa Tenggara Timur	64.746.067.000	833.389	305.138	159.467	1.297.994	49.882
33	Papua	91.358.750.000	391.439	112.835	67.996	572.270	159.643
34	Papua Barat	99.756.008.609	131.269	43.446	28.141	202.856	491.758
	Jumlah	16.135.604.552.155	26.210.067	10.153.093	4.589.448	40.952.608	394.007

Grafik 4.8A
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi
Tahun 2015



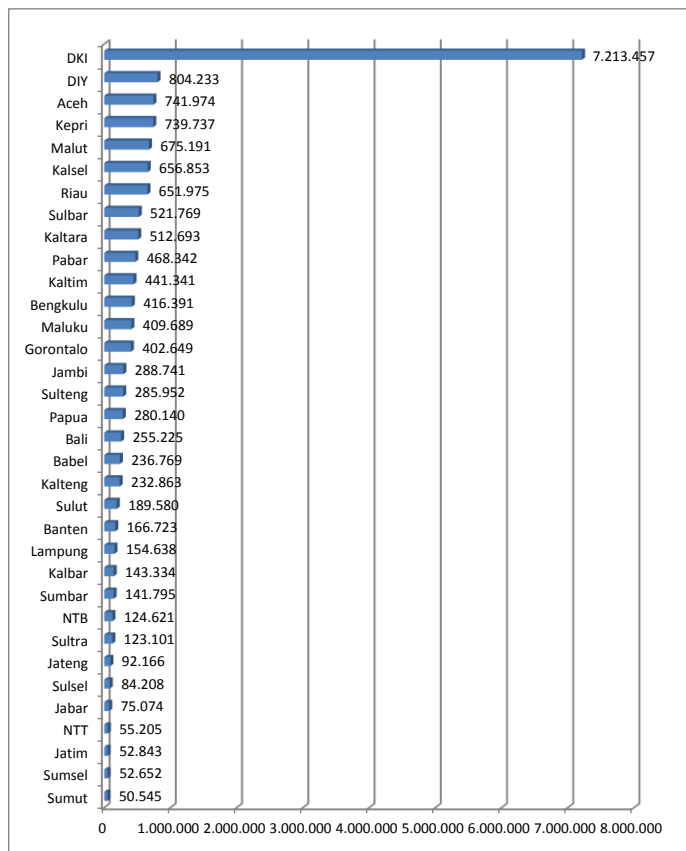
Pada Tabel 4.10B tahun 2016 menunjukkan bahwa belanja pendidikan sebesar Rp19.018.065,4 juta dengan siswa sebesar 45.117.161 sehingga diperoleh satuan pendidikan sebesar Rp421.526,00 per siswa.

Namun, bila dilihat per provinsi maka belanja pendidikan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.292,4 milyar dengan siswa dikdasmen sebesar 1.565,5 ribu, sehingga satuan biaya terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.213.457,00 per siswa. Belanja pendidikan terkecil terjadi di Bangka Belitung sebesar Rp63.078,0 juta dengan siswa dikdasmen sebesar 266,4 ribu, sehingga satuan biaya sebesar Rp236.769,00 namun bukan yang terkecil. Satuan biaya terkecil pada Sumatera Selatan sebesar Rp52.652,00 per siswa dengan belanja pendidikan sebesar Rp83.727,7 ribu dengan siswa dikdasmen sebesar 1.590,2 ribu. Perbedaan antara satuan biaya yang terbesar dengan yang terkecil menunjukkan disparitas yang sangat besar antara provinsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belanja pendidikan yang besar tidak menunjukkan satuan biaya per siswa yang besar pula karena tergantung dari siswa dikdasmen yang dilayani.

Tabel 4.10B
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	Tahun 2015/2016				Rasio
			SD	SMP	SM	Jumlah	
1	DKI Jakarta	11.292.414.762.239	826.332	373.223	365.910	1.565.465	7.213.457
2	Jawa Barat	592.038.619.281	4.574.165	1.817.283	1.494.637	7.886.085	75.074
3	Banten	341.789.200.000	1.210.046	433.340	406.652	2.050.038	166.723
4	Jawa Tengah	485.604.171.000	2.918.927	1.233.787	1.116.084	5.268.798	92.166
5	DI Yogyakarta	452.941.827.288	294.710	132.020	136.467	563.197	804.233
6	Jawa Timur	285.970.304.350	2.922.301	1.288.914	1.200.526	5.411.741	52.843
7	Aceh	654.718.050.893	484.677	205.149	192.574	882.400	741.974
8	Sumatera Utara	154.494.836.957	1.783.773	655.883	616.937	3.056.593	50.545
9	Sumatera Barat	154.742.617.764	659.825	216.296	215.189	1.091.310	141.795
10	Riau	837.980.173.939	805.544	253.670	226.081	1.285.295	651.975
11	Kepulauan Riau	273.957.232.412	222.755	83.224	64.365	370.344	739.737
12	Jambi	183.031.417.972	397.200	124.355	112.339	633.894	288.741
13	Sumatera Selatan	83.727.720.205	945.854	355.949	288.395	1.590.198	52.652
14	Bangka Belitung	63.077.995.703	160.215	59.377	46.819	266.411	236.769
15	Bengkulu	161.018.344.402	221.866	91.201	73.633	386.700	416.391
16	Lampung	221.019.183.000	846.898	320.742	261.628	1.429.268	154.638
17	Kalimantan Barat	144.049.973.720	611.299	231.521	162.177	1.004.997	143.334
18	Kalimantan Tengah	112.841.975.509	295.042	109.401	80.142	484.585	232.863
19	Kalimantan Selatan	410.311.771.000	387.002	126.040	111.621	624.663	656.853
20	Kalimantan Timur	310.745.154.000	415.584	155.292	133.217	704.093	441.341
21	Kalimantan Utara	67.384.826.167	78.400	30.879	22.154	131.433	512.693
22	Sulawesi Utara	91.221.909.061	259.963	120.863	100.352	481.178	189.580
23	Gorontalo	93.298.977.286	135.275	51.850	44.588	231.713	402.649
24	Sulawesi Tengah	171.905.222.857	365.996	131.144	104.028	601.168	285.952
25	Sulawesi Selatan	144.651.153.992	974.189	398.938	344.649	1.717.776	84.208
26	Sulawesi Barat	148.975.623.786	169.924	65.309	50.287	285.520	521.769
27	Sulawesi Tenggara	73.129.261.500	339.187	137.858	117.015	594.060	123.101
28	Maluku	169.829.783.305	231.877	98.099	84.557	414.533	409.689
29	Maluku Utara	189.495.018.000	162.843	66.188	51.623	280.654	675.191
30	Bali	197.836.861.000	406.628	198.659	169.861	775.148	255.225
31	Nusa Tenggara Barat	108.014.182.390	516.216	183.932	166.594	866.742	124.621
32	Nusa Tenggara Timur	74.921.071.300	817.783	319.629	219.735	1.357.147	55.205
33	Papua	171.170.141.500	403.015	118.163	89.838	611.016	280.140
34	Papua Barat	99.756.008.609	131.225	44.874	36.899	212.998	468.342
	Jumlah	19.018.065.372.387	25.976.536	10.233.052	4.589.448	45.117.161	421.526

Grafik 4.8B
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi
Tahun 2016



5. Belanja Pendidikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

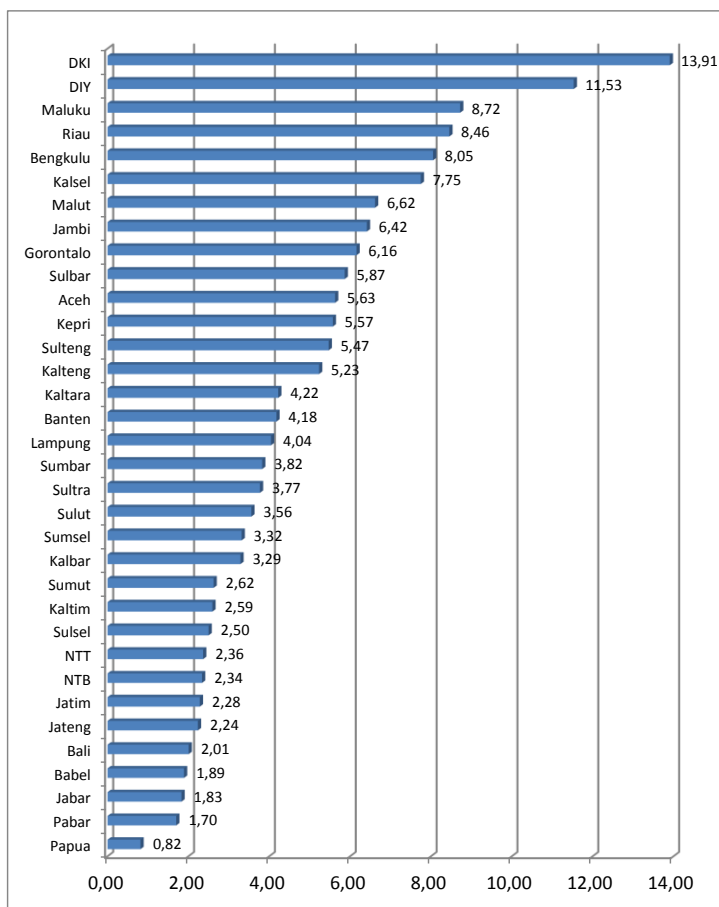
Belanja pendidikan terhadap APBD seharusnya 20%, namun pada kenyataannya tetap bervariasi antarprovinsi. Belanja pendidikan menggunakan data tahun 2015 namun APBD menggunakan tahun 2014 karena ketersediaan data yang ada. Pada Tabel 4.11A tahun 2015 menunjukkan bahwa belanja pendidikan sebesar Rp16.135.604,6 juta dengan APBD 2014 sebesar Rp263.307.844,2 juta sehingga diperoleh persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 6,12%. Hasilnya masih jauh dari yang seharusnya 20%. Bila dilihat per provinsi maka persentase terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,84% diikuti DI Yogyakarta sebesar 11,53% dan terkecil adalah Papua sebesar 0,82%, sedangkan provinsi lainnya lebih kecil dari 10%.

Tabel 4.11A
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi
Tahun 2015

No.	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	APBD 2014	%
1	DKI Jakarta	8.999.128.555.098	64.699.000.000.000	13,91
2	Jawa Barat	387.599.037.070	21.194.364.768.287	1,83
3	Banten	307.083.002.700	7.349.402.031.000	4,18
4	Jawa Tengah	312.885.079.000	13.997.158.183.000	2,24
5	DI Yogyakarta	384.068.252.773	3.330.039.349.990	11,53
6	Jawa Timur	406.617.974.650	17.811.135.360.418	2,28
7	Aceh	752.452.618.404	13.368.028.474.729	5,63
8	Sumatera Utara	223.726.549.302	8.526.300.954.643	2,62
9	Sumatera Barat	138.027.367.941	3.608.883.948.830	3,82
10	Riau	699.839.971.597	8.276.751.343.188	8,46
11	Kepulauan Riau	192.828.101.311	3.460.000.000.000	5,57
12	Jambi	209.492.016.795	3.265.329.746.272	6,42
13	Sumatera Selatan	215.688.662.776	6.501.271.947.580	3,32
14	Bangka Belitung	38.139.198.507	2.015.859.281.269	1,89
15	Bengkulu	152.741.096.389	1.896.631.491.461	8,05
16	Lampung	174.607.214.720	4.318.205.382.172	4,04
17	Kalimantan Barat	123.468.528.006	3.755.987.767.056	3,29
18	Kalimantan Tengah	167.796.383.937	3.206.706.335.277	5,23
19	Kalimantan Selatan	408.091.520.022	5.266.326.013.000	7,75
20	Kalimantan Timur	358.049.858.956	13.805.000.000.000	2,59
21	Kalimantan Utara	80.211.841.743	1.899.550.558.146	4,22
22	Sulawesi Utara	87.243.420.054	2.452.618.546.301	3,56
23	Gorontalo	79.736.563.981	1.294.658.364.425	6,16
24	Sulawesi Tengah	133.524.810.973	2.440.483.873.464	5,47
25	Sulawesi Selatan	145.980.535.022	5.839.377.160.724	2,50
26	Sulawesi Barat	76.659.549.665	1.306.640.548.783	5,87
27	Sulawesi Tenggara*)	87.533.579.947	2.321.892.890.432	3,77
28	Maluku	166.307.496.009	1.906.632.681.534	8,72
29	Maluku Utara	103.696.947.816	1.567.153.000.000	6,62
30	Bali*)	200.235.242.385	9.978.930.198.378	2,01
31	Nusa Tenggara Barat	66.282.748.997	2.834.204.802.100	2,34
32	Nusa Tenggara Timur	64.746.067.000	2.738.060.879.000	2,36
33	Papua	91.358.750.000	11.205.078.379.000	0,82
34	Papua Barat	99.756.008.609	5.870.179.976.714	1,70
	Jumlah	16.135.604.552.155	263.307.844.237.174	6,13

Catatan: APBD DKI diambil dari www.dki.go.id, *) APBD 2014 menggunakan data tahun 2015

Grafik 4.9A
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi
Tahun 2015



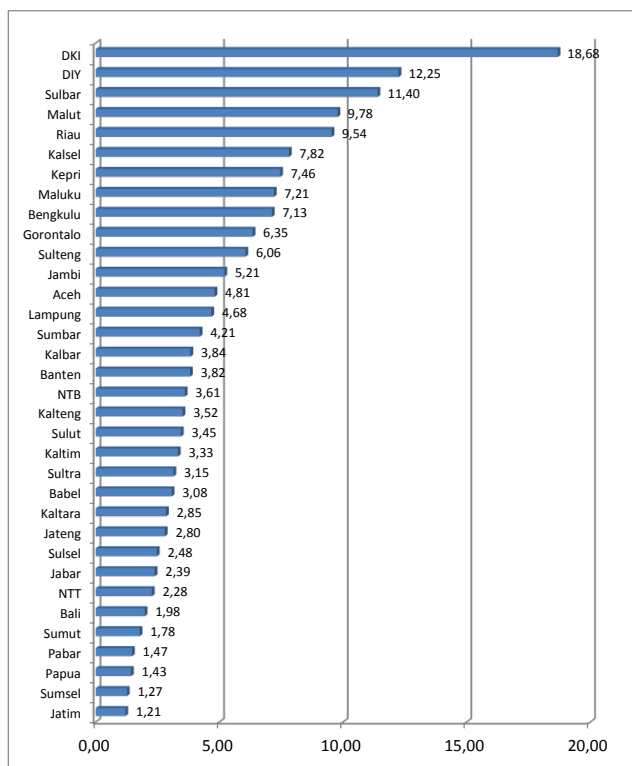
Belanja pendidikan menggunakan data tahun 2016 namun APBD menggunakan data tahun 2015 karena ketersediaan data yang ada. Pada Tabel 4.11B tahun 2016 menunjukkan bahwa belanja pendidikan sebesar Rp19.018.065,4 juta dengan APBD 2015 sebesar Rp276.048.793,1 juta, sehingga diperoleh persentase belanja pendidikan terhadap belanja pendidikan sebesar 6,89%. Hasilnya juga masih jauh dari yang seharusnya 20%. Bila dilihat per provinsi maka persentase terbesar pada DKI Jakarta sebesar 18,68% diikuti DI Yogyakarta sebesar 12,25% dan terkecil adalah Jawa Timur sebesar 1,21%, sedangkan provinsi lainnya lebih kecil dari 10%.

Tabel 4.11B
Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi
Tahun 2016

No.	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	APBD 2015	%
1	DKI Jakarta*)	11.292.414.762.239	60.442.738.783.978	18,68
2	Jawa Barat	592.038.619.281	24.753.926.333.107	2,39
3	Banten	341.789.200.000	8.947.633.698.000	3,82
4	Jawa Tengah	485.604.171.000	17.337.686.334.000	2,80
5	DI Yogyakarta	452.941.827.288	3.696.264.876.876	12,25
6	Jawa Timur	285.970.304.350	23.720.919.803.000	1,21
7	Aceh *)	654.718.050.893	13.608.652.987.274	4,81
8	Sumatera Utara	154.494.836.957	8.679.942.294.100	1,78
9	Sumatera Barat *)	154.742.617.764	3.673.843.859.909	4,21
10	Riau *)	837.980.173.939	8.779.977.824.854	9,54
11	Kepulauan Riau	273.957.232.412	3.670.455.273.330	7,46
12	Jambi	183.031.417.972	3.513.160.756.558	5,21
13	Sumatera Selatan	83.727.720.205	6.609.708.624.576	1,27
14	Bangka Belitung *)	63.077.995.703	2.049.322.545.338	3,08
15	Bengkulu	161.018.344.402	2.258.697.036.011	7,13
16	Lampung	221.019.183.000	4.723.190.697.838	4,68
17	Kalimantan Barat *)	144.049.973.720	3.755.987.767.056	3,84
18	Kalimantan Tengah *)	112.841.975.509	3.206.706.335.277	3,52
19	Kalimantan Selatan	410.311.771.000	5.246.601.442.000	7,82
20	Kalimantan Timur	310.745.154.000	9.336.213.350.000	3,33
21	Kalimantan Utara	67.384.826.167	2.364.623.612.074	2,85
22	Sulawesi Utara	91.221.909.061	2.641.789.104.310	3,45
23	Gorontalo	93.298.977.286	1.468.732.072.042	6,35
24	Sulawesi Tengah	171.905.222.857	2.837.564.141.400	6,06
25	Sulawesi Selatan *)	144.651.153.992	5.839.377.160.724	2,48
26	Sulawesi Barat *)	148.975.623.786	1.306.640.548.783	11,40
27	Sulawesi Tenggara *)	73.129.261.500	2.321.892.890.432	3,15
28	Maluku	169.829.783.305	2.355.709.811.760	7,21
29	Maluku Utara	189.495.018.000	1.936.900.925.130	9,78
30	Bali*)	197.836.861.000	9.978.930.198.378	1,98
31	Nusa Tenggara Barat	108.014.182.390	2.993.637.551.600	3,61
32	Nusa Tenggara Timur	74.921.071.300	3.289.126.340.000	2,28
33	Papua	171.170.141.500	11.935.508.825.500	1,43
34	Papua Barat	99.756.008.609	6.766.729.292.314	1,47
	Jumlah	19.018.065.372.387	276.048.793.097.530	6,89

Catatan: APBD DKI diambil dari www.dki.go.id, *) APBD 2015 menggunakan data tahun 2014

Grafik 4.9B
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi
Tahun 2016



B. Analisis Perkembangan Belanja SKPD Dinas Pendidikan Provinsi

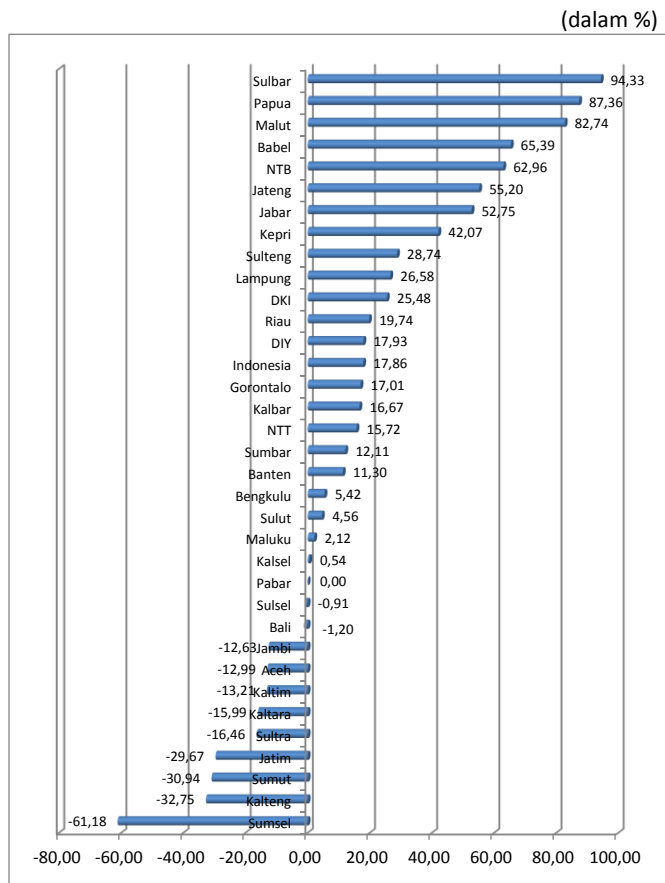
Perkembangan belanja pendidikan dilihat pada tahun 2015 dan 2016 dengan melihat angka pertumbuhan selama 2 tahun data. Angka pertumbuhan tersebut ada enam jenis, yaitu 1) angka pertumbuhan belanja pendidikan, 2) angka pertumbuhan belanja tidak langsung menurut jenis belanja, 3) angka pertumbuhan belanja langsung menurut tipe belanja, 4) angka pertumbuhan belanja langsung menurut jenis pendidikan, 5) angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa, dan 6) angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD. Perkembangan selama 2 tahun dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebenarnya belum bisa melihat kenaikan atau penurunan dana yang signifikan. Namun, karena yang tersedia hanya data selama 2 tahun maka tetap diberikan deskripsinya.

Tabel 4.12
Perkembangan Persentase Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2015-2016

No.	Nama Provinsi	Tak Langsung			Langsung			Jumlah		
		2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	DKI Jakarta	8.053.402.757.456	8.606.779.028.461	6,87	945.725.797.642	2.685.635.733.778	183,98	8.999.128.555.098	11.292.414.762.239	25,48
2	Jawa Barat	293.882.810.220	337.988.037.692	15,01	93.716.226.850	254.050.581.589	171,08	387.599.037.070	592.038.619.281	52,75
3	Banten	41.100.000.000	48.700.000.000	18,49	265.983.002.700	293.089.200.000	10,19	307.083.002.700	341.789.200.000	11,30
4	Jawa Tengah	117.353.101.000	333.940.426.000	184,56	195.531.978.000	151.663.745.000	-22,44	312.885.079.000	485.604.171.000	55,20
5	DI Yogyakarta	186.863.764.467	217.920.125.388	16,62	197.204.488.306	235.021.701.900	19,18	384.068.252.773	452.941.827.288	17,93
6	Jawa Timur	49.558.852.000	49.558.852.000	0,00	357.059.122.650	236.411.452.350	-33,79	406.617.974.650	285.970.304.350	-29,67
7	Aceh	37.730.414.686	42.699.833.366	13,17	714.722.203.718	612.018.217.527	-14,37	752.452.618.404	654.718.050.893	-12,99
8	Sumatera Utara	48.212.746.000	59.170.925.000	22,73	175.513.803.302	95.323.911.957	-45,69	223.726.549.302	154.494.836.957	-30,94
9	Sumatera Barat	57.494.138.734	66.361.889.464	15,42	80.533.229.207	88.380.728.300	9,74	138.027.367.941	154.742.617.764	12,11
10	Riau	68.797.530.512	70.096.949.941	1,89	631.042.441.085	767.883.223.998	21,68	699.839.971.597	837.980.173.939	19,74
11	Kepulauan Riau	9.633.733.411	11.171.617.964	15,96	183.194.367.900	262.785.614.448	43,45	192.828.101.311	273.957.232.412	42,07
12	Jambi	31.478.947.130	27.407.050.532	-12,94	178.013.069.665	155.624.367.440	-12,58	209.492.016.795	183.031.417.972	-12,63
13	Sumatera Selatan	55.638.662.776	39.755.882.855	-28,55	160.050.000.000	43.971.837.350	-72,53	215.688.662.776	83.727.720.205	-61,18
14	Bangka Belitung	6.546.987.507	7.921.982.703	21,00	31.592.211.000	55.156.013.000	74,59	38.139.198.507	63.077.995.703	65,39
15	Bengkulu	20.505.509.372	21.740.082.902	6,02	132.235.587.017	139.278.261.500	5,33	152.741.096.389	161.018.344.402	5,42
16	Lampung	51.146.840.000	60.693.183.000	18,66	123.460.374.720	160.326.000.000	29,86	174.607.214.720	221.019.183.000	26,58
17	Kalimantan Barat	27.838.245.100	29.846.331.800	7,21	95.630.282.906	114.203.641.920	19,42	123.468.528.006	144.049.973.720	16,67
18	Kalimantan Tengah	23.321.221.926	27.011.975.509	15,83	144.475.162.011	85.830.000.000	-40,59	167.796.383.937	112.841.975.509	-32,75
19	Kalimantan Selatan	19.529.111.000	21.857.771.000	11,92	388.562.409.022	388.454.000.000	-0,03	408.091.520.022	410.311.771.000	0,54
20	Kalimantan Timur	29.527.024.706	23.522.754.000	-20,33	328.522.834.250	287.222.400.000	-12,57	358.049.858.956	310.745.154.000	-13,21
21	Kalimantan Utara	4.704.650.293	8.219.826.167	74,72	75.507.191.450	59.165.000.000	-21,64	80.211.841.743	67.384.826.167	-15,99
22	Sulawesi Utara	25.431.707.054	26.658.542.761	4,82	61.811.713.000	64.563.366.300	4,45	87.243.420.054	91.221.909.061	4,56
23	Gorontalo	23.224.457.079	24.125.262.822	3,88	56.512.106.902	69.173.714.464	22,41	79.736.563.981	93.298.977.286	17,01
24	Sulawesi Tengah	28.728.387.678	38.421.199.503	33,74	104.796.423.295	133.484.023.354	27,37	133.524.810.973	171.905.122.857	28,74
25	Sulawesi Selatan	63.469.070.771	67.769.104.534	6,78	82.511.464.251	76.882.049.458	-6,82	145.980.535.022	144.651.153.992	-0,91
26	Sulawesi Barat	12.488.033.915	13.182.670.786	5,56	64.171.515.750	135.792.953.000	111,61	76.659.549.665	148.975.623.786	94,33
27	Sulawesi Tenggara	27.178.795.000	29.572.343.900	8,81	60.354.784.947	43.556.917.600	-27,83	87.533.579.947	73.129.261.500	-16,46
28	Maluku	28.808.519.009	31.221.123.305	8,37	137.498.977.000	138.608.660.000	0,81	166.307.496.009	169.829.783.305	2,12
29	Maluku Utara	15.517.370.316	18.660.563.000	20,26	88.179.577.500	170.834.455.000	93,73	103.696.947.816	189.495.018.000	82,74
30	Bali	66.341.813.880	68.989.449.000	3,99	133.893.428.505	128.847.412.000	-3,77	200.235.242.385	197.836.861.000	-1,20
31	Nusa Tenggara Barat	17.270.818.797	18.554.798.200	7,43	49.011.930.200	89.459.384.190	82,53	66.282.748.997	108.014.182.390	62,96
32	Nusa Tenggara Timur	21.137.757.000	29.433.289.000	39,25	43.608.310.000	45.487.782.300	4,31	64.746.067.000	74.921.071.300	15,72
33	Papua	24.974.292.000	39.783.442.000	59,30	66.384.458.000	131.386.699.500	97,92	91.358.750.000	171.170.141.500	87,36
34	Papua Barat	7.620.447.609	7.620.447.609	0,00	92.135.561.000	92.135.561.000	0,00	99.756.008.609	99.756.008.609	0,00
	Jumlah	9.596.458.518.404	10.526.356.762.165	9,69	6.539.146.033.751	8.491.708.610.223	29,86	16.135.604.552.155	19.018.065.372.387	17,86

Tabel 4.12 menunjukkan perkembangan persentase belanja pendidikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Belanja tidak langsung meningkat 9,69% lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja langsung yang meningkat sangat besar sebesar 29,86%, sedangkan belanja pendidikan meningkat cukup besar sebesar 17,86%. Hal ini berarti peningkatan program pendidikan sangat besar karena mencapai 30% per tahun. Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja tidak langsung terbesar lebih dari 50% terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua, sedangkan terkecil kurang dari 5% terjadi di Provinsi Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Bali. Penurunan belanja tidak langsung terbesar lebih dari 20% terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dan tak ada yang menurun kurang dari 5%.

Grafik 4.10
Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2015-2016



Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja langsung terbesar lebih dari 100% terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat, sedangkan terkecil kurang dari 10% terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Penurunan belanja langsung terbesar lebih dari 40% terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah dan terkecil kurang dari 10% terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Tabel 4.13
Perkembangan Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015--2016

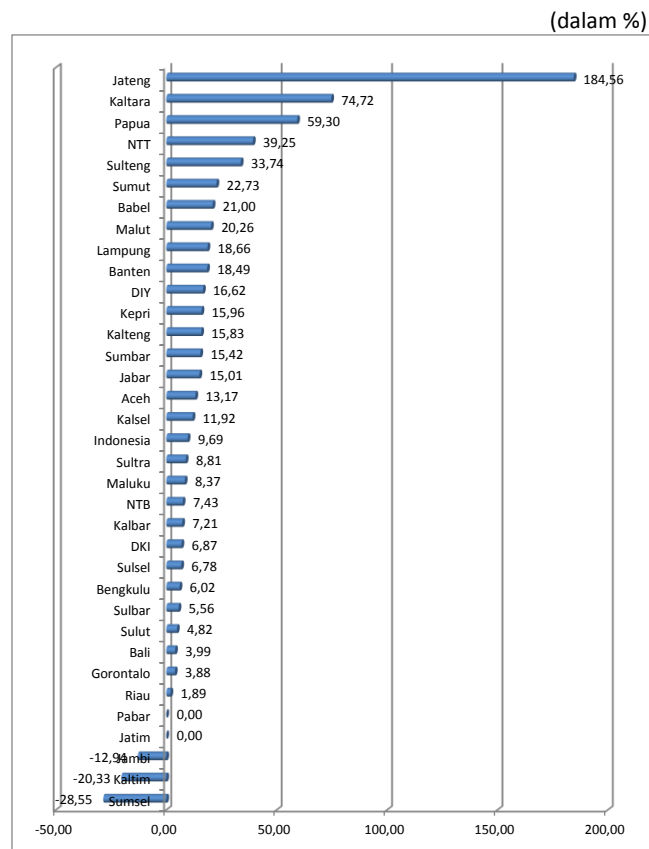
No.	Nama Provinsi	Gaji dan Tunjangan			Tambahan Penghasilan PNS			Insentif Pem Retribusi			Jumlah		
		2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	DKI Jakarta	2,763,044,417,000	2,926,112,870,461	5.90	5,290,358,340,456	5,680,666,158,000	7.38	0	0	-	8,053,402,757,456	8,606,779,028,461	6.87
2	Jawa Barat	149,822,510,220	168,004,237,692	12.14	144,060,300,000	169,983,800,000	17.99	0	0	-	293,882,810,220	337,988,037,692	15.01
3	Banten	24,657,510,000	30,279,700,000	22.80	16,442,490,000	18,420,300,000	12.03	0	0	-	41,100,000,000	48,700,000,000	18.49
4	Jawa Tengah	49,961,096,000	189,670,326,000	279.64	67,371,305,000	144,270,100,000	114.14	20,700,000	0	-100.00	117,353,101,000	333,940,426,000	184.56
5	DI Yogyakarta	186,863,764,467	217,920,125,388	16.62	0	0	-	0	0	-	186,863,764,467	217,920,125,388	16.62
6	Jawa Timur	38,519,911,000	38,519,911,000	0.00	11,037,441,000	11,037,441,000	0.00	1,500,000	1,500,000	0.00	49,558,852,000	49,558,852,000	0.00
7	Aceh	23,013,614,686	28,379,633,366	23.32	14,716,800,000	14,257,800,000	-3.12	0	62,400,000	-	37,730,414,686	42,699,833,366	13.17
8	Sumatera Utara	35,127,646,000	43,667,800,000	24.31	13,085,100,000	15,503,125,000	18.48	0	0	-	48,212,746,000	59,170,925,000	22.73
9	Sumatera Barat	42,819,679,070	49,797,359,800	16.30	14,668,384,664	16,559,084,664	0.00	6,075,000	5,445,000	-10.37	57,494,138,734	66,361,889,464	15.42
10	Riau	36,195,930,512	42,257,829,941	16.75	32,601,600,000	27,839,120,000	-14.61	0	0	-	68,797,530,512	70,096,949,941	1.89
11	Kepulauan Riau	5,842,983,411	6,649,597,964	13.80	3,790,750,000	4,522,020,000	19.29	0	0	-	9,633,733,411	11,171,617,964	15.96
12	Jambi	18,722,560,830	20,214,164,232	7.97	12,756,386,300	7,192,886,300	-43.61	0	0	-	31,478,947,130	27,407,050,532	-12.94
13	Sumatera Selatan	32,652,162,776	30,549,882,855	-6.44	22,860,500,000	9,064,000,000	-60.35	126,000,000	142,000,000	12.70	55,638,662,776	39,755,882,855	-28.55
14	Bangka Belitung	4,241,302,507	4,200,506,703	-0.96	2,305,685,000	3,721,476,000	61.40	0	0	-	6,546,987,507	7,921,982,703	21.00
15	Bengkulu	17,653,317,217	18,581,064,943	5.79	2,942,192,155	3,157,697,959	7.32	0	1,320,000	-	20,505,509,372	21,740,082,902	6.02
16	Lampung	19,551,320,000	23,527,291,500	20.34	6,022,100,000	6,774,300,000	12.49	25,573,420,000	30,391,591,500	18.84	51,146,840,000	60,693,183,000	18.66
17	Kalimantan Barat	13,657,473,100	14,918,547,800	9.23	14,174,112,000	14,921,064,000	5.27	6,660,000	6,720,000	0.90	27,838,245,100	29,846,311,800	7.21
18	Kalimantan Tengah	18,464,789,926	18,722,890,009	1.40	4,856,432,000	8,289,085,500	70.68	0	0	-	23,321,221,926	27,011,975,509	15.83
19	Kalimantan Selatan	17,742,141,000	14,384,775,000	-12.61	6,733,970,000	7,451,996,000	10.66	21,000,000	21,000,000	0.00	19,529,111,000	21,857,771,000	11.92
20	Kalimantan Timur	15,038,274,706	11,950,314,000	-20.53	14,488,300,000	11,572,440,000	0.00	450,000	0	-100.00	29,527,024,706	23,522,754,000	-20.33
21	Kalimantan Utara	2,376,650,293	3,571,826,167	50.29	2,328,000,000	4,648,000,000	99.66	0	0	-	4,704,650,293	8,219,826,167	74.72
22	Sulawesi Utara	16,862,335,467	17,544,936,884	4.05	8,569,371,587	9,113,605,877	6.35	0	0	-	25,431,707,054	26,658,542,761	4.82
23	Gorontalo	15,274,457,079	16,401,012,822	7.38	7,950,000,000	7,724,250,000	-2.84	0	0	-	23,224,457,079	24,125,262,822	3.88
24	Sulawesi Tengah	22,499,656,947	31,362,501,772	39.39	6,227,230,731	7,057,230,731	13.33	1,500,000	1,467,000	-2.20	28,728,387,678	38,421,199,503	33.74
25	Sulawesi Selatan	44,793,397,056	48,626,374,534	8.56	18,597,313,715	19,039,350,000	2.38	78,360,000	103,380,000	31.93	63,469,070,771	67,769,104,534	6.78
26	Sulawesi Barat	9,360,954,415	10,004,786,923	6.88	3,127,079,500	3,177,883,863	1.62	0	0	-	12,488,033,915	13,182,670,786	5.56
27	Sulawesi Tenggara	21,656,052,100	24,098,111,900	11.28	5,522,274,000	5,474,232,000	-0.87	468,900	0	-100.00	27,178,795,000	29,572,343,900	8.81
28	Maluku	19,902,304,009	20,668,360,304	3.85	8,906,215,000	10,552,763,001	18.49	0	0	-	28,808,519,009	31,221,123,305	8.37
29	Maluku Utara	13,306,370,316	16,434,563,000	23.51	2,211,000,000	2,226,000,000	0.68	0	0	-	15,517,370,316	18,660,563,000	20.26
30	Bali	37,300,967,880	40,349,881,000	8.17	29,028,798,000	28,627,520,000	-1.38	12,048,000	12,048,000	0.00	66,341,813,880	68,989,449,000	3.99
31	Nusa Tenggara Barat	13,015,228,797	14,065,058,200	8.07	4,255,590,000	4,489,740,000	5.50	0	0	-	17,270,818,797	18,554,798,200	7.43
32	Nusa Tenggara Timur	16,201,040,000	19,242,890,200	18.78	4,929,007,000	10,181,398,800	106.56	7,710,000	9,000,000	16.73	21,137,757,000	29,433,289,000	39.25
33	Papua	14,705,064,000	22,520,062,000	53.14	10,269,228,000	17,263,380,000	68.11	0	0	-	24,974,292,000	39,783,442,000	59.30
34	Papua Barat	5,485,047,609	5,485,047,609	0.00	2,135,400,000	2,135,400,000	0.00	0	0	-	7,620,447,609	7,620,447,609	0.00
	Jumlah	3,761,273,930,396	4,188,684,241,970	11.36	5,809,328,696,108	6,306,914,648,695	8.57	25,855,891,900	30,757,871,500	18.96	9,596,458,518,404	10,526,356,762,165	9.69

Berdasarkan Tabel 4.13, selama dua tahun gaji dan tunjangan meningkat 11,36%, hal ini wajar karena memang gaji pegawai setiap tahun meningkat. Namun, terdapat data yang kurang wajar karena terdapat dua provinsi yang menurun lebih dari 5%, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Demikian juga terdapat tiga provinsi yang meningkat lebih dari 50%, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua.

Tambahan penghasilan selama dua tahun meningkat 8,57%, hal ini wajar. Namun, terdapat data yang kurang wajar karena terdapat dua provinsi yang menurun lebih dari 5%, yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Demikian juga terdapat enam provinsi yang meningkat lebih dari 50%, yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Insentif pemungutan retribusi ternyata tidak selalu dialokasikan oleh semua provinsi. Terdapat 13 provinsi mengalokasikan pada tahun 2015, namun hanya 12 provinsi mengalokasikan pada tahun 2016. Contohnya, Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara hanya mengalokasikan tahun 2015, sedangkan Provinsi Aceh dan Bengkulu hanya mengalokasikan tahun 2016.

Grafik 4.11
Angka Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2015-2016



Secara keseluruhan terjadi peningkatan belanja tidak langsung sebesar 9,69%, hal ini wajar. Namun, terdapat data yang kurang wajar karena terdapat dua provinsi yang menurun lebih dari 5%, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Demikian juga terdapat empat provinsi yang meningkat lebih dari 30%, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Tabel 4.14 menunjukkan perkembangan belanja langsung menurut tipe belanja tiap provinsi. Berdasarkan Tabel 4.14 maka terjadi peningkatan modal sangat besar sebesar 146,37%, sedangkan barang dan jasa serta pegawai masing-masing meningkat 10,77% dan 9,87%.

Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja pegawai yang sangat ekstrim lebih besar dari 200% terjadi di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara. Peningkatan lebih besar dari 50% terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sebaliknya, terjadi penurunan belanja pegawai cukup besar lebih dari 20% di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Tabel 4.14
Perkembangan Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Provinsi
Tahun 2015—2016

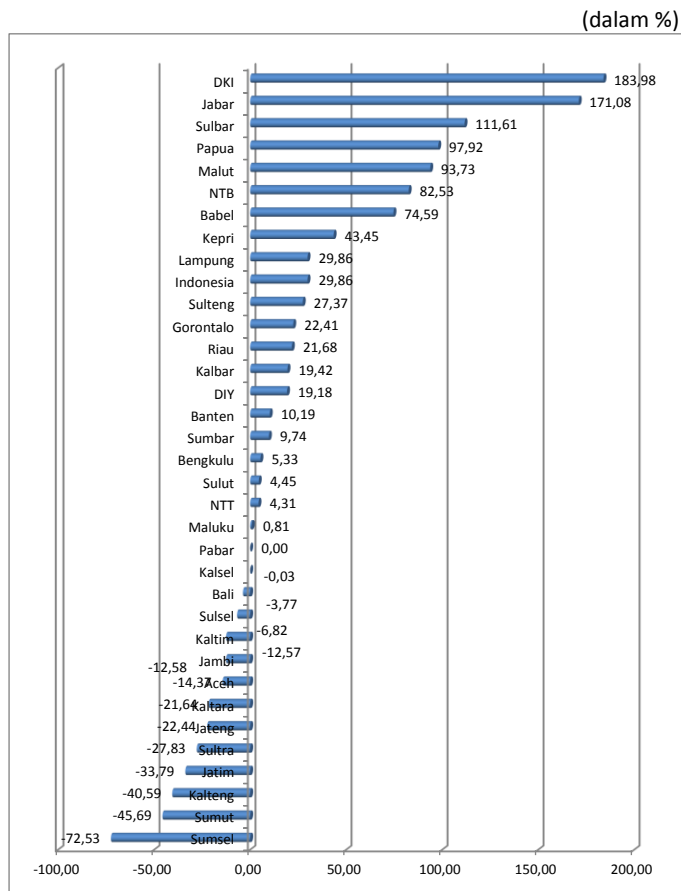
No.	Nama Provinsi	Pegawai			Barang dan Jasa			Modal			Jumlah		
		2015	2016	AP	2015	2016	AP	2015	2016	AP	2015	2016	AP
1	DKI Jakarta	5.501.480.000	1.029.920.000	-81,28	931.785.666.232	1.524.686.907.112	63,63	8.438.651.410	1.159.918.906.666	13645,31	945.725.797.642	2.685.635.733.778	183,98
2	Jawa Barat	11.923.342.500	18.380.343.500	54,15	74.912.574.350	174.560.238.089	133,02	6.880.310.000	61.110.000.000	788,19	93.716.226.850	254.050.581.589	171,08
3	Banten	5.701.715.000	3.409.530.000	-40,20	231.369.957.100	137.722.602.500	-40,48	28.911.330.600	151.957.067.500	425,60	265.983.002.700	293.089.200.000	10,19
4	Jawa Tengah	20.244.810.000	32.239.490.000	59,25	153.031.461.000	114.137.368.000	-25,42	22.255.707.000	5.286.887.000	-76,24	195.531.978.000	151.663.745.000	-22,44
5	DI Yogyakarta	16.643.581.692	23.682.426.568	42,29	123.164.870.909	135.589.975.452	10,09	57.396.035.705	75.749.299.880	31,98	197.204.488.306	235.021.701.900	19,18
6	Jawa Timur	73.694.383.000	63.034.020.500	-14,47	270.043.944.750	169.925.617.350	-37,07	13.320.794.900	3.451.814.500	-74,09	357.059.122.650	236.411.452.350	-33,79
7	Aceh	64.724.730.000	41.699.331.600	-35,57	510.461.394.739	396.736.904.795	-22,28	139.536.078.979	173.581.981.132	24,40	714.722.203.718	612.018.217.527	-14,37
8	Sumatera Utara	23.259.597.500	12.742.782.000	-45,21	117.680.639.066	71.498.674.957	-39,24	34.573.566.736	11.082.455.000	-67,95	175.513.803.302	95.323.911.957	-45,69
9	Sumatera Barat	0	0	0,00	65.047.548.177	52.846.460.850	0,00	15.485.681.030	35.534.267.450	0,00	80.533.229.207	88.380.728.300	9,74
10	Riau	21.883.648.000	73.074.634.455	233,92	499.657.177.310	619.534.419.665	23,99	109.501.615.775	75.274.169.878	-31,26	631.042.441.085	767.883.223.998	21,68
11	Kepulauan Riau	21.780.715.900	25.395.491.659	16,60	151.298.401.363	229.378.242.689	51,61	10.115.250.637	8.011.880.100	-20,79	183.194.367.900	262.785.614.448	43,45
12	Lambi	10.428.940.500	12.285.334.000	17,80	108.539.323.065	102.426.259.440	-5,63	59.044.806.100	40.912.774.000	-30,71	178.013.069.665	155.624.367.440	-12,58
13	Sumatera Selatan	293.500.000	91.800.000	-68,72	134.257.264.000	42.104.468.350	-68,64	25.499.236.000	1.775.569.000	-93,04	160.050.000.000	43.971.837.350	-72,53
14	Bangka Belitung	457.100.000	2.528.020.000	453,11	30.074.711.000	47.775.543.000	58,86	1.060.400.000	4.852.220.000	357,58	31.592.211.000	55.156.013.000	74,59
15	Bengkulu	10.022.159.800	6.757.315.000	-32,58	102.674.177.217	56.836.884.550	-44,64	19.539.250.000	75.684.061.950	287,34	132.235.587.017	139.278.261.500	5,33
16	Lampung	6.720.259.000	5.323.752.000	-20,78	107.357.395.320	140.490.647.150	30,86	9.382.720.400	14.511.600.850	54,66	123.460.374.720	160.326.000.000	29,86
17	Kalimantan Barat	2.214.367.600	1.939.730.000	-12,40	91.807.849.556	110.760.255.920	20,64	1.608.065.750	1.503.656.000	-6,49	95.630.282.906	114.203.641.920	19,42
18	Kalimantan Tengah	7.409.167.500	6.861.599.000	-7,39	129.249.641.961	78.283.161.000	-39,43	7.816.352.550	685.240.000	-91,23	144.475.162.011	85.830.000.000	-40,59
19	Kalimantan Selatan	11.024.200.000	8.117.980.000	-26,36	353.975.944.022	372.259.220.000	5,17	23.562.265.000	8.076.800.000	-65,72	388.562.409.022	388.454.000.000	-0,03
20	Kalimantan Timur	10.412.358.390	9.775.508.390	-6,12	242.048.584.160	271.196.076.610	0,00	76.061.891.700	6.250.815.000	0,00	328.532.834.250	287.222.400.000	-12,57
21	Kalimantan Utara	9.135.003.200	3.233.050.000	-64,61	61.318.235.650	53.764.050.000	-12,32	5.053.952.600	2.167.900.000	-57,10	75.507.191.450	59.165.000.000	-21,64
22	Sulawesi Utara	1.327.763.700	2.467.056.720	85,81	41.623.393.400	50.730.155.900	21,88	18.860.555.900	11.366.153.680	-39,74	61.811.713.000	64.563.366.300	4,45
23	Gorontalo	28.318.485.000	20.549.355.000	-27,43	23.757.121.902	41.780.984.464	75,87	4.436.500.000	6.843.375.000	54,25	56.512.106.902	69.173.714.464	22,41
24	Sulawesi Tengah	11.982.856.800	9.241.452.000	-22,88	87.485.494.898	117.400.204.994	34,19	5.328.071.597	6.842.366.360	28,42	104.796.423.295	133.484.023.354	27,37
25	Sulawesi Selatan	1.864.200.000	2.597.889.000	39,36	79.680.238.251	72.040.755.788	-9,59	967.026.000	2.243.404.670	131,99	82.511.464.251	76.882.049.458	-6,82
26	Sulawesi Barat	0	0	0,00	37.053.789.250	46.647.490.800	25,89	27.117.726.500	89.145.462.200	228,74	64.171.515.750	135.792.953.000	111,61
27	Sulawesi Tenggara	1.748.730.000	1.990.220.000	13,81	36.189.638.877	34.666.670.000	-4,21	22.416.416.070	6.900.027.600	-69,22	60.354.784.947	43.556.917.600	-27,83
28	Maluku	25.350.000	204.230.000	705,64	134.201.645.000	126.246.150.200	-5,93	3.271.982.000	12.158.279.800	271,59	137.498.977.000	138.608.660.000	0,81
29	Maluku Utara	2.532.975.000	24.640.600.000	872,79	67.103.777.000	98.848.725.500	47,31	18.542.825.500	47.345.129.500	155,33	88.179.577.500	170.834.455.000	93,73
30	Bali	0	0	0,00	0	0	0,00	133.893.428.505	128.847.412.000	-3,77	133.893.428.505	128.847.412.000	-3,77
31	Nusa Tenggara Barat	1.974.432.500	2.349.588.000	19,00	46.435.247.700	64.353.192.190	38,59	602.250.000	22.756.604.000	3678,60	49.011.990.200	89.459.384.190	82,53
32	Nusa Tenggara Timur	3.245.142.000	6.347.002.000	95,58	37.742.796.000	37.909.854.300	0,44	2.620.372.000	1.230.926.000	-53,02	43.608.310.000	45.487.782.300	4,31
33	Papua	6.672.960.000	10.617.900.000	59,12	53.658.633.000	103.083.149.500	92,11	6.052.865.000	17.685.650.000	192,19	66.384.458.000	131.386.699.500	97,52
34	Papua Barat	6.471.385.000	6.471.385.000	0,00	81.441.110.000	81.441.110.000	0,00	4.223.066.000	4.223.066.000	0,00	92.135.561.000	92.135.561.000	0,00
	Jumlah	399.639.339.582	439.078.966.392	9,87	5.216.129.646.225	5.777.662.421.115	10,77	923.377.047.944	2.274.967.222.716	146,37	6.539.146.033.751	8.491.708.610.223	29,86

Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja barang dan jasa sangat besar lebih dari 90% terjadi di Jawa Barat dan Papua. Sebaliknya, terjadi penurunan belanja barang dan jasa sangat besar lebih dari 40% terjadi di Banten,

Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja barang dan jasa terbesar lebih dari 200% terjadi di Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara. Sebaliknya, terjadi penurunan lebih dari 60% terjadi di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Utara.

Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja modal yang sangat ekstrim lebih besar dari 3500% terjadi di DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat, sedangkan Jawa Barat, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua meningkat lebih besar dari 150%. Peningkatan belanja modal agak wajar karena adanya pembangunan infrastruktur yang sangat masif akhir-akhir ini. Sebaliknya, terjadi penurunan belanja modal sangat besar lebih dari 60% terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Grafik 4.12
Angka Pertumbuhan Belanja Langsung Tiap Provinsi
Tahun 2015-2016



Tabel 4.15 menunjukkan perkembangan belanja langsung menurut jenis pendidikan tiap provinsi di mana terjadi peningkatan bukan institusi pendidikan

yang sangat besar sebesar 117,56%, diikuti kebudayaan sebesar 109,25%, sedangkan wajar dikdas dan dikmen meningkat cukup wajar sebesar 17,45%, pemuda dan olahraga meningkat 18,25%, dan institusi lain meningkat 3,36%. Sebaliknya, PAUD dan PNF justru menurun sebesar 3,99%.

Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja bukan institusi yang sangat ekstrim lebih dari 10000% terjadi pada DKI Jakarta, sedangkan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Maluku Utara meningkat lebih dari 100%. Peningkatan belanja bukan institusi pendidikan agak wajar karena kurang dari 20% terjadi di DI Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Bali. Sebaliknya, terjadi penurunan bukan institusi pendidikan yang sangat besar lebih dari 30% terjadi di Provinsi Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Tabel 4.15
Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Provinsi, Tahun 2015—2016

No.	Nama Provinsi	Bkn Institusi Pend			PAUD+PNF			Wajar Dikdas+Dikmen		
		2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	DKI Jakarta	11.659.695.983	1.203.306.188.658	10220,22	5.787.295.163	2.650.548.000	-54,20	905.589.005.778	1.478.789.739.000	63,30
2	Jawa Barat	51.671.295.806	84.562.012.500	63,65	8.765.530.000	6.227.627.750	-28,95	24.117.662.718	121.667.119.350	404,47
3	Banten	23.792.609.700	11.320.200.000	-52,42	21.385.023.000	18.267.337.000	-14,58	202.692.676.100	254.826.663.000	25,72
4	Jawa Tengah	72.308.465.000	52.940.589.000	-26,79	12.144.000.000	15.670.105.000	29,04	92.958.111.000	75.197.659.000	-19,11
5	DI Yogyakarta	34.976.261.200	37.093.506.900	6,05	7.158.880.000	9.840.757.000	37,46	61.262.232.000	58.509.596.000	-4,49
6	Jawa Timur	36.841.654.350	35.304.626.350	-4,17	39.917.601.050	19.774.114.500	-50,46	266.539.645.400	175.917.748.500	-34,00
7	Aceh	109.423.053.596	107.668.413.457	-1,60	40.292.718.377	52.399.201.250	30,05	471.357.631.745	365.845.562.820	-22,38
8	Sumatera Utara	56.938.273.735	41.164.185.259	-27,70	8.458.505.865	3.549.818.008	-58,03	108.371.208.642	50.609.908.690	-53,30
9	Sumatera Barat	16.200.863.844	12.071.200.039	-25,49	8.371.504.171	7.826.504.171	-6,51	43.632.262.232	57.477.048.530	31,73
10	Riau	62.667.911.000	77.716.834.986	24,01	84.261.796.450	98.603.877.737	17,02	253.095.025.410	302.600.805.207	19,56
11	Kepulauan Riau	24.803.077.541	24.246.446.100	-2,24	14.936.700.466	28.789.294.000	92,74	76.898.505.806	167.414.805.148	117,71
12	Jambi	27.125.162.365	32.303.690.715	19,09	10.757.379.000	6.326.891.000	-41,19	127.828.161.300	113.926.025.725	-10,88
13	Sumatera Selatan	15.656.516.000	8.696.394.250	-44,46	22.637.018.000	6.462.016.100	-71,45	120.133.450.000	28.441.427.000	-76,33
14	Bangka Belitung	2.375.360.000	9.871.048.000	315,56	4.966.549.000	9.042.805.000	82,07	21.560.102.000	31.944.680.000	48,17
15	Bengkulu	48.155.579.017	11.748.037.250	-75,60	26.320.890.000	7.720.529.800	-70,67	50.051.725.000	71.738.535.950	43,33
16	Lampung	41.528.131.970	31.671.965.650	-23,73	17.260.735.550	11.927.521.300	-30,90	54.264.111.600	84.373.532.850	55,49
17	Kalimantan Barat	27.384.582.340	28.139.596.920	2,76	7.814.428.250	7.833.565.000	0,24	51.218.147.316	68.261.420.500	33,28
18	Kalimantan Tengah	21.876.274.886	13.459.240.000	-38,48	21.112.166.670	6.656.500.000	-68,47	36.990.426.280	27.484.391.000	-25,70
19	Kalimantan Selatan	69.846.898.022	38.747.918.002	-44,52	58.969.896.000	69.150.631.498	17,26	248.945.615.000	258.728.610.500	3,93
20	Kalimantan Timur	12.916.212.650	27.854.675.810	115,66	11.957.150.000	14.957.105.000	25,09	166.657.283.210	111.742.640.800	-32,95
21	Kalimantan Utara	11.193.269.250	11.488.300.000	2,64	6.579.435.000	3.300.000.000	-49,84	34.875.688.200	28.336.215.000	-18,75
22	Sulawesi Utara	18.553.246.150	24.693.201.600	33,09	3.610.088.600	4.927.582.300	36,49	39.648.378.250	34.942.582.400	-11,87
23	Gorontalo	8.418.742.000	10.983.387.719	30,46	13.397.589.902	13.403.588.500	0,04	22.855.447.500	17.843.421.500	-21,93
24	Sulawesi Tengah	19.958.751.467	24.672.345.951	23,62	19.251.230.553	20.859.885.503	8,36	51.379.993.100	68.993.942.417	34,28
25	Sulawesi Selatan	7.744.329.251	13.068.759.458	68,75	6.834.500.000	7.341.405.000	7,42	11.031.890.000	18.106.590.730	64,13
26	Sulawesi Barat	11.560.183.516	13.830.376.000	19,64	6.346.868.300	9.109.901.800	43,53	32.903.243.700	94.890.707.200	188,39
27	Sulawesi Tenggara	22.239.132.797	17.056.233.750	-23,31	9.400.688.900	1.747.036.000	-81,42	20.549.978.250	11.276.813.300	-45,12
28	Maluku	34.355.471.000	31.573.885.000	-8,10	6.930.035.000	6.257.817.000	-9,70	88.201.983.000	92.220.636.000	4,56
29	Maluku Utara	10.222.651.050	22.912.514.000	124,13	2.279.328.000	5.960.580.000	161,51	22.213.363.500	77.605.277.000	249,36
30	Bali	22.602.988.675	22.810.496.400	0,92	6.245.527.000	1.804.845.000	-71,10	79.765.772.380	52.079.565.600	-34,71
31	Nusa Tenggara Barat	4.476.083.300	5.692.333.690	27,17	6.731.277.000	1.918.742.500	-71,50	32.680.911.000	77.663.040.000	139,84
32	Nusa Tenggara Timur	8.835.289.000	6.042.994.400	-31,60	972.434.000	1.778.826.950	82,93	23.108.561.000	26.504.756.250	14,70
33	Papua	20.737.335.000	26.778.510.995	29,13	4.788.031.000	22.955.902.505	379,44	13.723.572.000	28.862.064.000	110,31
34	Papua Barat	11.223.781.500	11.223.781.500	0,00	14.495.000.000	14.495.000.000	0,00	29.241.032.000	29.241.032.000	0,00
	Jumlah	980.269.132.961	2.132.713.890.309	117,56	541.137.800.267	519.537.862.172	-3,99	3.886.042.802.417	4.564.064.562.967	17,45

Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja PAUD dan PNF lebih dari 100% terjadi pada Provinsi Maluku Utara dan Papua, sedangkan Kepulauan Riau dan Belitung meningkat 50-100%. Sebaliknya, terjadi penurunan belanja PAUD dan PNF yang sangat besar lebih dari 50% terjadi di 7 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.15 (lanjutan)
Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Provinsi, Tahun 2015—2016

No.	Nama Provinsi	Institusi Lain			Pemuda & Or			Kebudayaan			Jumlah		
		2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	DKI Jakarta	22.689.800.718	889.258.120	-96,08	0	0	-	0	0	-	945.725.797.642	2.685.635.733.778	183,98
2	Jawa Barat	9.161.738.326	38.880.881.989	324,38	0	0	-	0	2.712.940.000	-	93.716.226.850	254.050.581.589	171,08
3	Banten	16.109.835.900	6.940.000.000	-56,92	0	0	-	2.002.858.000	1.735.000.000	-13,37	265.983.002.700	293.089.200.000	10,19
4	Jawa Tengah	18.121.402.000	7.855.392.000	-56,65	0	0	-	0	0	-	195.531.978.000	151.663.745.000	-22,44
5	DI Yogyakarta	36.208.634.256	48.772.592.000	34,70	49.327.920.850	77.542.550.000	57,20	8.270.560.000	3.262.700.000	-60,55	197.204.488.306	235.021.701.900	19,18
6	Jawa Timur	13.760.221.850	5.414.963.000	-60,65	0	0	-	0	0	-	357.059.122.650	236.411.452.350	-33,79
7	Aceh	93.648.800.000	86.105.040.000	-8,06	0	0	-	0	0	-	714.722.203.718	612.018.217.527	-14,37
8	Sumatera Utara	1.745.815.060	0	-100,00	0	0	-	0	0	-	175.513.803.302	95.323.911.957	-45,69
9	Sumatera Barat	6.133.270.970	4.527.770.750	-26,18	0	0	-	6.195.327.990	6.478.204.810	4,57	80.533.229.207	88.380.728.300	9,74
10	Riau	217.550.819.600	233.065.189.754	7,13	0	0	-	13.466.888.625	55.896.516.314	315,07	631.042.441.085	767.883.223.998	21,68
11	Kepulauan Riau	7.210.932.500	10.265.000.000	42,35	59.345.151.587	31.665.344.200	-46,64	0	404.725.000	-	183.194.367.900	262.785.614.448	43,45
12	Jambi	12.302.367.000	3.067.760.000	-75,06	0	0	-	0	0	-	178.013.069.665	155.624.367.440	-12,58
13	Sumatera Selatan	1.623.016.000	372.000.000	-77,08	0	0	-	0	0	-	160.050.000.000	43.971.837.350	-72,53
14	Bangka Belitung	2.690.200.000	4.297.480.000	59,75	0	0	-	0	0	-	31.592.211.000	55.156.013.000	74,59
15	Bengkulu	5.997.500.000	25.621.105.000	327,20	0	22.450.053.500	-	1.709.893.000	0	-100,00	132.235.587.017	139.278.261.500	5,33
16	Lampung	7.145.106.000	16.687.000.000	133,54	0	8.551.980.200	-	3.262.289.600	7.114.000.000	118,07	123.460.374.720	160.326.000.000	29,86
17	Kalimantan Barat	1.341.979.500	2.288.974.000	70,57	0	0	-	7.871.145.500	7.680.085.500	-2,43	95.630.282.906	114.203.641.920	19,42
18	Kalimantan Tengah	63.583.253.355	38.229.869.000	-39,87	0	0	-	913.040.820	0	-100,00	144.475.162.011	85.830.000.000	-40,59
19	Kalimantan Selatan	10.800.000.000	21.826.840.000	102,10	0	0	-	0	0	-	388.562.409.022	388.454.000.000	-0,03
20	Kalimantan Timur	136.992.188.390	132.667.978.390	-3,16	0	0	-	0	0	-	328.522.834.250	287.222.400.000	-12,57
21	Kalimantan Utara	1.744.130.000	2.583.500.000	48,13	12.762.669.000	6.830.035.000	-46,48	8.352.000.000	6.626.950.000	-20,65	75.507.191.450	59.165.000.000	-21,64
22	Sulawesi Utara	0	0	-	0	0	-	0	0	-	61.811.713.000	64.563.366.300	4,45
23	Gorontalo	4.039.714.500	3.404.963.520	-15,71	5.054.549.000	20.916.173.225	313,81	2.746.064.000	2.622.180.000	-4,51	56.512.106.902	69.173.714.464	22,41
24	Sulawesi Tengah	5.962.340.264	12.822.031.623	115,05	8.244.107.911	0	-100,00	0	6.135.817.860	-	104.796.423.295	133.484.023.354	27,37
25	Sulawesi Selatan	56.900.745.000	37.432.329.270	-34,21	0	0	-	0	932.965.000	-	82.511.464.251	76.882.049.458	-6,82
26	Sulawesi Barat	7.102.836.000	8.522.428.000	19,99	0	0	-	6.258.384.234	9.439.540.000	50,83	64.171.515.750	135.792.953.000	111,61
27	Sulawesi Tenggara	111.450.000	13.476.834.550	11992,27	0	0	-	8.053.535.000	0	-100,00	60.354.784.947	43.556.917.600	-27,83
28	Maluku	1.746.989.000	2.924.933.000	67,43	6.264.499.000	0	-100,00	0	5.631.389.000	-	137.498.977.000	138.608.660.000	0,81
29	Maluku Utara	53.464.234.950	64.356.084.000	20,37	0	0	-	0	0	-	88.179.577.500	170.834.455.000	93,73
30	Bali	11.603.468.200	42.591.433.100	267,06	13.675.672.250	9.561.071.900	-30,09	0	0	-	133.893.428.505	128.847.412.000	-3,77
31	Nusa Tenggara Barat	831.020.000	737.470.000	-11,26	4.592.638.900	3.447.798.000	-24,93	0	0	-	49.011.930.200	89.459.384.190	82,53
32	Nusa Tenggara Timur	2.410.930.000	3.795.225.400	57,42	0	7.365.979.300	-	8.281.096.000	0	-100,00	43.608.310.000	45.487.782.300	4,31
33	Papua	27.135.520.000	44.712.322.000	64,77	0	0	-	0	8.077.900.000	-	66.384.458.000	131.386.699.500	97,92
34	Papua Barat	37.175.747.500	0	-100,00	0	0	-	0	37.175.747.500	-	92.135.561.000	92.135.561.000	0,00
Jumlah		895.046.006.839	925.134.648.466	3,36	159.267.208.498	188.330.985.325	18,25	77.383.082.769	161.926.660.984	109,25	6.539.146.033.751	8.491.708.610.223	29,86

Belanja wajar dikdas dan dikmen meningkat cukup wajar sekitar 17%. Namun, bila dilihat tiap provinsi terjadi kenaikan yang sangat ekstrim sebesar 404% terjadi di Provinsi Jawa Barat, demikian juga lima provinsi meningkat cukup besar karena lebih dari 100% terjadi di Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sebaliknya, terjadi penurunan lebih dari 40% di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Bila dilihat tiap provinsi maka peningkatan belanja kebudayaan sangat besar karena sejak tahun 2015 kebudayaan digabungkan ke Dinas Pendidikan seperti halnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat tujuh provinsi, yaitu Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat yang mengalokasikan kebudayaan padahal sebelumnya tidak mengalokasikan dana untuk kebudayaan. Sebaliknya, terdapat tiga provinsi, yaitu Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur yang justru tidak mengalokasikan dana untuk kebudayaan. Provinsi lainnya yang tidak mengalokasikan dana kebudayaan karena ada yang sudah memiliki Dinas Kebudayaan tersendiri seperti di Provinsi Bali.

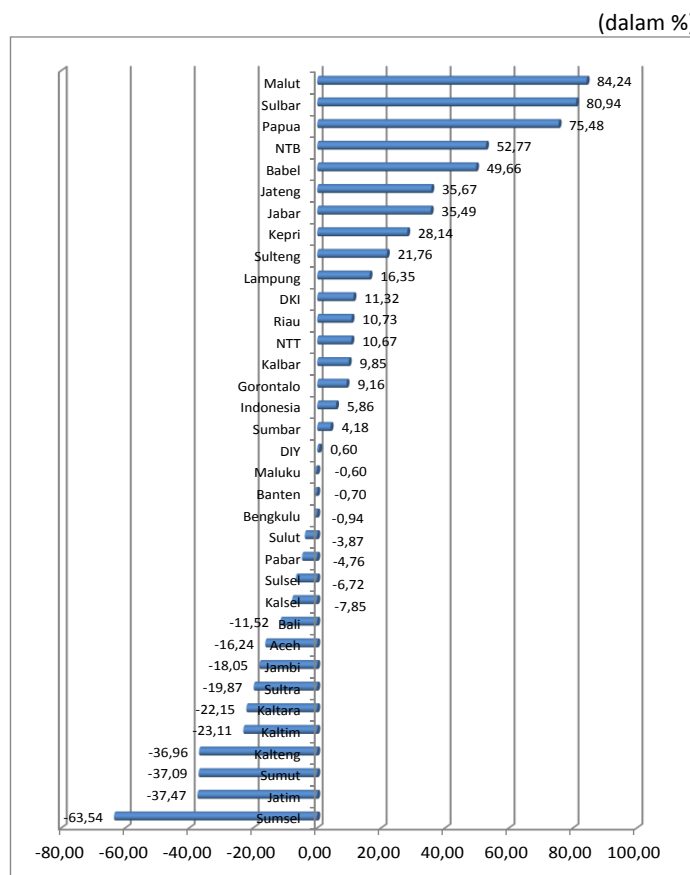
Tabel 4.16
Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen Tiap Provinsi
Tahun 2015—2016

No.	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan		Siswa Dikdasmen		Rasio		
		2015	2016	2014	2015	2014	2015	AP (%)
1	DKI Jakarta	8.999.128.555.098	11.292.414.762.239	1.388.817	1.565.465	6.479.708	7.213.457	11,32
2	Jawa Barat	387.599.037.070	592.038.619.281	6.995.013	7.886.085	55.411	75.074	35,49
3	Banten	307.083.002.700	341.789.200.000	1.828.892	2.050.038	167.907	166.723	-0,70
4	Jawa Tengah	312.885.079.000	485.604.171.000	4.605.844	5.268.798	67.932	92.166	35,67
5	DI Yogyakarta	384.068.252.773	452.941.827.288	480.445	563.197	799.401	804.233	0,60
6	Jawa Timur	406.617.974.650	285.970.304.350	4.811.991	5.411.741	84.501	52.843	-37,47
7	Aceh	752.452.618.404	654.718.050.893	849.431	882.400	885.831	741.974	-16,24
8	Sumatera Utara	223.726.549.302	154.494.836.957	2.784.374	3.056.593	80.351	50.545	-37,09
9	Sumatera Barat	138.027.367.941	154.742.617.764	1.014.069	1.091.310	136.112	141.795	4,18
10	Riau	699.839.971.597	837.980.173.939	1.188.633	1.285.295	588.777	651.975	10,73
11	Kepulauan Riau	192.828.101.311	273.957.232.412	334.029	370.344	577.280	739.737	28,14
12	Jambi	209.492.016.795	183.031.417.972	594.546	633.894	352.356	288.741	-18,05
13	Sumatera Selatan	215.688.662.776	83.727.720.205	1.493.649	1.590.198	144.404	52.652	-63,54
14	Bangka Belitung	38.139.198.507	63.077.995.703	241.069	266.411	158.209	236.769	49,66
15	Bengkulu	152.741.096.389	161.018.344.402	363.382	386.700	420.332	416.391	-0,94
16	Lampung	174.607.214.720	221.019.183.000	1.313.708	1.429.268	132.912	154.638	16,35
17	Kalimantan Barat	123.468.528.006	144.049.973.720	946.237	1.004.997	130.484	143.334	9,85
18	Kalimantan Tengah	167.796.383.937	112.841.975.509	454.286	484.585	369.363	232.863	-36,96
19	Kalimantan Selatan	408.091.520.022	410.311.771.000	572.520	624.663	712.799	656.853	-7,85
20	Kalimantan Timur	358.049.858.956	310.745.154.000	623.831	704.093	573.953	441.341	-23,11
21	Kalimantan Utara	80.211.841.743	67.384.826.167	121.800	131.433	658.554	512.693	-22,15
22	Sulawesi Utara	87.243.420.054	91.221.909.061	442.376	481.178	197.216	189.580	-3,87
23	Gorontalo	79.736.563.981	93.298.977.286	216.171	231.713	368.859	402.649	9,16
24	Sulawesi Tengah	133.524.810.973	171.905.222.857	568.564	601.168	234.846	285.952	21,76
25	Sulawesi Selatan	145.980.535.022	144.651.153.992	1.617.016	1.717.776	90.278	84.208	-6,72
26	Sulawesi Barat	76.659.549.665	148.975.623.786	265.840	285.520	288.367	521.769	80,94
27	Sulawesi Tenggara	87.533.579.947	73.129.261.500	569.804	594.060	153.621	123.101	-19,87
28	Maluku	166.307.496.009	169.829.783.305	403.482	414.533	412.181	409.689	-0,60
29	Maluku Utara	103.696.947.816	189.495.018.000	282.966	280.654	366.464	675.191	84,24
30	Bali	200.235.242.385	197.836.861.000	694.149	775.148	288.461	255.225	-11,52
31	Nusa Tenggara Barat	66.282.748.997	108.014.182.390	812.554	866.742	81.573	124.621	52,77
32	Nusa Tenggara Timur	64.746.067.000	74.921.071.300	1.297.994	1.357.147	49.882	55.205	10,67
33	Papua	91.358.750.000	171.170.141.500	572.270	611.016	159.643	280.140	75,48
34	Papua Barat	99.756.008.609	99.756.008.609	202.856	212.998	491.758	468.342	-4,76
	Jumlah	16.135.604.552.155	19.018.065.372.387	40.952.608	45.117.161	16.759.723	17.742.473	5,86

Tabel 4.16 menunjukkan perkembangan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen tiap provinsi di mana terjadi peningkatan rasio belanja

pendidikan terhadap siswa dikdasmen dari Rp16.759.723 menjadi Rp17.742.473 atau meningkat 5,86%. Peningkatan ini menunjukkan kondisi yang baik karena satuan biaya per siswa meningkat cukup besar. Namun, bila dilihat tiap provinsi ternyata tidak semua provinsi meningkat, peningkatan terbesar lebih dari 75% terjadi di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Papua dan peningkatan terkecil terjadi kurang dari 1% terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yang menunjukkan kondisinya sudah stabil. Sebaliknya, terjadi penurunan sangat besar sebesar 35% terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Menurunnya satuan biaya dapat menunjukkan akan menurunnya mutu pendidikan.

Grafik 4.13
Angka Pertumbuhan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Provinsi, Tahun 2015-2016



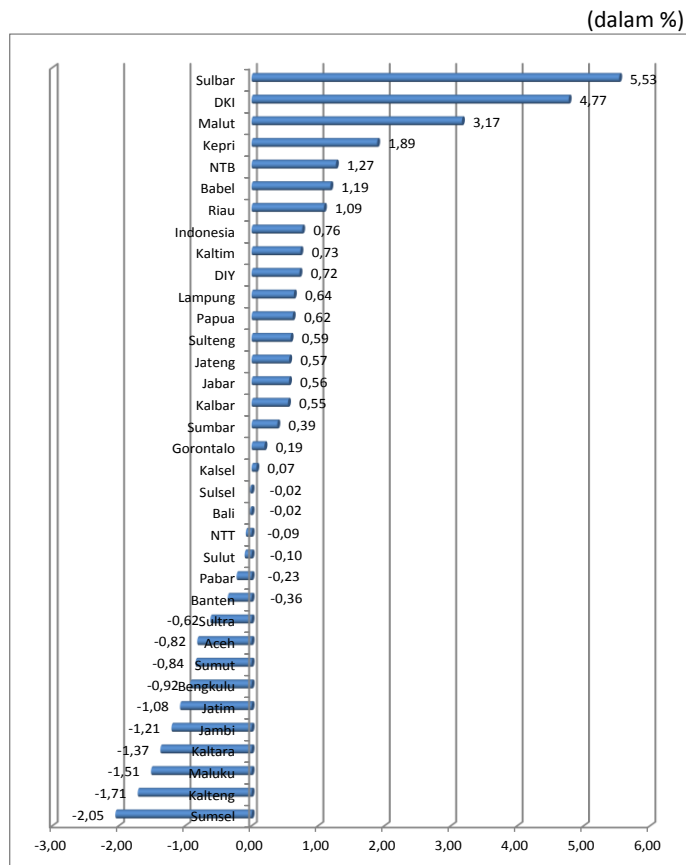
Tabel 4.17 menunjukkan perkembangan persentase belanja pendidikan terhadap APBD tiap provinsi terjadi peningkatan persentase belanja pendidikan terhadap APBD dari 6,13% menjadi 6,89% atau meningkat sebesar 0,76% sangat kecil karena tidak ada 1%. Peningkatan ini menunjukkan kondisi yang baik karena

belanja pendidikan meningkat walaupun sangat kecil. Namun, bila dilihat tiap provinsi ternyata tidak semua provinsi meningkat, terdapat tiga provinsi meningkat lebih dari 3%, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sebaliknya, terdapat 16 provinsi dalam kondisi menurun, artinya belanja pendidikan yang seharusnya 20% ternyata belum tercapai.

Tabel 4.17
Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi
Tahun 2015—2016

No.	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan		APBD		% BP thd APBD		
		2015	2016	2014	2015	2015	2016	AP (%)
1	DKI Jakarta	8.999.128.555.098	11.292.414.762.239	64.699.000.000.000	60.442.738.783.978	13,91	18,68	4,77
2	Jawa Barat	387.599.037.070	592.038.619.281	21.194.364.768.287	24.753.926.333.107	1,83	2,39	0,56
3	Banten	307.083.002.700	341.789.200.000	7.349.402.031.000	8.947.633.698.000	4,18	3,82	-0,36
4	Jawa Tengah	312.885.079.000	485.604.171.000	13.997.158.183.000	17.337.686.334.000	2,24	2,80	0,57
5	DI Yogyakarta	384.068.252.773	452.941.827.288	3.330.039.349.990	3.696.264.876.876	11,53	12,25	0,72
6	Jawa Timur	406.617.974.650	285.970.304.350	17.811.135.360.418	23.720.919.803.000	2,28	1,21	-1,08
7	Aceh	752.452.618.404	654.718.050.893	13.368.028.474.729	13.608.652.987.274	5,63	4,81	-0,82
8	Sumatera Utara	223.726.549.302	154.494.836.957	8.526.300.954.643	8.679.942.294.100	2,62	1,78	-0,84
9	Sumatera Barat	138.027.367.941	154.742.617.764	3.608.883.948.830	3.673.843.859.909	3,82	4,21	0,39
10	Riau	699.839.971.597	837.980.173.939	8.276.751.343.188	8.779.977.824.854	8,46	9,54	1,09
11	Kepulauan Riau	192.828.101.311	273.957.232.412	3.460.000.000.000	3.670.455.273.330	5,57	7,46	1,89
12	Jambi	209.492.016.795	183.031.417.972	3.265.329.746.272	3.513.160.756.558	6,42	5,21	-1,21
13	Sumatera Selatan	215.688.662.776	83.727.720.205	6.501.271.947.580	6.609.708.624.576	3,32	1,27	-2,05
14	Bangka Belitung	38.139.198.507	63.077.995.703	2.015.859.281.269	2.049.322.545.338	1,89	3,08	1,19
15	Bengkulu	152.741.096.389	161.018.344.402	1.896.631.491.461	2.258.697.036.011	8,05	7,13	-0,92
16	Lampung	174.607.214.720	221.019.183.000	4.318.205.382.172	4.723.190.697.838	4,04	4,68	0,64
17	Kalimantan Barat	123.468.528.006	144.049.973.720	3.755.987.767.056	3.755.987.767.056	3,29	3,84	0,55
18	Kalimantan Tengah	167.796.383.937	112.841.975.509	3.206.706.335.277	3.206.706.335.277	5,23	3,52	-1,71
19	Kalimantan Selatan	408.091.520.022	410.311.771.000	5.266.326.013.000	5.246.601.442.000	7,75	7,82	0,07
20	Kalimantan Timur	358.049.858.956	310.745.154.000	13.805.000.000.000	9.336.213.350.000	2,59	3,33	0,73
21	Kalimantan Utara	80.211.841.743	67.384.826.167	1.899.550.558.146	2.364.623.612.074	4,22	2,85	-1,37
22	Sulawesi Utara	87.243.420.054	91.221.909.061	2.452.618.546.301	2.641.789.104.310	3,56	3,45	-0,10
23	Gorontalo	79.736.563.981	93.298.977.286	1.294.658.364.425	1.468.732.072.042	6,16	6,35	0,19
24	Sulawesi Tengah	133.524.810.973	171.905.222.857	2.440.483.873.464	2.837.564.141.400	5,47	6,06	0,59
25	Sulawesi Selatan	145.980.535.022	144.651.153.992	5.839.377.160.724	5.839.377.160.724	2,50	2,48	-0,02
26	Sulawesi Barat	76.659.549.665	148.975.623.786	1.306.640.548.783	1.306.640.548.783	5,87	11,40	5,53
27	Sulawesi Tenggara	87.533.579.947	73.129.261.500	2.321.892.890.432	2.321.892.890.432	3,77	3,15	-0,62
28	Maluku	166.307.496.009	169.829.783.305	1.906.632.681.534	2.355.709.811.760	8,72	7,21	-1,51
29	Maluku Utara	103.696.947.816	189.495.018.000	1.567.153.000.000	1.936.900.925.130	6,62	9,78	3,17
30	Bali	200.235.242.385	197.836.861.000	9.978.930.198.378	9.978.930.198.378	2,01	1,98	-0,02
31	Nusa Tenggara Barat	66.282.748.997	108.014.182.390	2.834.204.802.100	2.993.637.551.600	2,34	3,61	1,27
32	Nusa Tenggara Timur	64.746.067.000	74.921.071.300	2.738.060.879.000	3.289.126.340.000	2,36	2,28	-0,09
33	Papua	91.358.750.000	171.170.141.500	11.205.078.379.000	11.935.508.825.500	0,82	1,43	0,62
34	Papua Barat	99.756.008.609	99.756.008.609	5.870.179.976.714	6.766.729.292.314	1,70	1,47	-0,23
	Jumlah	16.135.604.552.155	19.018.065.372.387	263.307.844.237.174	276.048.793.097.530	6,13	6,89	0,76

Grafik 4.14
Angka Pertumbuhan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD Tiap Provinsi
Tahun 2015-2016



C. Analisis Belanja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Seperti halnya analisis pada provinsi maka analisis belanja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menjadi sampel juga dirinci menjadi belanja pendidikan, belanja tidak langsung, belanja langsung, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen, dan persentase belanja pendidikan terhadap APBD kabupaten/kota. Sesuai dengan sampel sebanyak 23 kabupaten/kota maka analisis dilakukan menjadi tiga kelompok, yaitu 23 kabupaten/kota, rata-rata 15 kabupaten, dan rata-rata 8 kota.

1. Belanja Pendidikan

Belanja pendidikan pada tahun 2015 yang terdapat pada Tabel 4.18A menunjukkan bahwa belanja tidak langsung di 23 kabupaten/kota, rata-rata 15 kabupaten, dan rata-rata 8 kota lebih besar jika dibandingkan dengan belanja

langsung, masing-masing sebesar 85,11%, 88,13%, dan 76,69%. Dengan demikian, kabupaten sampel lebih banyak sebesar 11,43% dalam mengalokasikan belanja tidak langsung daripada kota sampel.

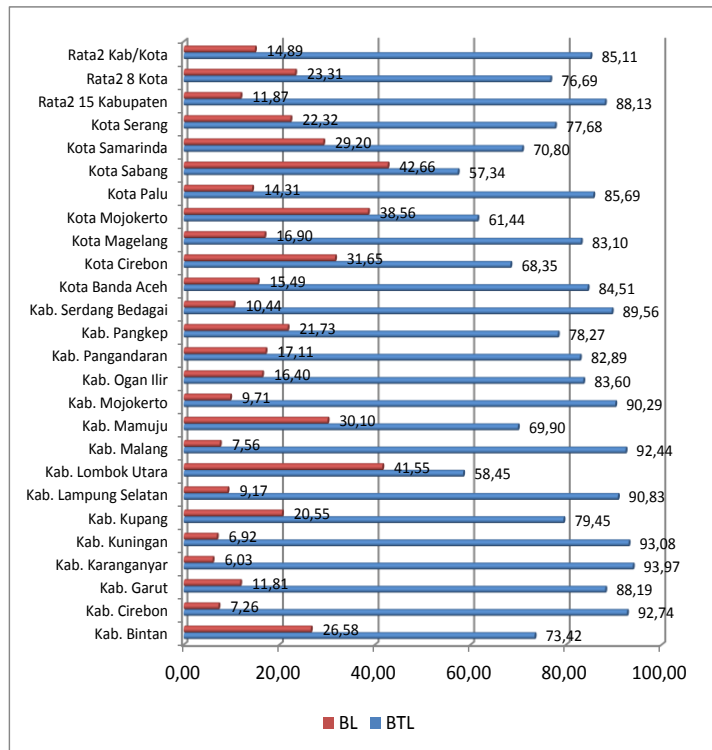
Tabel 4.18A
Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Tak Langsung		Langsung		Jumlah
			Subjumlah	%	Subjumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	193,556,867,937	73.42	70,080,242,722	26.58	263,637,110,659
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,220,182,226,306	92.74	95,498,238,290	7.26	1,315,680,464,596
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1,317,614,556,424	88.19	176,365,997,606	11.81	1,493,980,554,030
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	846,238,451,990	93.97	54,328,613,000	6.03	900,567,064,990
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	981,891,163,195	93.08	72,987,945,175	6.92	1,054,879,108,370
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	273,705,772,974	79.45	70,774,182,177	20.55	344,479,955,151
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	573,880,369,200	90.83	57,904,762,750	9.17	631,785,131,950
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	142,973,628,956	58.45	101,632,386,700	41.55	244,606,015,656
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,246,654,431,448	92.44	101,888,996,887	7.56	1,348,543,428,335
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	146,558,208,410	69.90	63,107,461,913	30.10	209,665,670,323
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	772,803,398,776	90.29	83,071,610,269	9.71	855,875,009,045
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	372,732,186,606	83.60	73,116,583,500	16.40	445,848,770,106
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	377,719,841,525	82.89	77,992,710,638	17.11	455,712,552,163
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	363,105,803,966	78.27	100,782,086,718	21.73	463,887,890,684
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	534,651,111,181	89.56	62,311,462,538	10.44	596,962,573,719
16	Kota Banda Aceh	Aceh	426,231,181,630	84.51	78,132,273,497	15.49	504,363,455,127
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	336,117,758,000	68.35	155,660,202,730	31.65	491,777,960,730
18	Kota Magelang	Jawa Barat	843,523,842,303	83.10	171,571,082,197	16.90	1,015,094,924,500
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	123,492,617,500	61.44	77,501,343,975	38.56	200,993,961,475
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	270,821,577,131	85.69	45,227,110,867	14.31	316,048,687,998
21	Kota Sabang	Aceh	91,696,984,683	57.34	68,228,823,302	42.66	159,925,807,985
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	424,155,183,175	70.80	174,931,583,555	29.20	599,086,766,730
23	Kota Serang	Banten	401,418,085,949	77.68	115,324,994,792	22.32	516,743,080,741
	Jumlah 15 Kabupaten		9,364,268,018,894	88.13	1,261,843,280,883	11.87	10,626,111,299,777
	Jumlah 8 Kota		2,917,457,230,371	76.69	886,577,414,915	23.31	3,804,034,645,286
	Jumlah seluruh		12,281,725,249,265	85.11	2,148,420,695,798	14.89	14,430,145,945,063

Bila dilihat tiap kabupaten/kota maka belanja tidak langsung terbesar tahun 2015 pada Kabupaten Karanganyar sebesar 93,97% dan terkecil pada Kota Sabang sebesar 57,34%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk gaji pegawai sangat besar di Kabupaten Karanganyar, sehingga belanja untuk program pendidikan sangat kecil karena hanya 6,03% dari belanja pendidikan. Demikian juga Kota Sabang juga lebih memprioritaskan belanja untuk gaji pegawai lebih besar 7,34% jika dibandingkan dengan program pendidikan sebesar 42,66%. Namun, kondisinya lebih baik daripada Kabupaten Karanganyar, bila diasumsikan belanja tidak langsung harus sama dengan belanja langsung.

Seperti halnya pada tahun 2015 maka belanja pendidikan pada tahun 2016 yang terdapat pada Tabel 4.18B menunjukkan bahwa belanja tidak langsung di 23 kabupaten/kota, rata-rata 15 kabupaten, dan rata-rata 8 kota lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung, masing-masing sebesar 89,88%, 92,71%, dan 81,79%. Dengan demikian, kabupaten sampel lebih banyak sebesar 10,92% dalam mengalokasikan belanja tidak langsung daripada kota sampel.

Grafik 4.15A
Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015



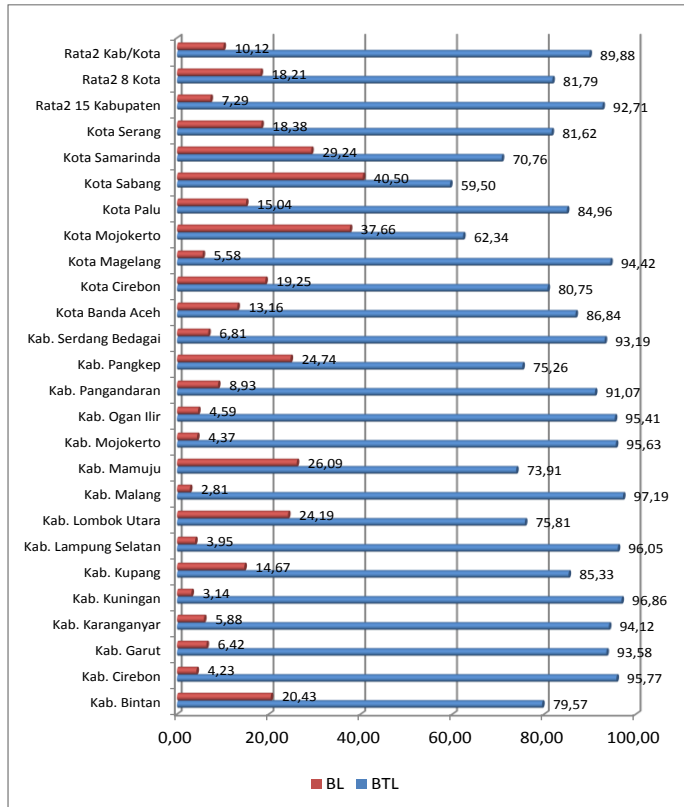
Catatan: BL : belanja langsung, BTL: belanja tak langsung

Bila dilihat tiap kabupaten/kota maka belanja tidak langsung tahun 2016 terbesar pada Kabupaten Malang sebesar 97,19% dan terkecil pada Kota Sabang sebesar 59,50%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk gaji pegawai sangat besar di Kabupaten Malang, sehingga belanja untuk program pendidikan sangat kecil karena hanya 2,81% dari belanja pendidikan. Demikian juga Kota Sabang juga lebih memprioritaskan belanja untuk gaji pegawai lebih besar 9,50% jika dibandingkan dengan program pendidikan sebesar 40,50%. Namun, kondisinya lebih baik daripada Kabupaten Malang, bila diasumsikan belanja tidak langsung harus sama dengan belanja langsung.

Tabel 4.18B
Jumlah Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Tak Langsung		Langsung		Jumlah
			Subjumlah	%	Subjumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	186,614,174,000	79.57	47,913,890,000	20.43	234,528,064,000
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,229,626,913,453	95.77	54,368,173,500	4.23	1,283,995,086,953
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1,427,087,994,170	93.58	97,967,335,804	6.42	1,525,055,329,974
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	870,207,314,000	94.12	54,380,890,950	5.88	924,588,204,950
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1,036,558,899,317	96.86	33,642,212,900	3.14	1,070,201,112,217
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	291,989,520,468	85.33	50,206,385,522	14.67	342,195,905,990
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	598,762,037,950	96.05	24,637,792,000	3.95	623,399,829,950
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	149,113,727,348	75.81	47,573,023,800	24.19	196,686,751,148
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,235,058,862,274	97.19	35,698,710,000	2.81	1,270,757,572,274
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	167,199,626,986	73.91	59,026,318,040	26.09	226,225,945,026
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	721,689,574,779	95.63	32,987,405,613	4.37	754,676,980,392
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	436,209,377,088	95.41	20,999,072,500	4.59	457,208,449,588
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	378,898,709,056	91.07	37,161,512,026	8.93	416,060,221,082
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	370,956,635,812	75.26	121,949,124,929	24.74	492,905,760,741
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	499,820,713,287	93.19	36,513,673,347	6.81	536,334,386,634
16	Kota Banda Aceh	Aceh	381,477,823,993	86.84	57,797,380,979	13.16	439,275,204,972
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	343,840,485,000	80.75	81,973,509,650	19.25	425,813,994,650
18	Kota Magelang	Jawa Barat	887,615,294,971	94.42	52,476,486,462	5.58	940,091,781,433
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	133,101,129,000	62.34	80,399,717,701	37.66	213,500,846,701
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	284,069,641,436	84.96	50,284,094,089	15.04	334,353,735,525
21	Kota Sabang	Aceh	92,744,894,662	59.50	63,124,813,118	40.50	155,869,707,780
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	449,109,248,516	70.76	185,606,347,022	29.24	634,715,595,538
23	Kota Serang	Banten	391,417,498,234	81.62	88,136,826,698	18.38	479,554,324,932
	Jumlah 15 Kabupaten		9,599,794,079,988	92.71	755,025,520,931	7.29	10,354,819,600,919
	Jumlah 8 Kota		2,963,376,015,811	81.79	659,799,175,719	18.21	3,623,175,191,530
	Jumlah seluruh		12,563,170,095,799	89.88	1,414,824,696,650	10.12	13,977,994,792,449

Grafik 4.15B
Persentase Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016



2. Belanja Tidak Langsung

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, belanja tidak langsung yang disajikan ada dua, yaitu 1) rincian jenis belanja menjadi 19 item belanja dan 2) jenis belanja yang terdiri dari tiga, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi.

a. Rincian Jenis Belanja

Belanja tidak langsung pada tahun 2015 di 23 kabupaten/kota dirinci menjadi 19 item yang terdiri dari 10 item belanja gaji dan tunjangan, 8 item belanja tambahan penghasilan, dan insentif pemungutan retribusi. Dari 10 item belanja gaji dan tunjangan maka iuran askes/uang duka hanya dialokasikan oleh 9 kabupaten/kota dan gaji guru hanya tersedia datanya pada Kabupaten Karanganyar dan Kupang. Dari 8 item belanja tambahan penghasilan juga tidak dialokasikan setiap kabupaten/kota, 7 kabupaten/kota tidak mengalokasikan berdasarkan beban kerja, 4 kabupaten/kota mengalokasikan berdasarkan tempat

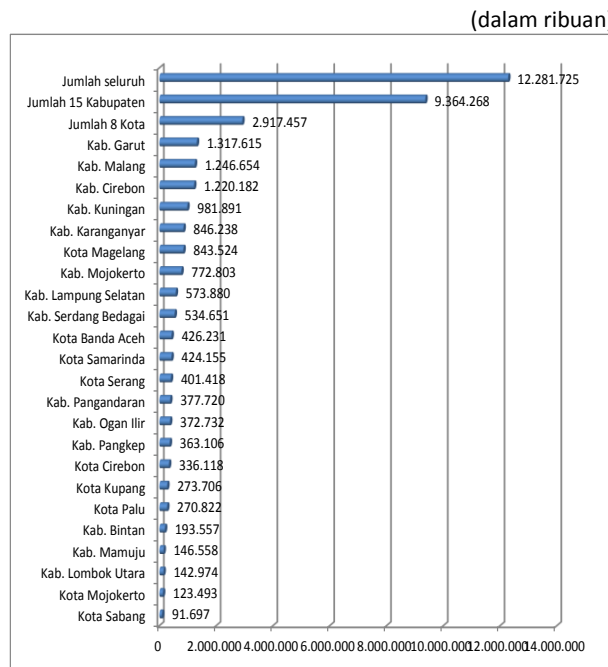
bertugas, 4 kabupaten/kota mengalokasikan berdasarkan prestasi kerja, 5 kabupaten/kota mengalokasikan berdasarkan pertimbangan objektif, 6 kabupaten/kota mengalokasikan sertifikasi profesi PNS, 7 kabupaten/kota tidak mengalokasikan PNS Guru, 9 kabupaten/kota tidak mengalokasikan TPG PNSD, uang kesejahteraan pegawai hanya dialokasikan oleh 2 kabupaten, yaitu Mojokerto dan Pangandaran, sedangkan insentif pemungutan retribusi hanya dialokasikan di Kabupaten Kuningan dan Kota Banda Aceh.

Tabel 4.19A
Jumlah Belanja Tidak langsung menurut Rincian Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. GP PNS/Uang representasi	Tunjangan						Pembulatan Gaji	9. Iuran Askes+ Uang	10. Gaji Guru	Jumlah Gaji dan Tunjangan
				2. Keluarga	3. Jabatan	4. Fungsional	5. Fungs Umum	6. Beras	7. PPH Khusus				
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	70.340.539.670	7.319.907.940	420.000.000	7.000.000.000	351.000.000	4.331.397.840	1.750.000.000	1.199.999	0	0	91.514.045.449
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	510.451.098.304	47.649.671.000	487.745.000	48.369.263.000	2.014.300.000	26.303.776.000	11.062.558.000	11.896.000	15.392.629.000	0	661.742.936.304
3	Kab. Garut	Jawa Barat	643.469.877.857	64.006.497.805	1.326.803.400	60.244.053.480	3.919.362.000	32.974.817.471	13.889.294.565	10.162.422	1.250.000.000	0	821.090.869.000
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	359.173.805.239	32.745.551.501	738.140.000	30.733.508.000	3.533.205.000	19.031.215.590	9.089.117.739	5.052.173	11.594.583.585	2.087.025.048	468.731.203.875
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	447.111.660.705	42.523.656.000	1.154.945.000	40.349.906.000	3.533.771.000	24.136.602.000	12.183.244.000	7.376.000	0	0	571.001.160.705
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Tim	10.865.101.000	1.061.355.516	240.325.000	955.474.000	164.580.000	579.287.040	306.727.200	264.420	0	182.651.778.798	196.824.892.974
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	265.972.408.000	26.144.237.600	472.550.000	29.215.368.000	2.340.039.000	16.407.135.600	9.310.236.000	3.874.000	500.000.000	0	350.365.848.200
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Bar	70.782.479.500	7.776.699.800	226.395.000	5.936.852.100	1.328.502.500	4.929.414.256	1.379.152.800	2.000.000	0	0	92.361.495.956
9	Kab. Malang	Jawa Timur	537.979.805.912	50.337.150.610	1.077.840.000	614.396.867.954	1.809.168.310	25.734.416.080	15.310.436.211	8.746.371	0	0	1.246.654.431.448
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	55.950.990.970	4.440.114.510	317.588.000	4.291.704.370	654.148.950	2.902.182.550	942.567.035	703.605	0	0	69.499.999.990
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	338.421.104.000	33.775.583.000	1.126.274.000	31.702.169.000	2.499.383.000	20.344.887.000	12.552.338.476	16.298.000	0	0	440.438.036.476
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	183.673.655.133	19.949.002.954	625.790.000	21.807.852.000	540.628.000	15.056.067.648	4.592.410.559	5.801.615	6.517.008.697	0	252.768.211.606
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	153.903.741.188	14.156.568.198	491.081.600	13.721.004.875	570.149.875	6.874.392.059	3.866.460.481	2.124.914	486.008.745	0	194.071.531.935
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	175.372.340.764	15.766.926.577	333.633.150	16.941.164.060	808.591.150	9.621.173.650	4.619.350.795	4.215.560	0	0	223.467.395.706
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	269.772.707.425	22.921.412.295	319.620.625	22.671.620.350	777.043.275	12.702.596.402	6.590.795.507	3.064.671	7.063.704.430	0	342.822.564.981
16	Kota Banda Aceh	Aceh	174.541.171.282	12.278.738.602	495.756.625	15.338.993.800	883.980.500	8.352.954.272	3.735.599.430	2.298.896	0	0	215.629.493.407
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	142.316.371.000	12.679.860.000	431.795.000	13.164.916.000	620.266.000	7.307.579.000	4.193.592.000	3.910.000	0	0	180.718.289.000
18	Kota Magelang	Jawa Barat	340.807.968.206	30.771.119.200	1.084.265.000	32.436.522.600	927.485.000	16.319.742.400	14.616.942.500	6.000.000	19.808.342.600	0	456.778.687.506
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	57.540.610.230	5.295.885.157	265.644.875	5.465.550.500	261.021.000	3.235.610.064	1.315.056.491	820.184	0	0	73.380.198.500
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	215.664.047.520	17.456.204.832	497.494.992	19.475.341.020	1.252.100.016	11.032.064.808	5.441.398.140	2.925.803	0	0	270.821.577.131
21	Kota Sabang	Aceh	40.694.730.178	3.786.013.039	225.125.875	3.892.143.250	488.297.150	2.416.089.445	914.891.412	560.614	0	0	52.417.850.963
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	263.798.632.055	23.802.285.242	833.179.500	25.249.357.000	1.976.893.500	15.725.641.504	6.051.434.132	4.010.242	0	0	337.441.433.175
23	Kota Serang	Banten	169.604.842.984	15.590.594.682	562.649.457	1.780.441.248	621.619.245	10.666.762.512	3.825.336.753	2.657.186	5.658.417.386	0	208.313.321.453
Jumlah 15 Kabupaten			4.093.241.315.667	390.574.335.306	9.358.730.775	948.336.807.189	24.843.872.060	221.929.361.186	107.444.689.368	82.779.750	42.803.929.457	184.738.803.846	6.023.354.624.605
Jumlah 8 Kota			1.404.968.373.455	121.661.000.754	4.395.911.324	116.803.265.418	7.031.662.411	75.056.444.005	40.094.250.858	23.182.925	25.466.759.986	0	1.795.500.851.135
Jumlah seluruh			5.498.209.689.122	512.235.336.060	13.754.642.099	1.065.140.072.607	31.875.534.471	296.985.805.191	147.538.940.226	105.962.675	68.270.689.443	184.738.803.846	7.818.855.475.740

Berdasarkan data pada Tabel 4.19A, pada tahun 2015 gaji dan tunjangan untuk 23 kabupaten/kota sebesar Rp7.818.855,5 juta, dengan rincian terbesar pada Kabupaten Malang sebesar Rp1.246.654,4 juta dan terkecil pada Kota Sabang sebesar Rp52.417,9 juta. Tambahan penghasilan PNS 23 kabupaten/kota sebesar Rp4.462.716,6 juta, terbesar pada Kota Cirebon sebesar Rp558.439.3 juta dan terkecil pada Kota Sabang sebesar Rp39.279,1 juta. Insentif pemungutan retribusi hanya terdapat di 2 kabupaten/kota sebesar Rp153,2 juta, di Kota Banda Aceh sebesar Rp151,2 juta dan Kabupaten Kuningan sebesar Rp1,9 juta. Dengan demikian, belanja tidak langsung 23 kabupaten/kota sebesar Rp12.281.725,2 juta.

Grafik 4.16A
Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel
Tahun 2015



Tabel 4.19A (lanjutan)
Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Rincian Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

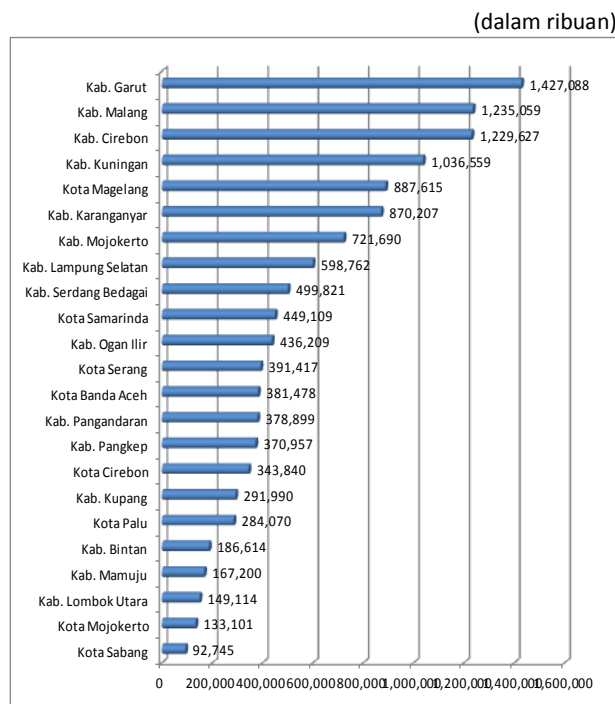
No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. Beban kerja	2. Tempat bertugas	3. Prestasi kerja	Pertimbangan objektif	5. Sertifikasi profesi PNS	6. PNS guru	7. TPG PNSO	8. Uang kesehatan pegawai	Tambahan Penghasilan PNS	Insentif pemungutan	Jumlah Belanja Pegawai
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	37.089.431,318	1.490.885,000	0	6.145.590,000	0	2.778.387,500	54.538.528,670	0	102.042.822,488	0	193.556.867,937
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	47.274.500,000	0	0	0	0	2.078.202,000	509.086.588,002	0	538.499.290,002	0	1.220.182.226,306
3	Kab. Garut	Jawa Barat	496.523.687,424	0	0	0	0	0	496.523.687,424	0	496.523.687,424	0	1.317.614.556,424
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	12.206.400,000	0	0	0	0	4.238.537,150	361.062.310,965	0	377.507.248,115	0	846.238.451,990
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	4.275.517,599	0	0	0	398.342.139,000	3.713.000,000	4.553.420,891	0	410.888.077,490	1.925,000	981.891.163,195
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Tim	0	0	0	1.880.880,000	0	0	75.000,000,000	0	76.880.880,000	0	273.705.772,974
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	0	294.000,000	0	944.300,000	0	3.225.000,000	219.051.221,000	0	223.514.521,000	0	573.880.369,200
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Bar	0	0	1.700.268,000	2.723.750,000	46.188.115,000	0	0	0	50.612.133,000	0	142.973.628,956
9	Kab. Malang	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.654.431,448
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	1.159.357,420	0	0	0	74.248.851,000	1.650.000,000	0	0	77.058.208,420	0	146.558.208,410
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	501.600,000	0	0	0	0	2.383.400,000	313.679.762,300	15.800.600,000	332.365.362,300	0	772.803.398,776
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	3.906.000,000	116.057.975,000	0	119.963.975,000	0	372.732.186,606
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	36.000,000	0	0	0	0	619.562,500	179.992.747,090	3.000.000,000	183.648.309,590	0	377.719.841,525
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	473.520,000	1.621.200,000	137.543.688,260	0	0	0	0	0	139.638.408,260	0	363.105.803,966
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	2.048.635,600	0	0	0	0	3.748.450,000	186.031.460,600	0	191.828.546,200	0	534.651.111,181
16	Kota Banda Aceh	Aceh	1.017.400,000	0	46.869.060,000	0	158.143.478,223	4.420.500,000	0	0	210.450.438,223	151.250,000	426.231.181,630
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	33.622.474,000	0	0	0	0	896.669,000	120.880.326,000	0	155.399.469,000	0	336.117.758,000
18	Kota Magelang	Jawa Barat	12.892.080,000	0	0	0	0	9.169.621,000	364.683.453,797	0	386.745.154,797	0	843.523.842,303
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	0	0	0	0	0	237.000,000	49.875.419,000	0	50.112.419,000	0	123.492.617,500
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.821.577,131
21	Kota Sabang	Aceh	2.365.200,000	2.794.500,000	12.440.400,000	0	20.668.283,720	1.010.750,000	0	0	39.279.133,720	0	91.696.984,683
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	83.965.000,000	0	0	0	0	0	2.748.750,000	0	86.713.750,000	0	424.155.183,175
23	Kota Serang	Banten	24.575.204,412	0	0	614.779.768	165.996.335,816	1.918.444,500	0	0	193.104.764,496	0	401.418.085,949
Jumlah 15 Kabupaten			601.592.649,361	3.406.085,000	139.243.956,260	11.494.520,000	518.779.105,000	28.340.539,150	2.019.054.014,518	18.800.600,000	3.340.911.469,289	1.925,000	9.364.268.018,894
Jumlah 8 Kota			158.437.358,412	2.794.500,000	59.309.460,000	614.779.768	344.808.097,759	17.652.884,500	538.187.948,797	0	1.121.805.129,236	151.250,000	2.917.457.230,371
Jumlah seluruh			760.030.007,773	6.200.585,000	198.553.416,260	12.309.299,768	863.587.202,759	45.993.523,650	2.557.241.963,315	18.800.600,000	4.462.716.598,525	153.175,000	12.281.725.249,265

Berdasarkan data pada Tabel 4.19B, pada tahun 2016 gaji dan tunjangan untuk 23 kabupaten/kota sebesar Rp8.262.893,5 juta, dengan rincian terbesar pada Kabupaten Malang sebesar Rp1.235.058,9 juta dan terkecil pada Kota Sabang sebesar Rp54.317,6 juta. Tambahan penghasilan PNS 23 kabupaten/kota sebesar Rp4.300.123,4 juta, terbesar pada Kabupaten Garut sebesar Rp592.172,3 juta dan terkecil pada Kota Sabang sebesar Rp38.427,3 juta. Insentif pemungutan retribusi hanya di Kota Banda Aceh sebesar Rp151,2 juta dan Kabupaten Kuningan sebesar Rp1,9 juta. Dengan demikian, belanja tidak langsung 23 kabupaten/kota sebesar Rp12.563.170,1 juta.

Tabel 4.19B
Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Rincian Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. GP PNS/Uang representasi	Tunjangan							8. Pembulatan Gaji	9. Iuran Askes+ Uang muka	10. Gaji Guru	Jumlah Gaji dan Tunjangan
				2. Keluarga	3. Jabatan	4. Fungsional	5. Fungs Umum	6. Beras	7. PPH Khusus					
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	77.237.855.000	7.987.602.000	448.895.000	7.518.648.000	374.880.000	5.110.582.000	1.854.885.000	1.500.000	0	0	0	100.534.847.000
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	561.150.236.453	55.728.133.000	549.675.000	54.472.725.000	2.568.825.000	27.866.204.000	8.165.505.000	7.113.000	16.985.933.000	0	0	727.494.349.453
3	Kab. Garut	Jawa Barat	655.458.377.304	64.952.510.088	1.601.050.425	61.437.799.780	4.128.913.425	37.146.867.124	8.928.854.250	11.360.774	1.250.000.000	0	0	834.915.733.170
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	413.725.204.010	35.010.711.834	794.920.000	32.161.430.000	3.807.580.000	23.837.147.406	4.698.122.380	5.193.550	14.627.813.892	923.861.928	0	529.591.985.000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	467.424.993.250	44.980.897.000	1.154.945.000	43.783.213.000	3.059.061.000	22.853.250.000	16.287.956.000	6.308.000	0	0	0	599.550.533.250
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	11.969.493.200	1.076.360.272	246.805.000	957.840.000	150.150.000	623.464.320	407.369.520	264.420	0	192.470.882.399	0	207.902.629.131
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	294.481.768.000	28.168.896.000	466.780.000	28.951.300.000	914.536.000	14.913.528.000	7.138.936.000	420.000	286.986.950	0	0	375.323.130.950
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	72.841.603.412	8.165.534.701	226.395.000	5.682.521.000	1.328.502.500	5.175.884.969	1.379.152.766	2000000	0	0	0	94.801.594.348
9	Kab. Malang	Jawa Timur	606.675.419.350	56.974.918.000	1.115.400.000	525.826.668.500	3.818.886.500	29.173.075.456	11.460.180.168	14.314.300	0	0	0	1.235.058.862.274
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	65.524.886.917	5.199.872.177	371.931.175	5.026.067.255	766.081.800	3.398.781.327	1.103.851.735	824.000	0	0	0	81.392.296.386
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	354.212.021.000	34.452.502.000	967.384.000	31.683.424.000	2.946.641.000	20.624.887.000	12.894.743.000	15.001.779	0	0	0	457.796.603.779
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	222.870.897.911	24.000.756.673	523.369.000	23.508.877.192	1.625.190.800	15.841.674.413	8.381.651.615	15.931.777	9.378.804.067	0	0	306.147.153.448
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	164.095.425.029	15.267.948.850	537.731.000	15.481.743.200	730.961.000	10.839.737.504	2.287.341.965	2.024.499	0	0	0	209.242.913.047
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	191.836.406.545	17.238.159.092	367.431.750	18.455.563.700	881.161.750	10.991.903.979	4.557.248.432	2.560.097	0	0	0	244.330.435.345
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	227.791.022.833	23.874.093.446	335.230.000	22.581.468.000	1.708.070.000	14.436.142.680	6.318.215.372	3.304.560	9.213.502.436	0	0	306.261.049.327
16	Kota Banda Aceh	Aceh	165.628.779.264	12.823.095.380	493.358.125	14.654.581.825	978.454.750	8.452.404.344	1.818.192.399	2.154.906	0	0	0	204.851.020.993
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	151.404.810.000	12.561.864.000	433.954.000	12.815.420.000	612.096.000	6.941.666.000	2.338.166.000	1.784.000	0	0	0	187.109.760.000
18	Kota Magelang	Jawa Tengah	400.196.054.490	33.707.416.400	1.141.955.000	32.895.589.200	2.100.085.000	17.545.918.000	14.264.625.993	6.404.889	23.666.990.000	0	0	525.525.038.971
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	69.524.039.000	6.389.149.000	4.093.460.000	5.973.548.000	386.540.000	3.852.415.000	1.670.698.000	931.000	0	0	0	91.890.780.000
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	230.173.514.280	17.648.520.552	497.494.992	19.153.939.980	1.267.499.988	10.655.525.400	4.670.177.268	2.968.976	0	0	0	284.069.641.436
21	Kota Sabang	Aceh	42.423.855.415	4.274.032.112	234.407.250	4.152.492.050	439.212.025	2.355.659.654	437.125.000	799.156	0	0	0	54.317.582.662
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	303.723.343.607	26.101.778.120	848.267.500	25.866.138.700	2.093.725.000	16.171.879.060	7.044.543.736	4.122.793	0	0	0	381.853.798.516
23	Kota Serang	Banten	181.678.517.471	16.496.352.680	562.649.458	1.775.344.262	616.534.425	10.637.098.520	4.336.087.134	2.528.498	5.993.118.586	833.572.339	222.931.803.373	622.931.803.373
Jumlah 15 Kabupaten			4.387.295.520.215	423.078.895.133	9.707.922.350	877.529.288.627	28.809.440.775	242.833.130.178	95.864.013.203	88.120.756	51.743.040.345	193.394.744.327	6.310.344.115.908	
Jumlah 8 Kota			1.544.752.913.526	130.002.208.244	8.305.546.325	117.287.054.017	8.494.147.188	76.612.565.978	36.579.615.530	21.694.217	29.660.108.586	833.572.339	1.952.549.425.950	
Jumlah seluruh			5.932.048.433.741	553.081.103.377	18.013.468.675	994.816.342.644	37.303.587.963	319.445.696.156	132.443.628.733	109.814.973	81.403.148.931	194.228.316.666	8.262.893.541.858	

Grafik 4.16B
Jumlah Belanja Tidak Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel
Tahun 2016



Tabel 4.19B (lanjutan)
Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Rincian Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. Beban kerja	2. Tempat bertugas	3. Prestasi kerja	4. Pertimbangan	5. Sertifikasi profesi PNS	6. PNS guru	7. TPG PNSD	8. Uang kesehatan pegawai	Tambahan Penghasilan PNS	Insentif pemungutan	Jumlah Belanja Pegawai
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	37.489.000.000	1.490.885.000	0	6.385.170.000	0	960.800.000	39.753.472.000	0	86.079.327.000	0	186.614.174.000
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	44.070.000.000	0	0	0	0	2.713.500.000	455.349.064.000	0	502.132.564.000	0	1.229.626.913.453
3	Kab. Garut	Jawa Barat	592.172.261.000	0	0	0	0	0	0	0	592.172.261.000	0	1.427.087.994.170
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	18.324.000.000	0	0	0	0	5.289.200.000	317.002.129.000	0	340.615.329.000	0	870.207.314.000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	437.006.441.067	0	0	0	0	0	0	0	437.006.441.067	1.925.000	1.036.558.899.317
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	1.824.000.000	0	6.762.500.000	75.500.391.337	0	84.086.891.337	0	291.989.520.468
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	120.000.000	294.000.000	0	2.273.400.000	0	3.206.700.000	217.544.807.000	0	223.438.907.000	0	598.762.037.950
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	0	0	5.400.268.000	2.723.750.000	0	0	46.188.115.000	0	54.312.193.000	0	149.113.727.348
9	Kab. Malang	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.058.862.274
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	2.716.458.600	0	0	0	82.422.872.000	668.000.000	0	0	85.807.330.600	0	167.199.626.986
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	501.600.000	0	0	0	0	962.000.000	242.202.371.000	20.227.000.000	263.892.971.000	0	721.689.574.779
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	3.906.000.000	126.156.223.640	0	130.062.223.640	0	436.209.377.088
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	36.000.000	0	0	0	0	493.562.500	169.126.233.509	0	169.655.796.009	0	378.898.709.056
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	1.288.045.467	1.621.140.000	123.717.015.000	0	0	0	0	0	126.626.200.467	0	370.956.635.812
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	2.657.035.600	0	0	0	0	2.440.000.000	188.462.628.360	0	193.559.663.960	0	499.820.713.287
16	Kota Banda Aceh	Aceh	1.017.400.000	0	42.157.747.000	0	130.426.906.000	2.873.500.000	0	0	176.475.553.000	151.250.000	381.477.823.993
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	38.236.448.000	0	0	0	0	118.494.277.000	0	0	156.730.725.000	0	343.840.485.000
18	Kota Magelang	Jawa Tengah	12.319.200.000	0	0	0	0	6.815.020.000	342.956.036.000	0	362.090.256.000	0	887.615.294.971
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	0	0	0	0	336.000.000	40.874.349.000	0	0	41.210.349.000	0	133.101.129.000
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.069.641.436
21	Kota Sabang	Aceh	2.365.200.000	0	13.329.432.000	0	22.649.880.000	82.800.000	0	0	38.427.312.000	0	92.744.894.662
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	66.010.150.000	0	0	0	0	0	1.245.300.000	0	67.255.450.000	0	449.109.248.516
23	Kota Serang	Banten	28.996.235.224	0	0	1.468.466.712	136.120.992.925	1.900.000.000	0	0	168.485.694.861	0	391.417.498.234
Jumlah 15 Kabupaten			1.136.380.841.734	3.406.025.000	129.117.283.000	13.206.320.000	82.422.872.000	27.402.262.500	1.877.285.434.846	20.227.000.000	3.289.448.039.080	1.925.000	9.599.794.079.988
Jumlah 8 Kota			148.944.633.224	0	55.487.179.000	1.468.466.712	289.533.778.925	171.039.946.000	344.201.336.000	0	1.010.675.339.861	151.250.000	2.963.376.015.811
Jumlah seluruh			1.285.325.474.958	3.406.025.000	184.604.462.000	14.674.786.712	371.956.650.925	198.442.208.500	2.221.486.770.846	20.227.000.000	4.300.123.378.941	153.175.000	12.563.170.095.799

b. Jenis Belanja

Berdasarkan data pada Tabel 4.20A, pada tahun 2015 dari 23 kabupaten/kota, gaji dan tunjangan ternyata menduduki porsi terbesar sebesar 63,66%, gaji dan tambahan penghasilan PNS sebesar 36,34%, dan insentif pemungutan retribusi mendekati 0,00% atau sangat kecil. Untuk gaji dan tunjangan maka rata-rata 15 kabupaten sebesar 64,32% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 61,54%. Hal ini berarti kabupaten memberikan sebesar 2,78% lebih besar daripada kota dalam hal gaji dan tunjangan pegawai. Untuk tambahan penghasilan, rata-rata kabupaten sebesar 35,68% lebih kecil daripada rata-rata kota sebesar 38,45%. Hal ini berarti terdapat Kota memberikan sebesar 2,77% lebih besar dalam pemberian tambahan penghasilan.

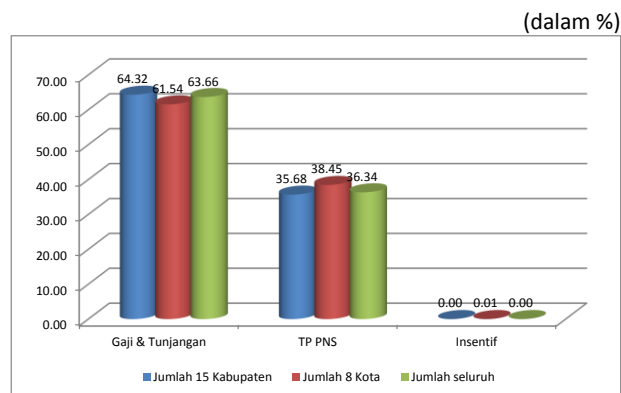
Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka hanya Kabupaten Malang dan Kota Palu yang tidak mengalokasikan tambahan penghasilan PNS atau tidak memberikan datanya. Kota Samarinda memberikan gaji dan tunjangan terbesar sebesar 79,56% dan Kabupaten Bintan yang terkecil sebesar 47,28%. Sebaliknya, Kabupaten Bintan mengalokasikan tambahan penghasilan PNS terbesar pada sebesar 52,72% dan Kota Samarinda terkecil sebesar 20,44%. Kota Banda Aceh

memberikan insentif pemungutan retribusi sebesar 0,04% lebih besar daripada Kabupaten Kuningan sebesar mendekati 0,00%, sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak mengalokasikan.

Tabel 4.20A
Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Gaji dan Tunjangan		Tambahkan Penghasilan PNS		Insentif		Jumlah
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	91.514.045.449	47,28	102.042.822.488	52,72	0	0	193.556.867.937
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	661.742.936.304	54,23	558.439.290.002	45,77	0	0	1.220.182.226.306
3	Kab. Garut	Jawa Barat	821.090.869.000	62,32	496.523.687.424	37,68	0	0	1.317.614.556.424
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	468.731.203.875	55,39	377.507.248.115	44,61	0	0	846.238.451.990
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	571.001.160.705	58,15	410.888.077.490	41,85	1.925.000	0,00	981.891.163.195
17	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	196.824.892.974	71,91	76.880.880.000	28,09	0	0	273.705.772.974
6	Kab. Lampung Selatan	Lampung	350.365.848.200	61,05	223.514.521.000	38,95	0	0	573.880.369.200
7	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	92.361.495.956	64,60	50.612.133.000	35,40	0	0	142.973.628.956
8	Kab. Malang	Jawa Timur	1.246.654.431.448	100,00	0	0,00	0	0	1.246.654.431.448
9	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	69.499.999.990	47,42	77.058.208.420	52,58	0	0	146.558.208.410
10	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	440.438.036.476	56,99	332.365.362.300	43,01	0	0	772.803.398.776
11	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	252.768.211.606	67,81	119.963.975.000	32,19	0	0	372.732.186.606
12	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	194.071.531.935	51,38	183.648.309.590	48,62	0	0	377.719.841.525
13	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	223.467.395.706	61,54	139.638.408.260	38,46	0	0	363.105.803.966
14	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	342.822.564.981	64,12	191.828.546.200	35,88	0	0	534.651.111.181
15	Kota Banda Aceh	Aceh	215.629.493.407	50,59	210.450.438.223	49,37	151.250.000	0,04	426.231.181.630
16	Kota Cirebon	Jawa Barat	180.718.289.000	53,77	155.399.469.000	46,23	0	0	336.117.758.000
18	Kota Magelang	Jawa Barat	456.778.687.506	54,15	386.745.154.797	45,85	0	0	843.523.842.303
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	73.380.198.500	59,42	50.112.419.000	40,58	0	0	123.492.617.500
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	270.821.577.131	100,00	0	0,00	0	0	270.821.577.131
21	Kota Sabang	Aceh	52.417.850.963	57,16	39.279.133.720	42,84	0	0	91.696.984.683
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	337.441.433.175	79,56	86.713.750.000	20,44	0	0	424.155.183.175
23	Kota Serang	Banten	208.313.321.453	51,89	193.104.764.496	48,11	0	0	401.418.085.949
Jumlah 15 Kabupaten			6.023.354.624.605	64,32	3.340.911.469.289	35,68	1.925.000	0,00	9.364.268.018.894
Jumlah 8 Kota			1.795.500.851.135	61,54	1.121.805.129.236	38,45	151.250.000	0,01	2.917.457.230.371
Jumlah seluruh			7.818.855.475.740	63,66	4.462.716.598.525	36,34	153.175.000	0,00	12.281.725.249.265

Grafik 4.17A
Persentase Belanja Tidak Langsung Menurut Jenis Belanja
Tahun 2015



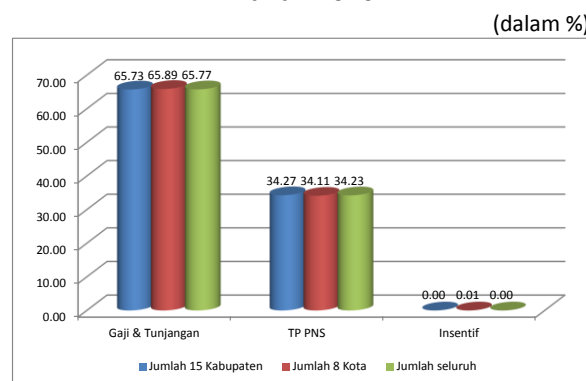
Berdasarkan data pada Tabel 4.20B, pada tahun 2016 dari 23 kabupaten/kota, gaji dan tunjangan ternyata menduduki porsi terbesar sebesar 65,77%, gaji dan tambahan penghasilan PNS sebesar 34,23%, dan insentif pemungutan retribusi mendekati 0,00% atau sangat kecil. Untuk gaji dan tunjangan maka rata-rata 15

kabupaten sebesar 65,73% sedikit lebih kecil daripada rata-rata kota sebesar 65,89%. Hal ini berarti kota memberikan sebesar 0,16% lebih besar daripada kabupaten dalam hal gaji dan tunjangan pegawai. Untuk tambahan penghasilan maka rata-rata kabupaten sebesar 34,27% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 34,11%. Hal ini berarti kabupaten sebesar 0,16% lebih besar daripada kota dalam pemberian tambahan penghasilan.

Tabel 4.20B
Jumlah Belanja Tidak langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Gaji dan Tunjangan		Tambahan Penghasilan PNS		Insentif Pem Retribusi		Jumlah
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	100.534.847.000	53,87	86.079.327.000	46,13	0	0,00	186.614.174.000
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	727.494.349.453	59,16	502.132.564.000	40,84	0	0,00	1.229.626.913.453
3	Kab. Garut	Jawa Barat	834.915.733.170	58,50	592.172.261.000	41,50	0	0,00	1.427.087.994.170
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	529.591.985.000	60,86	340.615.329.000	39,14	0	0,00	870.207.314.000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	599.550.533.250	57,84	437.006.441.067	42,16	1.925.000	0,00	1.036.558.899.317
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	207.902.629.131	71,20	84.086.891.337	28,80	0	0,00	291.989.520.468
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	375.323.130.950	62,68	223.438.907.000	37,32	0	0,00	598.762.037.950
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	94.801.594.348	63,58	54.312.133.000	36,42	0	0,00	149.113.727.348
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1.235.058.862.274	100,00	0	0,00	0	0,00	1.235.058.862.274
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	81.392.296.386	48,68	85.807.330.600	51,32	0	0,00	167.199.626.986
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	457.796.603.779	63,43	263.892.971.000	36,57	0	0,00	721.689.574.779
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	306.147.153.448	70,18	130.062.223.640	29,82	0	0,00	436.209.377.088
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	209.242.913.047	55,22	169.655.796.009	44,78	0	0,00	378.898.709.056
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	244.330.435.345	65,86	126.626.200.467	34,14	0	0,00	370.956.635.812
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	306.261.049.327	61,27	193.559.663.960	38,73	0	0,00	499.820.713.287
16	Kota Banda Aceh	Aceh	204.851.020.993	53,70	176.475.553.000	46,26	151.250.000	0,04	381.477.823.993
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	187.109.760.000	54,42	156.730.725.000	45,58	0	0,00	343.840.485.000
18	Kota Magelang	Jawa Barat	525.525.038.971	59,21	362.090.256.000	40,79	0	0,00	887.615.294.971
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	91.890.780.000	69,04	41.210.349.000	30,96	0	0,00	133.101.129.000
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	284.069.641.436	100,00	0	0,00	0	0,00	284.069.641.436
21	Kota Sabang	Aceh	54.317.582.662	58,57	38.427.312.000	41,43	0	0,00	92.744.894.662
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	381.853.798.516	85,02	67.255.450.000	14,98	0	0,00	449.109.248.516
23	Kota Serang	Banten	222.931.803.373	56,95	168.485.694.861	43,05	0	0,00	391.417.498.234
Jumlah 15 Kabupaten			6.310.344.115.908	65,73	3.289.448.039.080	34,27	1.925.000	0,00	9.599.794.079.988
Jumlah 8 Kota			1.952.549.425.950	65,89	1.010.675.339.861	34,11	151.250.000	0,01	2.963.376.015.811
Jumlah seluruh			8.262.893.541.858	65,77	4.300.123.378.941	34,23	153.175.000	0,00	12.563.170.095.799

Grafik 4.17B
Persentase Belanja Tidak Langsung Menurut Jenis Belanja
Tahun 2016



Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka hanya Kabupaten Malang dan Kota Palu yang tidak mengalokasikan tambahan penghasilan PNS atau tidak memberikan datanya. Kota Samarinda memberikan gaji dan tunjangan terbesar sebesar 85,02% dan Kabupaten Mamuju terkecil sebesar 48,68%. Sebaliknya, Kabupaten Mamuju mengalokasikan tambahan penghasilan PNS terbesar sebesar 51,32% dan Kota Samarinda terkecil sebesar 14,98%. Kota Banda Aceh memberikan insentif pemungutan retribusi sebesar 0,04% dan Kabupaten Kuningan sebesar mendekati 0,00%, sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak mengalokasikan.

3. Belanja Langsung

Seperti halnya provinsi, belanja langsung yang disajikan ada lima, yaitu 1) belanja langsung menurut jenis program dan tipe belanja, 2) belanja langsung menurut tipe belanja, 3) belanja langsung menurut jenis program, 4) persentase belanja langsung menurut program, dan 5) persentase belanja langsung menurut jenis pendidikan.

a. Jenis Program dan Tipe Belanja

Belanja langsung terdapat 16 jenis program dan 3 tipe belanja, namun tidak semua kabupaten/kota memiliki 16 jenis dan 3 tipe belanja. Program 1 sampai 5 adalah program mengenai administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan 11 program lainnya untuk institusi pendidikan.

Berdasarkan pada Tabel 4.21A pada tahun 2015, program administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur semua kabupaten/kota mengalokasikan dananya. Terdapat 7 kabupaten/kota sampel mengalokasikan dana disiplin aparatur, terdapat 10 kabupaten/kota mengalokasikan dana kapasitas sumber daya aparatur, terdapat 6 kabupaten/kota tidak mengalokasikan dana kinerja dan keuangan.

Untuk institusi pendidikan ternyata semua kabupaten/kota mengalokasikan dana PAUD, Wajar Dikdas, Dikmen, dan mutu PTK. Kabupaten Kupang tidak mengalokasikan dana PNF, hanya 3 kabupaten/kota mengalokasikan program PK dan PLK karena memang sebenarnya tanggung jawab provinsi, terdapat 2 kabupaten/kota tidak mengalokasikan mutu manajemen pelayanan pendidikan, 10 kabupaten/kota mengalokasikan kepemudaan dan olahraga, 6 kabupaten/kota mengalokasikan kebudayaan, Kabupaten Pangkep dan Kota Mojokerto mengalokasikan program PT, dan 10 kabupaten/kota mengalokasikan program lainnya.

Tabel 4.21A
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja 23 Kabupaten/Kota
Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	1. Administrasi Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keuangan	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	Kab. Bintan	Pegawai	17,221,513,800	22,100,000	0	0	42,495,600	138,751,100	1,688,510,100	578,911,900	6,209,300
		Barang & Jasa	2,883,259,703	250,000,000	0	50,000,000	80,067,950	772,855,500	6,136,332,900	3,316,598,867	153,510,700
		Modal	0	189,000,000	0	0	0	5,400,000	786,053,500	171,327,756	0
		Jumlah	20,104,773,503	461,100,000	0	50,000,000	122,563,550	917,006,600	8,610,896,500	4,066,838,523	159,720,000
2	Kab. Cirebon	Pegawai	0	577,300,000	0	0	25,872,000	24,200,000	385,220,000	6,629,542,725	103,860,000
		Barang & Jasa	1,910,087,800	1,495,355,112	0	0	22,455,300	1,103,687,336	3,507,672,874	6,828,154,429	5,392,927,186
		Modal	0	519,883,850	0	0	0	0	39,840,669,904	24,737,852,200	0
		Jumlah	1,910,087,800	2,592,538,962	0	0	48,327,300	1,127,887,336	43,733,562,778	38,195,549,354	5,496,787,186
3	Kab. Garut	Pegawai	5,908,500,000	10,904,000	0	0	12,884,000	350,000	87,962,000	81,560,000	464,542,000
		Barang & Jasa	1,113,909,000	235,689,200	0	0	104,448,600	6,433,150,000	22,784,835,372	36,896,707,500	741,077,000
		Modal	0	963,376,600	0	0	0	0	75,371,084,067	19,967,414,867	5,282,000
		Jumlah	7,022,409,000	1,209,969,800	0	0	117,332,600	6,433,500,000	98,243,881,439	56,945,682,367	1,210,901,000
4	Kab. Karanganyar	Pegawai	0	0	0	0	110,700,000	6,725,000	738,469,900	168,270,000	66,644,000
		Barang & Jasa	787,166,500	233,400,000	0	25,000,000	98,700,000	2,487,025,000	5,544,186,100	3,816,945,700	1,445,119,000
		Modal	0	2,089,950,000	0	0	0	0	14,017,740,100	11,019,975,000	224,390,000
		Jumlah	787,166,500	2,323,350,000	0	25,000,000	209,400,000	2,493,750,000	20,300,396,100	15,005,190,700	1,736,153,000
5	Kab. Kuningan	Pegawai	2,917,000,000	40,000,000	0	0	0	64,100,000	381,430,000	204,330,000	155,850,000
		Barang & Jasa	1,606,000,000	519,000,000	0	0	0	185,900,000	2,884,183,486	559,670,000	444,150,000
		Modal	0	350,000,000	0	0	0	0	34,356,334,689	21,787,197,000	0
		Jumlah	4,523,000,000	900,000,000	0	0	0	250,000,000	37,621,948,175	22,551,197,000	600,000,000
6	Kab. Kupang	Pegawai	12,089,040,000	0	0	0	63,600,000	4,950,000	227,415,000	59,200,000	0
		Barang & Jasa	842,936,500	231,755,000	59,620,000	0	464,000	708,109,000	2,877,976,017	1,718,900,000	0
		Modal	0	204,605,000	0	0	0	0	22,974,644,460	16,977,322,200	0
		Jumlah	12,931,976,500	436,360,000	59,620,000	0	64,064,000	713,059,000	26,080,035,477	18,755,422,200	0
7	Kab. Lampung Selatan	Pegawai	2,327,640,000	0	0	0	114,447,000	755,070,000	941,219,000	611,631,000	403,365,000
		Barang & Jasa	573,630,000	421,650,000	115,150,000	0	63,027,000	671,866,000	1,105,717,400	1,831,107,250	271,014,500
		Modal	0	699,293,150	0	0	0	0	22,936,738,000	20,625,971,000	0
		Jumlah	2,901,270,000	1,120,943,150	115,150,000	0	177,474,000	1,426,936,000	24,983,674,400	23,068,709,250	674,379,500
8	Kab. Lombok Utara	Pegawai	947,605,250	580,080,000	0	0	261,277,700	1,544,968,000	5,819,059,830	3,022,358,000	0
		Barang & Jasa	10,800,000	550,534,000	0	0	37,000,000	538,260,000	22,545,688,670	8,306,951,000	0
		Modal	1,117,869,250	1,186,414,000	0	0	479,692,700	2,430,438,000	29,345,168,500	11,751,814,000	344,700,000
		Jumlah	2,076,274,500	2,317,028,000	0	0	777,970,400	4,513,666,000	57,709,917,000	23,081,123,000	344,700,000
9	Kab. Malang	Pegawai	192,080,000	0	0	0	4,200,000	228,200,000	2,277,890,000	15,000,000	0
		Barang & Jasa	2,352,699,400	380,083,000	0	0	0	110,800,000	27,726,753,023	3,497,720,300	95,330,000
		Modal	0	0	0	0	0	0	64,673,016,514	0	149,680,000
		Jumlah	2,544,699,400	380,083,000	0	0	115,000,000	92,627,968,537	3,775,610,200	260,000,000	0
10	Kab. Mamuju	Pegawai	225,870,000	0	0	0	0	3,400,000	198,278,200	75,616,000	9,300,000
		Barang & Jasa	9,826,986,640	155,220,000	0	225,420,000	0	1,994,334,000	1,593,863,500	2,212,498,100	725,258,050
		Modal	0	1,263,200,000	0	0	0	0	17,953,445,092	21,894,717,908	0
		Jumlah	10,052,856,640	1,418,420,000	0	225,420,000	0	1,997,734,000	19,745,586,792	24,182,832,008	734,558,050
11	Kab. Mojokerto	Pegawai	163,955,000	5,890,000	12,700,000	0	3,150,000	30,700,000	677,300,000	349,200,000	11,430,000
		Barang & Jasa	5,281,917,700	927,880,000	5,399,410,000	0	6,850,000	634,300,000	758,275,000	3,097,324,500	149,495,000
		Modal	666,106,000	493,063,000	0	0	0	250,000,000	36,610,483,175	16,728,959,894	49,075,000
		Jumlah	6,111,978,700	1,426,833,000	5,412,110,000	0	10,000,000	915,000,000	38,046,058,175	20,175,475,394	210,000,000
12	Kab. Ogan Ilir	Pegawai	261,150,000	2,490,000	0	3,850,000	27,010,000	36,230,000	165,820,000	334,990,000	43,330,000
		Barang & Jasa	614,575,000	271,980,000	0	71,150,000	87,690,000	4,496,770,000	1,486,140,000	1,338,800,000	874,970,000
		Modal	213,770,000	523,770,000	0	0	0	392,000,000	11,188,040,000	24,085,188,000	0
		Jumlah	1,089,495,000	796,240,000	0	75,000,000	114,700,000	4,925,000,000	12,840,000,000	25,758,978,000	918,300,000
13	Kab. Pangandaran	Pegawai	0	79,255,000	0	0	73,816,000	178,900,000	685,850,000	248,485,000	225,400,000
		Barang & Jasa	2,001,490,000	437,666,000	0	80,000,000	391,687,500	484,650,900	2,730,833,433	6,148,588,533	828,292,300
		Modal	51,000,000	1,558,500,000	0	0	0	147,150,000	39,145,270,452	14,555,882,570	134,400,000
		Jumlah	2,052,490,000	2,075,420,000	0	80,000,000	465,503,500	810,700,900	42,561,953,885	20,952,956,103	1,188,092,300

Berdasarkan Tabel 4.21A dana keseluruhan program di 23 kabupaten/kota pada tahun 2015 sebesar Rp2.148.420,7 juta, terbesar terjadi di Kabupaten Garut sebesar Rp176.366,0 juta dan terkecil terjadi di Kota Palu sebesar Rp45.227,1 juta. Namun, bila dilihat setiap program maka kondisinya berbeda. Program 1, administrasi perkantoran terbesar terjadi di Kabupaten Bintan sebesar Rp20.104,8 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp787,2 juta. Program 2, sarana dan prasarana aparatur terbesar terjadi di Kota Serang sebesar Rp8.070,7 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Malang sebesar Rp380,1 juta. Program 3, disiplin aparatur terbesar terjadi di Kabupaten Malang sebesar Rp5.412,1 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Pangkep sebesar Rp56,6 juta. Program 4, kapasitas sumber daya aparatur terbesar terjadi di Kota Cirebon sebesar Rp772,2 juta dan terkecil terjadi di Kota Mojokerto sebesar Rp23,6 juta. Program 5, kinerja dan keuangan terbesar terjadi di Kota Samarinda sebesar Rp1.333,0 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp10,0 juta.

Program 6, PAUD terbesar terjadi di Kabupaten Garut sebesar Rp6.433,5 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Malang sebesar Rp115,0 juta. Program 7, wajar dikdas terbesar terjadi di Kota Magelang sebesar Rp112.198,9 juta dan terkecil

terjadi di Kabupaten Bintan sebesar Rp8.610,9 juta. Program 8, dikmen terbesar terjadi di Kota Samarinda sebesar Rp66.562,5 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Malang sebesar Rp3.775,6 juta. Program 9, PNF terbesar terjadi di Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.496,8 juta dan terkecil terjadi di Kota Banda Aceh sebesar Rp77,4 juta.

Tabel 4.21A (lanjutan 1)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan Pendid	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Bintan	Pegawai	0	207.400,550	0	0	0	0	872.593,150	20.778.485,500
		Barang & Jasa	0	535.758,348	0	0	0	0	9.339.755,158	23.518.139,126
		Modal	0	40.000,000	0	0	0	0	24.591,826,840	25.783,618,096
		Jumlah	0	783.158,898	0	0	0	0	34,804,185,148	70,080,242,722
2	Kab. Cirebon	Pegawai	0	182.798,000	0	395.950,000	0	0	10,080,000	8.334,822,725
		Barang & Jasa	0	497,652,550	0	1,292,064,974	0	0	14,952,050	22,065,009,611
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	65,098,405,954
		Jumlah	0	680,450,550	0	1,688,014,974	0	0	25,032,050	95,498,238,290
3	Kab. Garut	Pegawai	0	85.300,000	62.502,000	0	0	0	0	6,714,504,000
		Barang & Jasa	0	518.100,000	4,516,419,400	0	0	0	0	73,344,336,072
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	96,307,157,534
		Jumlah	0	603,400,000	4,578,921,400	0	0	0	0	176,365,997,606
4	Kab. Karanganyar	Pegawai	0	220.920,000	1,129,114,150	226,275,000	0	0	0	2,667,118,050
		Barang & Jasa	0	5,719,680,000	1,762,445,050	2,317,272,500	0	0	0	24,236,939,850
		Modal	0	0	63,500,000	0	0	0	0	27,424,555,100
		Jumlah	0	5,940,600,000	2,955,059,200	2,543,547,500	0	0	0	54,328,613,000
5	Kab. Kuningan	Pegawai	0	480.805,000	43,900,000	339,025,000	0	0	2,100,000	4,628,540,000
		Barang & Jasa	0	2,534,195,000	1,756,100,000	1,255,975,000	0	0	29,700,000	11,765,873,486
		Modal	0	0	0	100,000,000	0	0	0	56,593,531,689
		Jumlah	0	3,015,000,000	1,800,000,000	1,695,000,000	0	0	31,800,000	72,987,945,175
6	Kab. Kupang	Pegawai	0	39.940,000	9,450,000	28,250,000	0	0	0	12,521,845,000
		Barang & Jasa	0	4,370,290,000	6,681,880,000	603,835,000	0	0	0	18,095,765,517
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	40,156,571,660
		Jumlah	0	4,410,230,000	6,691,330,000	632,085,000	0	0	0	70,774,182,177
7	Kab. Lampung Selatan	Pegawai	0	287,858,000	511,370,000	203,960,000	0	0	84,192,000	6,240,752,000
		Barang & Jasa	0	482,924,450	1,522,440,000	222,120,000	0	0	121,362,000	7,402,008,600
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	44,262,002,150
		Jumlah	0	770,782,450	2,033,810,000	426,080,000	0	0	205,554,000	57,904,762,750
8	Kab. Lombok Utara	Pegawai	0	222,252,500	1,795,280,400	463,719,000	1,679,320,000	0	0	16,335,920,680
		Barang & Jasa	0	0	220,000,000	320,000,000	101,915,000	0	0	32,631,148,670
		Modal	0	464,642,500	2,386,115,400	1,048,368,000	2,110,095,000	0	0	52,665,317,350
		Jumlah	0	686,895,000	4,401,395,800	1,832,087,000	3,891,330,000	0	0	101,632,386,700
9	Kab. Malang	Pegawai	0	9.555,000	117,170,000	0	0	0	0	2,844,015,000
		Barang & Jasa	0	451,945,000	1,606,965,750	0	0	0	0	34,222,285,373
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	64,822,696,514
		Jumlah	0	461,500,000	1,724,135,750	0	0	0	0	101,888,996,887
10	Kab. Mamuju	Pegawai	0	48,070,000	132,620,000	0	0	0	0	693,154,200
		Barang & Jasa	0	1,452,568,423	3,037,185,000	0	0	0	0	21,223,333,713
		Modal	0	0	79,611,000	0	0	0	0	41,190,974,000
		Jumlah	0	1,500,638,423	3,249,416,000	0	0	0	0	63,107,461,913
11	Kab. Mojokerto	Pegawai	0	98.990,000	875,205,000	0	55,855,000	0	0	2,284,375,000
		Barang & Jasa	0	846,010,000	8,200,899,000	0	394,145,000	0	0	25,696,506,200
		Modal	0	0	293,051,000	0	0	0	0	55,090,729,069
		Jumlah	0	945,000,000	9,369,155,000	0	450,000,000	0	0	83,071,610,269
12	Kab. Ogan ilir	Pegawai	14,410,000	37,560,000	0	0	0	0	114,830,000	1,041,670,000
		Barang & Jasa	1,564,910,000	866,240,000	50,000,000	0	0	0	21,022,000,500	32,745,225,500
		Modal	290,700,000	0	0	0	0	0	2,636,220,000	39,329,688,000
		Jumlah	1,870,020,000	903,800,000	50,000,000	0	0	0	23,773,050,500	73,116,583,500
13	Kab. Pangandaran	Pegawai	0	130,350,000	193,410,000	356,645,000	88,550,000	0	0	2,260,661,000
		Barang & Jasa	0	764,320,000	1,066,270,000	1,640,240,950	827,098,000	0	0	17,401,136,616
		Modal	0	0	144,000,000	2,594,710,000	0	0	0	58,330,913,022
		Jumlah	0	894,670,000	1,403,680,000	4,591,595,950	915,648,000	0	0	77,992,710,638

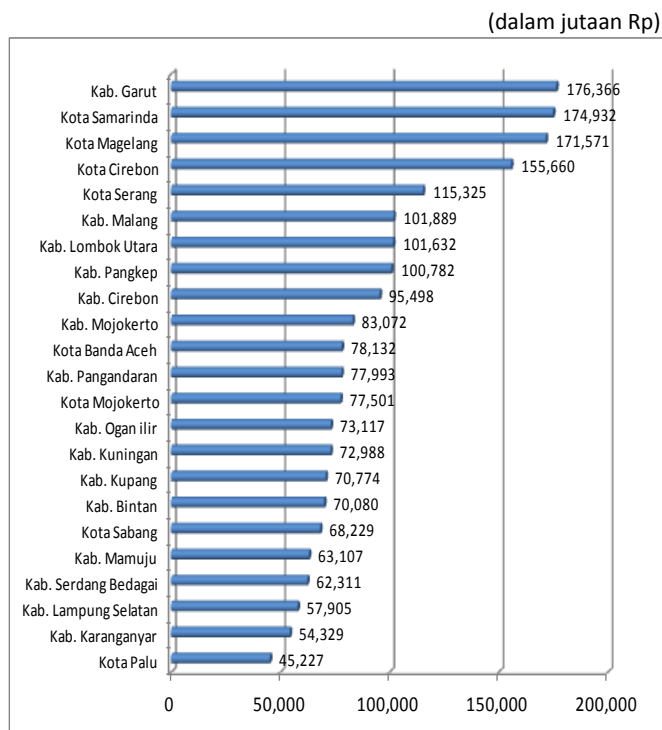
Masih pada Tabel 4.21A (lanjutan 1), program 10, PK dan PLK terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp1.870,0 juta dan terkecil terjadi di Kota Banda Aceh sebesar Rp31,2 juta. Program 11, mutu PTK terbesar terjadi di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp5.940,6 juta dan terkecil terjadi di Kota Banda Aceh sebesar Rp229,8 juta. Program 12, manajemen pelayanan pendidikan terbesar terjadi di Kota Cirebon sebesar Rp35.480,8 juta dan terkecil terjadi di Kota Sabang sebesar Rp26,3 juta. Program 13, kepemudaan dan olahraga terbesar terjadi di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp4.591,6 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp426,1 juta. Program 14, kebudayaan terbesar terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp3.891,3 juta dan terkecil

terjadi di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp450,0 juta. Program 15, PT di Kabupaten Pangkep sebesar Rp899,1 juta lebih besar daripada Kota Mojokerto sebesar Rp388,0 juta. Program 16, lainnya terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp23.773,1 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Cirebon sebesar Rp25,0 juta.

Tabel 4.21A (lanjutan 2)
Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	1. Administrasi Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keuangan	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
14	Kab. Pangkep	Pegawai	395.205.900	0	0	190.550.000	38.950.000	48.248.000	7.957.676.600	4.721.564.000	46.800.000
		Barang & Jasa	3.402.180.686	58.698.678	56.500.000	208.505.000	263.530.000	4.201.057.100	6.513.765.400	3.815.566.750	631.477.900
		Modal	0	1.550.397.000	0	0	0	191.772.800	42.203.767.434	23.030.321.470	0
		Jumlah	3.797.386.586	1.609.095.678	56.500.000	399.055.000	302.480.000	4.441.077.900	56.675.209.434	31.567.452.220	678.277.900
15	Kab. Serdang Bedagai	Pegawai	888.000.000	0	0	0	0	22.350.000	514.750.000	2.579.170.000	99.000.000
		Barang & Jasa	2.042.308.000	610.000.000	0	0	0	1.697.650.000	5.709.594.500	3.950.646.000	438.357.000
		Modal	877.261.300	545.000.000	0	0	0	167.000.000	20.071.395.738	20.508.716.000	0
		Jumlah	3.807.569.300	1.155.000.000	0	0	0	1.887.000.000	26.295.740.238	27.038.532.000	537.357.000
16	Kota Banda Aceh	Pegawai	1.875.050.000	34.848.000	0	0	0	49.425.000	4.118.525.000	2.383.300.000	42.625.000
		Barang & Jasa	1.467.964.800	1.091.210.300	1.463.780.700	0	0	1.352.533.400	4.745.860.840	12.576.709.500	34.822.500
		Modal	0	403.689.400	0	0	0	1.310.000.000	21.007.549.987	14.022.493.398	0
		Jumlah	3.343.014.800	1.529.747.700	1.463.780.700	0	0	2.711.958.400	29.871.935.836	28.984.502.898	77.447.500
17	Kota Cirebon	Pegawai	9.975.000	27.433.500	1.050.000	326.230.000	357.210.000	127.590.000	9.556.408.450	8.099.926.700	71.943.000
		Barang & Jasa	1.854.406.321	384.206.900	184.710.000	445.992.975	120.881.600	1.254.919.550	21.986.298.247	12.962.954.541	380.518.095
		Modal	0	1.690.820.000	0	0	0	0	33.525.358.935	24.796.381.437	0
		Jumlah	1.864.381.321	2.102.460.400	185.760.000	772.222.975	478.091.600	1.382.509.550	56.068.065.632	45.859.262.678	452.461.095
18	Kota Magelang	Pegawai	172.643.500	3.626.000	15.488.000	86.250.000	6.375.000	6.887.500	1.438.206.200	453.760.000	28.505.000
		Barang & Jasa	737.476.500	1.021.679.000	49.512.000	38.750.000	18.625.000	574.650.000	34.433.727.862	22.536.951.390	321.495.000
		Modal	55.544.000	1.866.864.400	0	0	0	134.880.000	76.327.000.410	8.512.750.373	0
		Jumlah	965.664.000	2.892.169.400	65.000.000	125.000.000	25.000.000	716.417.500	112.198.934.472	31.503.461.763	350.000.000
19	Kota Mojokerto	Pegawai	7.585.642.000	4.710.000	0	3.650.000	26.683.000	42.578.000	1.235.096.350	524.545.000	15.250.000
		Barang & Jasa	920.383.825	271.440.000	0	19.950.000	47.317.000	2.198.826.850	28.979.517.200	16.538.077.650	587.975.500
		Modal	187.616.000	263.040.000	0	0	0	256.209.900	9.924.940.600	3.136.586.700	41.690.000
		Jumlah	8.693.641.825	539.190.000	0	23.600.000	74.000.000	2.497.614.750	40.139.554.150	20.199.209.350	644.915.500
20	Kota Palu	Pegawai	1.096.325.000	0	0	0	0	84.600.000	572.400.000	264.956.000	514.200.000
		Barang & Jasa	2.731.456.275	6.000.000	0	0	0	546.673.555	5.519.180.433	6.115.592.041	597.975.455
		Modal	120.911.000	4.500.000.000	0	0	0	46.527.705	14.316.548.371	6.483.042.110	46.527.705
		Jumlah	3.948.692.275	4.506.000.000	0	0	0	677.801.260	20.408.128.804	12.863.590.151	1.158.703.160
21	Kota Sabang	Pegawai	821.970.000	109.480.000	0	0	7.400.000	9.315.000	12.497.760.250	2.816.250.000	13.200.000
		Barang & Jasa	857.159.037	628.046.701	0	0	2.317.675	1.574.730.113	2.553.849.276	1.633.283.820	702.600.748
		Modal	202.450.000	642.177.750	0	0	0	2.109.685.044	27.130.882.946	11.048.769.423	84.240.000
		Jumlah	1.881.579.037	1.379.704.451	0	0	9.717.675	3.693.730.157	42.182.492.472	15.498.303.243	800.040.748
22	Kota Samarinda	Pegawai	2.349.250.000	22.500.000	0	0	255.755.000	19.550.000	42.428.015.646	16.394.692.480	273.250.000
		Barang & Jasa	1.892.800.000	1.496.288.000	0	0	921.494.250	280.450.000	45.240.879.646	50.167.839.033	1.628.510.000
		Modal	1.047.579.000	0	0	0	155.780.000	0	0	0	14.790.000
		Jumlah	5.289.629.000	1.518.788.000	0	0	1.333.029.250	300.000.000	87.668.895.292	66.562.531.513	1.916.550.000
23	Kota Serang	Pegawai	35.590.000	94.645.000	0	3.240.000	67.800.000	1.234.145.000	189.450.000	10.485.279.671	278.885.000
		Barang & Jasa	2.441.323.700	814.117.500	0	186.340.000	609.323.913	794.570.000	2.623.414.000	23.287.866.882	1.552.975.000
		Modal	0	7.161.955.000	0	0	0	245.570.000	42.428.015.646	16.394.692.480	0
		Jumlah	2.476.913.700	8.070.717.500	0	189.580.000	677.123.913	2.274.285.000	45.240.879.646	50.167.839.033	1.831.860.000
	Jumlah 15 kab	Pegawai	43.537.479.950	1.318.019.000	12.700.000	194.400.000	774.202.300	2.863.142.100	20.697.160.630	21.942.718.625	1.650.730.300
		Barang & Jasa	35.249.946.929	6.769.909.990	5.630.680.000	660.075.000	1.155.920.350	26.520.414.836	113.905.816.675	85.336.178.829	12.190.968.636
		Modal	2.926.006.550	12.145.452.600	0	0	479.692.700	3.583.760.800	471.473.851.625	247.842.650.865	907.527.000
		Jumlah	81.713.433.429	20.233.381.590	5.643.380.000	854.475.000	2.409.815.350	32.967.317.736	606.076.828.930	355.121.548.319	14.749.225.936
	Jumlah 8 kota	Pegawai	13.946.445.500	297.242.500	16.538.000	419.370.000	721.223.000	1.574.090.500	72.035.861.896	41.422.709.851	1.237.858.000
		Barang & Jasa	12.902.970.458	5.712.988.401	1.698.002.700	691.032.975	1.719.959.438	8.577.353.468	146.082.727.513	145.821.274.857	5.806.672.298
		Modal	1.614.100.000	16.528.546.550	0	0	155.780.000	4.102.872.649	224.660.296.895	84.394.715.921	187.247.705
		Jumlah	28.463.515.958	22.538.777.451	1.714.540.700	1.110.402.975	2.596.962.438	14.254.316.617	442.778.886.304	271.638.700.629	7.231.978.003
	Jumlah	Pegawai	57.483.925.450	1.615.261.500	29.238.000	613.770.000	1.495.425.300	4.437.232.600	92.733.022.526	63.365.428.476	2.888.588.300
		Barang & Jasa	48.152.917.387	12.482.898.391	7.328.682.700	1.351.107.975	2.875.879.788	35.097.768.304	259.988.544.188	232.275.453.686	17.997.840.934
		Modal	4.540.106.550	28.673.999.150	0	0	635.472.700	7.686.633.449	696.134.148.520	332.237.366.786	1.094.774.705
		Jumlah	110.176.949.387	42.772.159.041	7.357.920.700	1.964.877.975	5.006.777.788	47.221.634.353	1.048.855.715.234	626.760.248.948	21.981.203.939

Grafik 4.18A
Jumlah Belanja Langsung Tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2015



Tabel 4.21A (lanjutan 3)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan	13. Kepemudaan &	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
14	Kab. Pangkep	Pegawai	0	41.050.000	0	0	0	26.250.000	0	13.466.294.500
		Barang & Jasa	0	205.457.500	13.200.000	0	0	872.860.500	0	20.242.799.514
		Modal	0	0	96.734.000	0	0	0	0	67.072.992.704
		Jumlah	0	246.507.500	109.934.000	0	0	899.110.500	0	100.782.086.718
15	Kab. Serdang Bedagai	Pegawai	0	607.200.000	31.500.000	0	0	72.800.000	0	4.814.770.000
		Barang & Jasa	0	375.920.000	190.894.000	0	0	311.950.000	0	15.327.319.500
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	42.169.373.038
		Jumlah	0	983.120.000	222.394.000	0	0	384.750.000	0	62.311.462.538
16	Kota Banda Aceh	Pegawai	1.800.000	137.925.000	1.383.201.250	411.455.000	0	0	17.250.000	10.455.404.250
		Barang & Jasa	29.407.500	91.897.600	5.211.767.613	1.753.135.500	0	0	49.802.500	29.870.892.762
		Modal	0	0	1.062.243.700	0	0	0	0	37.805.976.485
		Jumlah	31.207.500	229.822.600	7.657.212.563	2.164.590.500	0	0	67.052.500	78.132.273.497
17	Kota Cirebon	Pegawai	0	400.577.500	667.215.000	0	0	489.530.000	0	20.135.089.150
		Barang & Jasa	0	442.549.000	20.877.652.700	0	0	681.538.279	0	61.576.628.208
		Modal	0	0	13.935.925.000	0	0	0	0	73.948.485.372
		Jumlah	0	843.126.500	35.480.792.700	0	0	1.171.068.279	0	155.660.202.730
18	Kota Magelang	Pegawai	0	224.635.500	389.977.000	107.525.000	0	0	657.257.000	3.591.135.700
		Barang & Jasa	0	2.955.249.500	15.312.073.062	2.399.975.000	0	0	682.743.000	81.082.907.314
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	86.897.039.183
		Jumlah	0	3.179.885.000	15.702.050.062	2.507.500.000	0	0	1.340.000.000	171.571.082.197
19	Kota Mojokerto	Pegawai	13.400.000	166.754.000	7.000.000	44.400.000	37.829.000	0	0	19.707.537.350
		Barang & Jasa	107.900.000	1.013.106.000	576.718.650	1.040.450.000	1.218.654.400	388.000.000	0	53.908.317.078
		Modal	0	0	75.406.350	0	0	0	0	13.885.489.550
		Jumlah	121.300.000	1.179.860.000	659.125.000	1.084.850.000	1.256.483.400	388.000.000	0	77.501.343.975
20	Kota Palu	Pegawai	0	73.600.000	180.000.000	0	338.320.000	0	0	3.124.401.000
		Barang & Jasa	0	350.335.517	224.124.500	0	361.950.000	0	0	16.453.287.776
		Modal	0	69.293.200	34.922.000	0	31.650.000	0	0	25.649.422.091
		Jumlah	0	493.228.717	439.046.500	0	731.920.000	0	0	45.227.110.867
21	Kota Sabang	Pegawai	0	154.025.000	9.000.000	0	0	0	0	16.438.400.250
		Barang & Jasa	0	2.602.933.698	17.296.821	0	0	0	0	10.572.217.889
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	41.218.205.163
		Jumlah	0	2.756.958.698	26.296.821	0	0	0	0	68.228.823.302
22	Kota Samarinda	Pegawai	0	0	450.790.000	0	0	0	0	39.901.800
		Barang & Jasa	0	1.286.629.000	1.763.210.000	0	0	0	0	62.233.704.926
		Modal	0	0	16.000.000	0	0	0	0	105.222.939.129
		Jumlah	0	1.286.629.000	2.230.000.000	0	0	0	0	7.474.939.500
23	Kota Serang	Pegawai	0	210.575.000	27.250.000	0	71.240.000	0	0	174.931.583.555
		Barang & Jasa	0	1.076.654.000	1.315.929.000	0	1.694.748.000	0	0	12.698.099.671
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	36.396.661.995
		Jumlah	0	1.286.629.000	1.343.179.000	0	1.765.988.000	0	0	66.230.233.126
	Jumlah 15 kab	Pegawai	14.410.000	2.700.049.050	4.901.521.550	2.013.824.000	1.823.725.000	26.250.000	1.156.595.150	93.105.082.655
		Barang & Jasa	1.564.910.000	19.621.061.271	30.624.698.200	7.651.508.424	1.323.158.000	872.860.500	30.839.719.708	361.822.061.831
		Modal	290.700.000	504.642.500	3.063.011.400	3.743.078.000	2.110.095.000	0	27.228.056.840	736.141.954.220
		Jumlah	1.870.020.000	22.825.752.821	38.589.231.150	13.408.410.424	5.256.978.000	899.110.500	59.224.371.698	1.191.069.098.706
	Jumlah 8 kota	Pegawai	15.200.000	1.368.092.000	3.114.433.250	563.380.000	447.389.000	0	1.203.938.800	150.905.617.297
		Barang & Jasa	137.307.500	9.818.754.315	45.298.772.346	5.193.560.500	3.275.352.400	388.000.000	1.958.922.979	413.179.617.665
		Modal	0	69.293.200	15.124.497.050	0	31.650.000	0	6.240.790.500	393.266.362.130
		Jumlah	152.507.500	11.256.139.515	63.537.702.646	5.756.940.500	3.754.391.400	388.000.000	9.403.652.279	957.351.597.082
	Jumlah	Pegawai	29.610.000	4.068.141.050	8.015.954.800	2.577.204.000	2.271.114.000	26.250.000	2.360.533.950	244.010.699.952
		Barang & Jasa	1.702.217.500	29.439.815.586	75.923.470.546	12.845.068.924	4.598.510.400	1.260.860.500	32.798.642.687	775.001.679.496
		Modal	290.700.000	573.935.700	18.187.508.450	3.743.078.000	2.141.745.000	0	33.468.847.340	1.129.408.316.350
		Jumlah	2.022.527.500	34.081.892.336	102.126.933.796	19.165.350.924	9.011.369.400	1.287.110.500	68.628.023.977	2.148.420.695.798

Berdasarkan pada Tabel 4.21B pada tahun 2016, program administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur semua kabupaten/kota mengalokasikan dananya. Terdapat 11 kabupaten/kota sampel mengalokasikan dana disiplin aparatur, terdapat 11 kabupaten/kota mengalokasikan dana kapasitas sumber daya aparatur, terdapat 5 kabupaten/kota tidak mengalokasikan dana kinerja dan keuangan.

Untuk institusi pendidikan ternyata semua kabupaten/kota mengalokasikan dana PAUD, Wajar Dikdas, dan Dikmen. Kabupaten Bintang, Kupang dan Kota Palu tidak mengalokasikan dana PNF, hanya 4 kabupaten/kota mengalokasikan program PK dan PLK karena memang sebenarnya tanggung jawab provinsi, Kabupaten Garut tidak mengalokasikan mutu PTK, Kabupaten Bintang tidak mengalokasikan mutu manajemen pelayanan pendidikan, 10 kabupaten/kota mengalokasikan kepemudaan dan olahraga, 7 kabupaten/ kota mengalokasikan kebudayaan, Kabupaten Pangkep dan Kota Mojokerto mengalokasikan program PT, dan 9 kabupaten/kota mengalokasikan program lainnya.

Tabel 4.21B
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	1. Administrasi Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keu	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	Kab. Bintan	Pegawai	17.390.670,000	22.100,000	0	0	42.495,600	370.185,300	80.276,600	56.815,300	0
		Barang & Jasa	2.542.330,000	222.900,000	0	50,000,000	57.504,400	1.403.814,700	319.723,400	193.184,700	0
		Modal	0	150.000,000	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	19.933.000,000	395.000,000	0	50,000,000	100.000,000	1.774.000,000	400.000,000	250.000,000	0
2	Kab. Cirebon	Pegawai	16.140,000	566.404,000	0	0	20.904,000	59.495,000	529.220,000	288.576,000	132.150,000
		Barang & Jasa	1.462.531,600	1.230.293,400	0	0	19.069,000	810.860,000	3.098.110,000	15.855.096,350	5.259.960,400
		Modal	0	716.280,400	0	0	0	801.500,000	20.387.840,000	1.540.000,000	0
		Jumlah	1.478.671,600	2.512.977,800	0	0	39.973,000	1.671.855,000	24.015.170,000	17.683.672,350	5.392.110,400
3	Kab. Garut	Pegawai	9.238.800,000	4.800,000	0	600,000	3.584,000	22.650,000	55.960,000	30.444,000	155.390,000
		Barang & Jasa	844.105,100	200.889,200	0	67.640,000	56.416,000	25.235,610,000	8.643,472,700	12.109.003,900	1.791.735,000
		Modal	0	1.116.822,230	0	0	0	0	29.170.880,000	3.580.260,000	0
		Jumlah	10.082.905,100	1.322.511,430	0	68.240,000	60.000,000	25.258.260,000	37.870.312,700	15.719.707,900	1.947.125,000
4	Kab. Karanganyar	Pegawai	0	0	0	345.900,000	0	1.347.793,000	0	611.612,900	0
		Barang & Jasa	1.209.259,950	2.759.000,000	11.700,000	144.582,500	0	641.208,000	13.335.275,200	13.375.504,050	753.000,000
		Modal	0	0	0	0	0	0	6.479.396,500	4.529.480,850	200.000,000
		Jumlah	1.209.259,950	2.759.000,000	11.700,000	490.482,500	0	646.008,000	21.162.464,700	18.516.587,800	953.000,000
5	Kab. Kuningan	Pegawai	868.800,000	36.000,000	0	0	7.600,000	253.930,000	391.520,000	366.790,000	124.465,000
		Barang & Jasa	928.200,000	314.000,000	0	0	17.400,000	9.603.070,000	908.480,000	4.509.178,950	725.535,000
		Modal	15.000,000	300.000,000	0	0	0	150.000,000	8.367.243,950	200.000,000	0
		Jumlah	1.812.000,000	650.000,000	0	0	25.000,000	10.007.000,000	9.667.243,950	5.075.968,950	850.000,000
6	Kota Kupang	Pegawai	11.964.840,000	0	0	0	95.400,000	7.200,000	259.955,000	88.840,000	0
		Barang & Jasa	605.553,000	192.102,842	59.620,000	0	494,000	491.230,000	3.058.374,134	970.834,500	0
		Modal	0	0	0	0	0	0	14.582.330,246	0	0
		Jumlah	12.570.393,000	192.102,842	59.620,000	0	95.894,000	498.430,000	17.900.659,380	1.059.674,500	0
7	Kab. Lampung Selatan	Pegawai	2.920.760,000	3.505,000	0	0	40.554,000	45.825,000	188.016,000	120.740,000	10.460,000
		Barang & Jasa	331.822,600	546.840,250	0	0	259.446,000	361.550,000	1.825.082,750	1.440.724,000	272.643,000
		Modal	0	572.500,500	0	0	0	323.825,000	11.192.647,590	757.600,000	0
		Jumlah	3.252.582,600	1.122.845,750	0	0	300.000,000	730.000,000	13.205.746,350	2.358.464,000	283.103,000
8	Kab. Lombok Utara	Pegawai	967.150,000	785.660,000	0	182.660,000	147.440,000	1.944.885,000	2.837.376,500	1.389.765,000	146.100,000
		Barang & Jasa	0	145.590,000	0	0	0	0	6.488.665,000	795.000,000	0
		Modal	1.154.179,000	964.550,000	0	291.810,000	344.980,000	2.326.055,000	10.692.358,500	2.689.545,000	346.455,000
		Jumlah	2.121.329,000	1.895.800,000	0	474.470,000	492.420,000	4.270.940,000	20.018.400,000	4.874.310,000	492.555,000
9	Kab. Malang	Pegawai	193.200,000	0	0	0	3.600,000	30.605,800	2.219.235,000	14.265,000	0
		Barang & Jasa	2.252.696,800	380.083,000	0	0	0	126.400,000	1.174.943,200	376.966,200	210.735,000
		Modal	0	0	0	0	0	0	26.744.480,000	0	0
		Jumlah	2.445.896,800	380.083,000	0	0	0	130.000,000	27.950.029,000	2.596.201,200	225.000,000
10	Kab. Mamuju	Pegawai	145.800,000	0	0	0	110.880,000	116.900,000	29.390,000	66.574,000	68.944,000
		Barang & Jasa	14.571.791,000	69.830,000	0	155.431,000	67.244,000	5.407.340,500	1.207.980,850	2.179.066,635	898.806,000
		Modal	50.105,000	1.382.748,256	0	0	0	0	15.462.752,765	3.910.074,140	1.500,000
		Jumlah	14.767.696,000	1.452.578,256	0	155.431,000	178.124,000	5.524.240,500	16.700.132,615	6.155.714,775	969.250,000
11	Kab. Mojokerto	Pegawai	103.500,000	11.040,000	10.250,000	0	57.350,000	36.100,000	174.595,000	56.000,000	5.625,000
		Barang & Jasa	3.649.376,000	784.293,000	4.336.720,000	0	7.650,000	413.900,000	1.483.230,000	754.000,000	94.375,000
		Modal	366.175,000	215.000,000	0	0	0	0	10.383.970,440	1.474.922,673	0
		Jumlah	4.119.051,000	1.010.333,000	4.346.970,000	0	65.000,000	450.000,000	12.041.795,440	2.284.922,673	100.000,000
12	Kab. Ogan Ilir	Pegawai	260.420,000	6.500,000	0	30,000,000	29.125,000	25.500,000	48.340,000	33.910,000	8.120,000
		Barang & Jasa	489.049,500	288.500,000	25,000,000	20,000,000	64.375,000	3.604.500,000	692.427,000	476.600,000	445.980,000
		Modal	173.120,000	0	0	0	0	0	4.338.614,000	718.640,000	0
		Jumlah	922.589,500	295.000,000	25,000,000	50,000,000	93.500,000	3.630.000,000	5.079.381,000	1.229.150,000	454.100,000
13	Kab. Pangandaran	Pegawai	2.670,000	26.520,000	0	0	95.569,000	75.535,000	358.215,000	346.060,000	114.800,000
		Barang & Jasa	1.183.470,000	389.700,000	0	0	706.750,000	411.830,000	1.597.565,000	4.820.176,400	897.470,000
		Modal	0	606.080,000	0	0	0	3.785.830,000	10.073.971,950	4.246.162,676	0
		Jumlah	1.186.140,000	1.022.300,000	0	0	802.319,000	4.273.395,000	12.029.751,950	9.412.399,076	1.012.270,000

Berdasarkan Tabel 4.21B dana keseluruhan program di 23 kabupaten/kota pada tahun 2016 sebesar Rp1.414.824,7 juta, terbesar terjadi di Kabupaten Pangkep sebesar Rp121.949,1 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp20.999,1 juta. Namun, bila dilihat setiap program maka kondisinya berbeda. Program 1, administrasi perkantoran terbesar terjadi di Kabupaten Bintan sebesar Rp19.933,0 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp922,6 juta. Program 2, sarana dan prasarana aparatur terbesar terjadi di Kota Serang sebesar Rp8.001,6 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Kupang sebesar Rp192,1 juta. Program 3, disiplin aparatur terbesar terjadi di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp4.346,9 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp11,7 juta. Program 4, kapasitas sumber daya aparatur terbesar terjadi di Kota Cirebon sebesar Rp694,3 juta dan terkecil terjadi di Kota Mojokerto sebesar Rp43,5 juta. Program 5, kinerja dan keuangan terbesar terjadi di Kota Serang sebesar Rp1.003,1 juta dan terkecil terjadi di Kota Sabang sebesar Rp9,7 juta.

Program 6, PAUD terbesar terjadi di Kabupaten Garut sebesar Rp25.258,3 juta dan terkecil terjadi di Kota Samarinda sebesar Rp81,6 juta. Program 7, wajar

dikdas terbesar terjadi di Kabupaten Pangkep sebesar Rp68.577,3 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Bintan sebesar Rp400,0 juta. Program 8, dikmen terbesar terjadi di Kota Serang sebesar Rp40.806,7 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Bintan sebesar Rp250,0 juta. Program 9, PNF terbesar terjadi di Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.392,1 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp100,0 juta.

Tabel 4.21B (Lanjutan 1)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan Pend	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Bintan	Pegawai	0	233,969,700	0	0	0	0	359,293,400	18,555,805,900
		Barang & Jasa	0	872,030,300	0	0	0	0	9,016,091,600	14,677,579,100
		Modal	0	0	0	0	0	0	14,530,505,000	14,680,505,000
		Jumlah	0	1,106,000,000	0	0	0	0	23,905,890,000	47,913,890,000
2	Kab. Cirebon	Pegawai	0	141,770,000	409,250,000	0	0	0	0	2,163,909,000
		Barang & Jasa	0	333,135,350	689,588,000	0	0	0	0	28,758,644,100
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	23,445,620,400
		Jumlah	0	474,905,350	1,098,838,000	0	0	0	0	54,368,173,500
3	Kab. Garut	Pegawai	0	0	2,517,150,000	0	0	0	0	12,029,378,000
		Barang & Jasa	0	0	1,121,123,674	0	0	0	0	50,069,995,574
		Modal	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	35,867,962,230
		Jumlah	0	0	5,638,273,674	0	0	0	0	97,967,335,804
4	Kab. Karanganyar	Pegawai	0	0	289,657,500	0	0	0	0	2,599,763,400
		Barang & Jasa	0	3,972,000,000	2,173,172,500	2,031,658,000	130,000,000	0	0	40,536,360,200
		Modal	0	0	35,890,000	0	0	0	0	11,244,767,350
		Jumlah	0	3,972,000,000	2,498,720,000	2,031,658,000	130,000,000	0	0	54,380,890,950
5	Kab. Kuningan	Pegawai	0	150,440,000	246,015,000	322,775,000	0	0	2,100,000	2,770,435,000
		Barang & Jasa	0	574,560,000	2,508,985,000	1,612,225,000	0	0	37,900,000	21,739,533,950
		Modal	0	0	100,000,000	0	0	0	0	9,132,243,950
		Jumlah	0	725,000,000	2,855,000,000	1,935,000,000	0	0	40,000,000	33,642,212,900
6	Kota Kupang	Pegawai	0	19,440,000	9,450,000	25,550,000	0	0	0	12,470,675,000
		Barang & Jasa	0	7,154,297,800	9,104,649,000	616,225,000	0	0	0	22,253,380,276
		Modal	0	0	900,000,000	0	0	0	0	15,482,330,246
		Jumlah	0	7,173,737,800	10,014,099,000	641,775,000	0	0	0	50,206,385,522
7	Kab. Lampung Selatan	Pegawai	0	2,174,136,000	281,590,000	7,140,000	0	0	4,140,000	5,796,866,000
		Barang & Jasa	0	155,864,000	533,460,400	222,860,000	0	0	5,860,000	5,956,153,000
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	12,884,773,000
		Jumlah	0	2,330,000,000	815,050,400	230,000,000	0	0	10,000,000	24,637,792,000
8	Kab. Lombok Utara	Pegawai	0	421,600,000	1,675,230,400	527,110,000	2,647,347,500	0	0	13,672,324,400
		Barang & Jasa	0	0	0	100,000,000	225,000,000	0	0	7,754,255,000
		Modal	0	845,645,000	2,259,235,400	890,429,000	3,341,202,500	0	0	26,146,444,400
		Jumlah	0	1,267,245,000	3,934,465,800	1,517,539,000	6,213,550,000	0	0	47,573,023,800
9	Kab. Malang	Pegawai	0	8,040,000	113,900,000	0	0	0	0	2,582,845,800
		Barang & Jasa	0	398,460,000	1,451,100,000	0	0	0	0	6,371,384,200
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	26,744,480,000
		Jumlah	0	406,500,000	1,565,000,000	0	0	0	0	35,698,710,000
10	Kab. Mamuju	Pegawai	0	61,504,000	96,610,000	0	0	0	0	696,602,000
		Barang & Jasa	0	3,355,621,394	9,559,415,500	0	0	0	0	37,472,535,879
		Modal	0	50,000,000	0	0	0	0	0	20,857,180,161
		Jumlah	0	3,467,125,394	9,656,025,500	0	0	0	0	59,026,318,040
11	Kab. Mojokerto	Pegawai	0	77,500,000	391,390,000	0	21,750,000	0	0	945,100,000
		Barang & Jasa	0	897,500,000	6,827,943,500	0	253,250,000	0	0	19,502,237,500
		Modal	0	0	100,000,000	0	0	0	0	12,540,068,113
		Jumlah	0	975,000,000	7,319,333,500	0	275,000,000	0	0	32,987,405,613
12	Kab. Ogan Ilir	Pegawai	8,030,000	15,820,000	3,980,000	0	0	0	116,440,000	586,185,000
		Barang & Jasa	466,970,000	284,180,000	56,020,000	0	0	0	7,923,132,000	14,836,733,500
		Modal	75,000,000	0	0	0	0	0	270,780,000	5,576,154,000
		Jumlah	550,000,000	300,000,000	60,000,000	0	0	0	8,310,352,000	20,999,072,500
13	Kab. Pangandaran	Pegawai	0	153,050,000	202,105,000	534,350,000	98,020,000	0	0	2,006,894,000
		Barang & Jasa	0	884,520,000	662,617,000	1,840,850,000	701,175,000	0	0	14,096,223,400
		Modal	0	0	2,050,000,000	163,250,000	133,000,000	0	0	21,058,394,626
		Jumlah	0	1,037,570,000	2,914,722,000	2,538,450,000	932,195,000	0	0	37,161,512,026

Masih pada Tabel 4.21B (lanjutan 1), program 10, PK dan PLK terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp550,0 juta dan terkecil terjadi di Kota Banda Aceh sebesar Rp30,3 juta. Program 11, mutu PTK terbesar terjadi di Kota Samarinda sebesar Rp158.933,2 juta dan terkecil terjadi di Kota Banda Aceh sebesar Rp207,3 juta. Program 12, manajemen pelayanan pendidikan terbesar terjadi di Kota Magelang sebesar Rp17.510,7 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp60,0 juta. Program 13, kepemudaan dan olahraga terbesar terjadi di Kota Magelang sebesar Rp4.294,4 juta dan terkecil terjadi di

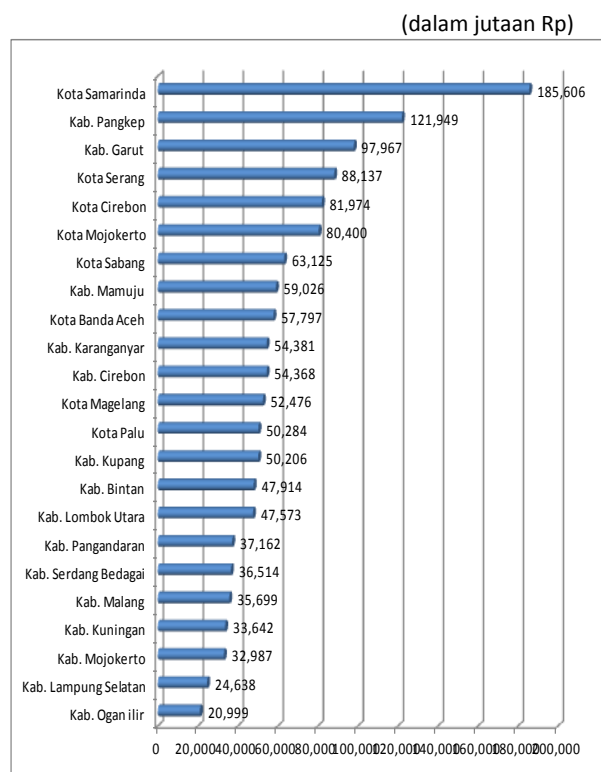
Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp230,0 juta. Program 14, kebudayaan terbesar terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp6.213,6 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp130,0 juta. Program 15, PT di Kota Mojokerto sebesar Rp8.181,0 juta lebih besar daripada Kabupaten Pangkep sebesar Rp1.088,1 juta. Program 16, lainnya terbesar terjadi di Kabupaten Bintan sebesar Rp23.905,9 juta dan terkecil terjadi di Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp10,0 juta.

Tabel 4.21B (Lanjutan 2)

Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	1. Administrasi Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Aparatur	4. Kapasitas SDA	5. SPC Kinerja & Keu	6. PAUD	7. Wejar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
14	Kab. Pangkep	Pegawai	478.299,139	0	0	230.665,500	47.329,500	58,480,080	9,628,888,686	5,713,192,440	56,728,000
		Barang & Jasa	4,116,738,630	71,125,400	68,465,000	252,391,050	319,071,300	5,083,379,091	7,881,756,134	4,616,935,768	764,188,259
		Modal	0	1,876,080,370	0	0	0	0	232,145,088	51,066,658,595	27,866,788,979
		Jumlah	4,595,037,769	1,947,205,770	68,465,000	483,056,550	366,400,800	5,374,004,259	68,577,303,415	38,196,917,187	820,916,259
15	Kab. Serdang Bedagai	Pegawai	1,332,000,000	0	0	0	0	0	12,350,000	93,350,000	2,420,710,000
		Barang & Jasa	1,400,296,425	220,000,000	0	0	0	1,697,150,000	11,549,627,000	7,066,849,522	536,726,400
		Modal	292,500,000	168,000,000	0	0	0	0	4,674,000,000	3,216,100,000	0
		Jumlah	3,024,796,425	388,000,000	0	0	0	1,719,500,000	16,316,977,000	12,703,659,522	625,976,400
16	Kota Banda Aceh	Pegawai	1,852,400,000	26,136,000	0	0	0	47,625,000	3,605,340,000	2,113,200,000	143,965,000
		Barang & Jasa	1,315,457,400	201,182,300	1,385,600,000	0	0	2,637,268,500	4,525,501,500	7,423,412,500	448,605,000
		Modal	0	332,500,000	0	0	0	800,000,000	18,182,475,000	3,047,800,000	0
		Jumlah	3,167,857,400	559,818,300	1,385,600,000	0	0	3,484,893,500	26,313,316,500	12,584,412,500	592,570,000
17	Kota Cirebon	Pegawai	36,031,000	4,546,500	850,000	300,940,000	624,653,000	143,825,000	8,387,573,400	6,855,802,100	23,575,000
		Barang & Jasa	1,835,414,900	351,523,400	75,000,000	393,333,350	194,295,100	1,350,709,800	11,750,954,950	10,373,474,500	273,370,000
		Modal	0	350,100,100	0	0	0	0	13,075,781,550	7,355,760,500	1,580,000
		Jumlah	1,871,445,900	706,170,000	75,850,000	694,273,350	818,948,100	1,494,534,800	33,214,309,900	24,585,037,100	298,525,000
18	Kota Magelang	Pegawai	172,747,000	0	14,625,000	96,025,000	6,300,000	8,785,000	929,881,000	561,122,500	29,495,000
		Barang & Jasa	765,253,000	1,048,810,000	195,375,000	428,975,000	18,700,000	760,760,000	8,971,191,200	5,969,410,500	330,505,000
		Modal	0	1,141,748,000	0	0	0	208,455,000	5,788,260,000	0	0
		Jumlah	938,000,000	2,190,558,000	210,000,000	525,000,000	25,000,000	978,000,000	15,689,332,200	6,530,533,000	360,000,000
19	Kota Mojokerto	Pegawai	9,713,140,000	2,760,000	0	6,150,000	43,608,000	41,272,000	1,547,162,045	1,372,489,225	141,500,000
		Barang & Jasa	932,292,500	216,000,000	30,400,000	37,350,000	398,000	3,396,547,900	15,816,299,583	6,728,190,950	874,647,950
		Modal	284,300,000	321,405,000	0	0	0	506,902,800	18,400,290,523	6,472,896,175	0
		Jumlah	10,929,732,500	540,165,000	30,400,000	43,500,000	44,006,000	3,944,722,700	35,763,752,151	14,573,576,350	1,016,147,950
20	Kota Palu	Pegawai	1,005,660,000	0	0	0	0	0	388,832,000	0	0
		Barang & Jasa	2,890,209,800	12,590,000	23,069,379	0	0	2,148,000,000	5,354,529,930	2,216,534,651	0
		Modal	621,064,000	2,707,066,000	0	0	0	2,287,469,995	21,834,208,399	7,091,301,751	0
		Jumlah	4,516,933,800	2,719,566,000	23,069,379	0	0	4,535,469,995	27,377,570,319	9,307,836,402	0
21	Kota Sabang	Pegawai	1,225,695,000	99,710,000	1,740,000	0	7,400,000	33,465,000	13,441,005,250	3,037,980,000	22,750,000
		Barang & Jasa	1,380,826,771	845,926,651	448,200,000	0	2,317,675	1,805,620,200	3,638,595,402	2,102,274,182	716,232,599
		Modal	148,600,000	538,000,000	0	0	0	2,186,119,915	18,493,158,759	6,631,889,031	0
		Jumlah	2,755,121,771	1,483,636,651	449,940,000	0	9,717,675	4,025,205,115	35,272,759,411	11,772,143,213	738,982,599
22	Kota Samarinda	Pegawai	3,215,305,000	15,600,000	0	0	19,500,000	0	122,550,000	222,750,000	181,725,000
		Barang & Jasa	1,784,600,000	1,433,815,000	0	0	116,500,000	40,800,000	315,951,800	102,250,000	628,275,000
		Modal	0	0	0	0	0	14,000,000	40,800,000	0	0
		Jumlah	4,999,905,000	1,449,415,000	0	0	150,000,000	81,600,000	438,501,800	325,000,000	810,000,000
23	Kota Serang	Pegawai	67,165,000	25,310,000	0	2,190,000	93,728,000	110,490,000	195,165,000	8,210,468,974	190,805,000
		Barang & Jasa	3,428,537,556	1,128,075,000	0	504,820,000	909,371,000	2,320,760,000	3,254,190,000	32,596,197,462	1,884,943,000
		Modal	0	6,848,239,990	0	0	0	349,100,000	21,115,862,716	0	0
		Jumlah	3,495,702,556	8,001,624,990	0	507,010,000	1,003,099,000	2,780,350,000	24,565,217,716	40,806,666,436	2,075,748,000
	Jumlah 15 kab	Pegawai	45,883,049,139	1,462,529,000	10,250,000	789,825,500	698,231,100	3,047,435,380	16,053,501,586	13,809,264,640	926,297,000
		Barang & Jasa	35,587,220,605	7,815,147,092	4,501,505,000	690,044,550	1,575,419,700	55,291,942,291	63,264,721,368	69,539,120,975	12,651,154,059
		Modal	2,051,079,000	8,068,061,756	0	291,810,000	344,980,000	7,618,255,088	223,617,144,446	54,768,974,318	547,955,000
		Jumlah	83,521,348,744	17,345,737,848	4,511,755,000	1,771,680,050	2,618,630,800	65,957,632,759	302,935,367,400	138,117,359,933	14,125,406,059
	Jumlah 8 kota	Pegawai	17,288,143,000	174,062,500	17,215,000	405,305,000	795,189,000	385,462,000	28,117,508,695	22,373,812,799	733,815,000
		Barang & Jasa	14,332,591,927	5,237,832,351	2,157,644,379	1,364,478,350	1,241,581,775	14,460,466,400	53,627,214,355	67,511,744,745	5,156,578,549
		Modal	1,053,964,000	12,239,059,090	0	0	14,000,000	6,478,847,710	116,890,036,947	30,599,647,457	1,580,000
		Jumlah	32,674,698,927	17,650,953,941	2,174,859,379	1,769,783,350	2,050,770,775	21,324,776,110	198,634,759,997	120,485,205,001	5,891,973,549
	Jumlah	Pegawai	63,171,192,139	1,636,593,500	27,465,000	1,195,130,500	1,493,420,100	3,432,897,380	44,171,010,281	36,183,077,439	1,660,112,000
		Barang & Jasa	49,919,812,532	13,052,979,443	6,659,149,379	2,054,522,900	2,817,001,475	69,752,408,691	116,891,935,273	137,050,865,720	17,807,732,608
		Modal	3,105,043,000	20,307,120,846	0	291,810,000	358,980,000	14,097,102,798	340,507,181,393	85,368,621,775	549,535,000
		Jumlah	116,196,047,671	34,996,691,789	6,866,614,379	3,541,463,400	4,669,401,575	87,282,408,869	501,570,127,397	258,602,564,934	20,017,379,608

Grafik 4.18B
Jumlah Belanja Langsung Tiap Kabupaten/Kota Sampel
Tahun 2016



Tabel 4.21B (Lanjutan 3)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program dan Tipe Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Tipe Program	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelayanan Pend	13. Kepemudaan & Olahraga	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
14	Kab. Pangkep	Pegawai	0	49,770,500	0	0	0	31,862,500	0	16,295,216,345
		Barang & Jasa	0	248,703,575	16,072,000	0	0	1,056,261,205	0	24,495,087,412
		Modal	0	0	117,148,140	0	0	0	0	81,158,821,172
		Jumlah	0	298,474,075	133,220,140	0	0	1,088,123,705	0	121,949,124,929
15	Kab. Serdang Bedagai	Pegawai	0	607,200,000	31,500,000	0	0	0	72,800,000	4,669,160,000
		Barang & Jasa	0	375,920,000	490,894,000	0	0	0	156,450,000	23,493,913,347
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	8,350,600,000
		Jumlah	0	983,120,000	522,394,000	0	0	0	229,250,000	36,513,673,347
16	Kota Banda Aceh	Pegawai	1,800,000	137,625,000	1,735,051,250	366,225,000	0	0	17,250,000	10,046,617,250
		Barang & Jasa	28,482,500	69,673,100	5,095,283,750	1,612,847,000	0	0	49,742,500	24,793,056,050
		Modal	0	0	594,932,679	0	0	0	0	22,957,707,679
		Jumlah	30,282,500	207,298,100	7,425,267,679	1,979,072,000	0	0	66,992,500	57,797,380,979
17	Kota Cirebon	Pegawai	0	54,850,000	509,271,500	165,320,000	0	0	56,790,000	17,164,027,500
		Barang & Jasa	0	270,150,000	548,439,000	259,180,000	0	0	2,412,710,000	30,088,555,000
		Modal	0	0	12,395,000	25,500,000	0	0	13,899,910,000	34,720,927,150
		Jumlah	0	325,000,000	1,070,005,500	450,000,000	0	0	16,369,410,000	81,973,509,650
18	Kota Magelang	Pegawai	0	251,107,500	519,497,500	239,765,000	0	0	1,027,648,000	3,856,998,500
		Barang & Jasa	0	1,403,892,500	16,991,202,462	2,374,620,300	0	0	542,352,000	39,801,046,962
		Modal	0	0	0	1,679,978,000	0	0	0	8,818,441,000
		Jumlah	0	1,655,000,000	17,510,699,962	4,294,363,300	0	0	1,570,000,000	52,476,486,462
19	Kota Mojokerto	Pegawai	25,100,000	234,525,000	165,870,000	22,950,000	43,622,000	3,950,000	0	13,364,098,270
		Barang & Jasa	129,210,400	1,599,475,000	1,032,343,050	402,636,950	1,582,942,650	722,050,000	0	33,500,784,933
		Modal	22,000,000	0	72,000,000	0	0	7,455,040,000	0	33,534,834,498
		Jumlah	176,310,400	1,834,000,000	1,270,213,050	425,586,950	1,626,564,650	8,181,040,000	0	80,399,717,701
20	Kota Palu	Pegawai	0	505,200,000	80,520,000	0	0	0	0	1,780,212,000
		Barang & Jasa	0	550,965,694	316,564,100	0	350,398,400	0	0	13,862,771,944
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	34,641,110,145
		Jumlah	0	1,056,165,694	397,084,100	0	350,398,400	0	0	50,284,094,089
21	Kota Sabang	Pegawai	0	1,155,816,500	11,925,000	0	0	0	0	18,737,486,750
		Barang & Jasa	0	5,299,504,993	150,060,190	0	0	0	0	16,389,558,663
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	27,997,767,705
		Jumlah	0	6,455,321,493	161,985,190	0	0	0	0	63,124,813,118
22	Kota Samarinda	Pegawai	331,050,000	69,341,785,000	169,190,000	0	0	0	37,130,000	73,656,585,000
		Barang & Jasa	173,950,000	69,465,426,700	555,810,000	0	0	0	14,547,466,422	89,164,844,922
		Modal	20,000,000	20,126,000,000	0	0	0	0	2,584,117,100	22,784,917,100
		Jumlah	525,000,000	158,933,211,700	725,000,000	0	0	0	17,168,713,522	185,006,347,022
23	Kota Serang	Pegawai	0	7,360,000	29,925,000	0	29,180,000	0	0	8,961,786,974
		Barang & Jasa	0	1,341,484,000	1,394,024,000	0	2,099,435,000	0	0	50,861,837,018
		Modal	0	0	0	0	0	0	0	28,313,202,706
		Jumlah	0	1,348,844,000	1,423,949,000	0	2,128,615,000	0	0	88,136,826,698
	Jumlah 15 kab	Pegawai	8,030,000	4,114,240,200	6,267,827,900	1,416,925,000	2,767,117,500	31,862,500	554,773,400	97,841,159,845
		Barang & Jasa	466,970,000	19,506,792,419	35,195,040,574	6,423,818,000	1,309,425,000	1,056,261,205	17,139,433,600	332,014,016,438
		Modal	75,000,000	895,645,000	7,562,273,540	1,053,679,000	3,474,202,500	0	14,801,285,000	325,170,344,648
		Jumlah	550,000,000	24,516,677,619	49,025,142,014	8,894,422,000	7,550,745,000	1,088,123,705	32,495,492,000	755,025,520,931
	Jumlah 8 kota	Pegawai	357,950,000	71,688,269,000	3,221,250,250	794,260,000	72,802,000	3,950,000	1,138,818,000	147,567,812,244
		Barang & Jasa	331,642,900	80,000,571,987	26,083,726,552	4,649,284,250	4,032,776,050	722,050,000	17,552,270,922	298,462,455,492
		Modal	42,000,000	20,126,000,000	679,227,679	1,705,478,000	0	7,455,040,000	16,484,027,100	213,768,907,983
		Jumlah	731,592,900	171,814,840,987	29,984,204,481	7,149,022,250	4,105,578,050	8,181,040,000	35,175,116,022	659,799,175,719
	Jumlah	Pegawai	365,980,000	75,802,509,200	9,489,078,150	2,211,185,000	2,839,919,500	35,812,500	1,693,591,400	245,408,972,089
		Barang & Jasa	798,612,900	99,507,364,406	61,278,767,126	11,073,102,250	5,342,201,050	1,778,311,205	34,691,704,522	630,476,471,930
		Modal	117,000,000	21,021,645,000	8,241,501,219	2,759,157,000	3,474,202,500	7,455,040,000	31,285,312,100	538,939,252,631
		Jumlah	1,281,592,900	196,331,518,606	79,009,346,495	16,043,444,250	11,656,323,050	9,269,163,705	67,670,608,022	1,414,824,696,650

b. Tipe Belanja

Tipe belanja terdiri dari tiga, yaitu pegawai, barang dan jasa, dan modal. Berdasarkan Tabel 4.22A, pada tahun 2015 belanja modal yang terbesar sebesar 52,57%, diikuti belanja barang dan jasa sebesar 36,07%, dan belanja pegawai sebesar 11,36%. Untuk belanja pegawai maka rata-rata 15 kabupaten sebesar 8,37% lebih kecil daripada rata-rata kota sebesar 15,61%. Hal ini berarti kota mengalokasikan belanja pegawai lebih besar 7,24% daripada kabupaten. Untuk tambahan belanja barang dan jasa maka rata-rata kabupaten sebesar 30,11% lebih kecil daripada rata-rata kota sebesar 44,56%. Hal ini berarti kota mengalokasikan barang dan jasa lebih besar 14,45% daripada kabupaten. Untuk modal maka rata-rata kabupaten sebesar 61,54% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 39,83%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan lebih besar 21,69% daripada kota.

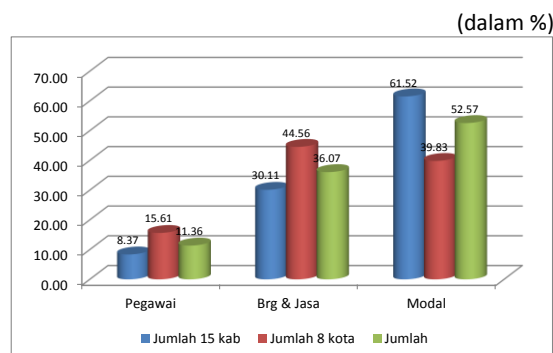
Bila dibandingkan antarkabupaten-kota maka belanja pegawai yang terbesar terjadi di Kota Samarinda sebesar Rp62.233,7 juta atau 35,58% dan terkecil

Kabupaten Mamuju sebesar Rp693,2 juta atau 1,10%. Belanja barang dan jasa yang terbesar di Kota Samarinda sebesar Rp105.222,9 juta atau 60,15% dan terkecil Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp7.402,0 juta atau 12,78%. Belanja modal yang terbesar Kabupaten Garut sebesar Rp96.307,2 juta atau 54,61% dan terkecil Kota Samarinda sebesar Rp7.474,9 juta atau 4,27%.

Tabel 4.22A
Jumlah Belanja Langsung menurut Tipe Belanja 23 Kabupaten/Kota
Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Pegawai		Barang dan Jasa		Modal		Jumlah
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	20,778,485,500	29.65	23,518,139,126	33.56	25,783,618,096	36.79	70,080,242,722
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	8,334,822,725	8.73	22,065,009,611	23.11	65,098,405,954	68.17	95,498,238,290
3	Kab. Garut	Jawa Barat	6,714,504,000	3.81	73,344,336,072	41.59	96,307,157,534	54.61	176,365,997,606
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	2,667,118,050	4.91	24,236,939,850	44.61	27,424,555,100	50.48	54,328,613,000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	4,628,540,000	6.34	11,765,873,486	16.12	56,593,531,689	77.54	72,987,945,175
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	12,521,845,000	17.69	18,095,765,517	25.57	40,156,571,660	56.74	70,774,182,177
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	6,240,752,000	10.78	7,402,008,600	12.78	44,262,002,150	76.44	57,904,762,750
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	16,335,920,680	16.07	32,631,148,670	32.11	52,665,317,350	51.82	101,632,386,700
9	Kab. Malang	Jawa Timur	2,844,015,000	2.79	34,222,285,373	33.59	64,822,696,514	63.62	101,888,996,887
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	693,154,200	1.10	21,223,333,713	33.63	41,190,974,000	65.27	63,107,461,913
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	2,284,375,000	2.75	25,696,506,200	30.93	55,090,729,069	66.32	83,071,610,269
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	1,041,670,000	1.42	32,745,225,500	44.78	39,329,688,000	53.79	73,116,583,500
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	2,260,661,000	2.90	17,401,136,616	22.31	58,330,913,022	74.79	77,992,710,638
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	13,466,294,500	13.36	20,242,799,514	20.09	67,072,992,704	66.55	100,782,086,718
15	Kab. Serdang Bedag	Sumatera Utara	4,814,770,000	7.73	15,327,319,500	24.60	42,169,373,038	67.68	62,311,462,538
16	Kota Banda Aceh	Aceh	10,455,404,250	13.38	29,870,892,762	38.23	37,805,976,485	48.39	78,132,273,497
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	20,135,089,150	12.94	61,576,628,208	39.56	73,948,485,372	47.51	155,660,202,730
18	Kota Magelang	Jawa Barat	3,591,135,700	2.09	81,082,907,314	47.26	86,897,039,183	50.65	171,571,082,197
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	9,707,537,350	12.53	53,908,317,075	69.56	13,885,489,550	17.92	77,501,343,975
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	3,124,401,000	6.91	16,453,287,776	36.38	25,649,422,091	56.71	45,227,110,867
21	Kota Sabang	Aceh	16,438,400,250	24.09	10,572,217,889	15.50	41,218,205,163	60.41	68,228,823,302
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	62,233,704,926	35.58	105,222,939,129	60.15	7,474,939,500	4.27	174,931,583,555
23	Kota Serang	Banten	12,698,099,671	11.01	36,396,661,995	31.56	66,230,233,126	57.43	115,324,994,792
Jumlah 15 kab			105,626,927,655	8.37	379,917,827,348	30.11	776,298,525,880	61.52	1,261,843,280,883
Jumlah 8 kota			138,383,772,297	15.61	395,083,852,148	44.56	353,109,790,470	39.83	886,577,414,915
Jumlah			244,010,699,952	11.36	775,001,679,496	36.07	1,129,408,316,350	52.57	2,148,420,695,798

Grafik 4.19A
Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja
Tahun 2015



Berdasarkan Tabel 4.22B, pada tahun 2016 belanja barang dan jasa yang terbesar sebesar 44,56%, diikuti belanja modal sebesar 39,09%, dan belanja

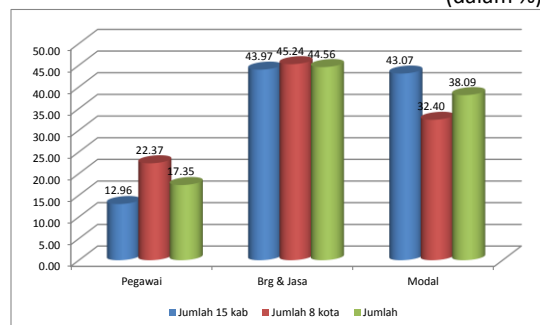
pegawai sebesar 17,35%. Untuk belanja pegawai maka rata-rata 15 kabupaten sebesar 12,96% lebih kecil daripada rata-rata kota sebesar 22,37%. Hal ini berarti kota mengalokasikan belanja pegawai lebih besar 9,41% daripada kabupaten. Untuk tambahan belanja barang dan jasa maka rata-rata kabupaten sebesar 43,97% lebih kecil daripada rata-rata kota sebesar 45,24%. Hal ini berarti kota mengalokasikan belanja barang dan jasa lebih besar 1,26% daripada kabupaten. Untuk belanja modal maka rata-rata kabupaten sebesar 43,07% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 32,40%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan belanja modal lebih besar 10,67% daripada kota.

Tabel 4.22B
Jumlah Belanja Langsung menurut Tipe Belanja Tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Pegawai		Barang dan Jasa		Modal		Jumlah
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	18.555.805.900	38,73	14.677.579.100	30,63	14.680.505.000	30,64	47.913.890.000
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	2.163.909.000	3,98	28.758.644.100	52,90	23.445.620.400	43,12	54.368.173.500
3	Kab. Garut	Jawa Barat	12.029.378.000	12,28	50.069.995.574	51,11	35.867.962.230	36,61	97.967.335.804
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	2.599.763.400	4,78	40.536.360.200	74,54	11.244.767.350	20,68	54.380.890.950
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	2.770.435.000	8,23	21.739.533.950	64,62	9.132.243.950	27,15	33.642.212.900
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	12.470.675.000	24,84	22.253.380.276	44,32	15.482.330.246	30,84	50.206.385.522
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	5.796.866.000	23,53	5.956.153.000	24,17	12.884.773.000	52,30	24.637.792.000
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	13.672.324.400	28,74	7.754.255.000	16,30	26.146.444.400	54,96	47.573.023.800
9	Kab. Malang	Jawa Timur	2.582.845.800	7,24	6.371.384.200	17,85	26.744.480.000	74,92	35.698.710.000
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	696.602.000	1,18	37.472.535.879	63,48	20.857.180.161	35,34	59.026.318.040
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	945.100.000	2,87	19.502.237.500	59,12	12.540.068.113	38,01	32.987.405.613
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	586.185.000	2,79	14.836.733.500	70,65	5.576.154.000	26,55	20.999.072.500
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	2.006.894.000	5,40	14.096.223.400	37,93	21.058.394.626	56,67	37.161.512.026
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	16.295.216.345	13,36	24.495.087.412	20,09	81.158.821.172	66,55	121.949.124.929
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	4.669.160.000	12,79	23.493.913.347	64,34	8.350.600.000	22,87	36.513.673.347
16	Kota Banda Aceh	Aceh	10.046.617.250	17,38	24.793.056.050	42,90	22.957.707.679	39,72	57.797.380.979
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	17.164.027.500	20,94	30.088.555.000	36,71	34.720.927.150	42,36	81.973.509.650
18	Kota Magelang	Jawa Tengah	3.856.998.500	7,35	39.801.046.962	75,85	8.818.441.000	16,80	52.476.486.462
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	13.364.098.270	16,62	33.500.784.933	41,67	33.534.834.498	41,71	80.399.717.701
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1.780.212.000	3,54	13.862.771.944	27,57	34.641.110.145	68,89	50.284.094.089
21	Kota Sabang	Aceh	18.737.486.750	29,68	16.389.558.663	25,96	27.997.767.705	44,35	63.124.813.118
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	73.656.585.000	39,68	89.164.844.922	48,04	22.784.917.100	12,28	185.606.347.022
23	Kota Serang	Banten	8.961.786.974	10,17	50.861.837.018	57,71	28.313.202.706	32,12	88.136.826.698
	Jumlah 15 kab		97.841.159.845	12,96	332.014.016.438	43,97	325.170.344.648	43,07	755.025.520.931
	Jumlah 8 kota		147.567.812.244	22,37	298.462.455.492	45,24	213.768.907.983	32,40	659.799.175.719
	Jumlah	15 provinsi	245.408.972.089	17,35	630.476.471.930	44,56	538.939.252.631	38,09	1.414.824.696.650

Grafik 4.19B
Persentase Belanja Langsung Menurut Tipe Belanja
Tahun 2016

(dalam %)



Bila dibandingkan antarkabupaten-kota maka belanja pegawai yang terbesar terjadi di Kota Samarinda sebesar Rp73.656,6 juta atau 39,68% dan terkecil Kabupaten Mamuju sebesar Rp696,6 juta atau 1,18%. Belanja barang dan jasa yang terbesar di Kota Samarinda sebesar Rp89.164,8 juta atau 48,04% dan terkecil Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp5.956,2 juta atau 24,17%. Belanja modal yang terbesar Kabupaten Pangkep sebesar Rp81.158,8 juta atau 66,55% dan terkecil Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp5.576,2 juta atau 26,55%.

c. Jenis Program

Jenis program dimaksud terdiri dari dua kelompok, yaitu untuk Dinas Pendidikan terdiri dari 5 program dan untuk institusi terdiri dari 11 program. Berdasarkan Tabel 4.23A pada tahun 2015, jumlah belanja langsung terbesar pada wajar dikdas dan dikmen masing-masing sebesar Rp1.048.855,7 juta dan Rp626.760,2 juta. Hal ini berarti wajar dikdas dan dikmen merupakan program prioritas pendidikan, sehingga alokasi dananya sangat besar dibandingkan dengan program lainnya. Program administrasi perkantoran di Dinas Pendidikan merupakan tiga besar sebesar Rp110.176,9 juta, sedangkan manajemen pelayanan pendidikan cukup besar sebesar Rp102.126,9 juta. Program lainnya dialokasikan dananya kurang dari Rp50.000,0 juta. Dengan demikian, terlihat sekali alokasi dana menurut program yang sangat mencolok perbedaannya.

Tabel 4.23A
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. Adm Perkantoran	2. SP Aparatur	3. Disiplin Apa	4. Kapasitas SD	5. SPC Kinerja & K	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	20,104,773,503	461,100,000	0	50,000,000	122,563,550	917,006,600	4,066,838,523	159,720,000	
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,910,087,800	2,592,538,962	0	0	48,327,300	1,127,887,336	43,733,562,778	38,195,549,354	5,496,787,186
3	Kab. Garut	Jawa Barat	7,022,409,000	1,209,969,800	0	0	117,332,600	6,433,500,000	98,243,881,439	56,945,682,367	1,210,901,000
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	787,166,500	2,332,350,000	0	25,000,000	209,400,000	2,493,750,000	20,300,396,100	15,005,190,700	1,736,153,000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	4,523,000,000	900,000,000	0	0	0	250,000,000	37,621,948,175	22,551,197,000	600,000,000
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	12,931,976,500	436,360,000	59,620,000	0	64,064,000	713,059,000	26,080,035,477	18,755,422,200	0
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	2,901,270,000	1,120,943,150	115,150,000	0	177,474,000	1,426,936,000	24,983,674,400	23,068,709,250	674,379,500
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	2,076,274,500	2,317,028,000	0	0	777,970,400	4,513,666,000	57,709,917,000	23,081,123,000	344,700,000
9	Kab. Malang	Jawa Timur	2,544,699,400	380,083,000	0	0	0	115,000,000	92,627,968,537	3,775,610,200	260,000,000
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	10,052,856,640	1,418,420,000	0	225,420,000	0	1,997,734,000	19,745,586,792	24,182,832,008	734,558,050
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	6,111,978,700	1,426,833,000	5,412,110,000	0	10,000,000	915,000,000	38,046,058,175	20,175,475,394	210,000,000
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	1,089,495,000	798,240,000	0	75,000,000	114,700,000	4,925,000,000	12,840,000,000	25,758,978,000	918,300,000
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	2,052,490,000	2,075,420,000	0	80,000,000	465,503,500	810,700,900	42,561,953,885	20,952,956,103	1,188,092,300
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	3,797,386,586	1,609,095,678	56,500,000	399,055,000	302,480,000	4,441,077,900	56,675,209,434	31,567,452,220	678,277,900
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	3,807,569,300	1,155,000,000	0	0	0	1,887,000,000	26,295,740,238	27,038,532,000	537,357,000
16	Kota Banda Aceh	Aceh	3,343,014,800	1,529,747,700	1,463,780,700	0	0	2,711,958,400	29,871,935,836	28,984,502,898	77,447,500
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	1,864,381,321	2,102,460,400	185,760,000	772,222,975	478,091,600	1,382,509,550	65,068,062,632	45,859,262,678	452,461,095
18	Kota Magelang	Jawa Barat	965,664,000	2,892,169,400	65,000,000	125,000,000	25,000,000	716,417,500	112,198,934,472	31,503,461,763	350,000,000
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	8,693,641,825	539,190,000	0	23,600,000	74,000,000	2,497,614,750	40,139,554,150	20,199,209,350	644,915,500
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	3,948,692,275	4,506,000,000	0	0	0	677,801,260	20,408,128,804	12,863,590,151	1,158,703,160
21	Kota Sabang	Aceh	1,881,579,037	1,379,704,451	0	0	9,717,675	3,693,730,157	42,182,492,472	15,498,303,243	800,040,748
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	5,289,629,000	1,518,788,000	0	0	1,333,029,250	300,000,000	87,668,895,292	66,562,531,513	1,916,550,000
23	Kota Serang	Banten	2,476,913,700	8,070,717,500	0	189,580,000	677,123,913	2,274,285,000	45,240,879,646	50,167,839,033	1,831,860,000
	Jumlah 15 kab		81,713,433,429	20,233,381,590	5,643,380,000	854,475,000	2,409,815,350	32,967,317,736	606,076,828,930	355,121,548,319	14,749,225,936
	Jumlah 8 kota		28,463,515,958	22,538,777,451	1,714,540,700	1,110,402,975	2,596,962,438	14,254,316,617	442,778,886,304	271,637,700,629	7,231,978,003
	Jumlah	15 provinsi	110,176,949,387	42,772,159,041	7,357,920,700	1,964,877,975	5,006,777,788	47,221,634,353	1,048,855,715,234	626,760,248,948	21,981,203,939

Tabel 4.23A (lanjutan)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program Tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelay	13. Kepemudaa	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	0	783,158,898	0	0	0	0	34,804,185,148	70,080,242,722
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	0	680,450,550	0	1,688,014,974	0	0	25,032,050	95,498,238,290
3	Kab. Garut	Jawa Barat	0	603,400,000	4,578,921,400	0	0	0	0	176,365,997,606
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	0	5,940,600,000	2,955,059,200	2,543,547,500	0	0	0	54,328,613,000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	0	3,015,000,000	1,800,000,000	1,695,000,000	0	0	31,800,000	72,987,945,175
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	0	4,410,230,000	6,691,330,000	632,085,000	0	0	0	70,774,182,177
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	0	770,782,450	2,033,810,000	426,080,000	0	0	205,554,000	57,904,762,750
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	0	686,895,000	4,401,395,800	1,832,087,000	3,891,330,000	0	0	101,632,386,700
9	Kab. Malang	Jawa Timur	0	461,500,000	1,724,135,750	0	0	0	0	101,888,996,887
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	0	1,500,638,423	3,249,416,000	0	0	0	0	63,107,461,913
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	0	945,000,000	9,369,155,000	0	450,000,000	0	0	83,071,610,269
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	1,870,020,000	903,800,000	50,000,000	0	0	0	23,773,050,500	73,116,583,500
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	0	894,670,000	1,403,680,000	4,591,595,950	915,648,000	0	0	77,992,710,638
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	0	246,507,500	109,934,000	0	0	899,110,500	0	100,782,086,718
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	0	983,120,000	222,394,000	0	0	0	384,750,000	62,311,462,538
16	Kota Banda Aceh	Aceh	31,207,500	229,822,600	7,657,212,563	2,164,590,500	0	0	67,052,500	78,132,273,497
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	0	843,126,500	35,480,792,700	0	0	0	1,171,068,279	155,660,202,730
18	Kota Magelang	Jawa Barat	0	3,179,885,000	15,702,050,062	2,507,500,000	0	0	1,340,000,000	171,571,082,197
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	121,300,000	1,179,860,000	659,125,000	1,084,850,000	1,256,483,400	388,000,000	0	77,501,343,975
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	0	493,228,717	439,046,500	0	731,920,000	0	0	45,227,110,867
21	Kota Sabang	Aceh	0	2,756,958,698	26,296,821	0	0	0	0	68,228,823,302
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	0	1,286,629,000	2,230,000,000	0	0	0	6,825,531,500	174,931,583,555
23	Kota Serang	Banten	0	1,286,629,000	1,343,179,000	0	1,765,988,000	0	0	115,324,994,792
Jumlah 15 kab			1,870,020,000	22,825,752,821	38,589,231,150	13,408,410,424	5,256,978,000	899,110,500	59,224,371,698	1,261,843,280,883
Jumlah 8 kota			152,507,500	11,256,139,515	63,537,702,646	5,756,940,500	3,754,391,400	388,000,000	9,403,652,279	886,577,414,915
Jumlah			2,022,527,500	34,081,892,336	102,126,933,796	19,165,350,924	9,011,369,400	1,287,110,500	68,628,023,977	2,148,420,695,798

Berdasarkan Tabel 4.23B pada tahun 2016, jumlah belanja langsung terbesar pada wajar dikdas dan dikmen masing-masing sebesar Rp501.570,1 juta dan Rp258.602,6 juta. Hal ini berarti wajar dikdas dan dikmen merupakan program prioritas pendidikan, sehingga alokasi dananya sangat besar dibandingkan dengan program lainnya. Program mutu PTK menempati tiga besar sebesar Rp196.331,5 juta. Program administrasi perkantoran yang merupakan program Dinas Pendidikan cukup besar sebesar Rp116.196,0 juta, sedangkan manajemen pelayanan pendidikan sebesar Rp79.009,4 juta dan lainnya sebesar Rp67.670,6 juta. Jenis program lainnya dialokasikan dananya kurang dari Rp50.000,0 juta. Dengan demikian, terlihat sekali alokasi dana menurut program yang sangat mencolok perbedaannya.

Tabel 4.23B
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. Adm Perkntan	2. SP Aparatur	3. Disiplin Apa	4. Kapasitas	5. SPC Kinerja & K	6. PAUD	7. Wajar Dikdas	8. Dikmen	9. PNF
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	19,933,000,000	395,000,000	0	50,000,000	100,000,000	1,774,000,000	400,000,000	250,000,000	0
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,478,671,600	2,512,977,800	0	0	39,973,000	1,671,855,000	24,015,170,000	17,683,672,350	5,392,110,400
3	Kab. Garut	Jawa Barat	10,082,905,100	1,322,511,430	0	68,240,000	60,000,000	25,258,260,000	37,870,312,700	15,719,707,900	1,947,125,000
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	1,209,259,950	2,759,000,000	11,700,000	490,482,500	0	646,008,000	21,162,464,700	18,516,597,800	953,000,000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1,812,000,000	650,000,000	0	0	25,000,000	10,007,000,000	9,667,243,950	5,075,968,950	850,000,000
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	12,570,393,000	192,102,842	59,620,000	0	95,894,000	498,430,000	17,900,659,380	1,059,674,500	0
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	3,252,582,600	1,122,845,750	0	0	300,000,000	730,000,000	13,205,746,250	2,358,464,000	283,103,000
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	2,121,329,000	1,895,800,000	0	474,470,000	492,420,000	4,270,940,000	20,018,400,000	4,874,310,000	492,555,000
9	Kab. Malang	Jawa Timur	2,445,896,800	380,083,000	0	0	0	130,000,000	27,950,029,000	2,596,201,200	225,000,000
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	14,767,696,000	1,452,578,256	0	155,431,000	178,124,000	5,524,240,500	16,700,132,615	6,155,714,775	969,250,000
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	4,119,051,000	1,010,333,000	4,346,970,000	0	65,000,000	450,000,000	12,041,795,440	2,284,922,673	100,000,000
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	922,589,500	295,000,000	25,000,000	50,000,000	93,500,000	3,630,000,000	5,079,381,000	1,229,150,000	454,100,000
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	1,186,140,000	1,022,300,000	0	0	802,319,000	4,273,395,000	12,029,751,950	9,412,399,076	1,012,270,000
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	4,595,037,769	1,947,205,770	68,465,000	483,056,550	366,400,800	5,374,004,259	68,577,303,415	38,196,917,187	820,916,259
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	3,024,796,425	388,000,000	0	0	0	1,719,500,000	16,316,977,000	12,703,659,522	625,976,400
16	Kota Banda Aceh	Aceh	3,167,857,400	559,818,300	1,385,600,000	0	0	3,484,893,500	26,313,316,500	12,584,412,500	592,570,000
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	1,871,445,900	706,170,000	75,850,000	694,273,350	818,948,100	1,494,534,800	33,214,309,900	24,585,037,100	298,525,000
18	Kota Magelang	Jawa Barat	938,000,000	2,190,558,000	210,000,000	525,000,000	25,000,000	978,000,000	15,689,332,200	6,530,533,000	360,000,000
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	10,929,732,500	540,165,000	30,400,000	43,500,000	44,006,000	3,944,722,700	35,763,752,151	14,573,576,350	1,016,147,950
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	4,516,933,800	2,719,566,000	23,069,379	0	0	4,535,469,995	27,377,570,319	9,307,836,402	0
21	Kota Sabang	Aceh	2,755,121,771	1,483,636,651	449,940,000	0	9,717,675	4,025,205,115	35,272,759,411	11,772,143,213	738,982,599
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	4,999,905,000	1,449,415,000	0	0	150,000,000	81,600,000	438,501,800	325,000,000	810,000,000
23	Kota Serang	Banten	3,495,702,556	8,001,624,990	0	507,010,000	1,003,099,000	2,780,350,000	24,565,217,716	40,806,666,436	2,075,748,000
	Jumlah 15 kab	Jumlah	83,521,348,744	17,345,737,848	4,511,755,000	1,771,680,050	2,618,630,800	65,957,632,759	302,935,367,400	138,117,359,933	14,125,406,059
	Jumlah 8 kota	Jumlah	32,674,698,927	17,650,953,941	2,174,859,379	1,769,783,350	2,050,770,775	21,324,776,110	198,634,759,997	120,485,205,001	5,891,973,549
	Jumlah	Jumlah	116,196,047,671	34,996,691,789	6,686,614,379	3,541,463,400	4,669,401,575	87,282,408,869	501,570,127,397	258,602,564,934	20,017,379,608

Tabel 4.23B (Lanjutan)
Jumlah Belanja Langsung menurut Jenis Program
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	10. PK dan PLK	11. Mutu PTK	12. Manaj Pelaya	13. Kepemudaan	14. Kebudayaan	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Bintan	0	1,106,000,000	0	0	0	0	23,905,890,000	47,913,890,000
2	Kab. Cirebon	0	474,905,350	1,098,838,000	0	0	0	0	54,368,173,500
3	Kab. Garut	0	0	5,638,273,674	0	0	0	0	97,967,335,804
4	Kab. Karanganyar	0	3,972,000,000	2,498,720,000	2,031,658,000	130,000,000	0	0	54,380,890,950
5	Kab. Kuningan	0	725,000,000	2,855,000,000	1,935,000,000	0	0	40,000,000	33,642,212,900
6	Kab. Kupang	0	7,173,737,800	10,014,099,000	641,775,000	0	0	0	50,206,385,522
7	Kab. Lampung Selatan	0	2,330,000,000	815,050,400	230,000,000	0	0	10,000,000	24,637,792,000
8	Kab. Lombok Utara	0	1,267,245,000	3,934,465,800	1,517,539,000	6,213,550,000	0	0	47,573,023,800
9	Kab. Malang	0	406,500,000	1,565,000,000	0	0	0	0	35,698,710,000
10	Kab. Mamuju	0	3,467,125,394	9,656,025,500	0	0	0	0	59,026,318,040
11	Kab. Mojokerto	0	975,000,000	7,319,333,500	0	275,000,000	0	0	32,987,405,613
12	Kab. Ogan ilir	550,000,000	300,000,000	60,000,000	0	0	0	8,310,352,000	20,999,072,500
13	Kab. Pangandaran	0	1,037,570,000	2,914,722,000	2,538,450,000	932,195,000	0	0	37,161,512,026
14	Kab. Pangkep	0	298,474,075	133,220,140	0	0	1,088,123,705	0	121,949,124,929
15	Kab. Serdang Bedagai	0	983,120,000	522,394,000	0	0	0	229,250,000	36,513,673,347
16	Kota Banda Aceh	30,282,500	207,298,100	7,425,267,679	1,979,072,000	0	0	66,992,500	57,797,380,979
17	Kota Cirebon	0	325,000,000	1,070,005,500	450,000,000	0	0	16,369,410,000	81,973,509,650
18	Kota Magelang	0	1,655,000,000	17,510,699,962	4,294,363,300	0	0	1,570,000,000	52,476,486,462
19	Kota Mojokerto	176,310,400	1,834,000,000	1,270,213,050	425,586,950	1,626,564,650	8,181,040,000	0	80,399,717,701
20	Kota Palu	0	1,056,165,694	397,084,100	0	350,398,400	0	0	50,284,094,089
21	Kota Sabang	0	6,455,321,493	161,985,190	0	0	0	0	63,124,813,118
22	Kota Samarinda	525,000,000	158,933,211,700	725,000,000	0	0	0	17,168,713,522	185,606,347,022
23	Kota Serang	0	1,348,844,000	1,423,949,000	0	2,128,615,000	0	0	88,136,826,698
	Jumlah 15 kab	550,000,000	24,516,677,619	49,025,142,014	8,894,422,000	7,550,745,000	1,088,123,705	32,495,492,000	755,025,520,931
	Jumlah 8 kota	731,592,900	171,814,840,987	29,984,204,481	7,149,022,250	4,105,578,050	8,181,040,000	35,175,116,022	659,799,175,719
	Jumlah	1,281,592,900	196,331,518,606	79,009,346,495	16,043,444,250	11,656,323,050	9,269,163,705	67,670,608,022	1,414,824,696,650

d. Persentase Jenis Program

Agar lebih jelas mengetahui besarnya alokasi dana tiap program tahun 2015 maka pada Tabel 4.24A disajikan persentase belanja langsung menurut jenis program. Alokasi terbesar pada program wajar dikdas sebesar 48,82%, dikmen sebesar 29,17%, administrasi perkantoran sebesar 5,13%, manajemen pelayanan pendidikan sebesar 4,75%, dan lainnya sebesar 3,19%, sedangkan jenis program lainnya kurang dari 3% dan terkecil pada kapasitas sumber daya aparatur dan PK dan PLK masing-masing sebesar 0,09%. Hal ini berarti program wajar dikdas masih menjadi program prioritas di 23 kabupaten/kota sampel, sedangkan program untuk administrasi di Dinas Pendidikan dari 5 program yang ada mencapai 12,54%.

Tabel 4.24A
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. AP	2. SPA	3. DA	4. KSDA	5. SPK & BK	6. PAUD	7. Wajar	8. Dikmen	9. PNF	10. PK & PLK	11. Mutu	12. MPP	13. K & O	14. Kebud	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	28.69	0.66	0.00	0.07	0.17	1.31	12.29	5.80	0.23	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	100.00
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	2.00	2.71	0.00	0.00	0.05	1.18	45.80	40.00	5.76	0.00	0.71	0.00	1.77	0.00	0.00	0.03	100.00
3	Kab. Garut	Jawa Barat	3.98	0.69	0.00	0.00	0.07	3.65	55.70	32.29	0.69	0.00	0.34	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	1.45	4.29	0.00	0.05	0.39	4.59	37.37	27.62	3.20	0.00	10.93	5.44	4.68	0.00	0.00	0.00	100.00
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	6.20	1.23	0.00	0.00	0.00	0.34	51.55	30.90	0.82	0.00	4.13	2.47	2.32	0.00	0.00	0.04	100.00
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	18.27	0.62	0.08	0.00	0.09	1.01	36.85	26.50	0.00	0.00	6.23	9.45	0.89	0.00	0.00	0.00	100.00
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	5.01	1.94	0.20	0.00	0.31	2.46	43.15	39.84	1.16	0.00	1.33	3.51	0.74	0.00	0.00	0.35	100.00
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	2.04	2.28	0.00	0.00	0.77	4.44	56.78	22.71	0.34	0.00	0.68	4.33	1.80	3.83	0.00	0.00	100.00
9	Kab. Malang	Jawa Timur	2.50	0.37	0.00	0.00	0.00	0.11	90.91	3.71	0.26	0.00	0.45	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	15.93	2.25	0.00	0.36	0.00	3.17	31.29	38.32	1.16	0.00	2.38	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	7.36	1.72	6.51	0.00	0.01	1.10	45.80	24.29	0.25	0.00	1.14	11.28	0.00	0.54	0.00	0.00	100.00
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	1.49	1.09	0.00	0.10	0.16	6.74	17.56	35.23	1.26	2.56	1.24	0.07	0.00	0.00	0.00	32.51	100.00
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	2.63	2.66	0.00	0.10	0.60	1.04	54.57	26.87	1.52	0.00	1.15	1.80	5.89	1.17	0.00	0.00	100.00
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	3.77	1.60	0.06	0.40	0.30	4.41	56.24	31.32	0.67	0.00	0.24	0.11	0.00	0.00	0.89	0.00	100.00
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	6.11	1.85	0.00	0.00	0.00	3.03	42.20	43.39	0.86	0.00	1.58	0.36	0.00	0.00	0.00	0.62	100.00
16	Kota Banda Aceh	Aceh	4.28	1.96	1.87	0.00	0.00	3.47	38.23	37.10	0.10	0.04	0.29	9.80	2.77	0.00	0.00	0.09	100.00
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	1.20	1.35	0.12	0.50	0.31	0.89	41.80	29.46	0.29	0.00	0.54	22.79	0.00	0.00	0.00	0.75	100.00
18	Kota Magelang	Jawa Barat	0.56	1.69	0.04	0.07	0.01	0.42	65.40	18.36	0.20	0.00	1.85	9.15	1.46	0.00	0.00	0.78	100.00
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	11.22	0.70	0.00	0.03	0.10	3.22	51.79	26.06	0.83	0.16	1.52	0.85	1.40	1.62	0.50	0.00	100.00
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	8.73	9.96	0.00	0.00	0.00	1.50	45.12	28.44	2.56	0.00	1.09	0.97	0.00	1.62	0.00	0.00	100.00
21	Kota Sabang	Aceh	2.76	2.02	0.00	0.00	0.01	5.41	61.83	22.72	1.17	0.00	4.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	3.02	0.87	0.00	0.00	0.76	0.17	50.12	38.05	1.10	0.00	0.74	1.27	0.00	0.00	0.00	3.90	100.00
23	Kota Serang	Banten	2.15	7.00	0.00	0.16	0.59	1.97	39.23	43.50	1.59	0.00	1.12	1.16	0.00	1.53	0.00	0.00	100.00
	Jumlah 8 kab		6.48	1.60	0.45	0.07	0.19	2.61	48.03	28.14	1.17	0.15	1.81	3.06	1.06	0.42	0.07	4.69	100.00
	Jumlah 8 kota		3.21	2.54	0.19	0.13	0.29	1.61	49.94	30.64	0.82	0.02	1.27	7.17	0.65	0.42	0.04	1.06	100.00
	Jumlah 15 provinsi		5.13	1.99	0.34	0.09	0.23	2.20	48.82	29.17	1.02	0.09	1.59	4.75	0.89	0.42	0.06	3.19	100.00

Hal yang sama untuk rata-rata kabupaten yang terbesar juga program wajar dikdas sebesar 48,09% dan rata-rata kota sebesar 49,34%. Hal ini berarti kota mengalokasikan lebih besar 1,91% daripada kabupaten. Begitu juga dengan program dikmen, rata-rata kabupaten sebesar 28,14% dan rata-rata kota sebesar 30,64%. Hal ini berarti kota mengalokasikan lebih besar 2,50% daripada kabupaten. Untuk manajemen layanan pendidikan, rata-rata kabupaten sebesar

3,06% dan rata-rata kota sebesar 7,17%. Hal ini berarti kota mengalokasikan lebih besar 4,11% daripada kabupaten.

Tabel 4.24B
Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Program
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	1. AP	2. SPA	3. DA	4. KSDA	5. SPKDK	6. PAUD	7. Wajar	8. Dikmen	9. PNF	10. PK & PLK	Mutu PTK	12. MPP	13. K & O	14. Kebud	15. PT	16. Lainnya	Jumlah
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	41,60	0,82	0,00	0,10	0,21	3,70	0,83	0,52	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	100,00
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	2,72	4,62	0,00	0,00	0,07	3,08	44,17	32,53	9,92	0,00	0,87	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Kab. Garut	Jawa Barat	10,29	1,35	0,00	0,07	0,06	25,78	38,66	16,05	1,99	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	2,22	5,07	0,02	0,90	0,00	1,19	38,92	34,05	1,75	0,00	7,30	4,59	3,74	0,24	0,00	0,00	100,00
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	5,39	1,93	0,00	0,00	0,07	29,75	28,74	15,09	2,53	0,00	2,16	8,49	5,75	0,00	0,00	0,12	100,00
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	25,04	0,38	0,12	0,00	0,19	0,99	35,65	2,11	0,00	0,00	14,29	19,95	1,28	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	13,20	4,56	0,00	0,00	1,22	2,96	53,60	9,57	1,15	0,00	9,46	3,31	0,93	0,00	0,00	0,04	100,00
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	4,46	3,99	0,00	1,00	1,04	8,98	42,08	10,25	1,04	0,00	2,66	8,27	3,19	13,06	0,00	0,00	100,00
9	Kab. Malang	Jawa Timur	6,85	1,06	0,00	0,00	0,00	0,36	78,29	7,27	0,63	0,00	1,14	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	25,02	2,46	0,00	0,26	0,30	9,36	28,29	10,43	1,64	0,00	5,87	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	12,49	3,06	13,18	0,00	0,20	1,36	36,50	6,93	0,30	0,00	2,96	22,19	0,00	0,83	0,00	0,00	100,00
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	4,39	1,40	0,12	0,24	0,45	17,29	24,19	5,85	2,16	2,62	1,43	0,29	0,00	0,00	0,00	39,57	100,00
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	3,19	2,75	0,00	0,00	2,16	11,50	32,37	25,33	2,72	0,00	2,79	7,84	6,83	2,51	0,00	0,00	100,00
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	3,77	1,60	0,06	0,40	0,30	4,41	56,23	31,32	0,67	0,00	0,24	0,11	0,00	0,00	0,89	0,00	100,00
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	8,28	1,06	0,00	0,00	0,00	4,71	44,69	34,79	1,71	0,00	2,69	1,43	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00
16	Kota Banda Aceh	Aceh	5,48	0,97	2,40	0,00	0,00	6,03	45,53	21,77	1,03	0,05	0,36	12,85	3,42	0,00	0,00	0,12	100,00
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	2,28	0,86	0,09	0,85	1,00	1,82	40,52	29,99	0,36	0,00	0,40	1,31	0,55	0,00	0,00	19,97	100,00
18	Kota Magelang	Jawa Barat	1,79	4,17	0,40	1,00	0,05	1,86	29,90	12,44	0,69	0,00	3,15	33,37	8,18	0,00	0,00	2,99	100,00
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	13,59	0,67	0,04	0,05	0,05	4,91	44,48	18,13	1,26	0,22	2,28	1,58	0,53	2,02	10,18	0,00	100,00
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	8,98	5,41	0,05	0,00	0,00	9,02	54,45	18,51	0,00	0,00	2,10	0,79	0,00	0,70	0,00	0,00	100,00
21	Kota Sabang	Aceh	4,36	2,35	0,71	0,00	0,02	6,38	55,88	18,65	1,17	0,00	10,23	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	2,69	0,78	0,00	0,00	0,08	0,04	0,24	0,18	0,44	0,28	85,63	0,39	0,00	0,00	0,00	9,25	100,00
23	Kota Serang	Banten	3,97	9,08	0,00	0,58	1,14	3,15	27,87	46,30	2,36	0,00	1,53	1,62	0,00	2,42	0,00	0,00	100,00
	Jumlah 15 kab	Jumlah	11,06	2,30	0,60	0,23	0,35	8,74	40,12	18,29	1,87	0,07	3,25	6,49	1,18	1,00	0,14	4,30	100,00
	Jumlah 8 kota	Jumlah	4,95	2,68	0,33	0,27	0,31	3,23	30,11	18,26	0,89	0,11	26,04	4,54	1,08	0,62	1,24	5,33	100,00
	Jumlah	Jumlah	8,21	2,47	0,47	0,25	0,33	6,17	35,45	18,28	1,41	0,09	13,88	5,58	1,13	0,82	0,66	4,78	100,00

Seperti halnya pada tahun 2015 maka dana tiap program pada tahun 2016 yang terdapat pada Tabel 4.24B disajikan persentase belanja langsung menurut jenis program. Alokasi terbesar pada program wajar dikdas sebesar 35,45%, dikmen sebesar 18,28%, mutu PTK sebesar 13,88%, administrasi perkantoran sebesar 8,21%, mutu pelayanan pendidikan sebesar 5,58%, dan lainnya sebesar 4,78%, sedangkan jenis program lainnya kurang dari 4% dan terkecil pada program PK dan PLK sebesar 0,09%. Hal ini berarti program wajar dikdas masih menjadi program prioritas di 23 kabupaten/kota, sedangkan administrasi Dinas Pendidikan dari 5 program yang ada mencapai 17,32%.

Hal yang sama untuk rata-rata kabupaten yang terbesar juga program wajar dikdas sebesar 40,12% dan rata-rata kota sebesar 30,11%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan program wajar lebih besar 10,02% daripada kota. Begitu juga dengan program dikmen, rata-rata kabupaten sebesar 18,29% dan rata-rata kota sebesar 18,26%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan program dikmen sedikit lebih besar 0,03% daripada kota. Untuk mutu PTK, rata-rata kabupaten sebesar 3,25% dan rata-rata kota sebesar 26,04%. Hal ini berarti kota mengalokasikan mutu PTK sangat lebih besar 22,79% daripada kabupaten. Untuk administrasi perkantoran, rata-rata kabupaten sebesar 11,06% dan

rata-rata kota sebesar 4,95%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan administrasi perkantoran lebih besar 6,11% daripada kota. Untuk manajemen layanan pendidikan, rata-rata kabupaten sebesar 6,49% dan rata-rata kota sebesar 4,54%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan manajemen layanan pendidikan lebih besar 1,95% daripada kabupaten.

e. Jenis Pendidikan

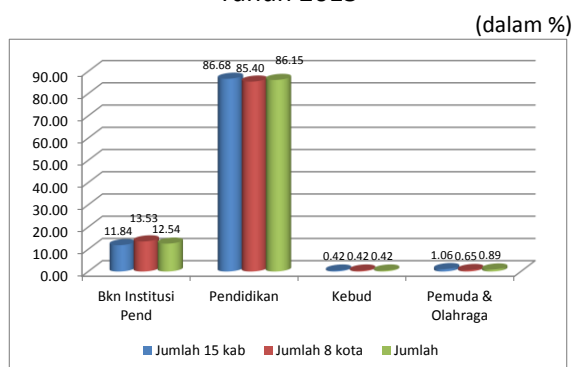
Belanja langsung dirinci menjadi enam jenis pendidikan, yaitu 1) bukan institusi pendidikan, 2) PAUD dan PNF, 3) wajar dikdas dan dikmen, 4) institusi lain, 5) pemuda dan olahraga, dan 6) kebudayaan. Berdasarkan pada Tabel 4.25A, pada tahun 2015 program wajar dikdas dan dikmen menduduki porsi tertinggi sebesar Rp1.709.697,9 juta atau 79,58% berarti lebih dari tiga per empat anggaran adalah untuk wajar dikdas dan dikmen. Bukan institusi pendidikan menduduki porsi kedua sebesar Rp269.405,6 juta atau 12,54%, berarti dana yang dialokasikan untuk manajemen di kantor masih sangat besar karena lebih dari 10%, program PAUD dan PNF sebesar Rp69.202,8 juta atau 3,22%, sedangkan institusi pendidikan lainnya sebesar Rp71.937,7 juta atau 3,35%. Pemuda dan olahraga sebesar Rp19.165,4 juta atau 0,89% dan kebudayaan sebesar Rp9.011,4 juta atau 0,42% karena memang belum semua Dinas Pendidikan termasuk Kebudayaan seperti halnya di Pusat dan masih banyak Dinas Pendidikan yang termasuk Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4.25A
Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Bkn Institusi Pend		PAUD+PNF		Wajar Dikdas+Dikmen		Institusi Lain		Pemuda & Olahraga		Kebudayaan		Jumlah
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	20,738,437,053	29.59	1,076,726,600	1.54	13,460,893,921	19.23	34,804,185,148	49.66	0	0.00	0	0.00	70,080,242,722
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	4,550,954,062	4.77	6,624,674,522	6.94	82,609,562,682	86.50	25,032,050	0.03	1,688,014,974	1.77	0	0.00	95,498,238,290
3	Kab. Garut	Jawa Barat	12,928,632,800	7.33	7,644,401,000	4.33	155,792,963,806	88.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	176,365,997,606
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	6,308,975,700	11.61	4,229,903,000	7.79	41,246,186,800	75.92	0	0.00	3,543,547,500	4.68	0	0.00	54,328,613,000
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	7,223,000,000	9.90	850,000,000	1.16	63,188,145,175	86.57	31,800,000	0.04	1,695,000,000	2.32	0	0.00	72,987,945,175
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	20,183,350,500	28.52	713,059,000	1.01	49,245,687,677	69.58	0	0.00	632,085,000	0.89	0	0.00	70,774,182,177
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	6,348,647,150	10.96	2,101,315,500	3.63	48,823,166,100	84.32	205,554,000	0.35	426,080,000	0.74	0	0.00	57,904,762,750
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	9,572,668,700	9.42	4,858,366,000	4.78	81,477,935,000	80.17	0	0.00	1,832,087,000	1.80	3,891,330,000	3.83	101,632,386,700
9	Kab. Malang	Jawa Timur	4,648,918,150	4.56	375,000,000	0.37	96,865,078,737	95.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	101,888,996,887
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	14,946,112,640	23.68	2,732,292,050	4.33	45,429,057,223	71.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	63,107,461,913
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	22,330,076,700	26.88	1,125,000,000	1.35	59,166,533,569	71.22	0	0.00	0	0.00	450,000,000	0.54	83,071,610,269
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	2,127,435,000	2.91	5,843,300,000	7.99	39,502,778,000	54.03	25,643,070,500	35.07	0	0.00	0	0.00	73,116,583,500
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	6,077,093,500	7.79	1,998,793,200	2.56	64,409,579,988	82.58	0	0.00	4,591,595,950	5.89	915,648,000	1.17	77,992,710,638
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	6,274,451,264	6.23	5,119,355,800	5.08	88,489,169,154	87.80	899,110,500	0.89	0	0.00	0	0.00	100,782,086,718
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	5,184,963,300	8.32	2,424,357,000	3.89	54,317,392,238	87.17	384,750,000	0.62	0	0.00	0	0.00	62,311,462,538
16	Kota Banda Aceh	Aceh	13,993,755,763	17.91	2,789,405,900	3.57	59,086,261,334	75.62	98,260,000	0.13	2,164,590,500	2.77	0	0.00	78,132,273,497
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	40,883,708,996	26.26	1,834,970,645	1.18	111,770,454,810	71.80	1,171,068,279	0.75	0	0.00	0	0.00	155,660,202,730
18	Kota Magelang	Jawa Barat	19,774,883,462	11.53	1,066,417,500	0.62	146,882,281,235	85.61	1,340,000,000	0.78	2,507,500,000	1.46	0	0.00	171,571,082,197
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	9,989,556,825	12.89	3,142,530,250	4.05	61,518,623,500	79.38	509,300,000	0.66	1,084,850,000	1.40	1,256,483,400	1.62	77,501,343,975
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	8,893,738,775	19.66	1,836,504,420	4.06	33,764,947,672	74.66	0	0.00	0	0.00	731,920,000	1.62	45,227,110,867
21	Kota Sabang	Aceh	3,297,297,984	4.83	4,493,770,905	6.59	60,437,754,413	88.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	68,228,823,302
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	10,771,446,250	5.93	2,216,550,000	1.27	155,518,055,805	88.90	6,825,531,500	3.90	0	0.00	0	0.00	174,931,583,555
23	Kota Serang	Banten	12,757,514,113	11.06	4,106,145,000	3.56	96,695,347,679	83.85	0	0.00	0	0.00	1,765,988,000	1.53	115,324,994,792
	Jumlah 15 kab		149,443,716,519	11.84	47,716,543,672	3.78	984,024,130,070	77.98	61,993,302,198	4.91	13,408,410,424	1.06	5,256,978,000	0.42	1,261,843,280,883
	Jumlah 8 kota		119,961,902,168	13.53	21,486,294,620	2.42	725,673,726,448	81.85	9,944,159,779	1.12	5,756,940,500	0.65	3,754,391,400	0.42	886,577,414,915
	Jumlah	15 provinsi	269,405,618,687	12.54	69,202,838,292	3.22	1,709,697,856,518	79.58	71,937,661,977	3.35	19,165,350,924	0.89	9,011,369,400	0.42	2,148,420,695,798

Dari enam jenis pendidikan pada tahun 2015 maka program wajar dikdas dan dikmen merupakan prioritas, sedangkan program bukan untuk institusi pendidikan juga cukup besar. Hal yang sama untuk rata-rata kabupaten yang terbesar juga program wajar dikdas dan dikmen sebesar 77,98% dan rata-rata kota sebesar 81,85%. Hal ini berarti kota mengalokasikan program wajar dikdas dan dikmen lebih besar 3,87% daripada kabupaten. Begitu juga dengan program bukan untuk institusi pendidikan, rata-rata kabupaten sebesar 11,84% dan rata-rata kota sebesar 13,53%. Hal ini berarti kota mengalokasikan program bukan untuk institusi pendidikan lebih besar 1,69% daripada kabupaten.

Grafik 4.20A
Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan
Tahun 2015



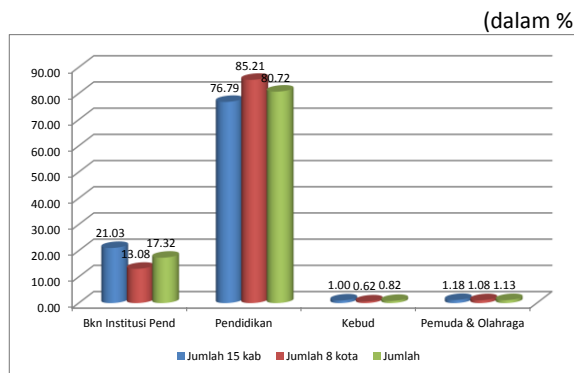
Berdasarkan pada Tabel 4.25B, pada tahun 2016 program wajar dikdas dan dikmen menduduki porsi tertinggi sebesar Rp956.504,2 juta atau 67,61% berarti dua per tiga anggaran adalah untuk wajar dikdas dan dikmen. Bukan institusi pendidikan menduduki porsi kedua sebesar Rp245.099,6 juta atau 17,31%, berarti dana yang dialokasikan untuk manajemen di kantor sangat besar karena lebih dari 10%, program PAUD dan PNF sebesar Rp107.299,8 juta atau 7,58%, sedangkan institusi pendidikan lainnya sebesar Rp78.221,4 juta atau 5,53%. Pemuda dan olahraga sebesar Rp16.043,4 juta atau 1,13% dan kebudayaan sebesar Rp11.656,3 atau 0,82% karena memang belum semua Dinas Pendidikan termasuk Kebudayaan seperti halnya Pusat dan masih banyak Dinas Pendidikan yang termasuk Pemuda dan Olahraga.

Dari enam jenis pendidikan pada tahun 2016 maka program wajar dikdas dan dikmen merupakan prioritas, sedangkan program bukan untuk institusi pendidikan juga cukup besar. Hal yang sama untuk rata-rata kabupaten yang terbesar juga program wajar dikdas dan dikmen sebesar 61,66% dan rata-rata kota sebesar 74,41%. Hal ini berarti kota mengalokasikan program wajar dikdas dan dikmen lebih besar 12,74% daripada kabupaten. Begitu juga dengan program bukan untuk institusi pendidikan, rata-rata kabupaten sebesar 21,03% dan rata-rata kota sebesar 13,08%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan program bukan untuk institusi pendidikan lebih besar 7,95% daripada kota.

Tabel 4.25B
Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Bkn Institusi Pend		PAUD+PNF		Wajar Dikdas+Dikmen		Institusi Lain		Pemuda & Or		Kebudayaan		Jumlah
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	20.478.000.000	42,74	1.774.000.000	3,70	1.756.000.000	3,66	23.905.890.000	49,89	0	0,00	0	0,00	47.913.890.000
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	5.130.460.400	9,44	7.063.965.400	12,99	42.173.747.700	77,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54.368.173.500
3	Kab. Garut	Jawa Barat	17.171.930.204	17,53	27.205.385.000	27,77	53.590.020.600	54,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97.967.335.804
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	6.969.162.450	12,82	1.599.008.000	2,94	43.651.062.500	80,27	0	0,00	2.031.658.000	3,74	130.000.000	0,24	54.380.890.950
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	5.342.000.000	15,88	10.857.000.000	32,27	15.468.212.900	45,98	40.000.000	0,12	1.935.000.000	5,75	0	0,00	33.642.212.900
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	22.932.108.842	45,68	498.430.000	0,99	26.134.071.680	52,05	0	0,00	641.775.000	1,28	0	0,00	50.206.385.522
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	5.490.478.750	22,28	1.013.103.000	4,11	17.894.210.250	72,63	10.000.000	0,04	230.000.000	0,93	0	0,00	24.637.792.000
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	8.918.484.800	18,75	4.763.495.000	10,01	26.159.955.000	54,99	0	0,00	1.517.539.000	3,19	6.213.550.000	13,06	47.573.023.800
9	Kab. Malang	Jawa Timur	4.390.979.800	12,30	355.000.000	0,99	30.952.730.200	86,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35.698.710.000
10	Kab. Memuju	Sulawesi Barat	26.209.854.756	44,40	6.493.490.500	11,00	26.322.972.784	44,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	59.026.318.040
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	16.860.687.500	51,11	550.000.000	1,67	15.301.718.113	46,39	0	0,00	0	0,00	275.000.000	0,83	32.987.405.613
12	Kab. Ogan ilir	Sumatera Selatan	1.446.089.500	6,89	4.084.100.000	19,45	6.608.531.000	31,47	8.860.352.000	42,19	0	0,00	0	0,00	20.999.072.500
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	5.925.481.000	15,95	5.285.665.000	14,22	22.479.721.026	60,49	0	0,00	2.538.450.000	6,83	932.195.000	2,51	37.161.512.026
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	7.593.386.029	6,23	6.194.920.518	5,08	107.072.694.677	87,80	1.088.123.705	0,89	0	0,00	0	0,00	121.949.124.929
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	3.935.190.425	10,78	2.345.476.400	6,42	30.003.756.522	82,17	229.250.000	0,63	0	0,00	0	0,00	36.513.673.347
16	Kota Banda Aceh	Aceh	12.538.543.379	21,69	4.077.463.500	7,05	39.105.027.100	67,66	97.275.000	0,17	1.979.072.000	3,42	0	0,00	57.797.380.979
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	5.236.692.850	6,39	1.793.059.800	2,19	18.124.347.000	70,91	16.369.410.000	19,97	450.000.000	0,55	0	0,00	81.973.509.650
18	Kota Magelang	Jawa Tengah	21.399.257.962	40,78	1.338.000.000	2,55	23.874.865.200	45,50	1.570.000.000	2,99	4.294.363.300	8,18	0	0,00	52.476.486.462
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	12.858.016.550	15,99	4.960.870.650	6,17	52.171.328.501	64,89	8.357.350.400	10,39	425.586.950	0,53	1.626.564.650	2,02	80.399.717.701
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	7.656.653.279	15,23	4.535.469.995	9,02	37.741.572.415	75,06	0	0,00	0	0,00	350.398.400	0,70	50.284.094.089
21	Kota Sabang	Aceh	4.860.401.287	7,70	4.764.187.714	7,55	53.500.224.117	84,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63.124.813.118
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	7.324.320.000	3,95	891.600.000	0,48	159.696.713.500	86,04	17.693.713.522	9,53	0	0,00	0	0,00	185.606.347.022
23	Kota Serang	Banten	14.431.385.546	16,37	4.856.098.000	5,51	66.720.728.152	75,70	0	0,00	0	0,00	2.128.615.000	2,42	88.136.826.698
Jumlah 15 kab			158.794.294.456	21,03	80.083.038.818	10,61	465.568.404.952	61,66	34.133.615.705	4,52	8.894.422.000	1,18	7.550.745.000	1,00	755.025.520.931
Jumlah 8 kota			86.305.270.853	13,08	27.216.749.659	4,13	490.934.805.985	74,41	44.087.748.922	6,68	7.149.022.250	1,08	4.105.578.050	0,62	659.799.175.719
Jumlah			245.099.565.309	17,32	107.299.788.477	7,58	956.504.210.937	67,61	78.221.364.627	5,53	16.043.444.250	1,13	11.656.323.050	0,82	1.414.824.696.650

Grafik 4.20B
Persentase Belanja Langsung Menurut Jenis Pendidikan
Tahun 2016



4. Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa

Rasio belanja pendidikan terhadap siswa dimaksud adalah perbandingan antara belanja pendidikan dengan siswa pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena belanja pendidikan ini untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah maka rasio belanja pendidikan terhadap siswa dapat dikatakan sebagai satuan biaya pendidikan dikdasmen oleh kabupaten/kota.

Tabel 4.26A
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

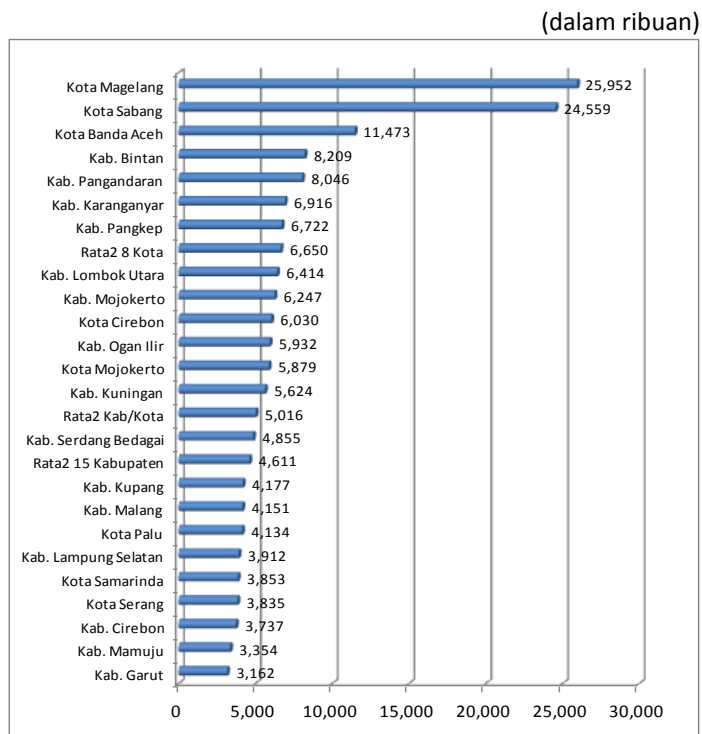
No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	Tahun 2014/2015				Rasio
				SD	SMP	SM	Jumlah	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	263.637.110.659	18.094	7.740	6.280	32.114	8.209.414
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1.315.680.464.596	207.822	79.354	64.859	352.035	3.737.357
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1.493.980.554.030	301.819	100.882	69.763	472.464	3.162.105
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	900.567.064.990	71.385	32.810	26.016	130.211	6.916.213
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1.054.879.108.370	105.919	42.906	38.734	187.559	5.624.252
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	344.479.955.151	42.888	20.361	19.225	82.474	4.176.831
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	631.785.131.950	99.487	33.975	28.040	161.502	3.911.934
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	244.606.015.656	24.367	7.497	6.271	38.135	6.414.213
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1.348.543.428.335	189.461	79.298	56.136	324.895	4.150.705
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	209.665.670.323	38.623	13.895	9.985	62.503	3.354.490
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	855.875.009.045	68.787	34.406	33.816	137.009	6.246.852
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	445.848.770.106	47.809	15.141	12.205	75.155	5.932.390
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	455.712.552.163	34.062	13.697	8.879	56.638	8.046.057
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	463.887.890.684	40.728	15.534	12.753	69.015	6.721.552
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	596.962.573.719	78.516	23.734	20.698	122.948	4.855.407
16	Kota Banda Aceh	Aceh	504.363.455.127	21.323	9.681	12.955	43.959	11.473.497
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	491.777.960.730	37.565	20.727	23.261	81.553	6.030.164
18	Kota Magelang	Jawa Barat	1.015.094.924.500	14.969	9.544	14.601	39.114	25.952.215
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	200.993.961.475	14.255	8.974	10.957	34.186	5.879.423
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	316.048.687.998	39.730	16.548	20.170	76.448	4.134.166
21	Kota Sabang	Aceh	159.925.807.985	3.724	1.465	1.323	6.512	24.558.631
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	599.086.766.730	86.075	34.501	34.923	155.499	3.852.673
23	Kota Serang	Banten	516.743.080.741	77.372	28.024	29.344	134.740	3.835.113
Jumlah 15 Kabupaten			10.626.111.299.777	1.369.767	521.230	413.660	2.304.657	4.610.713
Jumlah 8 Kota			3.804.034.645.286	295.013	129.464	147.534	572.011	6.650.282
Jumlah seluruh			14.430.145.945.063	1.664.780	650.694	561.194	2.876.668	5.016.271

Catatan: SD termasuk SDLB dan Paket A, SMP termasuk SMPLB dan Paket B, SM termasuk SMK, SMALB, dan Paket B

Berdasarkan Tabel 4.26A pada tahun 2015 menunjukkan bahwa belanja pendidikan 23 kabupaten/kota sebesar Rp14.430.145,9 juta dengan siswa sebesar 2.876.668, sehingga diperoleh satuan biaya per siswa sebesar Rp5.016.273,00. Untuk belanja pendidikan 15 kabupaten sebesar Rp10.626.111,3 juta dengan siswa sebesar 2.304.657 maka satuan biaya per siswa sebesar Rp4.610.713,00, sedangkan belanja pendidikan 8 kota sebesar Rp3.804.034,6 juta dengan siswa sebesar 572.011 maka satuan biaya per siswa sebesar Rp6.650.282,00. Bila dibandingkan antara rata-rata kabupaten dengan rata-rata kota maka satuan biaya di kota lebih besar daripada di kabupaten dengan perbedaan sebesar Rp2.252.442 per siswa.

Bila dilihat per kabupaten/kota pada tahun 2015 maka satuan biaya terbesar pada Kota Magelang sebesar Rp25.952.215,00 per siswa dan terkecil pada Kabupaten Garut sebesar Rp3.162.105,00 per siswa. Semua kota sampel kecuali Samarinda dan Serang memperlihatkan satuan biaya per siswa lebih besar daripada kabupaten. Perbedaan antara satuan biaya yang terbesar dengan yang terkecil menunjukkan disparitas yang sangat besar antara kabupaten/kota sampel. Hal yang sama untuk rata-rata kabupaten sebesar Rp4.610.713,00 dan rata-rata kota sebesar Rp6.650.282,00. Hal ini berarti satuan biaya di kota lebih besar Rp2.039.570,00 daripada kabupaten.

Grafik 4.21A
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015



Berdasarkan Tabel 4.26B, pada tahun 2016 menunjukkan bahwa belanja pendidikan 23 kabupaten/kota sebesar Rp13.977.994,8 juta dengan siswa sebesar 2.869.698, sehingga diperoleh satuan biaya per siswa sebesar Rp4.870.894,00. Untuk belanja pendidikan 15 kabupaten sebesar Rp10.354.819,6 juta dengan siswa sebesar 2.298.566 maka satuan biaya per siswa sebesar Rp4.504.904,00, sedangkan belanja pendidikan 8 kota sebesar Rp3.623.175,2 juta dengan siswa sebesar 571.132 maka satuan biaya per siswa sebesar Rp6.343.849,00. Bila dibandingkan antara rata-rata kabupaten dengan rata-rata kota maka satuan biaya di kota lebih besar daripada di kabupaten dengan perbedaan sebesar Rp1.838.945 per siswa.

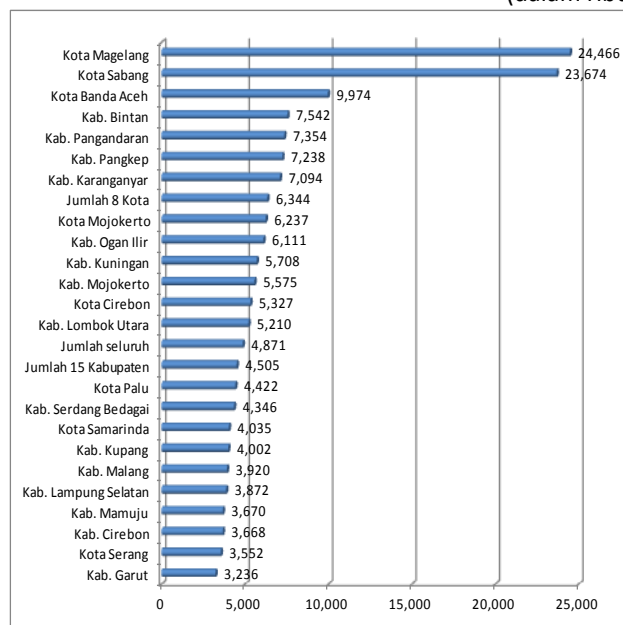
Bila dilihat per kabupaten/kota pada tahun 2016 maka satuan biaya terbesar pada Kota Magelang sebesar Rp24.465.629,00 per siswa dan terkecil pada Kabupaten Garut sebesar Rp3.236.047,00 per siswa. Semua kota sampel kecuali Samarinda dan Serang memperlihatkan satuan biaya per siswa lebih besar daripada kabupaten. Perbedaan antara satuan biaya yang terbesar dengan yang terkecil menunjukkan disparitas yang sangat besar antara kabupaten/kota sampel. Hal ini berarti satuan biaya di kota lebih besar Rp1.838.945,00 daripada kabupaten.

Tabel 4.26B
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	Tahun 2015/2016				Rasio
				SD	SMP	SM	Jumlah	
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	234,528,064,000	18,397	7,896	4,805	31,098	7,541,580
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,283,995,086,953	205,297	78,665	66,058	350,020	3,668,348
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1,525,055,329,974	294,157	103,471	73,643	471,271	3,236,047
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	924,588,204,950	70,681	33,014	26,646	130,341	7,093,610
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1,070,201,112,217	104,646	42,795	40,065	187,506	5,707,557
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	342,195,905,990	51,545	21,496	12,464	85,505	4,002,057
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	623,399,829,950	99,709	33,395	27,880	160,984	3,872,433
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	196,686,751,148	24,370	7,318	6,063	37,751	5,210,107
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,270,757,572,274	186,031	80,125	58,040	324,196	3,919,720
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	226,225,945,026	37,762	13,895	9,985	61,642	3,669,997
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	754,676,980,392	68,284	34,678	32,401	135,363	5,575,209
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	457,208,449,588	47,382	15,511	11,923	74,816	6,111,105
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	416,060,221,082	33,717	13,452	9,404	56,573	7,354,396
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	492,905,760,741	39,786	15,808	12,504	68,098	7,238,183
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	536,334,386,634	78,229	24,303	20,870	123,402	4,346,237
16	Kota Banda Aceh	Aceh	439,275,204,972	22,250	9,132	12,658	44,040	9,974,460
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	425,813,994,650	37,078	20,636	22,221	79,935	5,327,003
18	Kota Magelang	Jawa Barat	940,091,781,433	14,615	9,744	14,066	38,425	24,465,629
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	213,500,846,701	14,187	9,070	10,972	34,229	6,237,426
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	334,353,735,525	39,580	16,721	19,315	75,616	4,421,733
21	Kota Sabang	Aceh	155,869,707,780	3,852	1,481	1,251	6,584	23,674,014
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	634,715,595,538	86,834	35,237	35,230	157,301	4,035,039
23	Kota Serang	Banten	479,554,324,932	76,397	28,286	30,319	135,002	3,552,202
Jumlah 15 Kabupaten			10,354,819,600,919	1,359,993	525,822	412,751	2,298,566	4,504,904
Jumlah 8 Kota			3,623,175,191,530	294,793	130,307	146,032	571,132	6,343,849
Jumlah seluruh			13,977,994,792,449	1,654,786	656,129	558,783	2,869,698	4,870,894

Grafik 4.21B
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

(dalam ribuan)



5. Belanja Pendidikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Belanja pendidikan terhadap APBD seharusnya 20%, namun pada kenyataannya tetap bervariasi antara kabupaten/kota. Belanja pendidikan menggunakan data tahun 2015 namun menggunakan APBD tahun 2014 karena ketersediaan data yang ada. Berdasarkan Tabel 4.27A pada tahun 2015 menunjukkan bahwa belanja pendidikan sebesar Rp14.430.145,9 juta dengan APBD 2014 sebesar Rp34.168.093,5 juta, sehingga diperoleh persentase belanja pendidikan terhadap belanja pendidikan sebesar 42,23%. Bila dibandingkan antara kabupaten maka belanja pendidikan sebesar Rp10.626.111,3 juta dengan APBD sebesar Rp23.272.081,3 juta, sehingga diperoleh rata-rata kabupaten sebesar 45,66%. Demikian juga untuk kota maka belanja pendidikan sebesar Rp3.804.034,6 juta dengan APBD sebesar Rp10.896.012,2 juta diperoleh rata-rata kota sebesar 34,91%. Dengan demikian, terjadi perbedaan antara kota dengan kabupaten sebesar 10,75%. Hal ini berarti kabupaten mengalokasikan belanja pendidikan lebih besar daripada rata-rata kota.

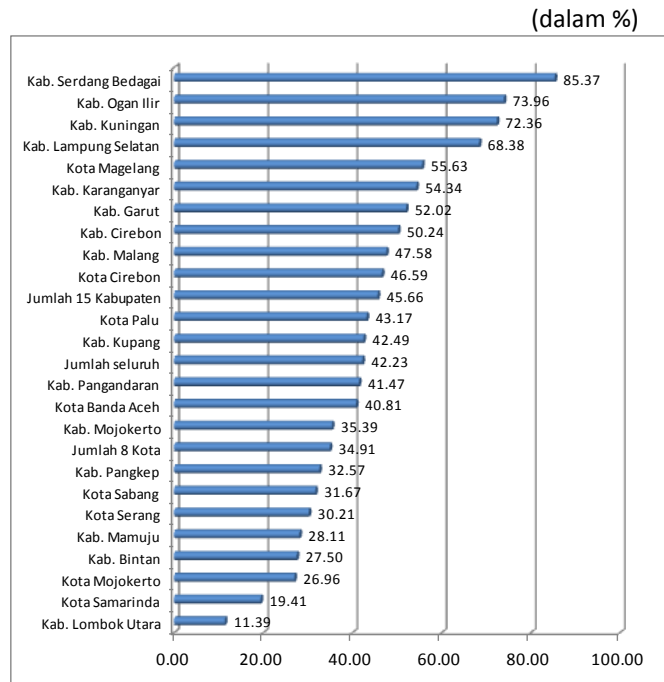
Tabel 4.27A
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	APBD 2014	%
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	263,637,110,659	958,808,155,127	27.50
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,315,680,464,596	2,618,599,602,401	50.24
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1,493,980,554,030	2,872,016,690,018	52.02
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	900,567,064,990	1,657,433,618,000	54.34
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1,054,879,108,370	1,457,896,901,731	72.36
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	344,479,955,151	810,714,998,750	42.49
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	631,785,131,950	923,975,076,219	68.38
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	244,606,015,656	2,148,333,134,800	11.39
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,348,543,428,335	2,834,456,200,161	47.58
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	209,665,670,323	745,917,826,860	28.11
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	855,875,009,045	2,418,393,915,585	35.39
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	445,848,770,106	602,828,383,652	73.96
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	455,712,552,163	1,098,985,672,446	41.47
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	463,887,890,684	1,424,455,329,692	32.57
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	596,962,573,719	699,265,776,708	85.37
16	Kota Banda Aceh	Aceh	504,363,455,127	1,235,953,041,361	40.81
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	491,777,960,730	1,055,622,441,134	46.59
18	Kota Magelang	Jawa Barat	1,015,094,924,500	1,824,743,223,423	55.63
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	200,993,961,475	745,532,289,361	26.96
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	316,048,687,998	732,096,176,765	43.17
21	Kota Sabang	Aceh	159,925,807,985	504,928,507,936	31.67
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	599,086,766,730	3,086,662,187,692	19.41
23	Kota Serang	Banten	516,743,080,741	1,710,474,347,594	30.21
Jumlah 15 Kabupaten			10,626,111,299,777	23,272,081,282,150	45.66
Jumlah 8 Kota			3,804,034,645,286	10,896,012,215,266	34.91
Jumlah seluruh			14,430,145,945,063	34,168,093,497,417	42.23

Bila dilihat per kabupaten/kota tahun 2015 maka persentase terbesar pada Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 85,37% diikuti Ogan Ilir sebesar 73,96% dan terkecil adalah Lombok Utara sebesar 11,39%. Besarnya persentase ini belum menunjukkan besarnya alokasi anggaran yang diberikan oleh kabupaten/kota

bersangkutan, bisa berarti karena besarnya bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Grafik 4.22A
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015

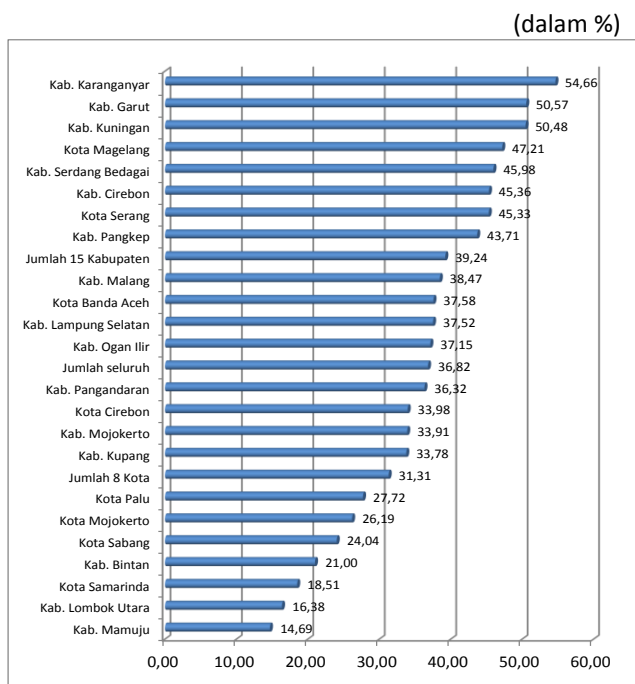


Belanja pendidikan menggunakan data tahun 2016 namun APBD menggunakan tahun 2015 karena ketersediaan data yang ada. Berdasarkan Tabel 4.27B pada tahun 2016 menunjukkan bahwa belanja pendidikan sebesar Rp13.977.994,8 juta dengan APBD 2015 sebesar Rp37.960.624,2 juta, sehingga diperoleh persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 36,82%. Bila dibandingkan antara kabupaten maka belanja pendidikan sebesar Rp10.354.819,6 juta dengan APBD sebesar Rp26.389.963,0, sehingga diperoleh rata-rata kabupaten sebesar 39,24%. Demikian juga untuk kota maka belanja pendidikan sebesar Rp3.623.175,2 dengan APBD sebesar Rp11.570.661,2 juta diperoleh rata-rata kota sebesar 31,31%. Dengan demikian, terjadi perbedaan antara kota dengan kabupaten sebesar 7,92%. Hal ini berarti alokasi belanja pendidikan rata-rata kabupaten lebih besar daripada rata-rata kota.

Tabel 4.27B
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan	APBD	%
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	234,528,064,000	1,117,058,295,309	21.00
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,283,995,086,953	2,830,893,761,058	45.36
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1,525,055,329,974	3,015,617,524,519	50.57
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	924,588,204,950	1,691,634,199,000	54.66
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1,070,201,112,217	2,120,109,715,351	50.48
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Tim	342,195,905,990	1,013,038,477,665	33.78
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	623,399,829,950	1,661,326,799,700	37.52
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Bara	196,686,751,148	1,200,863,836,345	16.38
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,270,757,572,274	3,302,969,222,643	38.47
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	226,225,945,026	1,540,283,054,100	14.69
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	754,676,980,392	2,225,693,946,326	33.91
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	457,208,449,588	1,230,778,391,339	37.15
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	416,060,221,082	1,145,479,268,622	36.32
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	492,905,760,741	1,127,757,157,017	43.71
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	536,334,386,634	1,166,459,388,168	45.98
16	Kota Banda Aceh	Aceh	439,275,204,972	1,168,955,301,261	37.58
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	425,813,994,650	1,253,260,157,000	33.98
18	Kota Magelang	Jawa Barat	940,091,781,433	1,991,093,895,045	47.21
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	213,500,846,701	815,212,120,650	26.19
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	334,353,735,525	1,206,306,923,617	27.72
21	Kota Sabang	Aceh	155,869,707,780	648,293,107,987	24.04
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	634,715,595,538	3,429,624,652,991	18.51
23	Kota Serang	Banten	479,554,324,932	1,057,915,011,530	45.33
Jumlah 15 Kabupaten			10,354,819,600,919	26,389,963,037,162	39.24
Jumlah 8 Kota			3,623,175,191,530	11,570,661,170,081	31.31
Jumlah seluruh			13,977,994,792,449	37,960,624,207,243	36.82

Grafik 4.22B
Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2016



Bila dilihat per kabupaten/kota tahun 2016 maka persentase terbesar pada Kabupaten Karanganyar sebesar 54,66% diikuti Garut sebesar 50,57% dan Kuningan sebesar 50,48% serta terkecil adalah Mamuju sebesar 14,69%. Besarnya persentase ini belum menunjukkan besarnya alokasi anggaran yang diberikan oleh kabupaten/kota bersangkutan, bisa berarti karena besarnya bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

D. Analisis Perkembangan Belanja SKPD Dinas Kabupaten/Kota

Seperti halnya provinsi maka perkembangan belanja pendidikan kabupaten/kota juga dilihat pada tahun 2015 dan 2016 dengan melihat angka pertumbuhan selama 2 tahun data. Angka pertumbuhan tersebut ada enam jenis, yaitu 1) angka pertumbuhan belanja pendidikan menurut komponen belanja, 2) angka pertumbuhan belanja tidak langsung menurut jenis belanja, 3) angka pertumbuhan belanja langsung menurut tipe belanja, 4) angka pertumbuhan belanja langsung menurut jenis pendidikan, 5) angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen, dan 6) angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD. Perkembangan selama 2 tahun dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebenarnya belum bisa melihat kenaikan atau penurunan dana yang signifikan tetapi tetap diberikan deskripsinya.

Tabel 4.28
Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan menurut Komponen Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015-2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Tak Langsung			Langsung			Jumlah		
			2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	193,556,867,937	186,614,174,000	-3.59	70,080,242,722	47,913,890,000	-31.63	263,637,110,659	234,528,064,000	-11.04
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,220,182,226,306	1,229,626,913,453	0.77	95,498,238,290	54,368,173,500	-43.07	1,315,680,464,596	1,283,995,086,953	-2.41
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1,317,614,556,424	1,427,087,994,170	8.31	176,365,997,606	97,967,335,804	-44.45	1,493,980,554,030	1,525,055,329,974	2.08
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	846,238,451,990	870,207,314,000	2.83	54,328,613,000	54,380,890,950	0.10	900,567,064,990	924,588,204,950	2.67
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	981,891,163,195	1,036,558,899,317	5.57	72,987,945,175	33,642,212,900	-53.91	1,054,879,108,370	1,070,201,112,217	1.45
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	273,705,772,974	291,989,520,468	6.68	70,774,182,177	50,206,385,522	-29.06	344,479,955,151	342,195,905,990	-0.66
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	573,880,369,200	598,762,037,950	4.34	57,904,762,750	24,637,792,000	-57.45	631,785,131,950	623,399,829,950	-1.33
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	142,973,628,956	149,113,727,348	4.29	101,632,386,700	47,573,023,800	-53.19	244,606,015,656	196,686,751,148	-19.59
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,246,654,431,448	1,235,058,862,274	-0.93	101,888,996,887	35,698,710,000	-64.96	1,348,543,428,335	1,270,757,572,274	-5.77
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	146,558,208,410	167,199,626,986	14.08	63,107,461,913	59,026,318,040	-6.47	209,665,670,323	226,225,945,026	7.90
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	772,803,398,776	721,689,574,779	-6.61	83,071,610,269	32,987,405,613	-60.29	855,875,009,045	754,676,980,392	-11.82
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	372,732,186,606	436,209,377,088	17.03	73,116,583,500	20,999,072,500	-71.28	445,848,770,106	457,208,449,588	2.55
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	377,719,841,525	378,898,709,056	0.31	77,992,710,638	37,161,512,026	-52.35	455,712,552,163	416,060,221,082	-8.70
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	363,105,803,966	370,956,635,812	2.16	100,782,086,718	121,949,124,929	21.00	463,887,890,684	492,905,760,741	6.26
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	534,651,111,181	499,820,713,287	-6.51	62,311,462,538	36,513,673,347	-41.40	596,962,573,719	536,334,386,634	-10.16
16	Kota Banda Aceh	Aceh	426,231,181,630	381,477,823,993	-10.50	78,132,273,497	57,797,380,979	-26.03	504,363,455,127	439,275,204,972	-12.91
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	336,117,758,000	343,840,485,000	2.30	155,660,202,730	81,973,509,650	-47.34	491,777,960,730	425,813,994,650	-13.41
18	Kota Magelang	Jawa Barat	843,523,842,303	887,615,294,971	5.23	171,571,082,197	52,476,486,462	-69.41	1,015,094,924,500	940,091,781,433	-7.39
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	123,492,617,500	133,101,129,000	7.78	77,501,343,975	80,399,717,701	3.74	200,993,961,475	213,500,846,701	6.22
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	270,821,577,131	284,069,641,436	4.89	45,227,110,867	50,284,094,089	11.18	316,048,687,998	334,353,735,525	5.79
21	Kota Sabang	Aceh	91,696,984,683	92,744,894,662	1.14	68,228,823,302	63,124,813,118	-7.48	159,925,807,985	155,869,707,780	-2.54
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	424,155,183,175	449,109,248,516	5.88	174,931,583,555	185,606,347,022	6.10	599,086,766,730	634,715,595,538	5.95
23	Kota Serang	Banten	401,418,085,949	391,417,498,234	-2.49	115,324,994,792	88,136,826,698	-23.58	516,743,080,741	479,554,324,932	-7.20
Jumlah 15 Kabupaten			9,364,268,018,894	9,599,794,079,988	2.52	1,261,843,280,883	755,025,520,931	-40.16	10,626,111,299,777	10,354,819,600,919	-2.55
Jumlah 8 Kota			2,917,457,230,371	2,963,376,015,811	1.57	886,577,414,915	659,799,175,719	-25.58	3,804,034,645,286	3,623,175,191,530	-4.75
Jumlah seluruh			12,281,725,249,265	12,563,170,095,799	2.29	2,148,420,695,798	1,414,824,696,650	-34.15	14,430,145,945,063	13,977,994,792,449	-3.13

Tabel 4.28 menunjukkan perkembangan persentase belanja pendidikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dari 23 kabupaten/kota sampel. Belanja tidak langsung meningkat 2,29% dan belanja langsung menurun sebesar 34,15%, sehingga belanja pendidikan juga menurun sebesar 3,13%. Hal ini berarti terjadi peningkatan belanja tidak langsung namun terjadi penurunan belanja langsung yang cukup besar, sehingga belanja pendidikan tetap menurun.

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka peningkatan belanja tidak langsung terbesar di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 17,03% dan terkecil di Kabupaten Cirebon sebesar 0,77%. Sebaliknya, terjadi penurunan belanja tidak langsung terbesar di Kota Banda Aceh sebesar 10,50% dan terkecil di Kabupaten Malang sebesar 0,93%. Rata-rata kabupaten meningkat sebesar 2,52% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 1,57%. Hal ini menunjukkan peningkatan belanja tidak langsung 0,94% lebih besar rata-rata kabupaten daripada rata-rata kota.

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka peningkatan belanja langsung hanya terjadi di 5 kabupaten/kota, peningkatan terbesar pada Kabupaten Pangkep sebesar 21,00% dan terkecil pada Kabupaten Karanganyar sebesar 0,10%. Sebaliknya, 18 kabupaten/kota terjadi penurunan belanja langsung, terbesar pada Kabupaten Ogan Ilir sebesar 71,28%, Kota Magelang sebesar 69,41%, Kabupaten Malang sebesar 64,96%, dan terkecil di Kabupaten Mamuju sebesar 6,47%. Rata-rata kabupaten menurun sebesar 40,16% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 25,58%. Hal ini menunjukkan penurunan belanja langsung rata-rata kabupaten lebih besar 14,59% daripada rata-rata kota.

Tabel 4.29
Perkembangan Belanja Tidak Langsung menurut Jenis Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015—2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Gaji dan Tunjangan			Tambahkan Penghasilan PNS			Insentif Pem Retribusi			Jumlah		
			2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	91,514,045,449	100,534,847,000	9.86	102,042,822,488	86,079,327,000	-15.64	0	0	-	193,556,867,937	186,614,174,000	-3.59
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	661,742,936,304	727,494,349,453	9.94	558,439,290,002	502,132,564,000	-10.08	0	0	-	1,220,182,226,306	1,229,626,913,453	0.77
3	Kab. Garut	Jawa Barat	821,090,869,000	834,915,733,170	1.68	496,523,687,424	592,172,261,000	19.26	0	0	-	1,317,614,556,424	1,427,087,994,170	8.31
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	468,731,203,875	529,591,985,000	12.98	377,507,248,115	340,615,329,000	-9.77	0	0	-	846,238,451,990	870,207,314,000	2.83
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	571,001,160,705	599,550,533,250	5.00	410,888,077,490	437,006,441,067	6.36	1,925,000	1,925,000	0.00	981,891,163,195	1,036,558,899,317	5.57
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	196,824,892,974	207,902,629,131	5.63	76,880,880,000	84,086,891,337	9.37	0	0	-	273,705,772,974	291,989,520,468	6.68
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	350,365,848,200	375,323,130,950	7.12	223,514,521,000	223,438,907,000	-0.03	0	0	-	573,880,369,200	598,762,037,950	4.34
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	92,361,495,956	94,801,594,348	2.64	50,612,133,000	54,312,133,000	7.31	0	0	-	142,973,628,956	149,113,727,348	4.29
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,246,654,431,448	1,235,058,862,274	-0.93	0	0	0.00	0	0	-	1,246,654,431,448	1,235,058,862,274	-0.93
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	69,499,999,990	81,392,296,386	17.11	77,058,208,420	85,807,330,600	11.35	0	0	-	146,558,208,410	167,199,626,986	14.08
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	440,438,036,476	457,796,603,779	3.94	332,365,362,300	265,892,971,000	-20.60	0	0	-	772,803,398,776	721,689,574,779	-6.61
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	252,768,211,606	306,147,153,448	21.12	119,963,975,000	130,062,223,640	8.42	0	0	-	372,732,186,606	436,209,377,088	17.03
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	194,071,531,935	209,242,913,047	7.82	183,648,309,590	169,655,796,009	-7.62	0	0	-	377,719,841,525	378,898,709,056	0.31
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	223,467,395,706	244,330,435,345	9.34	139,638,408,260	126,626,200,467	-9.32	0	0	-	363,105,803,966	370,956,635,812	2.16
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	342,822,564,981	306,261,049,327	-10.66	191,828,546,200	193,559,663,960	0.90	0	0	-	534,651,111,181	499,820,713,287	-6.51
16	Kota Banda Aceh	Aceh	215,629,493,407	204,851,020,993	-5.00	210,450,438,223	176,475,553,000	-16.14	151,250,000	151,250,000	0.00	426,231,181,630	381,477,823,993	-10.50
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	180,718,289,000	187,105,760,000	3.54	155,399,469,000	156,730,725,000	0.86	0	0	-	336,117,758,000	343,840,485,000	2.30
18	Kota Magelang	Jawa Barat	456,778,687,506	525,525,038,971	15.05	386,745,154,797	362,090,256,000	-6.37	0	0	-	843,523,842,303	887,615,294,971	5.23
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	73,380,198,500	91,890,780,000	25.23	50,112,419,000	41,210,349,000	-17.76	0	0	-	123,492,617,500	133,101,129,000	7.78
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	270,821,577,131	284,069,641,436	4.89	0	0	0.00	0	0	-	270,821,577,131	284,069,641,436	4.89
21	Kota Sabang	Aceh	52,417,850,963	54,317,582,662	3.62	39,279,133,720	38,427,312,000	-2.17	0	0	-	91,696,984,683	92,744,894,662	1.14
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	337,441,433,175	381,853,798,516	13.16	86,713,750,000	67,255,450,000	-22.44	0	0	-	424,155,183,175	449,105,248,516	5.88
23	Kota Serang	Banten	208,313,321,453	222,931,803,373	7.02	193,104,764,496	168,485,694,861	-12.75	0	0	-	401,418,085,949	391,417,498,234	-2.49
Jumlah 14 Kabupaten			6,023,354,624,605	6,310,344,115,908	4.76	3,340,911,469,289	3,289,448,039,080	-1.54	1,925,000	1,925,000	0.00	9,364,268,018,894	9,599,794,079,988	2.52
Jumlah 9 Kota			1,795,500,851,135	1,952,549,425,950	8.75	1,121,805,129,236	1,010,675,339,861	-9.91	151,250,000	151,250,000	0.00	2,917,457,230,371	2,963,376,015,811	1.57
Jumlah seluruh			7,818,855,475,740	8,262,893,541,858	5.68	4,462,716,598,525	4,300,123,378,941	-3.64	153,175,000	153,175,000	0.00	12,281,725,249,265	12,563,170,095,799	2.29

Tabel 4.29 adalah perkembangan belanja tidak langsung 23 kabupaten/kota, selama dua tahun meningkat 2,29%. Namun, peningkatan rata-rata kabupaten sebesar 2,52% lebih besar daripada peningkatan rata-rata kota sebesar 1,57%, artinya peningkatan kota lebih kecil 0,94% jika dibandingkan dengan peningkatan kabupaten.

Bila dirinci menurut jenis belanja, gaji dan tunjangan meningkat 5,68%, hal ini wajar karena memang gaji pegawai setiap tahun meningkat. Namun, peningkatan rata-rata kabupaten sebesar 4,76% lebih kecil daripada peningkatan rata-rata kota sebesar 8,75%. Artinya, peningkatan kota lebih besar 3,98% jika dibandingkan dengan peningkatan kabupaten. Selain itu, terdapat data yang kurang wajar karena terdapat tiga kabupaten yang menurun, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Malang, masing-masing sebesar 10,66%, 5,00%, dan 0,93%. Penurunan kurang dari 1% dapat diartikan adanya beberapa pegawai yang pensiun, namun lebih dari 10% menjadi pertanyaan apakah memang data yang diberikan kurang valid atau sebab lain. Sebaliknya, terdapat data yang kurang wajar karena terdapat tiga kabupaten/kota yang meningkat lebih dari 15%, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Mamuju, dan Kota Mojokerto masing-masing sebesar 15,05%, 17,11%, dan 25,23%. Peningkatan lebih dari 10% dapat diartikan karena penambahan pegawai yang lebih banyak masih perlu diteliti lebih lanjut.

Jenis belanja lainnya adalah tambahan penghasilan PNS dari 23 kabupaten/kota selama dua tahun menurun 3,64%, hal ini kurang wajar. Namun, penurunan rata-rata kabupaten sebesar 1,54% lebih kecil daripada penurunan rata-rata kota sebesar 9,91%. Artinya, penurunan kota lebih besar 8,37% jika dibandingkan dengan penurunan kabupaten. Penurunan terjadi karena 15 kabupaten/kota menurun dengan 7 kabupaten/kota menurun lebih dari 10%, yaitu Kabupaten Bintan, Cirebon, Mojokerto, Kota Banda Aceh, Mojokerto, Samarinda, dan Serang. Sebaliknya, hanya 8 kabupaten/kota yang meningkat dari 0,86% sampai 19,26%.

Jenis belanja lainnya adalah insentif pemungutan retribusi ternyata hanya dialokasikan oleh Kabupaten Kuningan dan Kota Banda Aceh, peningkatannya tidak terlihat karena terlalu kecil jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung dari 23 kabupaten/kota.

Tabel 4.30 adalah perkembangan belanja langsung 23 kabupaten/kota, di mana selama dua tahun terjadi penurunan sebesar 34,15%. Hal yang sama, rata-rata kabupaten menurun sebesar 40,16% dan rata-rata kota sebesar 25,58%. Artinya, penurunan belanja langsung kabupaten lebih besar 14,59% daripada kota. Hal ini terjadi karena penurunan di 18 kabupaten/kota dengan penurunan lebih dari 50% di 8 provinsi, yaitu Kabupaten Kuningan, Lampung Selatan, Lombok Utara, Malang, Mojokerto, Ogan Ilir, Pangandaran, dan Kota Magelang.

Bila dirinci menurut tipe belanja, tipe pertama adalah belanja pegawai selama dua tahun meningkat sebesar 0,57% sangat kecil karena rata-rata kabupaten menurun 7,37%, sedangkan rata-rata kota meningkat 6,64%. Artinya, penurunan kabupaten 14,01% lebih besar daripada kota. Menurunnya rata-rata

kabupaten karena dari 15 kabupaten ternyata 12 kabupaten menurun dan Kabupaten Garut menurun sangat besar sebesar 74,04%, diikuti Mojokerto sebesar 58,63%, Ogan Ilir sebesar 43,73%, dan Kuningan sebesar 40,14%. Selain itu, rata-rata kota meningkat walaupun terdapat empat kota yang menurun, yaitu Kota Banda Aceh, Cirebon, Palu, Serang masing-masing sebesar 3,91%, 14,76%, 43,02%, dan 29,42%.

Tabel 4.30
Perkembangan Belanja Langsung menurut Tipe Belanja
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015—2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Pegawai			Barang dan Jasa			Modal			Jumlah		
			2015	2016	AP	2015	2016	AP	2015	2016	AP	2015	2016	AP
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	20.778.485.500	18.555.805.900	-10,70	23.518.139.126	14.677.579.100	-37,59	25.783.618.096	14.680.505.000	-43,06	70.080.242.722	47.913.890.000	-31,63
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	8.334.822.725	2.163.909.000	-74,04	22.065.009.611	28.758.644.100	30,34	65.098.405.954	23.445.620.400	-63,98	95.498.238.290	54.368.173.500	-43,07
3	Kab. Garut	Jawa Barat	6.714.504.000	12.029.378.000	79,16	73.344.336.072	50.069.995.574	-31,73	96.307.157.534	35.867.962.230	-62,76	176.365.997.606	97.967.335.804	-44,45
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	2.667.118.050	2.599.763.400	-2,53	24.236.939.850	40.536.360.200	67,25	27.424.555.100	11.244.767.350	-59,00	54.328.613.000	54.380.890.950	0,10
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	4.628.540.000	2.770.435.000	-40,14	11.765.873.486	21.739.533.950	84,77	56.593.531.689	9.132.243.950	-83,86	72.987.945.175	33.642.212.900	-53,91
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	12.521.845.000	12.470.675.000	-0,41	18.095.765.517	22.253.380.276	22,98	40.156.571.660	15.482.330.246	-61,45	70.774.182.177	50.206.385.522	-29,06
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	6.240.752.000	5.796.866.000	-7,11	7.402.008.600	5.956.153.000	-19,53	44.262.002.150	12.884.773.000	-70,89	57.904.762.750	24.637.792.000	-57,45
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	16.335.920.680	13.672.324.400	-16,31	32.631.148.670	7.754.255.000	-76,24	52.665.317.350	26.146.444.400	-50,35	101.632.386.700	47.573.023.800	-53,19
9	Kab. Malang	Jawa Timur	2.844.015.000	2.582.845.800	-9,18	34.222.285.373	6.371.384.200	-81,38	64.822.696.514	26.744.480.000	-58,74	101.888.996.887	35.698.710.000	-64,96
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	693.154.200	696.602.000	0,50	21.223.333.713	37.472.535.879	76,56	41.190.974.000	20.857.180.161	-49,36	63.107.461.913	59.026.318.040	-6,47
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	2.284.375.000	945.100.000	-58,63	25.696.506.200	19.502.237.500	-24,11	55.090.729.069	12.540.068.113	-77,24	83.071.610.269	32.987.405.613	-60,29
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	1.041.670.000	586.185.000	-43,73	32.745.225.500	14.836.733.500	-54,69	39.329.688.000	5.576.154.000	-85,82	73.116.583.500	20.999.072.500	-71,28
13	Kab. Pangandaran	Jawa Timur	2.260.661.000	2.006.894.000	-11,23	17.401.136.616	14.096.223.400	-18,99	58.330.913.022	21.058.394.626	-63,90	77.992.710.638	37.161.512.026	-52,35
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	13.466.294.500	16.295.216.345	21,01	20.242.799.514	24.495.087.412	21,01	67.072.992.704	81.158.821.172	21,00	100.782.086.718	121.949.124.929	21,00
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	4.814.770.000	4.669.160.000	-3,02	15.327.319.500	23.493.913.347	53,28	42.169.373.038	8.350.600.000	-80,20	62.311.462.538	36.513.673.347	-41,40
16	Kota Banda Aceh	Aceh	10.455.404.250	10.046.617.250	-3,91	29.870.892.762	24.793.056.050	-17,00	37.805.976.485	22.957.707.679	-39,27	78.132.273.497	57.797.380.979	-26,03
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	20.135.089.150	17.164.027.500	-14,76	61.576.628.208	30.088.555.000	-51,14	73.948.485.372	34.720.927.150	-53,05	155.660.202.730	81.973.509.650	-47,34
18	Kota Magelang	Jawa Tengah	3.591.135.700	3.856.998.500	7,40	81.082.907.314	39.801.046.962	-50,91	86.897.039.183	8.818.441.000	-89,85	171.571.082.197	52.476.486.462	-69,41
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	9.707.537.350	13.364.098.270	37,67	53.908.317.075	33.500.784.933	-37,86	13.885.489.550	33.534.834.498	141,51	77.501.343.975	80.399.717.701	3,74
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	3.124.401.000	1.780.212.000	-43,02	16.453.287.776	13.862.771.944	-15,74	25.649.422.091	34.641.110.145	35,06	45.227.110.867	50.284.094.089	11,18
21	Kota Sabang	Aceh	16.438.400.250	18.737.486.750	13,99	10.572.217.889	16.389.558.663	55,02	41.218.205.163	27.997.767.705	-32,07	68.228.823.302	63.124.813.118	-7,48
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	62.233.704.926	73.656.585.000	18,35	105.222.939.129	89.164.844.922	-15,26	7.474.939.500	22.784.917.100	204,82	174.931.586.555	185.606.347.022	6,10
23	Kota Serang	Banten	12.698.099.671	8.961.786.974	-29,42	36.396.661.995	50.861.837.018	39,74	66.230.233.126	28.313.202.706	-57,25	115.324.994.792	88.136.826.698	-23,58
Jumlah 15 Kabupaten			105.626.927.655	97.841.159.845	-7,37	379.917.827.348	332.014.016.438	-12,61	776.298.525.880	325.170.344.648	-58,11	1.261.843.280.883	755.025.520.931	-40,16
Jumlah 8 Kota			138.383.772.297	147.567.812.244	6,64	395.083.852.148	298.462.455.492	-24,46	353.109.790.470	213.768.907.983	-39,46	886.577.414.915	659.799.175.719	-25,58
Jumlah seluruh			244.010.699.952	245.408.972.089	0,57	775.001.679.496	630.476.471.930	-18,65	1.129.408.316.350	538.939.252.631	-52,28	2.148.420.695.798	1.414.824.696.650	-34,15

Tipe belanja kedua adalah barang dan jasa dari 23 kabupaten/kota selama dua tahun menurun 18,65%. Penurunan rata-rata kabupaten sebesar 12,61% lebih kecil daripada penurunan rata-rata kota sebesar 24,46%. Artinya, penurunan kota lebih besar 11,85% jika dibandingkan dengan penurunan kabupaten. Penurunan terjadi karena 14 kabupaten/kota dengan 5 kabupaten/kota menurun lebih dari 50%, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Malang, Ogan Ilir, Kota Cirebon, dan Magelang. Sebaliknya, hanya 9 kabupaten/kota yang meningkat dengan peningkatan lebih dari 50% terjadi di 5 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kuningan, Mamuju, Serdang Bedagai, dan Kota Sabang.

Tipe belanja ketiga adalah modal dari 23 kabupaten/kota selama dua tahun menurun 52,28%, penurunan ini wajar karena sudah tidak membangun infrastruktur lagi. Penurunan rata-rata kabupaten sebesar 58,11% lebih besar daripada penurunan rata-rata kota sebesar 39,46%, artinya penurunan

kabupaten lebih besar 18,65% jika dibandingkan dengan penurunan kota. Penurunan terjadi karena 19 kabupaten/kota menurun dengan 6 kabupaten/kota menurun lebih dari 70%, yaitu Kabupaten Kuningan, Lampung Selatan, Mojokerto, Ogan Ilir, Serdang Bedagai, dan Kota Magelang. Sebaliknya, hanya 4 kabupaten/kota yang meningkat dengan peningkatan lebih dari 100% terjadi di Kota Mojokerto dan Samarinda.

Tabel 4.31

Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015—2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Bkn Institusi Pend			PAUD+PNF			Wajar Dikdas+Dikmen		
			2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	20.738.437.053	20.478.000.000	-1,26	1.076.726.600	1.774.000.000	64,76	13.460.893.921	1.756.000.000	-86,95
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	4.550.954.062	5.130.460.400	12,73	6.624.674.522	7.063.965.400	6,63	82.609.562.682	42.173.747.700	-48,95
3	Kab. Garut	Jawa Barat	12.928.632.800	17.171.930.204	32,82	7.644.401.000	27.205.385.000	255,89	155.792.963.806	53.590.020.600	-65,60
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	6.308.975.700	6.969.162.450	10,46	4.229.903.000	1.599.008.000	-62,20	41.246.186.800	43.651.062.500	5,83
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	7.223.000.000	5.342.000.000	-26,04	850.000.000	10.857.000.000	1177,29	63.188.145.175	15.468.212.900	-75,52
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	20.183.350.500	22.932.108.842	13,62	713.059.000	498.430.000	-30,10	49.245.687.677	26.134.071.680	-46,93
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	6.348.647.150	5.490.478.750	-13,52	2.101.315.500	1.013.103.000	-51,79	48.823.166.100	17.894.210.250	-63,35
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	9.572.668.700	8.918.484.800	-6,83	4.858.366.000	4.763.495.000	-1,95	81.477.935.000	26.159.955.000	-67,89
9	Kab. Malang	Jawa Timur	4.648.918.150	4.390.979.800	-5,55	375.000.000	355.000.000	-5,33	96.865.078.737	30.952.730.200	-68,05
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	14.946.112.640	26.209.854.756	75,36	2.732.292.050	6.493.490.500	137,66	45.429.057.223	26.322.972.784	-42,06
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	22.330.076.700	16.860.687.500	-24,49	1.125.000.000	550.000.000	-51,11	59.166.533.569	15.301.718.113	-74,14
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	2.127.435.000	1.446.089.500	-32,03	5.843.300.000	4.084.100.000	-30,11	39.502.778.000	6.608.531.000	-83,27
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	6.077.093.500	5.925.481.000	-2,49	1.998.793.200	5.285.665.000	164,44	64.409.579.988	22.479.721.026	-65,10
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	6.274.451.264	7.593.386.029	21,02	5.119.355.800	6.194.920.518	21,01	88.489.169.154	107.072.694.677	21,00
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	5.184.963.300	3.935.190.425	-24,10	2.424.357.000	2.345.476.400	-3,25	54.317.392.238	30.003.756.522	-44,76
16	Kota Banda Aceh	Aceh	13.993.755.763	12.538.543.379	-10,40	2.789.405.900	4.077.463.500	46,18	59.086.261.334	39.105.027.100	-33,82
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	40.883.708.996	5.236.692.850	-87,19	1.834.970.645	1.793.059.800	-2,28	111.770.454.810	58.124.347.000	-48,00
18	Kota Magelang	Jawa Barat	19.774.883.462	21.399.257.962	8,21	1.066.417.500	1.338.000.000	25,47	146.882.281.235	23.874.865.200	-83,75
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	9.989.556.825	12.858.016.550	28,71	3.142.530.250	4.960.870.650	57,86	61.518.623.500	52.171.328.501	-15,19
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	8.893.738.775	7.656.653.279	-13,91	1.836.504.420	4.535.469.995	146,96	33.764.947.672	37.741.572.415	11,78
21	Kota Sabang	Aceh	3.297.297.984	4.860.401.287	47,41	4.493.770.905	4.764.187.714	6,02	60.437.754.413	53.500.224.117	-11,48
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	10.371.446.250	7.324.320.000	-29,38	2.216.550.000	891.600.000	-59,78	155.518.055.805	159.696.713.500	2,69
23	Kota Serang	Banten	12.757.514.113	14.431.385.546	13,12	4.106.145.000	4.856.098.000	18,26	96.695.347.679	66.720.728.152	-31,00
Jumlah 15 kab			149.443.716.519	158.794.294.456	6,26	47.716.543.672	80.083.038.818	67,83	984.024.130.070	465.569.404.952	-52,69
Jumlah 8 kota			119.961.902.168	86.305.270.853	-28,06	21.486.294.620	27.216.749.659	26,67	725.673.726.448	490.934.805.985	-32,35
Jumlah			269.405.618.687	245.099.565.309	-9,02	69.202.838.292	107.299.788.477	55,05	1.709.697.856.518	956.504.210.937	-44,05

Tabel 4.31 menunjukkan perkembangan belanja langsung menurut jenis pendidikan tiap kabupaten/kota. Berdasarkan Tabel 4.31 maka terjadi penurunan bukan institusi pendidikan sebesar 9,02%, diikuti wajar dikdas dan dikmen sebesar 44,05%, pemuda dan olahraga sebesar 16,29%, sedangkan PAUD dan PNF meningkat sangat tajam sebesar 55,05%, institusi lain sebesar 8,73%, dan kebudayaan sebesar 29,35%. Penurunan belanja wajar dikdas dan dikmen sangat besar tidaklah wajar karena wajar dikdas dan dikmen masih merupakan program prioritas. Peningkatan program PAUD dan PNF sangat wajar karena menjadi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan anak untuk bersekolah mulai PAUD. Demikian juga untuk program kebudayaan sangat wajar karena memang makin banyak Dinas Pendidikan menambahkan program kebudayaan sesuai dengan kondisi di Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka peningkatan belanja bukan institusi rata-rata kabupaten sebesar 6,26%, sedangkan rata-rata kota menurun sebesar 28,06%, sehingga terjadi perbedaan penurunan kota lebih besar 34,31% daripada kabupaten. Belanja bukan institusi yang sangat ekstrim terjadi pada Kabupaten

Mamuju karena meningkat sebesar 75,36%, sebaliknya penurunan sangat ekstrim terjadi Kota Cirebon sebesar 87,19%.

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka peningkatan belanja PAUD dan PNF rata-rata kabupaten sebesar 67,83%, sedangkan rata-rata kota sebesar 26,67%, sehingga terjadi perbedaan wilayah 41,16% lebih kecil rata-rata kota daripada kabupaten. Peningkatan belanja PAUD dan PNF yang sangat ekstrim terjadi pada Kabupaten Kuningan karena meningkat sebesar 1177,29%, sebaliknya penurunan yang sangat besar terjadi Kabupaten Karanganyar sebesar 62,20%.

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka penurunan belanja wajar dikdas dan dikmen rata-rata kabupaten sebesar 52,69%, sedangkan rata-rata kota sebesar 32,35%, sehingga terjadi perbedaan sebesar 20,34% lebih baik rata-rata kota daripada kabupaten. Penurunan belanja wajar dikdas dan dikmen terjadi di 20 kabupaten/kota dan yang sangat ekstrim terjadi pada Kabupaten Bintan sebesar 86,95%, sebaliknya terjadi peningkatan di 3 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karanganyar, Pangkep, dan Kota Samarinda.

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka penurunan belanja institusi lain rata-rata kabupaten sebesar 44,94%, sedangkan rata-rata kota meningkat sangat tajam sebesar 343,35%, sehingga terjadi perbedaan 388,29% lebih besar rata-rata kota. Belanja institusi lain yang meningkat sangat ekstrim terjadi pada Kota Mojokerto sebesar 1.540,95% diikuti Kota Cirebon sebesar 1.297,29%, sebaliknya penurunan sangat besar terjadi Kabupaten Lampung Selatan sebesar 95,14%.

Tabel 4.31 (lanjutan)
Perkembangan Persentase Belanja Langsung menurut Jenis Pendidikan
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015—2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Institusi Lain			Pemuda & Or			Kebudayaan			Jumlah		
			2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)	2015	2016	AP (%)
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	34.804.185.148	23.905.890.000	-31,31	0	0	-	0	0	-	70.080.242.722	47.913.890.000	-31,63
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	25.032.050	0	-100,00	1.688.014.974	0	-100,00	0	0	-	95.498.238.290	54.368.173.500	-43,07
3	Kab. Garut	Jawa Barat	0	0	-	0	0	-	0	0	-	176.365.997.606	97.967.335.804	-44,45
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	0	0	-	2.543.547.500	2.031.658.000	-20,13	0	130.000.000	-	54.328.613.000	54.380.890.950	0,10
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	31.800.000	40.000.000	25,79	1.695.000.000	1.935.000.000	14,16	0	0	-	72.987.945.175	33.642.212.900	-53,91
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	0	0	-	632.085.000	641.775.000	1,53	0	0	-	70.774.182.177	50.206.385.522	-29,06
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	205.554.000	10.000.000	-95,14	426.080.000	230.000.000	-46,02	0	0	-	57.904.762.750	24.637.792.000	-57,45
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	0	0	-	1.832.087.000	1.517.539.000	-17,17	3.891.330.000	6.213.550.000	59,68	101.632.386.700	47.573.023.800	-53,19
9	Kab. Malang	Jawa Timur	0	0	-	0	0	-	0	0	-	101.888.996.887	35.698.710.000	-64,96
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	0	0	-	0	0	-	0	0	-	63.107.461.913	59.026.318.040	-6,47
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	0	0	-	0	0	-	450.000.000	275.000.000	-38,89	83.071.610.269	32.987.405.613	-60,29
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	25.643.070.500	8.860.352.000	-65,45	0	0	-	0	0	-	73.116.583.500	20.999.072.500	-71,28
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	0	0	-	4.591.595.950	2.538.450.000	-44,72	915.648.000	932.195.000	1,81	77.992.710.638	37.161.512.026	-52,35
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	899.110.500	1.088.123.705	21,02	0	0	-	0	0	-	100.782.086.718	121.949.124.929	21,00
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	384.750.000	229.250.000	-40,42	0	0	-	0	0	-	62.311.462.538	36.513.673.347	-41,40
16	Kota Banda Aceh	Aceh	98.260.000	97.275.000	-1,00	2.164.590.500	1.979.072.000	-8,57	0	0	-	78.132.273.497	57.797.380.979	-26,03
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	1.171.068.279	16.369.410.000	1297,82	0	450.000.000	-	0	0	-	155.660.202.730	81.973.509.650	-47,34
18	Kota Magelang	Jawa Barat	1.340.000.000	1.570.000.000	17,16	2.507.500.000	4.294.363.300	71,26	0	0	-	171.571.082.197	52.476.486.462	-69,41
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	509.300.000	8.357.350.400	1540,95	1.084.850.000	425.586.950	-60,77	1.256.483.400	1.626.564.650	29,45	77.501.343.575	80.399.717.701	3,74
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	0	0	-	0	0	-	731.920.000	350.398.400	-52,13	45.227.110.867	50.284.094.089	11,18
21	Kota Sabang	Aceh	0	0	-	0	0	-	0	0	-	68.228.823.302	63.124.813.118	-7,48
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	6.825.531.500	17.693.713.522	159,23	0	0	-	0	0	-	174.931.583.555	185.606.347.022	6,10
23	Kota Serang	Banten	0	0	-	0	0	-	1.765.988.000	2.128.615.000	20,53	115.324.994.792	88.136.826.698	-23,58
Jumlah 15 kab			61.993.502.198	34.133.615.705	-44,94	13.408.410.424	8.894.422.000	-33,67	5.256.978.000	7.550.745.000	43,63	1.261.843.280.883	755.025.520.931	-58,8
Jumlah 8 kota			9.944.159.779	44.087.748.922	343,35	5.756.940.500	7.149.022.250	24,18	3.754.391.400	4.105.578.050	9,35	886.577.414.915	659.799.175.719	-153
Jumlah			71.937.661.977	78.221.364.627	8,73	19.165.350.924	16.043.444.250	-16,29	9.011.369.400	11.656.323.050	29,35	2.148.420.695.798	1.414.824.696.650	-741

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka penurunan belanja program pemuda dan olahraga rata-rata kabupaten sebesar 33,67%, sedangkan rata-rata kota meningkat sebesar 24,18%, sehingga terjadi perbedaan 57,85% lebih besar rata-rata kota. Belanja pemuda dan olahraga yang meningkat yang besar terjadi pada Kota Magelang sebesar 71,26%, sebaliknya penurunan sangat besar terjadi Kota Mojokerto sebesar 60,77%.

Bila dilihat 23 Kabupaten/Kota maka peningkatan belanja program kebudayaan rata-rata kabupaten sebesar 43,63%, sedangkan rata-rata kota meningkat sebesar 9,35%, sehingga terjadi perbedaan 34,28% lebih besar rata-rata kabupaten. Belanja kebudayaan yang meningkat terbesar terjadi pada Kabupaten Lombok Utara sebesar 59,68%, sebaliknya penurunan terbesar terjadi Kota Palu sebesar 52,13%.

Tabel 4.32
Perkembangan Rasio Belanja Pendidikan terhadap Siswa Dikdasmen
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015—2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan		Siswa Dikdasmen		Rasio		
			2015	2016	2014	2015	2014	2015	AP (%)
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	263.637.110.659	234.528.064.000	32.114	31.098	8.209.414	7.541.580	-8,13
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1.315.680.464.596	1.283.995.086.953	352.035	350.020	3.737.357	3.668.348	-1,85
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1.493.980.554.030	1.525.055.329.974	472.464	471.271	3.162.105	3.236.047	2,34
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	900.567.064.990	924.588.204.950	130.211	130.341	6.916.213	7.093.610	2,56
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1.054.879.108.370	1.070.201.112.217	187.559	187.506	5.624.252	5.707.557	1,48
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	344.479.955.151	342.195.905.990	82.474	84.560	4.176.831	4.046.782	-3,11
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	631.785.131.950	623.399.829.950	161.502	160.984	3.911.934	3.872.433	-1,01
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	244.606.015.656	196.686.751.148	38.135	37.751	6.414.213	5.210.107	-18,77
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1.348.543.428.335	1.270.757.572.274	324.895	324.196	4.150.705	3.919.720	-5,56
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	209.665.670.323	226.225.945.026	62.503	61.642	3.354.490	3.669.997	9,41
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	855.875.009.045	754.676.980.392	137.009	135.363	6.246.852	5.575.209	-10,75
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	445.848.770.106	457.208.449.588	75.155	74.816	5.932.390	6.111.105	3,01
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	455.712.552.163	416.060.221.082	56.638	56.573	8.046.057	7.354.396	-8,60
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	463.887.890.684	492.905.760.741	69.015	68.098	6.721.552	7.238.183	7,69
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	596.962.573.719	536.334.386.634	122.948	123.402	4.855.407	4.346.237	-10,49
16	Kota Banda Aceh	Aceh	504.363.455.127	439.275.204.972	43.959	44.040	11.473.497	9.974.460	-13,07
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	491.777.960.730	425.813.994.650	81.553	79.935	6.030.164	5.327.003	-11,66
18	Kota Magelang	Jawa Barat	1.015.094.924.500	940.091.781.433	39.114	38.425	25.952.215	24.465.629	-5,73
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	200.993.961.475	213.500.846.701	34.186	34.229	5.879.423	6.237.426	6,09
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	316.048.687.998	334.353.735.525	76.448	75.616	4.134.166	4.421.733	6,96
21	Kota Sabang	Aceh	159.925.807.985	155.869.707.780	6.512	6.584	24.558.631	23.674.014	-3,60
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	599.086.766.730	634.715.595.538	155.499	157.301	3.852.673	4.035.039	4,73
23	Kota Serang	Banten	516.743.080.741	479.554.324.932	134.740	135.002	3.835.113	3.552.202	-7,38
	Jumlah 15 Kabupaten		10.626.111.299.777	10.354.819.600.919	2.304.657	2.297.621	4.610.713	4.506.757	-2,25
	Jumlah 8 Kota		3.804.034.645.286	3.623.175.191.530	572.011	571.132	6.650.282	6.343.849	-4,61
	Jumlah seluruh		14.430.145.945.063	13.977.994.792.449	2.876.668	2.868.753	5.016.271	4.872.499	-2,87

Catatan: SD termasuk Paket A, SMP termasuk Paket B, SM termasuk SMA, SMK, SMALB, dan Paket C

Tabel 4.32 menunjukkan perkembangan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen 23 Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 4.32 maka terjadi penurunan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen dari Rp5.016.271 menjadi Rp4.872.499 atau menurun 2,87%. Penurunan ini terjadi karena 14 kabupaten/kota menurun dengan penurunan lebih dari 10% terjadi di 5 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Mojokerto, Serdang Bedagai,

Kota Banda Aceh, dan Cirebon. Hal yang sama dari rata-rata kabupaten juga menurun 2,25% lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar 4,61%, sehingga terjadi perbedaan 2,35%. Menurunnya satuan biaya dapat juga menunjukkan menurunnya mutu pendidikan.

Tabel 4.33 menunjukkan perkembangan persentase belanja pendidikan terhadap APBD 23 Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 4.33 maka terjadi penurunan persentase belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 5,41% cukup besar karena lebih dari 5%. Penurunan ini menunjukkan kondisi yang kurang baik karena belanja pendidikan menurun. Penurunan ini terjadi karena 18 kabupaten/kota menurun dengan penurunan lebih dari 15% terjadi di 5 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kuningan, Lampung Selatan, Ogan Ilir, Serdang Bedagai, dan Kota Palu. Hal yang sama dari rata-rata kabupaten juga menurun 6,42% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar 3,60, sehingga terjadi perbedaan 2,82%. Menurunnya belanja pendidikan terhadap APBD juga dapat menunjukkan menurunnya mutu pendidikan.

Tabel 4.33
Perkembangan Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD
Tiap Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015—2016

No.	Nama Kab/Kota	Nama Provinsi	Belanja Pendidikan		APBD		% BP thd APBD		
			2015	2016	2014	2015	2015	2016	AP (%)
1	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	263,637,110,659	234,528,064,000	958,808,155,127	1,117,058,295,309	27.50	21.00	-6.50
2	Kab. Cirebon	Jawa Barat	1,315,680,464,596	1,283,995,086,953	2,618,599,602,401	2,830,893,761,058	50.24	45.36	-4.89
3	Kab. Garut	Jawa Barat	1,493,980,554,030	1,525,055,329,974	2,872,016,690,018	3,015,617,524,519	52.02	50.57	-1.45
4	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	900,567,064,990	924,588,204,950	1,657,433,618,000	1,691,634,199,000	54.34	54.66	0.32
5	Kab. Kuningan	Jawa Barat	1,054,879,108,370	1,070,201,112,217	1,457,896,901,731	2,120,109,715,351	72.36	50.48	-21.88
6	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	344,479,955,151	342,195,905,990	810,714,998,750	1,013,038,477,665	42.49	33.78	-8.71
7	Kab. Lampung Selatan	Lampung	631,785,131,950	623,399,829,950	923,975,076,219	1,661,326,799,700	68.38	37.52	-30.85
8	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	244,606,015,656	196,686,751,148	2,148,333,134,800	1,200,863,836,345	11.39	16.38	4.99
9	Kab. Malang	Jawa Timur	1,348,543,428,335	1,270,757,572,274	2,834,456,200,161	3,302,969,222,643	47.58	38.47	-9.10
10	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	209,665,670,323	226,225,945,026	745,917,826,860	1,540,283,054,100	28.11	14.69	-13.42
11	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	855,875,009,045	754,676,980,392	2,418,393,915,585	2,225,693,946,326	35.39	33.91	-1.48
12	Kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	445,848,770,106	457,208,449,588	602,828,383,652	1,230,778,391,339	73.96	37.15	-36.81
13	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	455,712,552,163	416,060,221,082	1,098,985,672,446	1,145,479,268,622	41.47	36.32	-5.14
14	Kab. Pangkep	Sulawesi Selatan	463,887,890,684	492,905,760,741	1,424,455,329,692	1,127,757,157,017	32.57	43.71	11.14
15	Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	596,962,573,719	536,334,386,634	699,265,776,708	1,166,459,388,168	85.37	45.98	-39.39
16	Kota Banda Aceh	Aceh	504,363,455,127	439,275,204,972	1,235,953,041,361	1,168,955,301,261	40.81	37.58	-3.23
17	Kota Cirebon	Jawa Barat	491,777,960,730	425,813,994,650	1,055,622,441,134	1,253,260,157,000	46.59	33.98	-12.61
18	Kota Magelang	Jawa Barat	1,015,094,924,500	940,091,781,433	1,824,743,223,423	1,991,093,895,045	55.63	47.21	-8.41
19	Kota Mojokerto	Jawa Timur	200,993,961,475	213,500,846,701	745,532,289,361	815,212,120,650	26.96	26.19	-0.77
20	Kota Palu	Sulawesi Tengah	316,048,687,998	334,353,735,525	732,096,176,765	1,206,306,923,617	43.17	27.72	-15.45
21	Kota Sabang	Aceh	159,925,807,985	155,869,707,780	504,928,507,936	648,293,107,987	31.67	24.04	-7.63
22	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	599,086,766,730	634,715,595,538	3,086,662,187,692	3,429,624,652,991	19.41	18.51	-0.90
23	Kota Serang	Banten	516,743,080,741	479,554,324,932	1,710,474,347,594	1,057,915,011,530	30.21	45.33	15.12
	Jumlah 15 Kabupaten		10,626,111,299,777	10,354,819,600,919	23,272,081,282,150	26,389,963,037,162	45.66	39.24	-6.42
	Jumlah 8 Kota		3,804,034,645,286	3,623,175,191,530	10,896,012,215,266	11,570,661,170,081	34.91	31.31	-3.60
	Jumlah seluruh		14,430,145,945,063	13,977,994,792,449	34,168,093,497,417	37,960,624,207,243	42.23	36.82	-5.41

F. Bahasan Belanja Pendidikan Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota

Hasil provinsi dan 23 kabupaten/kota sampel tahun 2015 dan 2016 dibandingkan maka menunjukkan hal yang berbeda pada setiap belanja, seperti

komponen belanja, jenis belanja, tipe belanja, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen, dan persentase belanja pendidikan terhadap APBD.

Tabel 4.34
Rangkuman Belanja Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sampel
Tahun 2015 dan 2016

No.	Komponen Belanja	Tahun	Provinsi/Kab/Kota	%BTL	%BL	
1	Belanja Pendidikan (BP) adalah Belanja Tak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)	2015	Semua Provinsi	59,47	40,53	
			Kab/Kota Sampel	85,11	14,89	
			Kabupaten Sampel	88,13	11,87	
			Kota Sampel	76,69	23,31	
		2016	Semua Provinsi	55,35	44,65	
			Kab/Kota Sampel	89,88	10,12	
			Kabupaten Sampel	92,71	7,29	
			Kota Sampel	81,79	18,21	
No.	Jenis Belanja	Tahun	Provinsi/Kab/Kota	% Gaji	% TP PNS	% Insentif
2	Belanja Tidak Langsung (BTL)	2015	Semua Provinsi	39,19	60,54	0,27
			Kab/Kota Sampel	63,66	36,34	0,00
			Kabupaten Sampel	64,32	35,68	0,00
			Kota Sampel	61,54	38,45	0,01
		2016	Semua Provinsi	39,79	59,92	0,29
			Kab/Kota Sampel	65,77	34,23	0,00
			Kabupaten Sampel	65,56	34,44	0,00
			Kota Sampel	66,37	33,63	0,00
No.	Tipe Belanja	Tahun	Provinsi/Kab/Kota	% Pegawai	% Barang & Jasa	% Modal
3	Belanja Langsung (BL)	2015	Semua Provinsi	6,11	79,77	14,12
			Kab/Kota Sampel	11,36	36,07	52,57
			Kabupaten Sampel	8,37	30,11	61,52
			Kota Sampel	15,61	44,56	39,83
		2016	Semua Provinsi	5,17	68,04	26,79
			Kab/Kota Sampel	17,35	44,56	38,09
			Kabupaten Sampel	12,96	43,97	43,07
			Kota Sampel	22,37	45,24	32,40
No.	Indikator	Tahun	Provinsi/Kab/Kota	R-BP/Siswa	%BP/APBD	
4	Indikator Belanja Pendidikan (BP)	2015	Semua Provinsi	Rp 394.007	6,13	
			Kab/Kota Sampel	Rp 5.016.271	42,23	
			Kabupaten Sampel	Rp 4.610.713	45,66	
			Kota Sampel	Rp 6.650.282	34,91	
		2016	Semua Provinsi	Rp 421.526	6,89	
			Kab/Kota Sampel	Rp 4.870.894	36,82	
			Kabupaten Sampel	Rp 4.504.904	39,24	
			Kota Sampel	Rp 6.343.849	31,31	

Tabel 4.34 merupakan rangkuman belanja pendidikan provinsi dan 23 kabupaten/kota sampel pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, belanja tidak langsung provinsi lebih tinggi sebesar 59,47% daripada belanja langsung sebesar 40,53%. Hal ini berarti, gaji dan tunjangan masih merupakan belanja pendidikan yang besar di provinsi daripada untuk program-program pendidikan. Hal yang sama dengan 23 kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten dan kota menunjukkan gaji dan tunjangan sangat besar, masing-masing sebesar 85,11%, 88,13%, dan 76,69%. Hal ini juga berarti, gaji dan tunjangan masih merupakan

belanja pendidikan yang sangat besar di 23 kabupaten/kota daripada untuk program-program pendidikan.

Hal yang sama dengan tahun 2015, pada tahun 2016, belanja tidak langsung provinsi lebih tinggi sebesar 55,35% daripada belanja langsung sebesar 44,65%. Hal ini berarti, gaji dan tunjangan masih merupakan belanja pendidikan yang besar di provinsi daripada untuk program-program pendidikan. Hal yang sama dengan 23 kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten dan kota menunjukkan gaji dan tunjangan sangat besar, masing-masing sebesar 89,88%, 92,71%, dan 81,79%. Hal ini juga berarti, gaji dan tunjangan masih merupakan belanja pendidikan yang sangat besar di 23 kabupaten/kota daripada untuk program-program pendidikan.

Pada tahun 2015, belanja tidak langsung provinsi yang dirinci menjadi tiga jenis belanja ternyata yang terbesar adalah tambahan penghasilan PNS sebesar 60,54% lebih besar daripada gaji dan tunjangan sebesar 39,19%, dan insentif pemungutan retribusi sebesar 0,27%. Sebaliknya, untuk kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota yang terbesar adalah gaji dan tunjangan masing-masing sebesar 63,66%, 64,32%, dan 61,54%, sedangkan insentif perumusan retribusi sangat kecil sekali karena hampir mendekati 0%.

Hal yang sama dengan tahun 2015, pada tahun 2016 belanja tidak langsung provinsi yang dirinci menjadi tiga jenis belanja ternyata yang terbesar adalah tambahan penghasilan PNS sebesar 59,92% lebih besar daripada gaji dan tunjangan sebesar 39,79%, dan insentif pemungutan retribusi sebesar 0,29%. Sebaliknya, untuk kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota yang terbesar adalah gaji dan tunjangan masing-masing sebesar 65,77%, 65,56%, dan 66,37%, sedangkan insentif perumusan retribusi hampir mendekati 0%.

Pada tahun 2015, belanja langsung provinsi yang dirinci menjadi tiga jenis belanja ternyata yang terbesar adalah barang dan jasa sebesar 79,77% lebih besar daripada belanja modal dan belanja pegawai masing-masing sebesar 14,12% dan 6,11%. Sebaliknya, untuk kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten yang terbesar adalah belanja modal masing-masing sebesar 52,57% dan 61,52%, sedangkan rata-rata kota yang terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 44,56%. Belanja pegawai di semua provinsi dan kabupaten/kota ternyata yang terkecil.

Hal yang sama dengan tahun 2015, pada tahun 2016 belanja langsung provinsi yang dirinci menjadi tiga jenis belanja ternyata yang terbesar adalah barang dan jasa sebesar 68,04% lebih besar daripada belanja modal dan belanja pegawai masing-masing sebesar 26,79% dan 5,17%. Demikian juga kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota yang terbesar adalah barang dan jasa masing-masing sebesar 44,56%, 43,97%, dan 45,24%. Belanja pegawai di semua provinsi dan kabupaten/kota ternyata yang terkecil.

Pada tahun 2015, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen provinsi sebesar Rp394.007,00 menunjukkan bahwa provinsi sangat lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten,

dan rata-rata kota, masing-masing sebesar Rp5.016.271,00, Rp4.610.713,00, dan Rp6.650.282,00. Hal yang sama dengan tahun 2015, pada tahun 2016 rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen provinsi sebesar Rp421.526,00 juga sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota, masing-masing sebesar Rp4.870.894,00, Rp4.504.904,00, dan Rp6.343.849,00.

Pada tahun 2015, persentase belanja pendidikan terhadap APBD provinsi sebesar 6,13% sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota, masing-masing sebesar 42,23%, 45,66%, dan 34,91%. Hal yang sama dengan tahun 2015, pada tahun 2016 persentase belanja pendidikan terhadap APBD provinsi sebesar 6,89% juga sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota, masing-masing sebesar 36,82%, 39,24%, dan 31,31%.

Tabel 4.35
Rangkuman Perkembangan Angka Pertumbuhan Belanja Pendidikan
Provinsi dan Kabupaten/Kota Sampel, Tahun 2015--2016

No.	Belanja	Provinsi/Kab/Kota	2015-2016
1	Belanja Pendidikan (BP)	Provinsi	17,86
		Kab/Kota sampel	-2,55
		Kabupaten sampel	-4,75
		Kota sampel	-3,13
2	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Provinsi	9,69
		Kab/Kota sampel	2,52
		Kabupaten sampel	1,57
		Kota sampel	2,29
3	Belanja Langsung (BL)	Provinsi	29,86
		Kab/Kota sampel	-40,16
		Kabupaten sampel	-25,58
		Kota sampel	-34,15
4	R-BP/Siswa	Provinsi	5,86
		Kab/Kota sampel	-2,25
		Kabupaten sampel	-4,61
		Kota sampel	-2,87
5	% BP thd APBD	Provinsi	0,76
		Kab/Kota sampel	-6,42
		Kabupaten sampel	-3,60
		Kota sampel	-5,41

Tabel 4.35 menunjukkan rangkuman perkembangan angka pertumbuhan belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sampel tahun 2015--2016. Angka pertumbuhan belanja pendidikan provinsi meningkat sangat besar sebesar 17,86%. Sebaliknya, rata-rata kabupaten/kota sampel, rata-rata kabupaten, dan rata-rata kota semuanya menurun masing-masing sebesar 2,55%, 4,75%, dan

3,13%. Dengan demikian, angka pertumbuhan provinsi dan kabupaten/kota tidak menunjukkan hal yang sama.

Angka pertumbuhan belanja tak langsung provinsi tahun 2015-2016 sebesar 9,69% lebih besar daripada kabupaten/kota sampel, kabupaten sampel, dan kota sampel masing-masing sebesar 2,52%, 1,57%, dan 2,29%. Hal ini berarti angka pertumbuhan provinsi sejalan dengan kabupaten/kota walaupun lebih besar. Angka pertumbuhan belanja langsung provinsi 2015-2016 sebesar 29,86% sangat besar. Sebaliknya, rata-rata kabupaten/kota sampel, kabupaten sampel, dan kota sampel justru menurun masing-masing sebesar 40,16%, 25,58%, dan 34,15%. Hal ini berarti angka pertumbuhan provinsi tidak sejalan dengan kabupaten/kota.

Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan provinsi tahun 2015-2016 terhadap siswa dikdasmen meningkat sebesar 5,86%. Sebaliknya, rasio belanja pendidikan rata-rata kabupaten/kota sampel, kabupaten sampel, dan kota sampel justru menurun masing-masing sebesar 2,25%, 4,61%, dan 2,87%. Hal ini berarti angka pertumbuhan provinsi tidak sejalan dengan kabupaten/kota.

Angka pertumbuhan persentase belanja pendidikan terhadap APBD tahun 2015-2016 meningkat sebesar 0,76%. Sebaliknya, rata-rata kabupaten/kota sampel, kabupaten sampel, dan kota sampel justru menurun masing-masing sebesar 6,42%, 3,60%, dan 5,41%. Hal ini berarti angka pertumbuhan provinsi tidak sejalan dengan kabupaten/kota.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan tujuan maka terdapat lima simpulan dari analisis keuangan dari belanja pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sampel.

1. Analisis Belanja Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi

Pada tahun 2015 belanja pendidikan provinsi sebesar Rp16.135.604,6 juta dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp9.596.458,6 juta atau 59,47% lebih besar daripada belanja langsung sebesar Rp6.539.146,0 juta atau 40,53%. Belanja tidak langsung tahun 2015 dirinci menjadi gaji dan tunjangan sebesar Rp3.761.273,9 juta atau 39,19%, tambahan penghasilan PNS sebesar Rp5.809.328,7 juta atau 60,54%, dan retribusi sebesar Rp25.855,9 ribu atau 0,27%. Hal ini berarti tambahan penghasilan PNS masih menduduki porsi yang paling tinggi. Sebaliknya, belanja langsung tahun 2015 dirinci menjadi belanja pegawai sebesar Rp399.639,3 juta atau 6,11%, belanja barang dan jasa sebesar Rp5.216.129,6 juta sebesar 79,77%, dan belanja modal sebesar Rp923.377,0 juta atau 14,12%. Hal ini berarti belanja barang dan jasa menduduki porsi yang paling tinggi.

Kondisi setahun kemudian atau pada tahun 2016 tetap sama dengan tahun 2015. Belanja pendidikan provinsi sebesar Rp19.018.065,4 juta dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp10.526.356,8 juta atau 55,35% lebih besar daripada belanja langsung sebesar Rp8.491.708,6 juta atau 44,65%. Belanja tidak langsung tahun 2016 dirinci menjadi gaji dan tunjangan sebesar Rp4.188.684,2 juta atau 39,79%, tambahan penghasilan PNS sebesar Rp6.306.914,6 juta atau 59,92%, dan retribusi sebesar Rp30.757,9 ribu atau 0,29%. Hal ini berarti tambahan penghasilan PNS masih menduduki porsi yang paling tinggi. Sebaliknya, belanja langsung tahun 2015 dirinci menjadi belanja pegawai sebesar Rp439.079,0 juta atau 5,17%, belanja barang dan jasa sebesar Rp5.777.662,4 juta sebesar 68,04%, dan belanja modal sebesar Rp2.274.967,2 juta atau 26,79%. Hal ini berarti belanja barang dan jasa menduduki porsi yang paling tinggi.

Pada tahun 2015, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp394.007,00 dengan rasio terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.479.708,00 dan terkecil terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp49.882,00. Belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 6,13% dengan persentase terbesar terdapat di DKI Jakarta sebesar 13,91% dan terkecil terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,82%. Pada tahun 2016, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp421.526,00 dengan rasio terbesar terdapat

di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.213.457,00 dan terkecil terdapat di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp55.205,00. Belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 6,89% dengan persentase terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 18,68% dan terkecil terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,21%.

2. Analisis Perkembangan Belanja Pendidikan SKPD Provinsi

Angka pertumbuhan belanja pendidikan selama 2 tahun meningkat sebesar 17,86% sangat besar, walaupun Provinsi Sumatera Selatan menurun sangat tajam sebesar 61,18%, sedangkan Provinsi Papua meningkat sangat tajam sebesar 87,36%. Bila dilihat komponen belanja maka belanja tidak langsung selama 2 tahun meningkat sebesar 9,69% per tahun, namun terdapat 3 provinsi yang menurun, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Bila dilihat komponen belanja langsung selama 2 tahun maka terjadi peningkatan cukup besar sebesar 29,86% per tahun, karena terjadi peningkatan di tiga provinsi yang lebih dari 100%, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Barat. Namun, terdapat 13 provinsi yang menurun, dengan penurunan lebih dari 30% di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen meningkat sebesar 5,86% dengan peningkatan lebih dari 50% terjadi di empat provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Namun, terdapat 16 provinsi yang menurun dengan penurunan lebih dari 30% terjadi di empat provinsi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah.

3. Analisis Belanja Pendidikan SKPD 23 Kabupaten/Kota Sampel

Analisis 23 kabupaten/kota menggunakan cara yang sama dengan analisis provinsi. Pada tahun 2015 belanja pendidikan kabupaten/kota sebesar Rp14.430.145,9 juta dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp12.281.725,2 juta atau 85,11% lebih besar daripada belanja langsung sebesar Rp2.148.420,7 juta atau 14,89%. Bila dilihat rata-rata kabupaten maka belanja tak langsung sebesar 88,13% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 76,69%, berarti rata-rata kabupaten mengalokasikan belanja tidak langsung lebih besar 11,44% daripada rata-rata kota.

Kondisi setahun kemudian atau pada tahun 2016 tetap sama dengan tahun 2015. Belanja pendidikan kabupaten/kota sebesar Rp13.977.994,8 juta dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp12.563.170,1 juta atau 89,88% sangat lebih besar daripada belanja langsung sebesar Rp1.414.824,7 juta atau 10,12%. Bila dilihat rata-rata kabupaten maka belanja tak langsung sebesar 92,71% lebih besar daripada rata-rata kota sebesar 81,79%, berarti rata-rata kabupaten mengalokasikan belanja tidak langsung lebih besar 10,92% daripada rata-rata kota.

Belanja tidak langsung tahun 2015 dirinci menjadi gaji dan tunjangan sebesar Rp7.818.855,5 juta atau 63,66%, tambahan penghasilan PNS sebesar Rp4.462.716,6 juta atau 36,34%, dan retribusi sebesar Rp153.175,0 ribu atau mendekati 0%. Hal ini berarti tambahan gaji dan tunjangan masih menduduki porsi yang paling tinggi. Sebaliknya, belanja langsung tahun 2015 dirinci menjadi belanja pegawai sebesar Rp244.010,7 juta atau 11,36%, belanja barang dan jasa sebesar Rp775.001,7 juta sebesar 36,07%, dan belanja modal sebesar Rp1.129.408,3 juta atau 52,57%. Hal ini berarti modal menduduki porsi yang paling tinggi karena banyak dibangunnya infrastruktur sekolah.

Belanja tidak langsung tahun 2016 dirinci menjadi gaji dan tunjangan sebesar Rp8.262.893,5 juta atau 65,77%, tambahan penghasilan PNS sebesar Rp4.300.123,4 juta atau 34,23%, dan retribusi sebesar Rp153.175,0 ribu atau mendekati 0%. Hal ini berarti gaji dan tunjangan masih menduduki porsi yang paling tinggi. Sebaliknya, belanja langsung tahun 2016 dirinci menjadi belanja pegawai sebesar Rp245.408,9 juta atau 17,35%, belanja barang dan jasa sebesar Rp630.476,5 juta sebesar 44,56%, dan belanja modal sebesar Rp538.939,3 juta atau 38,09%. Hal ini berarti belanja barang dan jasa menduduki porsi yang paling tinggi.

Pada tahun 2015, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp5.016.271,00 dengan rasio terbesar terdapat di Kota Magelang sebesar Rp25.952.215,00 dan terkecil terdapat di Kabupaten Garut sebesar Rp3.162.105,00. Bila dilihat rata-rata kabupaten rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp4.610.713,00 lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar Rp6.650.282,00. Hal ini berarti alokasi belanja pendidikan di kota lebih besar Rp2.039.569,00.

Hal yang sama dengan tahun 2015, pada tahun 2016, rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp4.870.894,00 dengan rasio terbesar terdapat di Kota Magelang sebesar Rp24.465.629,00 dan terkecil terdapat di Kabupaten Garut sebesar Rp3.236.047,00. Bila dilihat rata-rata kabupaten rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen sebesar Rp4.504.904,00 lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar Rp6.343.849,00. Hal ini berarti alokasi belanja pendidikan di kota lebih besar Rp1.837.092,00.

Pada tahun 2016, belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 36,82% dengan persentase terbesar terdapat di Kabupaten Karanganyar sebesar 54,66% dan terkecil terdapat di Kabupaten Mamuju sebesar 14,69%. Bila dilihat rata-rata kabupaten rasio belanja pendidikan terhadap APBD sebesar 39,24% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar 31,31%. Hal ini berarti alokasi belanja pendidikan di kabupaten lebih besar 8,07% jika dibandingkan dengan kota.

4. Analisis Perkembangan Belanja Pendidikan SKPD 23 Kabupaten/Kota Sampel

Angka pertumbuhan belanja pendidikan selama 2 tahun menurun sebesar 3,13%, karena 14 kabupaten/kota menurun dengan penurunan lebih besar dari 10% terjadi di 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bintan, Lombok Utara, Mojokerto, Serdang Bedagai, Kota Banda Aceh, dan Kota Cirebon. Bila dilihat rata-rata kabupaten belanja pendidikan menurun sebesar 2,55% lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar 4,75%. Hal ini berarti alokasi belanja pendidikan di kabupaten lebih kecil 2,20% jika dibandingkan dengan kota.

Bila dilihat komponen belanja maka belanja tidak langsung selama 2 tahun meningkat sebesar 2,29% per tahun, namun terdapat enam kabupaten/kota yang menurun, yaitu Kabupaten Bintan, Malang, Mojokerto, Serdang Bedagai, Kota Banda Aceh, dan Serang. Bila dilihat rata-rata kabupaten belanja tidak langsung meningkat sebesar 2,52% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar 1,57%. Hal ini berarti alokasi belanja pendidikan di kabupaten lebih besar 0,94% jika dibandingkan dengan kota.

Bila dilihat komponen belanja langsung selama 2 tahun maka terjadi penurunan sangat besar sebesar 34,15% per tahun, karena terjadi penurunan di 18 provinsi, penurunan yang lebih dari 50%, terjadi di tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kuningan, Lampung Selatan, Lombok Utara, Malang, Mojokerto, Ogan Ilir, dan Kota Magelang. Bila dilihat rata-rata kabupaten belanja langsung menurun sebesar 40,16% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata kota sebesar 25,58%. Hal ini berarti alokasi belanja pendidikan di kabupaten lebih kecil 14,59% jika dibandingkan dengan kota.

Angka pertumbuhan rasio belanja pendidikan terhadap siswa dikdasmen menurun sebesar 2,87% karena terjadi penurunan di 14 kabupaten/kota dengan penurunan lebih dari 10% terjadi di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Mojokerto, Serdang Bedagai, Kota Banda Aceh, dan Cirebon. Sebaliknya, terdapat 9 kabupaten/kota yang meningkat lebih dari 6% terjadi di empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Mamuju, Pangkep, Kota Mojokerto, dan Palu.

5. Analisis Belanja Pendidikan Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota Sampel

Data provinsi dan kabupaten/kota sampel tidak menunjukkan konsistensi. Hal ini terlihat belanja pendidikan tahun 2015 untuk provinsi dengan rincian belanja tidak langsung dan langsung sebesar 59,47% berbanding 40,53%, sedangkan kabupaten/kota sampel sebesar 85,11% berbanding 14,89%. Demikian juga pada tahun 2016 untuk provinsi dengan rincian belanja tidak langsung dan langsung sebesar 55,35% berbanding 44,65%, sedangkan kabupaten/kota sampel sebesar 89,88% berbanding 10,12%.

Hal yang sama untuk belanja tidak langsung tahun 2015 untuk provinsi terbesar adalah tambahan penghasilan PNS sebesar 60,54%, sedangkan kabupaten/kota sampel terbesar pada pegawai sebesar 63,66%. Hal yang sama

untuk tahun 2016 untuk provinsi terbesar adalah tambahan penghasilan PNS sebesar 59,92%, sedangkan kabupaten/kota sampel terbesar pada pegawai sebesar 65,77%.

Hal yang sama untuk belanja langsung tahun 2015 untuk provinsi terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 79,77%, sedangkan kabupaten/kota sampel terbesar pada belanja modal sebesar 52,57%. Hal yang sama untuk tahun 2016 untuk provinsi terbesar adalah belanja barang dan jasa sebesar 68,04%, sedangkan kabupaten/kota sampel terbesar pada belanja barang dan jasa sebesar 44,56%.

Indikator rasio belanja pendidikan per siswa provinsi dengan kabupaten/kota juga menunjukkan perbedaan. Pada tahun 2015 dan 2016 rasio belanja pendidikan per siswa provinsi masing-masing sebesar Rp394.007,00 dan Rp 421.526,00 sangat kecil, sedangkan kabupaten/kota sampel masing-masing sebesar Rp5.016.271,00 dan Rp4.870.894,00. Hal yang sama untuk persentase belanja pendidikan terhadap APBD pada tahun 2015 dan 2016 provinsi masing-masing sebesar 6,13% dan 6,89%, sedangkan kabupaten/kota sampel masing-masing sebesar 42,23% dan 36,82%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis belanja pendidikan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Sampel maka diberikan saran dalam bentuk komentar umum.

1. Bila dilihat belanja pendidikan maka belanja tidak langsung menduduki porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini disebabkan karena gaji dan tunjangan sangat besar, akibatnya program pendidikan menjadi lebih kecil.
2. Bila dilihat dari belanja tidak langsung maka tambahan penghasilan PNS provinsi sangat besar, sedangkan gaji dan tunjangan terbesar pada kabupaten/kota sampel. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tidak ada ketentuan berapa maksimal untuk gaji dan tunjangan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara provinsi dengan kabupaten/kota?
3. Bila dilihat dari belanja langsung maka belanja barang dan jasa lebih banyak pada provinsi, sedangkan belanja modal terbesar pada kabupaten/kota sampel. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tidak ada ketentuan berapa maksimal untuk barang dan jasa, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara provinsi dengan kabupaten/kota?
4. Perkembangan belanja langsung provinsi masih meningkat cukup tajam namun kabupaten/kota sampel justru menurun sangat tajam. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa belanja langsung khusus untuk pendidikan menurun padahal peningkatan mutu pendidikan masih harus dilaksanakan?
5. Perkembangan satuan biaya pendidikan provinsi masih meningkat namun kabupaten/kota sampel justru menurun. Hal ini menjadi pertanyaan karena adanya inflasi mengapa satuan biaya pendidikan menurun padahal peningkatan mutu pendidikan masih harus dilaksanakan?

6. Perkembangan persentase belanja pendidikan terhadap APBD provinsi meningkat sangat kecil namun kabupaten/kota justru menurun. Hal ini menjadi pertanyaan karena dalam rangka meningkatkan mutu maka belanja pendidikan harusnya juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- <http://apbd.jkt.go.id> diakses pada tanggal 12 Juli 2016
- <http://jatengprov.go.id/id/pemerintahan/satuan-kerja-perangkat-daerah>
- <http://kkbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 7 Agustus 2016.
- <http://kkbi.web.id/data> diakses pada tanggal 7 Agustus 2016.
- <http://kkbi.web.id/indikator> diakses pada tanggal 7 Agustus 2016
- <http://kkbi.web.id/informasi> diakses pada tanggal 7 Agustus 2016.
- http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316 LGF Anggaran (Fungsi) per Mei 2015 dan LGF Anggaran (Fungsi) per Desember 2014 diakses pada tanggal 12 Juli 2016
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2016.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Kementerian Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015a. *Analisis Data Pendidikan untuk Lembaga Internasional (Analisis Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015)*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kintamani, Ida. 2009. *Pendayagunaan Data*. Bahan pelatihan regional Pusat Statistik Pendidikan. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2016a. Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2016b. Data Keuangan dari SKPD Provinsi dan SKPD 23 kabupaten/kota sampel, Tahun 2015—2016. Hasil pengolahan data dari pengumpulan data tahun 2016, tidak diterbitkan.
- UNESCO/OECD, 2016, *Education at a Glance 2015*, UNESCO Publishing & Bernan Press.
- wikipedia.org/wiki/data diakses pada tanggal 27 Agustus 2016.

wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah diakses pada tanggal 27 Agustus 2016.

wikipedia.org/wiki/informasi diakses pada tanggal 27 Agustus 2016.